Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH BALI

9.851
S

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO:135
PPS / Kb / 29

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH DAERAH BALI

oleh

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENERBITAN BUKU BACAAN DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
JAKARTA 1978

Hak pengarang dilindungi Undang-Undang

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baru dimulai dalam tahun 1976/1977 yang meliputi 10 Propinsi :

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
4. Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Jawa Tengah
6. Jawa Timur
7. Bali
8. Kalimantan Timur
9. Kalimantan Selatan
10. Maluku.

Proyek ini bertujuan :

"Mengadakan penggalian penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional."

Adapun sasaran proyek ini ialah :

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni :

- Sejarah Daerah
- Ceritera Rakyat Daerah
- Adat Istiadat Daerah
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah dan
- Geografi Budaya Daerah

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua yaitu :

Kegiatan di Pusat meliputi :

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi :

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1976/1977, proyek ini dapat menghasilkan 50 buah naskah dari 10 Propinsi tersebut di atas.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K. di Daerah Pemerintah Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah Sejarah Daerah Bali ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Kepala Bidang PSK, Departemen P dan K Propinsi Bali.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Denpasar – Bali.
3. Pemerintah Daerah Bali.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali.
5. Tim penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah propinsi Bali yang terdiri dari :
   1. Drs. Putu Budiastra.
   2. Drs. Made Sutaba.
   3. Drs. A.A. Gde Putra Agung.
   4. I Gde Sumadisastra B.A.
   5. Ida Bagus Gde Budarta B.A.
   6. Ida Bagus Rama B.A.
   7. I Gde Parimartha B.A.
   8. I Made Sudjana B.A.
6. Tim penyempurnaan naskah di pusat terdiri dari :

– Konsultan	:	1. Prof. Dr. I.B. Mantra 2. Dr. Astrid S. Susanto. 3. Abdurachman Suryomihardjo 4. A.B Lapian.
– Ketua	:	Sutrisno Kutoyo
– Sekretaris	:	Sunjata Kartadarmadja
– Anggota	:	1. Mardanus 2. Masjkuri

KATA PENGANTAR

Kebudayaan merupakan wujud identitas bangsa. Pengembangan identitas bangsa adalah unsur utama di dalam rangka pengembangan ketahanan nasional untuk mencapai kesatuan bangsa. Meskipun rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan mempunyai adat istiadat yang berlainan, hal itu tidak mengurangi rasa kesatuan. Bahkan keanekaragaman itu menambah khasanah kebudayaan nasional.

Oleh sebab itu, segala warisan lama berupa sejarah daerah, cerita rakyat, adat istiadat dan lain-lain perlu dikembangkan dan disebarluaskan, sehingga dapat dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia, agar dapat tercipta iklim dan lingkungan hidup yang lebih baik dan serasi.

Buku mengenai sejarah dan kebudayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan baru sedikit sekali, sehingga tidak memadai untuk menjadi bahan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaktahuan itu menyebabkan orang kurang menghargai kebudayaan daerah, dan tidak suka menggali dari warisan lama itu.

Orang-orang tua yang mengetahui tentang seluk beluk kebudayaan daerahnya masing-masing banyak yang sudah meninggal. Sadar akan kerugian yang akan kita derita kalau sampai kebudayaan daerah itu tidak kita bukukan, maka Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan penelitian ke daerah-daerah dan menyusun naskah yang siap untuk diterbitkan.

Selanjutnya yang menerbitkan naskah tersebut menjadi buku ialah Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah Departemen P dan K bekerja sama dengan PN Balai Pustaka.

Mudah mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan bagi memperkaya kebudayaan nasional.

Jakarta, 1978. Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah

3. Surachman
4. Muchtaruddin Ibrahim
5. Sutjiatiningsih

7. Editor terdiri dari : 1. Sutrisno Kutoyo.

8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.
Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

(Drs. Bambang Suwondo)
NIP. 130117589.

DAFTAR ISI

HALAMAN

1. PENDAHULUAN 1

1.1. Tujuan Penelitian 1
1.2. Masalah 1
1.3. Ruang Lingkup 2
1.4. Pertanggung Jawaban Ilmiah 3
1.5. Hasil Akhir 3

2. PRASEJARAH 6

2.1. Asal-usul penghuni yang pertama 6
2.2. Penyelenggaraan hidup 7
2.2.1. Pemenuhan keperluan hidup primer 7
2.2.2. Perlindungan terhadap alam 9
2.2.3. Perpindahan 10
2.3. Organisasi masyarakat 11
2.3.1. Pengaturan masyarakat 11
2.3.2. Kepemimpinan 11
2.4. Kehidupan seni budaya 12
2.4.1. Pendidikan 12
2.4.2. Kesenian 13
2.5. Alam pikiran dan kepercayaan 15
2.5.1. Sistem kepercayaan 15
2.5.2. Pandangan tentang kosmos 16

3. ZAMAN KUNO (± Abad I – 1500 M) 18

3.1. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan 18
3.1.1. Pertumbuhan negara-negara 18
3.1.2. Perkembangan 28
3.1.3. Kepemimpinan 29
3.1.4. Pengaturan 33
3.1.5. Hubungan antar negara 34
3.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat 36
3.2.1. Pemenuhan kebutuhan hidup 36
3.2.2. Hubungan antar golongan 40
3.2.3. Kepemimpinan 41
3.2.4. Pengaturan masyarakat 43
3.3. Kehidupan seni budaya 45
3.3.1. Pendidikan 45
3.3.2. Kesenian 46
3.4. Alam pikiran dan kepercayaan (Agama) 48

3.4.1. Perkembangan agama 48
3.4.2. Bangunan Agama 52
3.5. Hubungan ke luar 54
3.5.1. Bentuk hubungan 54
3.5.2. Akibat hubungan 54

4. ZAMAN BARU (± 1500 M – 1800 M) 59
4.1. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan 59
4.1.1. Pertumbuhan 59
4.1.2. Perkembangan 60
4.1.3. Kepemimpinan 62
4.1.4. Pengaturan 64
4.1.5. Hubungan antar negara 66
4.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat 67
4.2.1. Pemenuhan kebutuhan hidup 68
4.2.2. Hubungan antar golongan 68
4.2.3. Kepemimpinan 70
4.2.4. Pengaturan masyarakat 71
4.3. Kehidupan seni budaya 73
4.3.1. Pendidikan 73
4.3.2. Kesenian 74
4.4. Alam fikiran dan kepercayaan 75
4.4.1. Perkembangan agama 75
4.4.2. Pengaruhnya 77
4.5. Hubungan ke luar 78
4.5.1. Bentuk hubungan 78
4.5.2. Akibat hubungan 80

5. ABAD KE 19 (± 1800 – 1900) 92
5.1. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan 92
5.1.1. Keadaannya pada tahun ± 1800 M 92
5.1.2. Hubungannya dengan kekuasaan Eropa 93
5.1.3. Akibat hubungan 95
5.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat 96
5.2.1. Pengaruh kekuasaan Eropa 96
5.2.2. Pemenuhan kebutuhan hidup 99
5.2.3. Gerakan perlawanan 100
5.2.4. Keadaan masyarakat pada akhir abad 19 112
5.3. Kehidupan seni budaya 113
5.3.1. Pengaruh seni budaya asing 113
5.3.2. Pendidikan 114
5.3.3. Kesenian 115

6. ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (± 1900–1942) 119
6.1. Keadaan pemerintahan dan kenegaraan 119
6.1.1. Kerajaan-kerajaan 119
6.1.2. Pemerintahan Hindia Belanda 120
6.2. Kaum pergerakan di Daerah 122
6.2.1. Timbulnya 122
6.2.2. Sikap dan gerakannya 123
6.3. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat 124
6.3.1. Pengaruh kekuatan Eropa 124
6.3.2. Pemenuhan kebutuhan 125
6.3.3. Partisipasi masyarakat dalam pergerakan kebangsaan 125
6.3.4. Keadaan masyarakat selama periode 1900–1942 126
6.4. Kehidupan seni budaya 127
6.4.1. Pengaruh kebudayaan asing 127
6.4.2. Pendidikan 128
6.4.3. Kesenian 129
6.5. Alam fikiran dan kepercayaan 130
6.5.1. Perkembangan agama 130
6.5.2. Perjuangan pergerakan nasional dan motivasi agama 131

7. ZAMAN PENDIDIKAN JEPANG (1942–1945) 135
7.1. Keadaan pemerintahan dan kenegaraan 135
7.1.1. Kerajaan-kerajaan 136
7.1.2. Pemerintahan Jepang 136
7.1.3. Sikap terhadap pemerintahan Jepang 138
7.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat 139
7.2.1. Keadaan sosial 139
7.2.2. Keadaan ekonomi 141
7.3. Kehidupan seni budaya 142
7.3.1. Pendidikan 142
7.3.2. Kesenian 143
7.3.3. Pengaruh seni budaya Jepang 143
7.4. Alam fikiran dan kepercayaan 144
7.4.1. Perkembangan agama 144
7.4.2. Gerakan perlawanan dengan motivasi agama 145
7.4.3. Kehidupan intelektuil 145
7.5. Hubungan ke luar 147
7.5.1. Terbuka 147
7.5.2. Di bawah tanah 147

8. ZAMAN KEMERDEKAAN (1945–1975) 153
8.1. Keadaan pemerintahan dan kenegaraan 153
8.1.1. Tumbuhnya Pem. R.I. di Daerah 153
8.1.2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan .. 155
8.1.3. Sesudah pengakuan kedaulatan 167
8.1.4. Terbentuknya Pemerintahan Daerah Tingkat I 168
8.2. Penyelenggaraan hidup 169
8.2.1. Kehidupan sosial-ekonomi pada zaman Revolusi Fisik (1945–1949) 169
8.2.2. Kehidupan sosial-ekonomi pada masa sesudah pengakuan kedaulatan 170
8.2.3. Kehidupan sosial-ekonomi sesudah terbentuknya Daerah Tingkat I 171
8.3. Kehidupan pendidikan dan seni budaya 172
8.3.1. Perkembangan pendidikan 172
8.3.2. Perkembangan seni budaya 175
8.4. Alam fikiran dan kepercayaan 176
8.4.1. Perkembangan agama 176
8.4.2. Kehidupan intelektuil 179
8.5. Hubungan ke luar 180
8.5.1. Bidang agama 180
8.5.2. Bidang seni budaya 181
8.5.3. Bidang ekonomi-sosial 181
8.5.4. Bidang pendidikan 181
8.5.5. Bidang komunikasi 182

DAFTAR KEPUSTAKAAN
MANUSKRIP
LAMPIRAN : – Foto-foto

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penelitian

Banyak sudah kita membaca tulisan-tulisan mengenai Bali, baik tulisan tersebut berupa buku-buku, majalah ataupun berita-berita yang termuat di surat kabar, tetapi sampai sekarang kita belum pernah mengetahui bagaimana perkembangan sejarah Bali sejak zaman purba sampai ke zaman barunya. Kebanyakan tulisan-tulisan tersebut hanya menguraikan sebagian kecil yang mereka lihat dan bersifat lebih mengkhususkan di dalam penguraiannya.

Warisan budaya yang telah kita warisi dari para leluhur, harus kita selamatkan untuk seterusnya dapat dihayati dan dipelihara oleh generasi mendatang. Harus disadari bahwa lenyapnya warisan-warisan nilai budaya hal ini akan berarti hilangnya cermin kepribadian bangsa di masa lampau. Karenanya untuk mewujudkan cita-cita di atas sudahlah sewajarnya harus dilaksanakan suatu pencatatan dan penulisan-penulisan perkembangan bangsa itu sendiri. Pencatatan dan penulisan merupakan dokumen yang tak ternilai harganya bagi bangsa itu sendiri khususnya, dunia luar pada umumnya.

Lebih-lebih mengingat pesatnya perkembangan pariwisata yang dihadapi Bali sekarang, langkah-langkah di atas sudah seharusnya kita tangani lebih serius demi mempertebal kesadaran dan tanggung jawab penduduk. Kita menyadari pula bahwa di samping aspek-aspek positif yang ditimbulkan arus pariwisata kadang-kadang timbul pula pengaruh-pengaruh negatif yang tidak kita harapkan.

Berdasarkan alasan di atas serta untuk memberikan gambaran yang agak jelas tentang perkembangan sejarah Bali, di sini kami akan mencoba menguraikan sejarah Bali sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kami.

1.2. Masalah

Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang sudah tidak asing lagi di dunia. Nama Bali telah terkenal di seluruh pelosok dunia lebih-lebih dengan pesatnya arus pariwisata, Bali tidak pernah terlupakan oleh mereka. Namun demikian apabila kita ingin

mengetahui kronologi sejarah Bali tidaklah mungkin kita akan dapat mengemukakan sesuai dengan yang kita harapkan.

Berbeda halnya dengan tempat-tempat di Indonesia lainnya seperti Jawa, Sumatra, di Bali amatlah sukar bila kita ingin melakukan penyelidikan kekunaan yang ada sebab sebagian besar kekunaan di atas masih in fungsi dan amat dikeramatkan "penyungsungnya" (penghormatnya). Mereka amat kuat memegang petunjuk-petunjuk serta nasihat-nasihat yang diberikan oleh ahli warisnya kepadanya. Benda-benda warisannya disimpan sebaik-baiknya dan kadang-kadang tidak diperkenankan berbekas tangan bukan penyungsungnya. Mungkin mereka berpendapat bahwa bila warisan mereka telah terjamah oleh orang lain kekuatan magis benda-benda itu akan berkurang dan kadang-kadang menimbulkan apa yang mereka tidak harapkan. Karenanya makin baik dan dikeramatkannya benda-benda yang mereka warisi makin sulit kita melakukan penyelidikan lebih mendalam. Untuk maksud di atas tidak jarang pula kita harus menunggu berbulan-bulan, menunggu sampai tiba saatnya hari baik, agar masyarakat sadar dan pasrah menyerahkannya untuk diteliti. Dalam hal ini kesabaran dan ketabahan sangat diperlukan menghadapi masyarakat, yang belum begitu menginsyafi arti dan fungsi benda-benda yang mereka hormati. Sampai saat ini kemungkinan masih banyak tersimpan prasasti-prasasti batu, perunggu ataupun benda-benda arkeologi lainnya yang belum diserahkan kepada yang berwewenang untuk diteliti lebih seksama.

Berdasarkan hal di atas kami amat sukar mengetahui kronologi selengkapnya, bagaimana keadaan Bali di masa lampau. Bahkan banyak pula di antaranya terselip tahun-tahun lowong sehingga kita tidak dapat mengetahui raja siapa yang bertahta di Bali pada tahun-tahun tersebut, selain hanya bersumberkan beberapa prasasti-prasasti yang pernah dikumpulkan Dr. R. Goris. Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan di atas kami tidaklah mungkin mampu menjangkaunya dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu uraian yang akan kami berikan di bawah ini tidaklah lebih dari pendataan belaka yang sudah barang tentu masih memerlukan penelitian dan pembahasan lebih mengkhusus.

Di samping hal di atas sampai sekarang kami belum mendapatkan data-data selengkapnya yang dapat kami pergunakan sebagai pegangan serta pertanggungkan jawab untuk menguraikan perkembangan sejarah Bali sejak dahulu hingga sekarang.

1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup uraian di bawah ini kami kelompokkan ke da-

lam dua kelompok utama yaitu :

1. Zaman Prasejarah
2. Zaman Sejarah

Untuk tidak membingungkan kita dalam menelitinya nanti kedua kelompok di atas kami pisah-pisahkan pula penguraiannya menjadi :

A. Zaman Prasejarah terbagi dalam :
   1. Zaman hidup berburu (Palaeolithicum)
   2. Zaman hidup berburu dan mengumpulkan makanan (Megalithicum)
   3. Zaman bercocok tanam (Neolithicum).

Selanjutnya uraian pada zaman sejarah dapat pula dibagi menjadi beberapa bagian seperti :

1. Zaman sejarah Bali Kuna (abad 1 – 1500 Masehi)
2. Zaman Baru (1500 – 1800)
3. Bali pada abad 19 (1800 – 1900)
4. Zaman Kebangkitan Nasional (1900 – 1942)
5. Zaman Pendudukan Jepang (1942 – 1945)
6. Zaman Kemerdekaan.

1.4. **Pertanggung jawaban ilmiah.**

Mengingat kurangnya bahan-bahan serta singkatnya waktu yang tersedia, di samping survey penelitian ke beberapa tempat pada peninggalan-peninggalan kekunaan di Bali, penulisan ini sebagian besar berdasarkan beberapa buku-buku literatur yang telah dibuat beberapa sarjana dalam maupun luar negeri. Juga dilakukan wawancara dengan tokoh-tokoh sebagai manusia sumber terutama pada periode sejak tahun 1900. Namun demikian mengingat perkembangan ilmu pengetahuan yang makin berkembang, dalam penguraian pendataan di atas sudah tentunya harus kami sesuaikan dengan perkembangan ilmu itu sendiri. Penulisan yang kami sampaikan ini adalah hasil kemampuan yang dapat kami capai yang sudah tentunya masih jauh dari apa yang kita harapkan.

Mudah-mudahan di masa-masa mendatang pelaksanaan pencatatan dan penelitian kebudayaan di daerah-daerah di Indonesia dapat diteruskan sehingga penuturan sejarah di tiap-tiap daerah khususnya, di Indonesia pada umumnya dapat dijadikan cermin dan lebih dihayati generasi yang akan datang.

1.5. **Hasil akhir.**

Naskah ini merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian pekerjaan yang bertahap yang dilakukan baik di daerah sendiri maupun di pusat. Sesuai dengan rencana yang tertera dalam Pola Pe-

nelitian dan Kerangka Laporan dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, maka naskah ini dalam bentuknya yang asli disiapkan oleh Team Peneliti di daerah sendiri. Kemudian melalui pekerjaan penilaian dan penyempurnaan baik yang dilakukan oleh petugas-petugas di daerah maupun dari pusat, dan diselenggarakan dalam lokakarya dan rapat-rapat khusus maka sesudah terlebih dahulu mengalami proses **editing**, maka akhirnya naskah itu mencapai bentuk seperti yang ada sekarang ini.

Dalam menilai, menyempurnakan dan mengadakan **editing** pada naskah ini, diperhatikan beberapa hal seperti : bahasa, cara penyajian, pendekatan dan materi itu sendiri. Mengenai sektor bahasa naskah "Sejarah Daerah Bali" itu sendiri, secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik. Perbaikan hanya dilakukan pada beberapa hal seperti ejaan supaya lebih sesuai dengan peraturan dari ejaan yang sudah disempurnakan. Di sana-sini beberapa kata dan istilah, terutama yang masih bercorak lokal dan kuat ikatannya dengan dialek kedaerahan, diusahakan penjelasan ataupun digantikan dengan kata dan istilah yang lebih lazim dan umum.

Segi lain yang perlu diperhatikan ialah cara penyajian. Dalam hal ini secara keseluruhan dapat pula dikatakan bahwa cara penyajian sudah berhasil, dalam arti keseluruhan bahan tersusun dalam bentuk kisah kesejarahan yang urut dan logis, sehingga terjamin komunikasi antara penyusun bahan dengan pembaca yang menunjukkan bahwa persyaratan keterbacaan sudah dipenuhi. Meskipun demikian, baik karena sifat materi itu sendiri yang secara obyektif memang berlainan dan berbeda-beda, lagi pula penanganan keseluruhan naskah ini dilakukan oleh suatu team, maka tidak dapat dihindarkan adanya perbedaan nuansa baik pada gaya, maupun selera. Sebagai contoh pada Bab Masa Kuno (± abad 1 – 1500 M) masih dirasakan adanya cara yang condong pada usaha pencatatan.

Selanjutnya dalam menulis sejarah daerah maka segi pendekatan merupakah hal yang penting dan menentukan. Pada sejarah nasional yang meliputi seluruh kegiatan bangsa Indonesia pada masa lampau, maka pendekatan sudah barang tentu menggunakan cara nasional dengan kaca penelitian yang lebih luas, ibarat seorang astronoom yang meneliti bintang-bintang di langit dengan teleskoop. Sebaliknya dengan penulisan sejarah daerah, di sini justru diperlukan pendekatan yang berlainan, yaitu pendekatan regiosentris, yang justru merupakan titik berat pada penelitian segi-segi yang kecil dan rumit, ibarat seorang ahli kimia yang bekerja dengan mikroskop.

Mengenai naskah ini sendiri, dapatlah dikatakan, bahwa pen-

dekatan regiosentris sudah diusahakan dengan jauh, sehingga hasil penulisan ini merupakan pengungkapan masa lampau khusus di daerah Bali yang pada giliranny a akan merupakan sumbangan bagi penulisan sejarah nasional secara keseluruhan.

Selain dari itu hal bahan atau materi kesejarahan yang terdapat dalam naskah ini dapat dikatakan cukup memadai dan hal tersebut dibuktikan dengan pengadaan data yang ditimba dari sumber buku seperti yang tertera di dalam daftar kepustakaan dan wawancara yang diperoleh dari sebelas manusia sumber yang kesemuanya tercantum di dalam buku ini.

Akhirnya dapat dikemukakan, bahwa penyusunan naskah ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh cakupan tugas ataupun terms of reference dan dapatlah hasil karya ini dinilai sebagai usaha perintisan ke arah penulisan sejarah daerah yang lebih sempurna.

******

2. ZAMAN PRASEJARAH

2.1. Asal usul penghuni pertama.

Untuk mengetahui asal usul penghuni yang pertama di pulau Bali, memerlukan suatu peninjauan kembali kepada hasil-hasil penelitian terhadap kebudayaan yang tertua di pulau ini. Penelitian terhadap kebudayaan yang tertua di pulau Bali, seperti halnya dengan penelitian yang sama di tempat lainnya, dapat memberikan beberapa petunjuk tentang penghuni yang pertama dan kehidupannya di masa silam. Oleh karena masa hidup yang telah berlangsung itu amat jauh, maka bukti-bukti yang dapat memberikan suatu petunjuk kepada kita, hanya dapat ditemukan kembali dalam keadaan yang serba terbatas dan tidak lengkap seperti apa yang telah terjadi dahulukala, misalnya berupa alat-alat untuk keperluan hidup sehari-hari yang terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama antara lain alat-alat dari batu, tulang atau tanduk binatang. Dengan demikian sudah jelas, bahwa pengetahuan mengenai penghuni yang pertama dengan segala aktivitasnya, tidak dapat diperoleh secara lengkap dan pasti. Dalam hubungan ini studi perbandingan mengenai kehidupan dalam masa yang sama di tempat lainnya, akan dapat memberikan gambaran yang agak jelas.

Adapun mengenai asal usul penghuni yang pertama di Pulau Bali seperti disinggung di atas tadi, hingga dewasa ini belum dapat diketahui dengan pasti, oleh karena penelitian prasejarah di sini tidak berhasil mendapatkan sisa-sisa tulang belulang manusia dari masa yang tertua. Penelitian prasejarah yang dilakukan oleh Drs. R.P. Soejono[1]) (baca : Suyono) beberapa tahun yang lalu di Bali, khususnya penelitian terhadap masa hidup yang tertua, yaitu masa hidup berburu dan mengumpul makanan tingkat sederhana, hanya berhasil menemukan kembali alat-alat untuk keperluan hidup sehari-hari di desa Sembiran (Bali Utara) dan di tepi Danau Batur di sekitar desa Trunyan (Bangli). Sisa-sisa tulang belulang manusia maupun binatang purba, sama sekali tidak berhasil ditemukan di sana, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti asal usul penghuni yang pertama di pulau Bali.

Walaupun demikian, studi perbandingan dengan kehidupan

yang berasal dari masa yang sama di Indonesia dapat memberikan gambaran yang agak terang. Dalam hal ini kita beruntung sekali karena alat-alat dari desa Sembiran, kecuali berasal dari masa yang sama dengan alat-alat dari Pacitan (Jawa Timur)[2], juga kedua-duanya mempunyai persamaan yang menarik sekali. Seperti telah diketahui, alat-alat dari Pacitan telah diteliti dengan mendalam oleh para ahli prasejarah. Menurut sementara kalangan sarjana prasejarah, alat-alat dari Pacitan berasal dari tingkat akhir Plestosin Tengah atau permulaan Plestosin Akhir dan mungkin sekali diciptakan oleh Pithecanthropus Erectus atau keturunan-keturunannya. Berdasarkan perkiraan di atas, mungkin sekali dapat diperkirakan, bahwa penghuni yang pertama di Pulau Bali adalah Pithecanthropus Erectus atau setidak-tidaknya keturunan-keturunannya yang berasal dari Jawa Timur. Penghuni yang pertama ini, seperti dibuktikan oleh alat-alat dari Sembiran, telah menghasilkan alat-alat untuk mempertahankan dan meneruskan hidupnya di tengah-tengah tantangan alam yang beraneka ragam, pada masa itu. Di tempat lainnya terdapat pula bukti-bukti, bahwa pada masa hidup berburu dan mengumpul makanan, manusia telah mengenal api, suatu temuan yang amat besar artinya bagi kehidupan manusia selanjutnya.

2.2. **Penyelenggaraan hidup.**

2.2.1. Pemenuhan keperluan hidup primer[3].

Problema hidup manusia yang pokok dahulu kala adalah daya upaya untuk memenuhi kebutuhan akan makanan sehari-hari. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, hidup manusia sepenuhnya tergantung kepada alam sekitarnya dan selalu berpindah-pindah tempat, di mana terdapat kemungkinan untuk meneruskan hidupnya, terutama tersedianya bahan-bahan makanan untuk suatu masa tertentu. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang di dalam hutan belantara dan mengumpulkan makanan yang dapat diperolehnya di alam sekitarnya. Mereka menangkap ikan di sungai, atau di danau dan meramu hasil-hasil alam yang dapat dimakan, misalnya jenis daun-daunan, buah-buahan dan ubi-ubian tertentu. Pada masa ini telah terdapat pembagian tugas antara laki-laki dan wanita. Kaum laki-laki mengerjakan pekerjaan yang berat dan banyak memerlukan tenaga misalnya berburu, sedangkan kaum wanita menyelesaikan tugas-tugas yang tidak berat misalnya mengumpulkan bahan-bahan makanan, memilih dan meramu bahan-bahan makanan yang mudah diperoleh di sekitarnya.

Pada masa berikutnya, yaitu masa berburu dan mengumpulkan

makanan tingkat lanjut, pada umumnya cara hidup manusia hampir sama dengan masa sebelumnya dan tidak terjadi kemajuan yang besar. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan masih tetap diteruskannya, dan tergantung kepada alam sekitarnya. Hidup mengembara atau berpindah-pindah masih terus berlangsung walaupun di sana-sini sudah terlihat adanya usaha-usaha untuk bertempat tinggal di dalam gua-gua alam secara tidak tetap pula. Di Pulau Bali cara hidup dari masa ini terbukti dari temuan-temuan berupa alat-alat dari tulang (antara lain sudip, penusuk) yang ditemukan di Gua Selonding oleh Drs. R.P. Soejono. Pada waktu bertempat tinggal di dalam gua-gua alam ini, tampak adanya tanda-tanda hidup berladang dengan cara yang amat sederhana dan berpindah-pindah tergantung kepada kesuburan tanah. Sebidang hutan ditebas, lalu dibakar atau dibersihkan, dan kemudian ditanami biji-bijian. Kemudian setelah panen berlalu mereka pindah lagi ke tempat lainnya dan demikian seterusnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan mulai dilepaskan secara perlahan-lahan dan mulai tampak jelas tanda-tanda untuk menetap di suatu tempat. Mulailah dikembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam dan menjinakkan jenis hewan-hewan tertentu. Para sarjana memperkirakan, bahwa pada masa bercocok tanam ini, cara untuk memenuhi keperluan akan makanan telah mengalami perubahan yang menuju ke arah yang lebih maju. Dan mulai pula terbentuk pola perkampungan dan terbentuklah desa-desa kecil semacam pedukuhan, walaupun pembangunan tempat tinggal belum dilakukan dengan cara yang teratur.

Diduga, bahwa rumah tempat tinggal pada masa itu berbentuk persegi panjang, dibangun di atas tiang dan dapat menampung beberapa keluarga inti. Atau mungkin juga dibangun rumah yang kebulat-bulatan. Rumah tempat tinggal ini didirikan di dekat tanah ladang milik mereka dan dikerjakan secara gotong-royong. Perkembangan masyarakat seperti di atas, memberikan kemungkinan bertambahnya penduduk dan meningkatnya perkembangan peradaban manusia.

Menurut bukti-bukti yang ditemukan di Bali, hidup bercocok tanam seperti diuraikan di atas, rupanya berkembang merata di seluruh Bali. Sayang sekali sisa-sisa tradisi neolitik yang berasal dari masa ini, hanya diketahui dari hasil-hasil pengumpulan alat-alatnya yang kini masih disimpan di Museum Bali (Denpasar) dan di Gedung Arca (Gianyar), yaitu antara lain berupa beliung, belincung dan sebagainya. Dan hingga kini belum pernah ditemukan suatu yang berasal dari masa ini.

Kemajuan peradaban pada masa bercocok tanam, telah memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan masa berikutnya, yaitu masa perundagian yang ditandai oleh cara hidup yang lebih maju dengan ditemukannya bijih-bijih logam dan cara mengerjakannya. Usaha untuk mendapatkan makanan telah lebih maju juga. Hidup bercocok tanam berkembang menjadi pertanian menetap dan setelah sistem persawahan dikenal, maka kehidupan menjadi meningkat pula. Bentuk perkampungan atau desa menjadi berkembang dengan teratur. Walaupun kemajuan dalam hidup sudah meningkat sekali, tetapi cara hidup berburu dan menangkap ikan masih juga dilakukannya. Di Bali, amat beruntung telah ditemukan sebuah perkampungan nelayan yaitu di tepi pantai Teluk Gilimanuk, yang mungkin merupakan kampung yang cukup besar.

2.2.2. Perlindungan terhadap alam.

Dalam usaha manusia prasejarah untuk mempertahankan dan meneruskan hidupnya, mereka juga berusaha untuk melindungi dirinya terhadap bahaya-bahaya alam termasuk serangan-serangan binatang buas yang berkeliaran di dalam hutan di mana mereka hidup. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, manusia belum memiliki suatu pemukiman tertentu, karena mereka masih hidup mengembara dan berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Untuk melindungi dirinya, mereka mencari tempat-tempat yang dapat melindungi dirinya dari serangan hewan-hewan buas. Dan menyalakan api, adalah salah satu cara bagi mereka untuk mengusir binatang-binatang tadi.

Demikian juga pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, mereka masih berpindah-pindah. Memang ada pula di antaranya yang bertempat tinggal di dalam gua-gua alam, tetapi cara ini hanya sementara saja sifatnya, dan suatu ketika mereka akan pindah lagi. Tanda-tanda pemukiman yang jelas, perumahan dan pedukuhan baru tampak pada masa bercocok tanam dan masa perundagian. Pada masa bercocok tanam telah terbentuk desa-desa kecil seperti pedukuhan, yang terdiri dari beberapa keluarga. Rumah-rumah tempat tinggal sudah dibuat dan demikian juga peralatan sehari-hari yang diperlukan dalam segala kegiatan hidupnya. Dan perdukuhan mungkin telah berjalan dengan agak teratur.

Kemajuan yang paling besar pengaruhnya terjadi pada masa perundagian. Perumahan, perdukuhan dan peralatan telah berkembang menjadi lebih teratur lagi. Segala kemajuan ini terjadi karena penduduk telah menetap di desa-desa yang teratur. Dalam masyarakat desa ini hidup bersama secara gotong royong telah berkembang pula dengan baik.

2.2.3. Perpindahan.

Dalam kehidupan manusia, perpindahan penduduk selalu terjadi, baik karena alasan-alasan keperluan hidup yang harus dicari, maupun karena alasan-alasan alamiah misalnya karena bencana alam yang dahsyat. Pada masa prasejarah rupa-rupanya keperluan primer akan makanan merupakan alasan pendorong untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya karena di tempat yang lama bahan-bahan makanan tidak tersedia lagi untuk keperluan hidup sehari-hari. Dengan demikian perpindahan adalah salah satu jalan bagi manusia untuk mempertahankan dan meneruskan hidupnya, walaupun dengan segala peralatan-peralatan yang dimilikinya pada waktu itu.

Hidup mengembara atau berpindah-pindah pada masa berburu dan mengumpulkan makanan baik pada tingkat sederhana maupun pada tingkat lanjut, dilakukan dengan cara yang mudah dari satu tempat ke tempat lainnya bersama-sama keluarganya. Dalam perpindahan ini hanya dibawa sedikit peralatan hidup untuk berburu dan mengumpulkan makanan, sekedar dapat dipergunakan sehari-hari. Demikian perpindahan penduduk terjadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut.

Kemudian pada masa bercocok tanam, terjadi juga perpindahan penduduk, tetapi tidak seperti apa yang terjadi pada masa sebelumnya. Pada masa bercocok tanam di mana penduduk telah hidup lebih teratur, perpindahan terjadi secara berkala, terutama jika tanah pertanian tidak dapat lagi memberikan hasil yang dapat menjamin hidup mereka. Biasanya perpindahan ini terjadi setelah panen berlalu. Mereka pindah bersama keluarganya, yang jumlahnya sudah agak banyak jika dibandingkan dengan jumlahnya pada masa-masa sebelumnya. Seperti telah disinggung di atas tadi, penduduk yang telah mempunyai tempat tinggal, pada umumnya cepat bertambah banyak dan anak-anak sudah mulai dianggap produktif.

Demikianlah pada masa perundagian, di mana peradaban manusia sudah jauh lebih maju dari pada masa sebelumnya dan telah bertempat tinggal tetap di dalam perkampungan yang sudah teratur, maka perpindahan sudah tidak terjadi lagi. Mereka sudah hidup dalam ikatan kampung dan kekeluargaan yang berdasarkan hidup gotong royong. Hidup bersama dalam ikatan-ikatan di atas dan ikatan-ikatan adat istiadat telah menjadikan mereka bersatu dengan baik. Hidup menetap dan usaha-usaha pertanian lebih intensif dari masa-masa sebelumnya telah meningkatkan pula keterampilan mereka secara terus menerus.

2.3. Organisasi masyarakat.

2.3.1. Pengaturan masyarakat.

Pengetahuan kita mengenai pengaturan masyarakat pada masa prasejarah memang amat kurang, lebih-lebih tentang pengaturan masyarakat pada masa yang paling tua dari sejarah peradaban manusia. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut, secara tegas tidak dikenal pengaturan masyarakat. Waktu itu penduduk hidup mengembara dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan hidupnya tergantung kepada alam sekitarnya. Walaupun demikian, kehidupan berburu menuntut adanya persatuan gotong royong untuk menghadapi binatang buas dan hutan belantara yang penuh bahaya, supaya mereka berhasil. Mungkin sekali, bahwa penduduk yang jumlahnya kecil pada masa itu, melalui suatu sistem yang amat sederhana telah mengatur dirinya sebagai masyarakat pemburu dan pengumpul makanan.

Pengaturan masyarakat menjadi lebih terang dan teratur pada masa bercocok tanam dan perundagian. Hidup menetap dan bertani di suatu tempat tertentu, menghendaki adanya pengaturan masyarakat dengan baik dan memerlukan adanya pemimpin yang disegani dan dipercaya oleh para anggota masyarakat. Hidup masyarakat telah diatur oleh ikatan-ikatan kampung dan kekerabatan yang berdasarkan gotong royong. Meningkatnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi di samping hidup bercocok tanam atau berladang, memerlukan pengaturan masyarakat yang lebih teratur dan tertib. Perkembangan masyarakat yang semakin maju menghendaki adanya pemimpin yang baik, disegani dan dipercaya. Lebih-lebih pada masa perundagian, pemimpin semacam itu amat diperlukan.

Demikianlah pada masa perundagian, di kalangan masyarakat muncul golongan pemimpin. Dan di samping itu timbul pula golongan-golongan yang mempunyai keterampilan khusus yang dikenal sebagai golongan undagi. Kedua golongan di atas merupakan golongan yang terpandang di tengah-tengah masyarakat dewasa itu.

2.3.2. Kepemimpinan.

Di atas telah disinggung sepintas lalu mengenai pengaturan masyarakat pada masa prasejarah. Seperti telah diketahui, pengaturan masyarakat bertalian erat sekali dengan hal-hal yang menyangkut kepemimpinan di dalam masyarakat, di mana peranan pemimpin telah menempati suatu kedudukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat se-

derhana dan tingkat lanjut, di mana pengaturan masyarakat berburu belum tampak dengan jelas, kiranya kepemimpinan pada waktu itu pun belum jelas juga. Walaupun demikian, barangkali dapat diduga, bahwa untuk mengatur perburuan diperlukan adanya pemimpin yang terampil dan cekatan dan tokoh-tokoh ini tentu memegang peranan yang penting dalam hidup masyarakat yang masih mengembara.

Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, yaitu pada masa bercocok tanam, di mana penduduk telah menetap dalam desa-desa kecil, tetapi telah teratur, maka peranan pemimpin desa menjadi menonjol dan menentukan. Dasar-dasar kepemimpinan pada masa ini kemudian menjadi landasan bagi perkembangan yang berikutnya. Pada masa perundagian, desa telah berkembang menjadi lebih besar dan penduduk semakin bertambah pula serta kemajuan dalam teknologi meningkat, sehingga peranan pemimpin desa, bahkan mungkin pemimpin suku menjadi semakin penting pula. Di samping itu dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju, muncullah golongan-golongan khusus yang mempunyai ketrampilan tertentu yang dikenal sebagai golongan undagi.

Dan pada waktu itu muncul pula golongan ulama, yang memegang peranan yang penting dalam hidup keagamaan dan adat-istiadat, yang pada masa itu telah pula berkembang. Tokoh-tokoh ini di kalangan masyarakat merupakan tokoh yang penting, di samping tokoh-tokoh lainnya. Kepercayaan masyarakat kepada roh leluhur yang berkembang pesat pada masa itu, telah menjadikan tokoh-tokoh ini semakin penting dan mereka dianggap sebagai penghubung antara dunia arwah dengan dunia nyata.

2.4. Kehidupan seni budaya.

2.4.1. Pendidikan.

Pendidikan seni budaya tidak meninggalkan bukti-bukti yang dapat kita pergunakan sebagai bahan studi. Masyarakat mengembara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, rupa-rupanya belum melakukan pendidikan seni budaya. Mereka masih hidup dalam keadaan yang serba tergantung kepada alam dan segala usaha dipusatkan kepada tujuan untuk mendapatkan makanan atau tegasnya mempertahankan hidupnya, sehingga tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk memikirkan soal-soal seni budaya.

Perubahan baru tampak pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, ketika sebagian penduduk telah mulai bertempat tinggal di dalam gua-gua alam, walaupun untuk sementara saja. Hasil-hasil seni khususnya seni lukis yang dilukiskan

di dinding-dinding atau langit-langit gua, merupakan hasil budaya yang menonjol pada masa ini, seperti ditemukan di Sulawesi Selatan, Pulau Kei dan Irian Jaya. Temuan ini, walaupun di Bali hingga sekarang belum dijumpai lukisan-lukisan gua tetapi cukup memberikan petunjuk, bahwa pada masa itu telah dimulai pendidikan seni budaya di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat yang sudah bertempat tinggal bersama-sama.

Kemajuan lebih tampak lagi pada masa bercocok tanam dan lebih-lebih pada masa berikutnya, yaitu masa perundagian. Di Bali terdapat temuan-temuan yang baik sekali, yang memberikan gambaran seni budaya. Sebagai contoh, temuan nekara raksasa dari Pejeng yang terkenal dengan nama bulan Pejeng, telah diberi hiasan-hiasan yang baik sekali, antara lain berupa hiasan kepala, binatang dan sebagainya. Dan temuan sarkofagus di Bali yang sebagian besar berisi hiasan-hiasan kedok muka di bagian tonjolannya, merupakan hasil seni yang maju pada masa perundagian. Hasil-hasil seni yang ditemukan di Bali, seperti tersebut di atas, merupakan hasil seni budaya yang sudah maju pada masa itu, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan seni budaya di Bali pada masa-masa selanjutnya, terutama seni ukir.

Temuan-temuan di atas, cukup memberikan petunjuk, bahwa pada masa itu di tengah-tengah masyarakat telah tumbuh segolongan seniman yang terampil. Berdasarkan hasil-hasil di atas kiranya dapat diduga, bahwa pada masa itu pendidikan seni budaya di dalam keluarga dan di kalangan masyarakat luas, telah berjalan dengan baik. Semuanya ini berjalan baik, karena masyarakat desa yang telah ada sudah teratur sekali dalam ikatan-ikatan kampung atau desa dan juga dalam ikatan-ikatan kekerabatan. Dan taraf hidup yang telah lebih maju dan waktu yang tersedia, telah turut memberikan kemungkinan bagi perkembangan di atas.

2.4.2. Kesenian.

Lahirnya kesenian, khususnya seni rupa atau seni lukis, baru pada masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut, ketika sebagian penduduk telah mulai bertempat tinggal di dalam gua-gua alam, walaupun hanya untuk sementara waktu. Hal ini terbukti dari lukisan-lukisan yang ditemukan di dinding-dinding atau langit-langit gua di daerah Sulawesi Selatan, Pulau Kei dan Irian Jaya[4]). Dalam perkembangan selanjutnya, kesenian ini rupanya telah menjadi dasar bagi perkembangan kesenian Indonesia pada masa yang lebih kemudian.

Sayang sekali di Bali, lukisan-lukisan gua semacam itu tidak ditemukan, walaupun pada masa yang sama di Bali telah tampak

adanya usaha-usaha penduduk untuk bertempat tinggal tetap di dalam gua-gua alam walaupun ini hanya bersifat sementara. Pengetahuan kita mengenai kesenian di Bali baru bertambah agak jelas pada masa perundagian, di mana kemahiran teknologi telah berkembang dengan baik dan masyarakat telah hidup dengan teratur dalam perkampungan.

Demikianlah pada masa perundagian di Bali ditemukan sejumlah sarkofagus yang berisi tonjolan-tonjolan yang berupa kedok muka dalam sikap yang menarik, misalnya sikap melawak, mata membelalak dan sebagainya[5]). Sebagian besar dari temuan sarkofagus di Pulau Bali yang telah diketahui hingga dewasa ini, berisi tonjolan-tonjolan yang berhiasan kedok muka. Hanya sedikit yang berisi hiasan dalam bentuknya yang lain, misalnya sarkofagus dari Ambyarsari (Negara), berisi hiasan bagian yang distilasi demikian rupa. Dan ada pula yang berhiasan kedok muka yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk kadal besar.

Temuan yang lain dari Bali, adalah temuan sebuah nekara perunggu yang kini masih disimpan di dalam Pura Penataran Sasih di Pejeng (Gianyar), yang berisi hiasan yang berbentuk bintang. Sehubungan dengan nekara ini, patut disinggung pula di sini, bahwa diduga sebagai produksi penduduk setempat karena di desa Manuaba ditemukan cetakan batunya, walaupun berukuran lebih kecil. Jika dugaan ini benar, maka dapat digambarkan betapa kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh masyarakat pada masa itu.

Demikianlah sejumlah temuan di Bali telah memberikan gambaran tentang hasil-hasil seni rupa yang telah dicapai oleh masyarakat. Hasil-hasil kesenian tersebut di atas tadi, tidak hanya semata-mata sebagai hasil seni yang bernilai aestethis tetapi juga mengandung nilai-nilai religius-magis yang lebih dalam. Nilai-nilai spirituil inilah yang telah menjiwai hasil-hasil kesenian masa itu, sehingga hasil-hasil seni ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas hidup masyarakat seluruhnya. Seperti di atas tadi telah disinggung, bahwa hasil-hasil kesenian ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan kesenian di Bali selanjutnya, terutama perkembangan seni ukir.

Adapun kesenian lainnya seperti seni tari dan seni suara, di Indonesia umumnya maupun di Bali khususnya, tidak banyak yang dapat kita ketahui. Bukti-bukti mengenai hal ini memang belum dijumpai hingga sekarang. Walaupun bukti yang meyakinkan belum ada, kiranya dapat diduga, bahwa mungkin pada masa perundagian telah berkembang semacam seni tari, yang berhubungan erat dengan hidup keagamaan, karena pada masa itu hidup keagamaan telah pula berkembang dengan baik. Barangkali semacam ta-

ri sakral telah berkembang waktu itu.

Dan mengenai seni suara, tidak mustahil telah pula berkembang waktu itu, yang mungkin juga bertalian dengan keagamaan. Memang hingga sekarang tidak ada bukti-bukti mengenai hal ini. Tetapi yang jelas, masyarakat prasejarah telah mengenal bahasa sebagai alat komunikasi yang diperlukan dalam pergaulan hidupnya.

2.5. Alam pikiran dan kepercayaan[6)]

2.5.1. Sistem kepercayaan

Sistem kepercayaan masyarakat prasejarah baru dapat diketahui sedikit mulai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut dan masa-masa berikutnya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, lukisan-lukisan dinding gua telah dijiwai oleh jiwa keagamaan masyarakat. Kepercayaan pada masa itu antara lain adalah kepada kekuatan pelindung atau kekuatan gaib. Dan di samping tampak adanya benih-benih kepercayaan kepada arwah orang yang telah meninggal dunia, yang di masa kemudian berkembang dengan lebih baik.

Dan pada masa bercocok tanam, mulai tampak pemikiran-pemikiran kepada alam yang subur yang dapat memberikan hidup kepada manusia. Penghormatan kepada alam mulai mendapat tempat di dalam kehidupan masyarakat dewasa itu. Dan tentang kehidupan setelah meninggal dunia, tampak diperhatikan oleh masyarakat.

Perkembangan sistem kepercayaan menjadi lebih baik pada masa perundagian. Dan khususnya di Bali pada masa ini terdapat bukti-bukti yang menunjukkan suatu kepercayaan kepada arwah nenek moyang. Sistem penguburan dengan sarkofagus dan dengan tempayan yang ditemukan di Bali memberikan petunjuk yang baik sekali. Arwah nenek moyang yang dianggap berdiam di puncak bukit atau gunung, dihormati dan dipuja untuk meminta perlindungannya bagi masyarakat yang masih hidup. Kepercayaan, bahwa hidup masih berlangsung terus setelah meninggal dunia, berkembang pada masa itu dan menjadi tradisi dalam bentuk pemberian bekal kubur kepada orang yang telah meninggal dunia.

Dalam kepercayaan kepada arwah nenek moyang, orang yang meninggal dunia diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dan dalam hubungan ini mungkin penguburan dilakukan dengan suatu upacara tertentu. Sayang sekali, kita tidak mengetahui upacara yang dilakukan ini. Kepercayaan kepada arwah nenek moyang dijelaskan pula dalam kepercayaan kepada jenis binatang-binatang tertentu,

misalnya kadal yang dianggap sebagai wujud dari arwah nenek moyang mereka.

2.5.2. Pandangan tentang kosmos

Pandangan tentang kosmos masyarakat prasejarah bertalian erat dengan kehidupannya sendiri dan alam lingkungan di mana mereka hidup. Seperti di atas telah kami kemukakan, bahwa kepercayaan masyarakat prasejarah mulai tampak pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, tetapi pandangan yang jelas tentang kosmos pada masa itu belum tampak dengan jelas.

Pada masa berikutnya, yaitu masa bercocok tanam baru tampak adanya pandangan kepada kesuburan alam yang dapat memberikan hidup kepada manusia dan mulailah penghormatan kepada kekuatan alam yang berada di luar jangkauan pemikiran biasa. Pandangan kepada makhluk supernatural atau kekuatan supernatural, berkembang pada masa perundagian. Sejalan dengan perkembangan alam pikiran ini, para pemuka kepercayaan atau golongan alim ulama menjadi tokoh yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia arwah yang digambarkan di puncak-puncak gunung atau bukit.

Sudah jelas, bahwa tokoh-tokoh kepercayaan ini amat penting kedudukannya di dalam masyarakat, sehingga mereka dianggap juga sebagai makhluk supernatural yang mampu menjaga ketenangan spiritual masyarakat. Dan mereka pun memegang peranan penting di dalam setiap upacara-upacara keagamaan yang berlangsung.

Demikianlah perkembangan masyarakat dalam segala aspek kegiatannya telah menunjukkan kemajuan yang besar dalam kehidupan manusia. Kehidupan masyarakat dalam desa-desa yang telah teratur dalam ikatan-ikatan kekerabatan yang berdasarkan gotong royong telah menjadi landasan bagi perkembangan masyarakat selanjutnya. Dan hidup keagamaan atau kepercayaan seperti diuraikan di atas, telah pula menjadi dasar bagi perkembangan hidup spiritual bagi masyarakat selanjutnya. Berbagai faktor kehidupan yang telah lebih maju pada masa-masa ini telah ikut memberikan kemungkinan yang lebih bagi perkembangan peradaban manusia selanjutnya.

CATATAN

1. Lih. Soejono, Beberapa Catatan Sementara Tentang Penemuan-penemuan Baru Alat-alat Paleolithik awal di Indonesia, **MISI**, II/3, 1965, hl. 360–362. Lihat juga Sartono Karto-

dirdjo, Sejarah Nasional Indonesia, jilid I Jaman Prasejarah di Indonesia, 1975, hal. 96–99.

2. Lih. Sartono Kartodirdjo, op.cit., hal. 82–90 dan van Heekeren, New Investigation on the Lower Palaeolithic Pacitan Culture in Java, BDP., 1,1955, hal. 1–12.
3. Lih. Sartono Kartodirdjo, op.cit., hal. 108–112; 147–152; 181–187; dan 260–262.
4. Ibid., hal. 142–146.
5. Lih. Soejono, Penyelidikan Sarkofagus di Pulau Bali, Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional II, Seksi D., 1962 hal. 210–250.
6. Lih. Sartono Kartodirdjo, op.cit., hal. 150–152 dan 189–190.

DAFTAR SINGKATAN

BDP. : Berita Dinas Purbakala, Diterbitkan oleh Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional Republik Indonesia.

MISI : Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, Diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Karya Sastra, Ikatan Sarjana Sastra Indonesia, dengan bantuan Departemen Urusan Research Nasional.

3. ZAMAN KUNO
(± ABAD I – 1500 M)

3.1. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan

3.1.1. Pertumbuhan negara-negara.

Pembicaraan dalam pasal ini baiklah kami dahului dengan suatu pembicaraan singkat tentang kapan pulau Bali mulai memasuki zaman sejarahnya, yaitu dalam arti dari tahun berapakah prasasti atau peninggalan tertulis yang tertua di pulau ini. Untuk ini kami tunjuk publikasi yang telah dibuat oleh Dr. W.F. Stutterheim mengenai prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta yang ditemukan di daerah Pejeng, Gianyar. Apa yang dikatakan atau dipublikasikan oleh Dr. Stutterheim kemudian dibicarakan lagi oleh Dr. R. Goris dalam bukunya Prasasti Bali I.

Mengenai prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta yang ditemukan di daerah tersebut di atas, kedua sarjana itu membedakan atas dua golongan, yaitu yang bersifat ke Budhaan (Budhistis) dan yang bukan Budhistis. Di antara yang Budhistis, ada yang memuat mantra yang sangat terkenal dalam agama Budha yakni yang disebut : "**ye te mantra**". Mantra-mantra tersebut dituliskan pada tablet-tablet tanah liat yang disimpan di dalam stupika dari tanah liat pula.

Pada bagian ini kami tidak banyak berbicara mengenai prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta itu. Hal itu akan kita bicarakan lagi nanti pada bagian pembicaraan mengenai agama dan kepercayaan[1]. Penguraian yang hendak kami tekankan di sini ialah bahwasanya di antara prasasti-prasasti itu tidak ada yang memuat angka tahun yang memberi kepastian bagi kita mengenai kapan pulau Bali memasuki zaman sejarahnya. Hanya terutama berdasarkan persamaan persamaan bunyi "**ye te mantra**" yang terdapat di Pejeng dengan yang terdapat di atas pintu candi Kalasan, dapat dikatakan bahwa prasasti yang terdapat pada tablet-tablet tanah liat ini juga berasal dari kira-kira abad ke 8 Masehi. Tetapi untuk sebagiannya perkiraan dari segi palaeografis, bahkan ada di antara prasasti berbahasa Sanskerta tersebut rupa-rupanya berasal dari abad ke 9 Masehi.[2]

Prasasti tertua yang berangka tahun, yang telah ditemukan sampai dewasa ini ialah prasasti yang terdapat/tersimpan di desa Sukawana berangka tahun çaka 804 (982 M)[3]. Prasasti ini berbaha-

sa Bali Kuna dimulai dengan perkataan "**Yumu pakatahu**". Sangat disayangkan bahwa tidak terdapat nama raja disebutkan dalam prasasti itu. Dikatakan bahwa prasasti tersebut dikeluarkan atau diturunkan di "**panglapuan Singhamandawa**". Sampai dewasa ini **panglapuan** diartikan semacam peradilan atau tempat pelapuran mengenai masalah-masalah penting dalam lingkungan kerajaan. Ada enam buah prasasti lainnya yang juga berbahasa Bali Kuna dikeluarkan di panglapuan tersebut di atas. Juga dari padanya kita belum mengetahui nama atau gelar seorang raja. Prasasti-prasasti termaksud ialah prasasti-prasasti no. 002 Bebetin AI (çaka 818), 003 Trunyan AI (çaka 833), 004 Trunyan B, (çaka 833), 005 Bangli (Pura Kehen A (çaka –), 006 Gobleg, Pura Desa I (çaka 836), 007 Angsari A (çaka –)[4].

Kita kembali kepada soal pertumbuhan negara-negara khususnya yang terjadi pada zaman Bali Kuna. Dari uraian singkat di atas, jelaslah bagi kita, bahwa sangat tidak mungkin kita dapat berbicara mengenai hal tersebut. Demikian pula kita akan menyimpang apabila kita menduga bahwa setelah munculnya nama raja-raja dalam prasasti yang merupakan bukti jelas tentang adanya sesuatu negara, kita akan dapat menarik garis yang jelas mengenai pertumbuhan kerajaan pada zaman Bali Kuna. Dari prasasti-prasasti yang kami periksa kami belum mendapatkan data yang cukup, untuk sanggup melukiśkan masalah pertumbuhan atau kembang kuncupnya kerajaan Bali Kuna. Akibatnya apa yang kami terakan di bawah ini pada galibnya hanyalah merupakan susunan tertib secara kronologis nama raja-raja yang pernah memerintah di Bali pada zaman Bali Kuna. Dengan suatu catatan pula bahwa jumlah nama raja-raja yang kami urutkan sebagai berikut ini bukanlah merupakan jumlah yang mutlak. Sewaktu-waktu akan dapat berubah sesuai adanya penemuan-penemuan baru.

Demikianlah berdasarkan atas pembacaan prasasti-prasasti yang telah ditemukan sampai dewasa ini, dapatlah diurutkan nama-nama raja sebagai berikut :

1. Çri Kesari Warmadewa (Çaka 835).

Sampai dewasa ini telah ditemukan tiga buah prasasti yang berasal dari baginda, yaitu prasasti-prasasti : 5

005 b Blanjong, Sanur (nomor lama 103),
005 c Panembahan,
005 d Malat Gede (çaka 835).

Dari prasasti Blanjong kita dapat mengetahui bahwa Kesari Warmadewa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di Gurun dan Di Swal. Di mana lokasi Gurun dan Swal belumlah dapat

diketahui dengan pasti. Dr. R. Goris memperkirakan bahwa kedua tempat itu terletak di luar pulau Bali dan dengan Gurun mungkin dimaksudkan pulau Lombok.[6] Oleh karena tugu Blanjong memberitakan soal kemenangan raja, maka sering pula tugu tersebut mendapat predikat sebagai "**jayacihna**" atau "**jaya stambha**". Kedua prasasti lainnya juga menyebutkan kemenangan Cri Kesari terhadap musuh-musuhnya. Prasasti-prasasti yang tersebut belakangan ditemukan di daerah pedalaman pulau Bali sedangkan Blanjong terletak di pesisir pantai. Atas dasar kenyataan itu kiranya boleh kita menduga bahwa prasasti Blanjong merupakan berita mengenai kemenangan Kesari terhadap musuh-musuhnya yang terletak di daerah pantai ataupun diseberang pulau Bali, sedangkan yang di Penempahan dan Malet Gede merupakan jayacihna kemenangan baginda atas musuh-musuhnya di daerah pedalaman pulau Bali.

Perlu dicatat pula bahwa sepanjang yang sudah kita ketahui bagindalah raja pertama mempergunakan kata: Warmmadewa dalam gelarnya. Kemudian dari padanya kita akan mengetahui pula ada beberapa raja lain yang juga mempergunakan bagian gelar: Warmmadewa. Oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa Cri Kesari Warmmadewa adalah "**wamçakara**" dari dinasti Warmmadewa.

2. Sang Ratu Çri Ugrasena.

Prasasti-prasasti yang berasal dari raja ini ialah prasasti-prasasti nomor:[7]

101	Srokadan A	(Çaka 837)
102	Babahan I	(Çaka 839)
104	Sembiran AI	(Çaka 844)
105	Pengotan AI	(Çaka 846)
106	Batunya AI	(Çaka 855)
107	Dausa AI	(Çaka 857)
108	Serai AI	(Çaka 888)
109	Dausa BI	(Çaka 864)
110	Gobleg, Pura Batur A	(Çaka–)

Semua prasasti di atas berbahasa Bali Kuna dan dimulai dengan perkataan yumu pakatahu. Prasasti-prasasti yang demikian menurut Goris dimasukkan ke dalam type yumu pakatahu. Pada bagian akhir prasasti-prasasti itu juga disebut tempat dikeluarkannya yaitu di panglapuan Singhamandawa.

Sangat menarik perhatian kita ialah keterangan yang terdapat dalam prasasti nomer 102 Babahan I. Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa raja Ugrasena mengadakan perjalanan ke Bu-

wunan: **"tatkala sang ratu çri ugrasena, tua lumaku ka buwunan** ....." (102. Ib.1).[8]

3. Sang Ratu Çri Haji Tabanendra Warmmadewa dan Sang Ratu Luhur Cri Subhadrika Dharmmadewi (Çaka 877 - 889).

Prasasti-prasasti dari raja ini ialah prasasti-prasasti nomer:[9]

202 - 204 Manik Liu AI, BI, dan Ç (Caka 877)

206 - 207 Kintamani A dan B (Çaka 889)

Prasasti-prasasti itu semuanya berbahasa Bali kuna, tergolong tipe "I Çaka" sebab prasasti-prasasti ini dimulai dengan perkataan "I Çaka".[10]

Kedua pribadi sejarah tersebut merupakan pasangan suami-istri. Melihat dilekatkannya kata: "Warmmadewa" dalam gelar sang raja, dapat diketahui bahwa baginda adalah tergolong ke turunan (dinasti) Warmmadewa.

Dalam prasasti-prasastinya tidak disebut lagi nama panglapuan Singhamandawa. Apa sebabnya demikian, belumlah diketahui dengan pasti.

4. Jayasingha Warmmadewa (Çaka 882).

Baru sesudah prasasti yang diketemukan mengenai raja ini yaitu prasasti nomer 205 Manukaya (Çaka 882).[11]

Isi terpenting prasasti termaktub ialah tentang pembuatan telaga kembar yang dalam prasasti disebut dengan nama: Tirtha di Air Hampul.[12] Adapun yang dimaksud kata di atas tentulah telaga tirtha Empul sekarang yang terletak di Tampaksiring.

Telaga ini sampai saat ini masih dianggap suci, terutama bagi "sekeha barong" di daerah Gianyar. Setiap tahun sekali diadakan odalan khusus, yang bersamaan dengan hari di atas, prasasti batu tersebut diarak ke Tirtha Empul untuk disucikan.

5. Janasadhu Warmmadewa (Çaka 897)

Bersamaan halnya dengan raja Jayasingha Warmmadewa prasasti yang dikeluarkan oleh raja inipun baru sebuah yang diketemukan prasasti yang dikeluarkan raja ini ialah prasasti nomer 209 Sembira A II (Çaka 897).[13]

Gelar lengkap sang raja berbunyi: **"Sang Ratu Çri Janasadhu Warmmadewa"**. Seperti prasasti yang telah disebutkan di muka, prasasti nomer 209 Sembiran A II inipun masih tetap berbahasa Bali Kuna.

Pokok isi prasasti tersebut ialah ketetapan-ketetapan mengenai desa Julah. Di dalamnya disebutkan pula bahwa apabila ada kerusakan-kerusakan pada kuil-kuil, perkebunan, pancuran, prasada dan sebagainya yang terletak di wilayah desa Julah, desa Julah

Indrapura, Buwun Dalem dan Hiliran penduduk desa berkewajiban memperbaikinya.

6. Çri Maharaja Çri Wijaya Mahadewi (Çaka 905).

Prasasti nomer 210 Gobleg, Pura Desa II (Çaka 905)[14] adalah satu-satunya prasasti baginda yang sudah diketemukan. Dalam prasasti ini terdapat phrase yang berbunyi: ..... **masuruhang paduka**nda siwyan dini di bali ....." Hal ini memberikan petunjuk bahwa ratu ini berasal dari luar Bali. Mengenai asal-usul raja ini terdapat dua pendapat yang berbeda di antara dua orang sarjana arkeologi. Dr.P.V.van Stein Callenfels mengatakan baginda raja berasal dari Sumatra (kerajaan Çri Wijaya). Sedangkan L.C. Damais menduga baginda berasal dari Jawa Timur dan putri Mpu Sindok yang bergelar Çri Içanatunggawijaya.[15]

Kemungkinan pendapat L.C.Damais lebih dapat kita terima, sebab kenyataannya jabatan-jabatan seperti Wadihati dan Makudur serta Pangkaja khas Jawa

7. Gunapriya Dharmmapatni dan Dharma Udayana Warmmadewa (Çaka 911 - 923, Çaka 929, Çaka 933).

Prasasti-prasasti raja zaman ini yang sekaligus merupakan sumber penyusunan raja suami istri ini adalah prasasti-prasasti nomer :[16]

301. Bebetin AII (Çaka 911)
302. Seraii AII (Çaka 915)
303. Buahan A (Çaka 916)
304. Sading A (Çaka 923)
305a. Bekasih, Pura Batu Madeg (Çaka 1393).

Prasasti ini disebut Mpu Bradah dan di dalamnya disebutkan sebuah prasasti lebih tua dengan candra sangkala:" nawa sanga apit lawang" (Çaka 929).

305b. Ujung, Pura Dalem (Çaka 932)
305c. Abang, Pura Batur A (Çaka 933).

Perlu diperhatikan bahwa pada zaman inilah mulai kita dapati dipergunakannya bahasa Jawa Kuno dalam prasasti-prasasti di Bali. Demikianlah di antara prasasti-prasasti tersebut di atas yang sudah berbahasa Jawa Kuno, ialah nomer-nomer: 303, 305a, 305b, dan 305c. Sedangkan yang lainnya masih tetap berbahasa Bali Kuna.

Hal lain yang juga cukup mengesankan ialah bahwasanya dalam prasasti-prasastinya selamanya gelar istrinya disebutkan lebih dahulu dari pada gelar Udayana sendiri. Mengingat hal tersebut di atas, dan juga mulai terpakainya bahasa Jawa Kuna dalam prasasti-prasastinya memberi petunjuk kepada kita bahwa Mahendradata

atau Gunapriya Dharmmapatni yang berasal dari Jawa Timur ini memegang peranan yang lebih penting dari pada suaminya.

Mereka mempunyai tiga orang putra, yang tertua ialah Erlangga seorang tokoh sejarah yang mempunyai nama gemilang di Jawa Timur. Bagindalah yang sanggup mempersatukan kembali wilayah kerajaan Mataram Kuna yang bercerai berai, akibat serangan raja Wura-wuri berhasil menewaskan raja Dharmmawangça. Putra ke dua dan ketiga dari raja suami istri di atas ialah Marakata dan anak Wungçu yang kelak juga menjadi raja di Bali.

Gunapriya Dharmmapatni mangkat kira-kira antara tahun Çaka 923-933 dan dicandikan di Burwan. Kemungkinan besar arca Durgamahesasuramardini di pura Bukit Darma di Kutri (Gianyar) adalah arca perwujudan baginda. [17] Sedangkan Udayana setelah mangkat disebut: Bhatara lumah i Banu Wka. Belumlah dapat dipastikan di mana letak Banu Wka itu.

8. Çri Sang Ajnadewi (Çaka 938).

Prasasti nomor 351 Sembiran A III (Çaka 938)[18] adalah satu-satunya prasasti dari baginda yang telah ditemukan. Prasasti tersebut berbahasa Bali Kuna dan oleh Goris digolongkan ke dalam "tipe punah". Kecuali prasasti nomor 438 Klungkung C (Çaka 994) dari zaman Anak Wungçu, prasasti ratu inilah merupakan kan prasasti terakhir yang berbahasa Bali Kuna.

Pada gelarnya ternyata tidak terpakai kata Warmmadewa. Apakah dengan demikian kita boleh mengatakan bahwa baginda itu bukan keturunan dinasti Warmmadewa? Bagaimanapun juga belumlah dapat kita pastikan.

9. Marakata (Çaka 944 - 948)

Gelar baginda selengkapnya seperti yang terbaca pada prasasti nomor 352 batuan, lembaran Ib.3. berbunyi: Paduka Haji Cri Dharmmawangcawardhana Marakatapangkajasthanottunggadewa.[19]

Prasasti-prasasti lainnya yang juga menyebut nama baginda ialah prasasti nomor :[20]

353a. Sembiran A I (Çaka 945).
353b. Tengkulak A (Çaka 945).
355 Buwahan B (Çaka 947).

Pada mulanya Stutterheim menduga raja Marakata sama dengan Airlangga. Dugaan tersebut didasarkan atas tahun pemerintahannya atau tahun-tahun terbitnya prasasti yang hampir bersamaan di Jawa dan di Bali. Tetapi kemudian dengan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut Dr.R. Goris berhasil mengetahui bahwa Marakata yang memerintah di Bali adalah lain dengan Airlangga yang memerintah di Jawa Timur. Bahkan diketahuinya bahwa

baginda bersaudara kandung

Marakata mangkat antara tahun Çaka 948-971. Sebagai raja baginda digantikan oleh Anak Wungçu yang mengeluarkan prasasti pertama pada caka 971. Setelah mangkat Marakata mendapat sebutan "Sang lumah ing Camara".[21] Amat disayangkan sampai sekarang kita belum mengetahui di mana lokasi Camara

10. Anak Wungcu (Caka 971 - 999).

Pada prasasti 402 Trunyan AII (Caka 971) terdapat kalimat antara lain berbunyi ".....**Paduka Haji Anak Wungçu nira kalih Bhatari sang lumah i Burwan, mwang bhatara dewata sang lumah ring Banu Wka**....."[22]. Jadi jelaslah baginda adalah putra raja suami istri Udayana dan Gunapriyadharmmapatni.

Gelar baginda semacam itu terbaca pula pada prasasti-prasasti nomor :[23]

403 Bebetin A III (Çaka 972)
404a. Dawan A II (Çaka 975)
404b. Sukawana A II (Çaka 976)
405. Batunya A II (Çaka 977)
406. Sangsit A – Blantih A (Çaka 980)
407. Dausa A II (Çaka 983)
408. Sawan B – Bebetin B (Çaka 897)
409. Sembiran A IV (Çaka 987)
410. Serai AII (Çaka 989)
431. Pengotan A II (Çaka 991)
433. Manik Liu A II (Çaka –)
434. Manik Liu B II (Çaka –)
436. Pandak Bandung (Çaka 993)
438. Klungkung C (Çaka 994)
439. Klungkung A (Çaka 994)
440. Klungkung B (Çaka 994)
441. Sawan A II–Bile A II (Çaka 995)
446. (Y.1) (Çaka 999).

Di samping itu ada lagi beberapa prasasti yang juga berasal dari zaman pemerintahan baginda yaitu prasasti nomor 401, 411, 432, 435, 437, 442, 443, 444, 445.[24]

Dari beberapa prasasti tersebut di atas kita mengetahui adanya kasta-kasta pada zaman Anak Wungçu yaitu kasta Brahmana Ksatriya, Waiçya, Sudra dan golongan budak belian. Lebih lanjut dijelaskan, beliau adalah penjelmaan Wisnu (Saksat Wisnu Murti).

Beliau adalah saudara terkecil dari tiga bersaudara yaitu Airlangga, Marakata, Anak Wungçu yang ketiga-tiganya putra raja suami istri Udayana dan Gunapriyadharmmapatni.

1. Çri Maharaja Çri Walaprabhu (Çaka 1001–1010).

Kita mempunyai tiga buah prasasti dari raja ini yaitu nomor: 25

501a. Babi A (Çaka–)
501b. Klandis (Çaka–)
501c. Babahan (Çaka–)

Dalam prasastinya baginda juga disebut "Çri Maharaja Wisnumurti saksat jagat palaka". Hal itu kiranya bukanlah berarti bahwa baginda sebagai seorang Waishawa. Tetapi lebih cendrung didasari oleh suatu pengertian bahwa antara Wisnu dan raja terdapat keserupaan fungsi, yaitu dalam arti wisnu berfungsi sebagai pelindung dunia beserta segala isinya sedang raja berkewajiban melindungi negara beserta rakyatnya.

12. Sakalindu Kirana (Çaka 1010 - 1023).

Sumber keterangan mengenai ratu ini ialah prasasti-prasasti yang bernomor: [26]

502 Pengotan B I (Çaka 1010)
505 Sawan C = Belantih C (Çaka 1020)
506 Pengotan B II (Çaka 1023)

Gelar lengkap ratu ini berbunyi: "... Paduka Çri Maharaja Çri Sakalendu Kirana Icana Gunadharmma Laksmidhara Wijaya Uttunggadewi". Gelar-gelar ini kita dapati pada prasasti-prasasti nomor 502 -dan 506.

Melalui bagian gelar-gelar di atas seperti: Icana, Uttunga, Gunadharmma serta Wijaya kemungkinan tokoh ini hendak memperlihatkan dirinya mengaku ada hubungan keturunan, masing-masing dengan raja Sindok di Jawa Timur, Gunapriyadharmmapatni (ibu Airlangga) dan dengan raja-raja kerajaan Çri Wijaya di Sumatra.

13. Çri Maharaja Cri Curadhipa (Çaka 1037–1041)

Raja ini kita ketahui dari dua buah prasasti yang dikeluarkannya yaitu prasasti nomer 507 Gobleg, Pura Desa III (Çaka 1037 dan 508 Angsari B (Çaka 1041)[27]. Menurut Dr. R. Goris kemungkinan pula prasasti nomer 509 dan 510 berasal dari Cri Curadhipa.[28]

Pada prasasti nomer 507 dijelaskan mengenai Air Tabar, karaman Indrapura serta Bhatara Bukit Tunggal. Sedangkan prasasti nomer 508 memuat ketetapan tentang patapan Sukhamrta yang terletak di desa Lutungan.

14. Çri Maharaja Cri Jayacakti (Çaka 1053 – 1072).

Gelar baginda terbaca pada lima buah prasasti yang telah diketemukan yaitu pada prasasti-prasasti nomer :[29]

551a	Manik Liu D = Lambean A	(Çaka 1055)
554	Bwahan C	(Çaka 1068)
556a	Prasi A	(Çaka 1070)
556b	Campetan	(Çaka 1071)
557	Sading B	(Çaka 1072)

Disamping itu prasasti-prasasti nomer 551b, 552, 553, 555, 558, 559, 560 dan 561, menurut Dr. R. Goris juga berasal dari zaman pemerintahan baginda.[30]

Seperti halnya prasasti-prasasti raja-raja lainnya, prasasti-prasasti raja Jayacakti di atas tidak mungkin dapat kami bicarakan isinya masing-masing, mengingat waktu yang tersedia untuk mengerjakannya jauh dari memungkinkan. Namun secara selayang dapat kami sampaikan bahwa menilik isi prasasti-prasasti tersebut kita mendapatkan kesan bahwa baginda telah melakukan usaha melaksanakan mengendalikan roda pemerintahan dengan teratur.

Pada beberapa prasastinya baginda disinggung dengan kata pujian yang berbunyi : **"kadi sira prabhu saksat hari murtti"** (sebagai raja baginda semata-mata merupakan perwujudan dari dewa Hari (Wisnu). Ketika baginda memerintah di Bali, di Kediri (Jawa Timur memerintahlah raja Jayabhaya (1135–1157 Masehi).

15. Cri Maharaja Cri Ragajaya (Çaka 1077)

Baru sebuah prasasti dari baginda yang kita ketemukan yaitu prasasti nomer 571 Tejakula (Çaka 1077)[31]. Isi terpenting prasasti ini menguraikan penunjukan desa Sabaya oleh Çri Maharaja Çri Ragajaya untuk mengerjakan **"jataka"** (laba pura) menjadikan sebuah bangunan suci Bhatara di Kunjarasana. Lebih lanjut dalam prasasti itu dijelaskan sebagai imbalannya penduduk desa diberikan keringanan-keringanan di samping kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

16. Cri Maharaja Haji Jayapangus (Çaka 1099–1103)[32]

Dr. R. Goris menilai raja ini termasuk raja Bali Kuna yang termasyhur di samping Ugrasena dan Udayana yang telah kita bicarakan di muka.[33] Pada prasasti-prasastinya dijelaskan bahwa baginda mengeluarkan prasastinya bersama-sama dengan kedua permaisurinya. Jayapangus menyatakan dirinya sebagai maharaja yang berkuasa di seluruh wilayah pulau Bali : **".....pinaka ta patraning bhuwana satungkeb balidwipa mandala."**[34]

Di antara raja-raja yang pernah memerintah di Bali, prasasti dari raja inilah yang paling banyak diketemukan. Sampai sekarang kurang lebih 43 buah prasasti telah dikeluarkan raja Jayapangus,

selama beliau memerintah Bali. Kebanyakan angka tahun prasasti itu dikeluarkan bersamaan yaitu tahun 1103 Çaka, dengan tithi, hari pasaran dan wuku yang sama pula. Dengan kata lain prasasti itu diterbitkan dalam waktu sehari. Hanya sebuah saja di antaranya bertanggal dan bertahun berbeda yaitu Çaka 1099 (prasasti Mantring A).[35]

Mengenai kumpulan prasasti-prasasti yang dikeluarkan raja Jayapangus telah disinggung oleh Dr. R. Goris dalam bukunya yang berjudul Prasasti Bali I dan II. Pada buku-buku tersebut beliau mengelompokkannya ke dalam kelompok 6 (**6A, 6B, 6C**)[36]

17. Çri Maharaja Haji Ekajaya Lancana dan Çri Maharaja Çri Arjarya Deng Jaya (Çaka 1122).

Prasasti-prasasti raja ini ialah prasasti nomer 703 Kintamani E dan 704 Kintamani F yang keduanya berangka tahun Çaka 1122 yang dianugrahkan kepada karaman Çintamani.[37] Dari prasasti di atas kita mengetahui bahwa perhubungan baginda adalah antara anak dengan ibunya. Çukup menarik pula di sini karena keduanya yaitu sang putra dan ibunya sama-sama memakai gelar Maharaja.

18. Çri Adikuntiketana (Bhatara Guru I).

Prasasti nomer 705 Bangli, Pura Kehen C (Çaka 1126) adalah satu-satunya prasasti yang telah diketemukan memuat gelar Bhatara Guru Çri Adikunti ketana.[38] Lebih lanjut pada prasasti tersebut disebutkan beberapa nama lainnya yang belum jelas bagaimana hubungan kekeluargaannya. Adapun nama dimaksud adalah Bhatara Parameçwara Çri Wirama, Çri Dhanadhirajalancana dengan permaisurinya Paduka Bhatara Çri Dhanadewiketu.

19. Bhatara Parameçwara Çri Hyang ning Hyang Adidewalancana (Çaka 1182).

Seperti halnya beberapa raja-raja lainnya untuk raja ini pun juga baru sebuah prasasti diketemukan yaitu prasasti nomer 706 Bulian B (Çaka 1182). Karaman yang dianugrahi prasasti tersebut ialah karaman i Bulihan.[39]

20. Bhatara Çri Mahaguru (Bhatara Guru II) Çaka 1246–1250

Prasasti-prasasti yang dikeluarkan antara tahun 1246–1250 Çaka memuat beberapa gelar raja yang belum jelas hubungan kekeluargaannya. Pada prasasti 803 Hyang Putih (bulan Çrawana Çaka 1246) menyebutkan Paduka Bhatara Guru memerintah bersama-sama cucunya yaitu Paduka Haji Tarunajaya.[40]

Pada prasasti nomer 804 Çampaga (Asuji Çaka 1246) kita dapatkan gelar raja berbunyi : "..... **paduka cri mahaguru**.....[41]" Tahun kemudian pada prasasti nomer 806 Tumbu (?) terdapat gelar

raja yang mengeluarkannya atas nama raja yang bergelar **"Çri Maharaja Çri Bhatara Mahaguru Dharmattungga Warmmadewa.**[42]

Akhirnya pada prasasti nomer 807 Salumbung (Çaka 1250), kembali kita dapat baca pasangan raja dengan ibunya. Baginda itu ialah : "paduka bhatara Çri mahaguru dan paduka bhatara Çri walajaya krttaningrat"[43]. Baginda-baginda tersebut menganugrahkan prasasti ini kepada karaman i Salumbung.

Perlu dicatat pula bahwa sampai dewasa ini masih terdapat masa kosong selama 64 tahun yang mengawali penggantian raja-raja agak mengacaukan ini, yaitu antara tahun çaka 1182 (prasasti dari raja Adidewalancana) dan tahun çaka 1246 (prasasti atas nama Bhatara Guru dan cucunya Tarunajaya). Di antara tahun-tahun itu kita belum mengetahui nama seorang raja mengeluarkan prasasti. Hanya pada tahun Çaka 1218 dan 1222 terbit dua buah prasasti atas nama raja patih Kebo Parud.[44] Pangkat-pangkat atau jabatan-jabatan tinggi kerajaan yang disebutkan jelas bercorak Jawa. Besar kemungkinan hal ini ada hubungannya dengan penaklukan pulau Bali oleh Kartanagara dari kerajaan Singasari pada tahun Çaka 1206.

21. Bhatara Çri Astasura Ratna Bumi Banten (Çaka 1259)

Gelar baginda dapat kita baca pada prasasti nomer 811 Langgahan (Çaka 1259).[45] Prasasti ini menguraikan beberapa hal berkenaan dengan patapan Langgahan. Di samping itu pada bagian belakang sebuah arca yang disimpan di pura Tegeh Koripan terdapat tulisan antara lain berbunyi : .....(...) **stasura ratna bumi banta** ....."[46]

Çri Astasura adalah raja Bali Kuna terakhir yang kita ketahui sampai dewasa ini. Enam tahun kemudian yaitu pada Çaka 1265 tentara Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada datang menyerang pulau Bali.[47] Akhirnya dengan ditaklukkannya pulau Bali oleh Majapahit timbullah kerajaan Samprangan yang mendapat pengaruh kuat dari kerajaan Majapahit. Lebih-lebih dengan terdesaknya Majapahit oleh agama Islam di Jawa penduduk Majapahit yang tidak mau menganut agama Islam mengasingkan dirinya ke daerah pegunungan dan beberapa di antaranya lari ke pulau Bali dengan segala pusaka yang dimilikinya sementara Bali menuju zaman barunya di sekitar tahun 1500 Masehi.

3.1.2. Perkembangan.

Berdasarkan atas judul pasal ini seharusnya uraian pada bagian ini akan sanggup memberikan gambaran mengenai bagaimana perkembangan atau kemajuan pasang surut kekuasaan raja-raja Bali Kuna sejak permulaan sampai akhir periodenya. Dengan kata lain

seharusnya sanggup memberikan keterangan pada pemerintahan raja manakah terjadi garis perkembangan yang menanjak, bahkan sampai kepada titik zaman keemasannya atau sebaliknya.

Dalam membicarakan hal di atas terus terang kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami belum menemukan data-data yang benar-benar autentik dapat dipergunakan sebagai sandaran memberikan gambaran perkembangan kenegaraan kerajaan Bali pada zaman kuna. Hanya didasarkan pendapat Dr. R. Goris di antara raja-raja yang telah disebutkan pada angka 3.1.1. di depan raja-raja seperti Ugrasena, raja suami istri Udayana– Gunapriyadarmapatni dan Jayapangus dapat kita anggap sebagai jaman menanjaknya kerajaan Bali.[48]

Mengenai ketenaran raja Jayapangus kami tambahkan dengan faktor-faktor jumlah prasastinya yang sedemikian banyak (tidak kurang 43 buah), serta pengakuan baginda sebagai maharaja yang bagaikan pelindung seluruh wilayah pulau Bali, dapat dipakai penunjang untuk memandang Jayapangus seorang pribadi sejarah yang termasyhur.

Demikian pula raja Anak Wungçu dengan 29 buah prasastinya dan dari 13 buah prasastinya yang telah ditemukan, kiranya dapat dipandang sebagai tokoh raja yangcukup menonjol di antara beberapa tokoh raja lainnya.

3.1.3. Kepemimpinan.

Sebagai pucuk pemerintahan pada jaman Bali Kuna adalah raja atau ratu dalam prasasti-prasasti ada yang berpredikat haji, atau maharaja. Di antara raja-raja tersebut, ada yang memerintah atau mengeluarkan prasasti-prasastinya, bersama-sama dengan permaisurinya. Di sini dapat kita sebutkan umpamanya: Tabanendra Warmmadewa, dengan permaisurinya Subhadrika Dharmmadewi, Jayapangus dengan kedua permaisurinya. Pada masa pemerintahan raja-raja suami istri di atas kadang-kadang kita menemukan nama Sang ratu disebutkan pada permulaannya. Umpamanya pada masa pemerintahan raja Udayana–Gunapriyadharmmapatni pada prasasti-prasasti yang dikeluarkan baginda berdua selalu nama Gunapriyadharmmapatni lebih didahulukan. Hal ini kemungkinan membuktikan bahwa kekuasaan sang ratu lebih besar dibandingkan sang raja.

Adapun para ratu yang memerintah tanpa disertai oleh suaminya antara lain : Çri Maharaja Çri Wijaya Mahadewi, Çri Sang Ajnadewi, dan Sakalendukirana. Di samping itu kita ketahui pula raja Ekajayalancana mengeluarkan prasastinya bersama-sama dengan ibunya yaitu Çri Arjarya Deng jaya, dan Bhatara Çri Mahagu-

ru (Bhatara Guru II) memerintah bersama cucunya, yakni Tarunajaya.

Masalah-masalah penting lainnya seperti terlihat pada prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja dapat diketahui bahwa pucuk pemerintahan dibantu oleh semacam dewan atau badan yang oleh Goris disebut : Badan penasehat pusat. Badan penasehat pusat itu dikenal dengan beberapa istilah dalam prasasti-prasasti sebelum tahun 1001 Masehi (Caka 923) dinamakan : **panglapuan, samohanda senopati di panglapuan, pasamaksa,** atau **palapknan.**[49]

Sejak tahun 1001 Masehi masa pemerintahan Udayana dan Gunapryadharmmapatni badan itu disebut **pakira kiran i jro makabaihan.**

Badan tersebut beranggotakan :[50]

1. Sejumlah senopati.
2. Sejumlah pendeta Çiwa dan pendeta Budha.

Pada jaman-jaman lebih kemudian seperti terbaca pada prasasti-prasasti raja Jayapangus dapat kita ketahui bahwa "**pakira kiran i jro makabaihan**" beranggotakan :[51]

1. Sejumlah senapati.
2. Sejumlah samgat.
3. Sejumlah pendeta Çiwa dan pendeta Budha.

Untuk mengetahui masing-masing kelompok yang ada pada jaman Bali Kuna, tentulah kita harus memeriksa semua prasasti-prasasti yang ada. Hal ini tidak mungkin dapat kita lakukan karena adanya beberapa kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain tidak lengkapnya transkripsi prasasti-prasasti yang sudah pernah dibaca lebih-lebih hanya disediakan waktu yang relatif amat singkat.

Oleh Dr. R. Goris telah dicatat beberapa nama-nama senapati yang telah terkumpulkan seperti :[52]

1. Senapati Wrsabha (Wrsanten)
2. Senapati Pancakala
3. Senapati Tira
4. Senapati Waranasi
5. Senapati Danda (Waci)
6. Senapati Wwit
7. Senapati Byut
8. Senapati Balabaksa
9. Senapati Balembunut (Dalembunut)
10. Senapati Dinganga
11. Senapati Kuturan
12. Senapati Maniringin
13. Senapati Pinatih

14. Senapati Sarbwa
15. Senapati Tunggalan

Jumlah di atas belum pernah kami ketemukan disebutkan seluruhnya pada jaman pemerintahan seorang raja.

Sebagai contoh dapat kami sebutkan di sini pada jaman pemerintahan Marakata (Çaka 944–947) kita mengetahui delapan jabatan **senapati** yaitu **senapati Maniringin, Kuturan, Balembunut, Dinganga, Tunggalan, Pinatih, Danda** dan **Senapati Asba.**[53]

Dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan Anak Wungçu (Çaka 971–999) kita dapat ketahui 10 jabatan **senapati** yaitu **Senapati Pancakala, Tira, Wwit, Byut** dan **Balebaksa** saja yang tidak ada.[54] Dari prasasti-prasasti Jayasakti kita mengetahui 7 (tujuh) **senapati** yaitu **Senapati Kuturan, Senapati Sarbwa, Senapati Waranaçi, Senapati Danda, Senapati Dinganga, Senapati Wrsanten,** dan **Senapati Maniringin.**[55]

Jadi jumlahnya dalam jaman Jayapangus menjadi delapan lagi yaitu jabatan-jabatan senapati yang dikenal dari prasasti-prasasti Jayacakti ditambah dengan satu jabatan Senapati lagi yakni Senapati Balembunut.[56] Di sini kami tambahkan pula sedikit keterangan dari Dr. R. Goris yang mengatakan bahwa kedudukan senapati itu bolehlah dibandingkan dengan kedudukan para penggawa pada jaman kerajaan Gelgel ataupun Klungkung yakni di daerahnya sendiri beliau berkuasa juga dalam bidang kehakiman serta mempunyai "**panglapuan**" sendiri-sendiri dan juga berfungsi sebagai hulubalang.[57]

Mengenai kelompok samgat Dr. R. Goris tidak menyinggungnya. Berdasarkan atas pemeriksaan kami terhadap prasasti-prasasti yang dikeluarkannya, pada jaman Jayapangus terdapat tujuh jabatan samgat yang dapat digolongkan pada bagian ini Yaitu :[58]

1. Samgat Manuratang ajna i hulu.
2. Samgat Manuratang ajna i tngah
3. Samgat Manuratang ajna iwuntat
4. Samgat çaksu karana pura
5. Samgat çaksu karana kranta
6. Samgat manumbul
7. Samgat pituha.

Keadaan yang sama kita ketahui pula dari pemeriksaan prasasti-prasasti raja Jayacakti dan prasasti atas nama raja Ragajaya. Namun demikian apa tugas kewajiban samgat-samgat tersebut tidaklah dapat diketahui dengan jelas seluruhnya. Hanya yang tiga bagian permulaan agak jelas dapat kami mengartikan tugasnya. Beliau-beliau itulah rupanya merupakan pejabat-pejabat ahli yang bertugas menuliskan perintah raja. **Manuratang berarti menuliskan**

dan ajna (kata sangskerta) berarti perintah. Sangat merupakan akronim dari **sang pamgat** yang berarti **sang pemutus**, yaitu seorang pejabat ahli yang mahir dalam bidangnya.

Tibalah kini pada pembicaraan mengenai kelompok pendeta Çiwa dan pendeta Budha. Beliau-beliau itu juga tergabung dalam "Badan penasehat pusat" yang telah kita singgung di muka. Mengenai hal ini Dr. R. Goris tidak menguraikan selengkapnya, tetapi dikatakan bahwa untuk pendeta Kaçewan dicatat nama-nama mpungku yang berdiam di :[59]

1. Banu Garuda
2. Air Gajah
3. Antakunjarapada atau Ratnakunjara
4. Binor
5. Dharmma Hanar
6. Haritanten
7. Kanyabhawana
8. Kusumadanta
9. Lokeçwara
10. Suryamandala
11. Udayalaya
12. Dan lain-lain.

Adapun yang tergolong ke dalam Kasogatan disebutkan beliau-beliau di :[60]

1. Bajraçikara
2. Badaha
3. Wihara bahung
4. Buruan
5. Çanggini
6. Dharmarya
7. Kuçala
8. Kutihanar
9. Lwa Gajah
10. Nalanda
11. Waranasi
12. Dan lain-lain.

Seperti halnya para senapati tersebut di depan, dari hasil pemeriksaan prasasti sepanjang yang telah kami ketemukan sampai dewasa ini belum pernah pula kami ketemukan secara keseluruhannya disebutkan dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja. Untuk sekedar bahan perbandingan kami sampaikan data sebagai tertera di bawah ini. Pada jaman pemerintahan Jayapangus umpamanya kita hanya membaca jabatan mpungku dan sebuah jabatan samgat di kaçewan yaitu :[61]

1. Mpungkwing Hyang Padang
2. Mpungkwing Dharmma Hanar
3. Mpungkwing Makarun
4. Mpungkwing Pasabhan
5. Mpungkwing Binor
6. Mpungkwing Banu Garuda
7. Samgat Juru Wadwa.

Demikian pula dari golongan kasogatan kita mengetahui enam jabatan mpungku dan sebuah jabatan samgat. Jabatan-jabatan tersebut ialah :[62]

1. Mpungkwing Kutihanar
2. Mpungkwing Bajraçikhara
3. Mpungkwing Kadhikaran
4. Mpungkwing Raganagara
5. Mpungkwing Purwanagara
6. Mpungkwing Nalanja
7. Samgat mangire-ngiren wandami

Para **senapati, samgat** dan para pendeta dari golongan **kaçewan** dan **kasogatan** apabila tergabung dalam suatu persidangan merupakan "Badan penasehat pusat" yang secara relatif juga mendapat kesempatan memberi pertimbangan kepada pucuk pemerintahan untuk merundingkan berkenaan dengan kebijaksanaan pemerintah yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi beliau-beliau itu juga sekaligus merupakan pejabat-pejabat tingkat pusat kerajaan.

3.1.4. Perrgaturan

Pada bagian ini kami uraikan secara singkat mengenai pokok-pokok persoalan yang menyangkut masalah prosedur jalannya suatu perintah raja kepada pejabat-pejabat tingkat bawahannya. Sebagai contoh dapat kita lihat di sini prosedur tersebut pada waktu zaman pemerintahan raja Jayapangus pada prasasti nomer 602 Bwahan berbunyi sebagai berikut :[63]

> "....., **irika dewaça ajna paduka çri maharaja haji Jayapangus arkajalancana, saha rajapatni dwaja paduka çri parameçwari indujakatana, paduka çri mahadewi çaçangkajaçihna umajar i para sang senapati, uming sor i tanda rakryan ri pakira kiran i jro makabehan karuhun mpungku çewasogata resi mahabrahmana** ....."

Artinya :

> ....., pada waktu itulah dewasanya (turun) perintah Paduka Çri Maharaja Haji Jayapangus Arkajalancana, beserta kedua permaisuri Baginda yaitu Paduka Çri Parameçwari Indujakatana, Paduka Çri Mahadewi Çaçangkajaçihna, yakni ber-

sabda kepada para senapati (yang seterusnya) menurun kepada tanda rakryan dalam pakira kiran i jro makabehan, didahulukan (kepada) para Mpungku Çewa Sogata resimahabrahmana .....

Dari kutipan di atas jelas dapat dipahami bahwa perintah sang raja sebagai pucuk pemerintahan mula-mula diturunkan langsung kepada para senapati. Kemudian para senapati melanjutkannya kepada pejabat-pejabat yang setingkat berada di bawahnya, yaitu pejabat-pejabat yang disebut : **tanda rakryan**. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap prasasti-prasasti Jayapangus, terutama pada bagian akhirnya kita dapat mengidentifikasikan bahwa yang dimaksud dengan tanda rakryan itu ialah kelompok **samgat** yang telah kami singgung pada angka 3.1.3. di muka. Kami katakan demikian sebab dari bagian akhir prasasti yang bersangkutan kita dapat baca disebutkannya urutan saksi-saksi dari pejabat-pejabat tinggi kerajaan : yaitu saksi-saksi yang menyaksikan prasasti itu dianugrahkan kepada penduduk suatu desa. Pada bagian itulah kita dapat membacanya secara berurut yaitu pertama-tama beliau-beliau yang berpangkat senapati, disusul oleh para **samgat** yang selanjutnya diikuti para tokoh-tokoh keagamaan dari golongan **kaçewan** dan **kasogatan** yaitu para mpungku yang telah kami sebutkan di muka, pada pasal 3.1.3.

Tetapi perlu diingat bahwa walaupun tokoh-tokoh agama disebutkan pada urutan terakhir bukanlah berarti mengurangi kedudukan terhormat beliau-beliau. Betapa terhormat kedudukan beliau dibuktikan adanya kalimat yang diawali dengan kata "**karuhun**" seperti terlihat pada bagian permulaan prasasti-prasasti yang dikeluarkan.

Prosedur jalannya perintah raja seperti ini kita jumpai pula pada zaman pemerintahan raja Walajayakrttaningrat yang memerintah bersama-sama dengan ibundanya paduka Bhatara Çri Mahaguru (Çaka 1250).[64]

3.1.5. Hubungan antar negara.

Sebelum kami melanjutkan uraian kami lebih mendalam perlu kiranya di sini kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan pengertian hubungan antar negara pada pasal ini ialah kerajaan Bali Kuna yang untuk sementara kami pandang sebagai suatu kerajaan tunggal meliputi seluruh wilayah Bali. Sebab sampai dewasa ini kita belum mempunyai data-data yang cukup kuat untuk menyatakan Bali pada masa lampau terdiri dari beberapa kerajaan dengan kedaulatannya masing-masing. Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut tidaklah mungkin pula kami dapat menguraikan hubungan

antar negara yang terletak di kawasan pulau Bali. Dengan demikian untuk mengisi uraian ini baiklah di sini akan kami singgung sedikit bagaimana hubungan kerajaan Bali dengan kerajaan-kerajaan yang terletak di Nusantara lainnya. Hal ini dapat kita lihat adanya beberapa bukti-bukti seperti tertera di bawah ini :

1. Pada prasasti yang dikeluarkan oleh Çri Kesari Warmmadewa pada çaka 835 kita mengetahui bahwa beliau melakukan expansinya menaklukkan musuh-musuhnya di Gurun dan di Swal. Untuk ini dapat kita baca pada salah satu prasasti yang dikeluarkan atas nama beliau yaitu pada prasasti yang kini dikenal dengan prasasti Blanjong, antara lain pada prasenya disebutkan bahwa :
..... **di gurun, di s (u) wal dahumalahang musuh** ....."[65]

Mengenai kedua nama tersebut Dr. R. Goris berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gurun tidak lain pulau Lombok sekarang, sedangkan mengenai Swal beliau hanya menduga daerah yang terletak di luar Bali pula.[66] Kini timbul sebuah pertanyaan kita, daerah atau pulau manakah yang dimaksud dengan Swal ? Untuk mengetahui lokasi daerah Swal kiranya perlu diadakan penyelidikan lebih mendalam.

2. Hubungan selanjutnya yang telah dilakukan Bali dengan kerajaan luar telah terjadi di sekitar Çaka 911 yakni hubungan dengan kerajaan Mataram Kuna di Jawa Timur. Udayana putra Bali berhasil mempersuntingkan putri Jawa Timur Gunapriyadharmmapatni[67] yang kemudian menurunkan Airlangga, Marakata, dan Anak Wungçu. Akibat adanya hubungan di atas bahasa Jawa Kuna yang lumrah dipergunakan di Jawa pada waktu itu berkembang di Bali dan perlahan-lahan mendesak bahasa Bali Kuna, bahasa pengantar penduduk Bali pada saat itu. Hubungan antara Bali dengan Jawa dilaksanakan atas perdamaian. Ini dibuktikan di samping hubungan perkawinan di atas, Airlangga putra sulung Udayana setelah meningkat dewasa pergi ke Jawa dan melanjutkan tampuk pimpinan kerajaan di sana.

3. Bukti-bukti hubungan lainnya kita ketahui dengan adanya usaha penaklukan Bali oleh raja Kertanagara dari Singasari. Usaha penaklukan ini terjadi di sekitar Çaka 1206.[68] Tetapi yang belum jelas bagi kita raja Bali siapakah yang berhadapan dengan tentara-tentara Singasari dan harus mengakui keunggulan-keunggulan Kertanagara.

4. Tidak hanya sampai di sini saja usaha penaklukan Bali oleh kerajaan-kerajaan di Jawa dilaksanakan. Usaha-usaha di atas dilancarkan pula pada tahun 1343 masehi[69] salah satu expedisi yang dilakukan Gajah Mada mahapatih Majapahit yang terkenal dengan nama "sumpah palapanya". Dengan ditaklukkannya Bali pengaruh

Majapahit baik di bidang kebudayaan dan pemerintahan lainnya meresap di Bali. luluh tidak dapat dipisahkan lagi.

Demikianlah beberapa hubungan yang telah dilakukan antara Bali dengan kerajaan-kerajaan di luar Bali lainnya.

3.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat.

3.2.1. Pemenuhan kebutuhan hidup.

Apabila kita teliti beberapa prasasti-prasasti yang dikeluarkan raja-raja yang pernah memerintah Bali di sini dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan tata kebutuhan hidup mereka telah diatur baik sesuai dengan kondisi pada zaman itu. Dengan penuh kesadaran mereka mentaati segala peraturan-peraturan yang telah mereka sepakati bersama serta memegang teguh keputusan-keputusan yang telah diturunkan raja kepadanya. Mereka tidak segan-segan mengutus beberapa wakilnya, menghadap raja menyampaikan segala kehendak mereka demi tercapainya ketenangan serta ketentraman desanya. Pada saat itulah biasanya raja menurunkan prasasti untuk menguatkan dan mengukuhkan keputusan yang telah disepakati dan disahkan para pemuka-pemuka di sana.

Selanjutnya pada pasal ini baiklah kita pusatkan perhatian kita, guna meneliti sejenak beberapa hal berkenaan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang pada dasarnya erat hubungannya dengan :

a. Pertanian/bercocok tanam.
b. Pertukangan dan kerajinan rumah tangga.
c. Peternakan.
d. Perdagangan.

a. Pertanian / bercocok tanam.

Bercocok tanam merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Mereka telah mengenal sistem pertanian yang maju dan teratur. Hal ini dibuktikan adanya sistem pembagian air yang diatur sesuai dengan kebutuhan dan luas tanah yang membutuhkannya. Para pemilik sawah yang berdekatan menggabungkan diri dengan pemilik-pemilik sawah di sekitarnya. Mereka membentuk suatu organisasi yang mempercayakan kepada seorang pemimpin yaitu "**pekaser**" atau "**ser**". Kata ini mengingatkan kita kepada "**pekaseh**" sekarang yaitu kepala "**subak**", yang bertanggung jawab dan mengurus pembagian air di sawah-sawah. Jadi dengan demikian tidaklah menyimpang apabila kita mengatakan bahwa sistem subak pada persawahan di Bali yang telah terkenal bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya adalah kelanjutan sistem irigasi yang telah dimiliki penduduk Bali sejak berabad-abad yang lampau.

Demi memperlancar pembagian air di atas penduduk membangun beberapa "**aungan**" (dam) untuk menghubungkan air dari sawah ke sawah lainnya. Pelaksanaan pembuatan aungan inipun ditugaskan kepada para ahli tehnik khusus pembuatan dam yang terkenal dengan sebutan "**undahagi pengarung**" dan ukuran pembagian airnya disebut "**kilan**". Untuk mencapai satu kilan didapat dengan jalan mengambil sebatang kayu (biasanya batang kelapa atau enau). Sepanjang 75 cm sampai 100 cm. Pada bagian atas batang ini ditetak sepanjang sejengkal yang dibatasi oleh dua buah sisi tepi sedalam ± 8 cm. Dengan demikian untuk mendapatkan air 3 kilan umpamanya, mereka harus menetak batang tersebut sepanjang tiga jengkal dengan kedua batas tepi masing-masing sedalam 8 cm pula.[70] Pembagian air seperti ini masih tetap kita kenal pada subak-subak di Bali yang oleh para "**kerama subak**" (anggota subak) disebut "**tembuku**". Sistem kilan di masa lampau tidak berbeda dengan tembuku di masa kini, walaupun telah agak berubah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Di samping masyarakat bercocok tanam di "huma" (sawah), dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka tidak melalaikan pengolahan "**parlak**" (ladang), "**mmel**" (tanah kebun), "**padang**" (tanah tegalan), dan menanami tanah tersebut bermacam-macam kebutuhan sesuai dengan musimnya seperti padi, gaga, serta bermacam-macam palawija. Mmel biasanya ditanami "**nyiu**" (kelapa) "**duriyan**" (durian), "**pring**" (jenis bambu), "**sekar kuning**" (berjenis bunga yang berwarna kuning), "**kemiri**", "**poh**" (mangga), belimbing dan sebagainya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila penduduk salah satu desa bertani dan berladang di desa lain tidak dihalangi oleh penduduk desa, tetapi mereka harus membayar beberapa pajak-pajak yang telah ditentukan jumlahnya oleh penduduk desa di mana mereka mengusahakan ladang atau sawahnya.

b. Pertukangan dan kerajinan rumah tangga.

Di samping bercocok tanam, kebutuhan hidup kedua yang tidak pernah mereka abaikan ialah pertukangan dan kerajinan rumah tangga, walaupun pelaksanaannya masih amat sederhana. Di dalam pertukangan penduduk telah mengenal pengelompokan sesuai dengan bakat dan keahlian mereka masing-masing. Penduduk yang tertarik di bidang pembangunan akan menggabungkan dirinya ke kelompok **undahagi pengarung** atau **undahagi batu**. Tidak hanya sampai di sini saja dikenal sistem pertukangan pada zaman itu. Malahan di bidang lainnya seperti bidang pengangkutan di air telah dikenal adanya "**undahagi lancang**" yaitu undahagi yang khusus bertugas membuat prasarana komunikasi di air seperti pembuatan

perahu, jukung, sampan dan sebagainya.[71]

Selanjutnya bidang pertukangan lainnya yang tidak dapat dilepaskan dengan industri kerajinan ialah adanya beberapa para "pande" (tukang) seperti pande mas, pande besi, pande tembaga. Pengkhusussan pekerjaan ini disesuaikan dengan materi yang dipergunakan dalam menghasilkan buah karyanya. Pande mas sebagian besar hasil karyanya berwujud perhiasan-perhiasan ataupun benda-benda keagamaan lainnya. Pande besi dan tembaga menghasilkan beberapa jenis benda yang materinya dibuat dari besi dan tembaga seperti keris, tombak, perlengkapan alat-alat upacara lainnya.

Industri kerajinan rumah tangga lainnya yang telah mereka laksanakan antara lain kerajinan tenun-menenun. Kenyataan ini dibuktikan dengan adanya tulisan-tulisan "**acadar**" (membuat pakaian), mengikat (memberi ikatan) persiapan pembuatan pola pada kain tenunan "**mangnila**" (mencelup dan memberi warna biru) "mamang kudu" (mencelup dan memberi warna orange) dan sebagainya.[72] Pemberian warna tenunan-tenunan tersebut dilakukan dengan teknik amat sederhana. Bahan pewarnaannya dibuat dari akar pohon-pohonan sehingga warna yang dihasilkan tahan lama dan tidak mudah luntur. Teknik ini masih dapat kita saksikan sekarang pada pembuatan tenunan "**geringsing**" di desa Tenganan Karangasem.

Sebelum benang ditenun terlebih dahulu diikat dengan tali sesuai dengan pola yang dikehendaki yang setelah pola tersebut diikat baik-baik barulah dimasukkan ke dalam warna-warnanya yang telah disiapkan sebelumnya untuk kemudian ditenun menjadi kain.

Kemungkinan masih banyak lagi hal-hal berkenaan dengan pertukangan, usaha kerajinan rumah tangga lainnya pada masa silam yang belum terungkapkan selengkapnya. Dengan penuh pengharapan kita harus bersabar, mudah-mudahkan dengan didapatkannya bahan-bahan lebih lengkap, besar keyakinan kita, penguraian pertukangan dan usaha kerajinan rumah tangga di atas dapat kita ungkapkan lebih mendetail.

c. Peternakan.

Apabila kita ingin mengetahui bagaimana cara penduduk pada masa lalu menternakkan binatang-binatang peliharaan mereka amatlah sulit kita menguraikannya. Hal ini disebabkan pula tidak adanya sebuah prasasti pun menjelaskan masalah di atas, bagaimana cara dan tindakan-tindakan penduduk menternakkan binatang-binatang yang mereka kenal. Karenanya di sini kami hanya dapat menyampaikan kepada pembaca yang jelas penduduk pada waktu itu telah mengenal dan memelihara beberapa jenis binatang seperti kerbau, lembu, kambing, ayam, itik, burung, babi, anjing. Bina-

tang-binatang di atas di samping dipelihara demi memenuhi kebutuhan pokok mereka yaitu makanan, beberapa di antaranya berfungsi juga untuk pelengkap upacara keagamaan serta pembantu penduduk dalam memperlancar maksud-maksud sampingan lainnya. Bahkan beberapa di antaranya seperti kuda, lembu, dan anjing mempunyai peranan amat penting dan merupakan binatang terdekat dengannya. Anjing di samping berfungsi sebagai penjaga keselamatan rumah, dipergunakan pula sebagai binatang perburuan. Lembu binatang kuat untuk membantu masalah pengangkutan dan pengerjaan tanah di sawah-sawah. Sedangkan kuda binatang utama alat komunikasi, menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan andaikata pada beberapa buah prasasti sering kita dapati uraian yang isinya menjelaskan bahwa apabila ada lembu, kuda, ular sawah jatuh ke dalam sungai atau di semak-semak agar penduduk yang mengetahuinya segera melaporkan kepada desa, sebaliknya apabila binatang-binatang lainnya mati, penduduk tidak perlu melaporkannya kepada desa atau ke istana.[73]

Pendataan di atas membuktikan bahwa lembu dan kuda merupakan binatang amat penting dan mempunyai tempat utama di antara binatang-binatang lainnya. Lebih-lebih kuda benar-benar mendapatkan prioritas di antara seluruh binatang-binatang di atas sehingga untuk pemelihara kudapun diperlukan petugas khusus yang disebut "**tangkalik asba**" yaitu orang yang bertugas memelihara dan menternakkan kuda.[74] Tetapi bagaimana pelaksanaan menternakkan kuda ataupun binatang-binatang lainnya amatlah gelap bagi kita.

d. Perdagangan.

Diketemukannya kata "**pken**" pada beberapa buah prasasti yang telah dibaca memberikan jawaban, bahwa penduduk telah mengenal perdagangan. Kata "**pken**" sampai sekarang masih dipergunakan penduduk di Bali, dan berarti pasar. Di pasarlah terjadinya persetujuan pertukaran di antara penjual dengan pembeli dengan tidak merasa dirugikan pada kedua belah pihak.

Pendataan ini diperkuat dengan terdapatnya kata "**banyaga**" yang berarti saudagar.[75] Para saudagar pada zaman itu dibedakan menjadi **wanagrama**(saudagar laki-laki) dan "**wanagrami**" (saudagar perempuan). Kenyataan di atas memberikan petunjuk pula bahwa sangatlah aneh seandainya penduduk tidak melaksanakan perdagangan tetapi mengenal kata **wanagrama** dan **wanagrami**.[76] Harus diingat tidak setiap saudagar diperkenankan melakukan perdagangan di seluruh pasar di **Bali dwipa mandala**. Tiap desa di Bali mempunyai peraturan-peraturan tersendiri dan pedagang yang berasal

bukan dari desa tersebut dilarang berdagang di pasar desa lain tanpa seijin raja atau desa yang bersangkutan. Kemajuan perekonomian sudah demikian pesatnya, lebih-lebih pada zaman pemerintahan Anak Wungşu, hubungan perdagangan tidak hanya dilakukan antara penduduk desa, malahan sudah lebih meluas dengan daerah-daerah seberang. Kejadian ini dapat dibuktikan dengan bunyi prasasti yang disimpan di desa Sembiran (A.D. 1065) yang menyebutkan antara lain : **mangkana ya hana banyaga sakeng sabrang jong, bahitra, rumunduk i manasa .....**"[77]
Artinya : andaikata ada saudagar dari seberang, yang datang dengan jukung bahita datang berlabuh di manasa .....

Adapun barang-barang yang diperdagangkan antara lain kapas, benang, asam, beras dan sebagainya. Tetapi suatu hal yang belum jelas bagi kita apakah perdagangan yang dilaksanakan di "**pken**" pada mulanya dilakukan sistem tukar (barter) ataukah pembayaran dengan mata uang ? Pada prasasti-prasasti yang dikeluarkan dalam bahasa Bali Kuna di antara tahun 818 Çaka sampai 888 Çaka tidak pernah dijelaskan bagaimana pelaksanaan transaksi antara penjual dengan pembeli. Namun mengingat telah dikenalnya nilai-nilai mata uang seperti **ma, su, ku, piling** pada zaman itu berat dugaan kami sebagian besar transaksi yang dilakukan tidaklah sepenuhnya dilakukan dengan barter seperti yang masih kita lihat pada beberapa desa di Bali.[78] Pendapat ini dikuatkan dengan isi prasasti Bwahan yang dikeluarkan oleh raja Marakata pada Çaka 945 kepada desa Bwahan di tepi danau Batur yang antara lain menyebutkan bahwa raja menjual sebidang tanah kepada penduduk desa seharga **ma su 10 pilih**, dan uang **ma 10**.[79]

3.2.2. Hubungan antar golongan

Membicarakan masalah hubungan antar golongan tentu saja kita tidak boleh mengabaikan pengelompokan penduduk yang ada pada masa itu. Sebab tanpa mengetahui kelompok-kelompok penduduk yang ada, mustahil kita dapat menguraikan jalinan hubungan mereka satu dengan lainnya. Selanjutnya bagaimanakah pengelompokan penduduk pada zaman Bali Kuna ? Untuk menjawab pertanyaan di atas kita harus membuka lembaran prasasti diturunkan raja kepada desa-desa yang telah dikumpulkan ahli-ahli arkeologi. Dari kumpulan prasasti-prasasti mereka kita mendapat sedikit gambaran yang pada dasarnya pengelompokan serta hubungan antar golongan di masa lampau tidaklah jauh berbeda dengan pengelompokan Hindu Dharma di Bali sekarang walaupun pada beberapa bagian masih belum begitu jelas dan memerlukan penelitian lebih seksama.

Sejak zaman dahulu pembagian "**catur warna**" yaitu Brahmana, Kesatria, Waiçya dan Sudra telah dikenal di masyarakat. Bahkan di samping ke empat kelompok di atas masih terdapat satu kelompok lainnya yang disebut "**kahula atau kalula**" (para budak). Di sini hubungan tata cara antar golongan di atas dibatasi oleh norma-norma serta peraturan-peraturan amat ketat.

Seperti contoh dapat kita kemukakan di sini golongan "**kahula**" oleh golongan-golongan lainnya dipandang golongan terendah sehingga golongan-golongan lainnya dapat berbuat semena-mena terhadap diri mereka. Perlakuan ini dapat kita lihat pada prasasti yang bertahun Çaka 999 Srokodan D = Sukawati C yang antara lain berbunyi :[80]

> "**kunang ya tan aharp ya sumahwa hutangnya crakaknanya ikang rarai hulu, irikang pradana,**"

Artinya :

> Adapun andaikata seseorang tidak sanggup membayar hutangnya, agar menyerahkan budak miliknya, kepada orang yang mau memberikan pinjaman.

Hubungan antar golongan lainnya dapat kita saksikan pada perkawinan di antara mereka. Golongan Brahmana adalah golongan utama pada catur warna. Kaum pria golongan lainnya diharapkan tidak memperistri wanita Brahmana **wangçasantana hunjeman juru keling**. Tetapi apabila mereka berkeras juga mengawininya calon mempelai laki-laki harus membayar denda "**pamucuk**" yang jumlahnya sudah ditetapkan.[81] Persoalan yang belum jelas sekarang siapakah yang dimaksud dengan Brahmana **wangçasantana hunjeman juru keling** ? Pada prasasti-prasasti jelas ditulis ucapan :..... **mwang yan hana rwangnya sakaramah salah margga ahyun makastri babini Brahmana wangçasantana hunjeman juru keling mamahura ya pamucuk** ....."

Dengan tidak adanya tanda pemisah (**koma**) pada kalimat tersebut timbullah pertanyaan di atas. Di sini kemungkinan yang dimaksud yalah Brahmana keturunan **hunjeman** atau Brahmana keturunan **juru keling**. Pendapat ini mengingatkan kenyataan sebutan yang masih kita dapati di Bali sekarang seperti **Brahmana Kemenuh, Brahmana Mas, Brahmana Geniten, Brahmana Manuaba** dan lain-lainnya.

3.2.3. Kepemimpinan

Dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh para raja kita mengenal adanya bermacam-macam jabatan yang dipegang oleh pemerintah di pusat (istana) ataupun jabatan di daerah (desa) seperti **Senapati, nayakan, samgat, manuratang, kubayan, hulukayu** dan

lain-lain yang beberapa di antaranya belum begitu jelas tugas-tugas dan tanggung jawab mereka kepada raja ataupun desa. Oleh karena itu sesuai dengan judul pokok bab di atas yaitu penyelenggaraan hidup dalam masyarakat, maka untuk tidak membingungkan kami batasi ruang lingkup uraian kami, membicarakan masalah kepemimpinan yang kita kenal di tingkat desa saja. Sedangkan untuk uraian yang berkenaan dengan masalah kepemimpinan di tingkat pusat kami persilakan kepada pembaca untuk meneliti pada pasal lainnya.

Di tingkat desa kita mengenal beberapa jabatan kepemimpinan lokal yang sifatnya amat sederhana sekali. Jabatan pertama yalah "**rama**" yang berarti ketua atau orang yang bertanggung jawab. Kata ini mengingatkan kita sekarang pada bahasa Bali lumrah "**rerama**" berarti orang tua atau kepala keluarga, yang juga bertanggung jawab di dalam lingkungan keluarga. Kata rama sering diikuti kata **kubayan** di samping awalan **ka, pang** dan akhiran **an** sehingga menjadi **karaman, sarama, pangrama** dan sebagainya. Walaupun kata ini mendapat imbuhan awalan dan akhiran hubungan arti kata di atas tidaklah berubah dan tetap memberikan pengertian jabatan atau orang yang menduduki jabatan. Demikian pula berat dugaan kami kata "**kerama**" yang berarti anggota dari suatu organisasi seperti "**kerama banjar**" (anggota banjar), "**kerama subak**" (anggota irigasi), "**kerama desa**" (anggota desa) dan sebagainya, berasal dari kata di atas.

Di sini kita akan melihat seolah-olah ada perbedaan arti kata rama yaitu dari ketua menjadi anggota. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti arti kata **kerama** itu sendiri tidaklah demikian. Sebab persaratan orang yang boleh menjadi "**kerama banjar**" atau anggota desa yang sah harus orang yang sudah berkeluarga.

Sebelum orang bersangkutan kawin, tidak diperkenankan menjadi **kerama banjar**. Jadi dengan adanya perkawinan tersebut langsung si calon kerama menjadi ketua atau kepala di rumah tangganya.

Jabatan kedua pada struktur kepemimpinan Bali Kuna yalah **Sang mathani**. Kata ini berasal dari kata "**thani**" yang oleh Dr. R. Goris disamakan dengan daerah wilayah. Jadi **sang mathani** berarti penguasa wilayah desa. Pada beberapa prasasti sering kita menemui kalimat sebagai berikut :[82]

..... **kunang yan hana dagingnya tendasnya kari, wwetaknanya ri sang mathani, tan pacrawanakna i sira makabaihan** .....

Artinya :

"..... adapun kalau masih bersisa dagingnya, kepalanya agar membawanya ke sang mathani, dan tidak perlu disampaikan kepa-

da beliau-beliau semua ....."

Apabila pada pemerintahan di pusat terdapat jabatan **manuratang ajna** (sekretaris raja) di desapun kita mengenal adanya sekretaris yaitu **manuratang**. Mengenai penjelasan jabatan **manuratang** baiklah kami uraikan pada pasal selanjutnya karena erat hubungannya dengan pengaturan masyarakatnya.

Kubayan adalah jabatan yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Pada zaman Bali kuna dapat dibedakan beberapa nama-nama **kubayan** seperti **kubayan wayahan, kubayan tengah, kubayan nom**, dan **kubayan ketut**, yang belum jelas bagi kami kewajiban mereka masing-masing.[83]

Adapun jabatan selanjutnya kita kenal berdasarkan temuan-temuan yang telah dibaca oleh para sarjana ialah **"tuha-tuha"**. Kata **tuha** berarti tua. Namun ini tidaklah berarti bahwa orang yang menduduki jabatan ini harus orang-orang yang umurnya sudah lanjut. Kiranya pengertian di atas mengandung juga kiasan yang artinya orang yang benar-benar tua umurnya dan berpengaruh di masyarakat ataupun orang masih muda tetapi sudah matang dalam beberapa segi-segi ilmu pengetahuan sehingga dipandang arif bijaksana oleh masyarakat sekitarnya.

Jabatan lainnya yang belum jelas ialah para **wulu-wulu. Wulu** berarti juga kepala. Lalu pertanyaan ialah kepala atau kepemimpinan di bidang apa para **wulu-wulu** tersebut di desanya ?.

3.2.4. Pengaturan masyarakat.

Seperti telah kami sampaikan pada bagian terdahulu, masyarakat terdiri dari beberapa golongan dengan berbagai macam kepentingan dan kebutuhan mereka yang kadang-kadang agak sukar diatur. Untuk mengatasi masalah di atas dan menjamin ketenangan serta keamanan masyarakat sudah tentu diperlukan adanya ketetapan-ketetapan tegas yang dituangkan ke dalam undang-undang. Berkenaan dengan kejadian tersebut oleh raja dikeluarkan beberapa peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penduduk. Raja sebagai penguasa memerintahkan kepada **manuratang ajna** (penulis raja) untuk mencatat segala yang telah diputuskan dengan sejumlah saksi-saksi yang hadir pada saat itu. Hasil catatan prasasti tersebut diserahkan kepada desa sebagai **"piagam"** (pegangan) desa untuk diperhatikan dan dipelihara oleh penduduk desa yang bersangkutan. Dengan demikian prasasti yang mereka simpan juga mengandung pengaturan masyarakat desa itu sendiri.

Di sini tidaklah mampu kami menyampaikan seluruh permasalahan yang termuat pada seluruh prasasti-prasasti yang diketemukan yang berkenaan dengan pengaturan masyarakat. Karenanya pa-

da bagian ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa persoalan-persoalan umum yang berlaku hampir di seluruh desa-desa pada zaman Bali Kuna, sebab tiap desa mempunyai situasi dan kondisi berbeda-beda.

Kerja sama di antara warga desa dilaksanakan dengan baik dan teratur. Gotong royong yang kita kenal sekarang adalah keperibadian bangsa Indonesia asli yang merupakan pokok utama di dalam membina persatuan. Pada zaman kerajaan Bali Kuna sistem ini dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Sebagai contoh dapat kami kemukakan di sini :

1. Andaikata pada desa tersebut terdapat "**kahyangan**", (tempat suci), "**panti**" (tempat pertemuan), "**aungan**" (dam), mengalami kerusakan, baik kerusakan tersebut diakibatkan oleh binatang ataupun alam, penduduk desa diwajibkan memperbaikinya. Pada saat itulah penduduk dengan pasrah dan penuh tanggung jawab memperbaiki kerusakan-kerusakannya kembali. Masyarakat desa mengeluarkan atap, kayu-kayuan, serta ramuan lainnya berkenaan dengan perbaikan bangunan ataupun dam-dam.
2. Apabila ada penduduk dari desa lain kemalaman di desanya penduduk desa menyediakan tikar, makanan, serta peralatan penginapan untuk penduduk desa lain yang kemalaman di desanya.[14]
3. Demi kelancaran pelaksanaan upacara pujawali pada salah satu pura di desanya penduduk mengeluarkan beberapa jenis bahan keperluan pelaksanaan upacara seperti : serh, beras, serta bermacam-macam buah-buahan lainnya.
4. Apabila ada pohon yang menaungi tanah di sekitar sawah atau ladangnya, untuk keberhasilan pengolahan tanah tersebut pemilik pohon yang menaungi sawah tetangganya akan ikhlas seandainya pohon (tanaman) miliknya ditebang.
5. Penduduk desa diperkenankan mengusahakan tanah di desa lain asal memenuhi ketetapan peraturan yang harus dipenuhi.

Pembagian warisan khusus untuk para "**krangan**" atau "**krangan tumpur**" diatur dalam sistem "**tribhaga**" atau "**patlun**". Tetapi patut diingat bahwa oleh karena desa telah mengambil sebagian dari milik keluarga orang yang ditinggalkan, desa harus juga melaksanakan segala upacara yang diperlukan berkenaan dengan upacara kematian tersebut. Kekayaan yang didapat oleh desa biasanya diperuntukkan pula untuk kepentingan tempat suci dan lain-lain.
Pada prasasti antara lain disebutkan :[84]

"..... **lawan yan hana krangan pjah ri thaninya patlun sakwehni kdik ni drwyanya yan lanang pjah rwang bhaga**

munggaha i bhatara ring punta hyang subhaga mareng walu, yan stri rwang bhaga mareng walu kunang krangan tumpur sahanani drwayanya kapwa munggaha i bhatara ring punta hyang ....."

Artinya :

"..... selanjutnya apabila keluarga (tak punya anak) meninggal di desanya segala hak miliknya dibagi menjadi tiga bagian, apabila yang meninggal suaminya dua pertiga dari miliknya diserahkan kepada **bhatara punta hyang**, sepertiga diberikan kepada jandanya, seandainya yang meninggal istrinya dua pertiga dari kekayaannya diserahkan kepada dudanya, dan sepertiga bagian diserahkan kepada **bhatara punta hyang**, selanjutnya apabila yatim piatu seluruh hak milik yang ditinggalkan diserahkan kepada **punta hyang** ....."

Keamanan desa kadang-kadang tidak luput dari gangguan-gangguan seperti pencurian, penganiayaan, peracunan, ilmu sihir dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini diatur pula dengan peraturan-peraturan ketat diikuti sangsi sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Bahkan ada kalanya kutukan-kutukan dipaparkan demi kesadaran masyarakat.[21]

Raja sebagai penguasa tidak mengabaikan keluh kesah dan keberatan-keberatan rakyat. Kehendak rakyat disalurkan melalui para pemuka desa seperti **rama kubayan, tuha-tuha, manuratang** ditampung dan diperhatikan demi kesejahteraan rakyatnya.

3.3. Kehidupan seni budaya

3.3.1. Pendidikan

Kehidupan seni **budaya** dapat berkembang langsung dari satu generasi ke generasi selanjutnya mudah dipahami melalui suatu cara atau sistem pendidikan, walaupun sistim tersebut dilaksanakan sangat sederhana.

Pada zaman Bali Kuna suatu usaha untuk mengembangkan, memelihara dan memajukan kesenian yang ada untuk dapat dihayati generasi selanjutnya tentulah telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hanya amat disayangkan sampai sekarang kita belum menemukan beberapa data-data epigrapi maupun keterangan dari sumber-sumber lainnya yang cukup jelas dapat memberikan gambaran cara-cara yang telah ditempuh dalam menyelenggarakan pendidikan termaksud. Singkatnya kita belum mengetahui bagaimana penerapan sistim pendidikan yang dilakukan pada zaman Bali Kuna. Hanya sedikit sekali data-data yang kita ketahui dari prasasti yang memberikan indikasi adanya usaha pendidikan atau pengajaran.

Salah satu contoh dapat kami kemukakan di sini adanya titel **"dang acaryya"** pada prasasti-prasasti yang telah kita ketemukan yang dilekatkan kepada nama seseorang tokoh. Kata **dang acaryya** pada galibnya berarti guru yang terhormat (**dang** = yang terhormat, **acaryya** = guru). Untuk lebih jelasnya baiklah kita periksa prasasti yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Anak Wungçu. Umpamanya antara lain menyebutkan beberapa dan **acaryya** yang menjabat sebagai samgat **juru wadwa**, dan **acaryya Guhyananda** dengan jabatannya sebagai **Mpungkwing Garudasara**, dang **acaryya Sawyaraja**, dengan jabatan sebagai **Mpungkwing Binor**, dang **acaryya Jatasmara** dengan jabatan sebagai **Mpungkwing Dharmmahanar** dan dang **acaryya Marmeçwara** dengan jabatan sebagai **Mpungkwing Banutiga** :[85]

3.3.2. Kesenian.

Dari pembacaan teks prasasti-prasasti yang ada pada kami dapat diketahui bahwa pada zaman Bali Kuna telah hidup beberapa cabang kesenian seperti seni rupa, seni tari, dan seni sastra. Tetapi nama-nama kesenian atau tontonan yang disebutkan dalam prasasti tidaklah seluruhnya dapat kita mengertikan atau identifikasikan dengan salah satu jenis kesenian atau tontonan yang sudah kami ketahui masih hidup dewasa ini.

Dalam prasasti 002 Bebetin A.I. pada lembaran IIb.5[86] umpamanya dapat kita baca sederetan nama jenis kesenian yaitu, **pamukul** (pemukul gamelan), **pagending** (penyanyi), **pabunjing** (pemain angklung bambu ?), **papadaha** (tukang kendang), **perbangci** (peniup seruling), **partapukan** (lakon topeng), **parbwayang** (tontonan wayang).

Sementara sekarang nama-nama kesenian atau tontonan yang paling banyak kita ketahui ialah dari prasasti raja Anak Wungçu. Bahkan berdasarkan atas nama-nama dari beberapa kesenian atau tontonan itu kita mendapat kesan bahwa ada di antaranya yang lebih bersifat sebagai tontonan untuk raja (kesenian keraton), di samping tontonan untuk umum (kesenian rakyat). Barangkali boleh juga kita mengartikan bahwa pembagian di atas ini tidaklah ketat sekali, dalam arti kemungkinan pula terhadap tontonan untuk raja masih terbuka pula kesempatan bagi rakyat untuk menyaksikannya. Demikian pula sebaliknya dalam suatu kesempatan mungkin juga raja berkenan menyaksikan tontonan rakyat.

Demikianlah dari zaman pemerintahan raja tersebut di atas kita dapat mengetahui beberapa nama-nama kesenian atau tontonan antara lain sebagai berikut :[87]

1. **Agending i haji**, penyanyi istana yang bernyanyi untuk raja.

Jadi semacam seni sastra.

2. **Agending i ambaran**, yaitu penyanyi yang menyanyi dari desa ke desa lainnya (**ngelelawang** = bahasa Bali modern). Juga semacam seni sastra.
3. **Awayang i haji**, rupanya semacam tontonan wayang untuk raja.
4. **Amukul**, : kata ini menunjukkan adanya kelompok pemukul gambelan.
5. **Anuling** : berarti meniup seruling (juru suling).
6. **Aringgit** : semacam tontonan wayang.
7. **Abusya** : tidak jelas maksudnya.
8. **Abanjuran** : kata ini tidak jelas maksudnya.
9. **Atali-tali** : kata ini tidak jelas maksudnya.
10. **Menmen** : semacam permainan atau tarian topeng.
11. **Atapukan** : juga semacam tontonan topeng.
12. **Pirus** : kumpulan pelawak (badut).
13. **'Abunawal** : semacam dagelan atau lawakan.

Dari prasasti-prasasti raja Jayapangus kita mengetahui pula beberapa nama-nama kesenian lainnya, khususnya seni bunyi-bunyian yaitu : **salunding wsi**, **galunggang petung**, **calung**, dan **pabangkis**.[88] **Salunding wsi** besar kemungkinan sumber bunyi utamanya terdiri dari besi. Kata **salunding** sekarang menjadi kata "**salonding**" yaitu perangkat alat bunyi-bunyian yang disebut **gambelan salonding**. Gambelan semacam ini masih kita dapati pada beberapa desa di Bali walaupun sudah terdesak oleh kesenian lainnya. **Galunggang petung** dan **calung** adalah alat bunyi-bunyian yang mempergunakan bambu sebagai bahan utamanya. Sedangkan **pabangkis** belum begitu jelas bagi kita kesenian bagaimana yang dimaksud.

Selanjutnya kesenian lainnya yang hendak kami singgung di sini ialah semacam kesenian yang disebut "**sulpika dan citrakaka**".[89] Istilah-istilah di atas memberikan pengertian kita bahwa pada zaman Bali Kuna telah ada orang yang mempunyai keahlian melukis dan memahat. Mengenai pemahat mudah kita pahami sebab kenyataannya sampai dewasa ini sangat banyak kita mewarisi peninggalan-peninggalan berupa arca-arca maupun relief-relief yang berasal dari zaman Bali Kuna. Peninggalan-peninggalan yang berpusat di pura Tegeh Koripan di gunung Penulisan (daerah tingkat II Bangli), Goa Gajah dan Kutri (daerah tingkat II Gianyar) merupakan contoh yang tidak asing lagi di samping peninggalan-peninggalan lainnya yang tidak terhitung jumlahnya tersebar di pelosok-pelosok pulau Bali. Mengenai **sulpika** (pelukis) pada zaman Bali Kuna walaupun tidak begitu sukar dimengerti, tetapi kenyataan-

nya sampai dewasa ini kita belum menemukan adanya peninggalan lukisan-lukisan zaman Bali Kuna.

3.4. Alam pikiran dan kepercayaan (agama)

3.4.1. Perkembangan agama.

Bahwasannya agama Budha dan agama Çiwa telah berpengaruh di Bali pada zaman Bali Kuna tidaklah perlu disangsikan lagi. Awal perkembangan kedua agama itu di Bali dapat ditelusur kembali setidak-tidaknya sampai sekitar abad ke 8 Masehi.

Sebagai contoh dapat disebutkan di sini tulisan yang terdapat pada tablet-tablet tanah liat yang disimpan dalam **stupika-stupika** tanah liat pula. Tulisan-tulisan itu memuat ajaran-ajaran atau mantra-mantra agama Budha. Mantra-mantra tersebut yang terkenal di antaranya memuat **ye te mantra**, yang berbunyi sebagai berikut:[90]

Ye dharma hetu prabhawa
Hetun tesan tathagata hyawadat
Tesanca yo nirodha
Ewam wadi mahacramanah.

Artinya :

Keadaan tentang sebab kejadian itu sudah diterangkan oleh Tathagata (Budha); Tnan Mahatapa itu telah menerangkan juga apa yang harus diperbuat orang supaya dapat menghilangkan sebab-sebab itu.

Peninggalan-peninggalan ini terdapat di desa Pejeng kabupaten Gianyar dan sekarang banyak di antaranya disimpan di Museum Bali di Denpasar. Peninggalan-peninggalan yang isinya seperti itu terdapat pula di atas pintu candi Kalasan (di Jawa Tengah) yang bila ditilik dari segi palaeografi juga menunjukkan langgam tulisan yang sezaman. Oleh karena kita ketahui candi Kalasan berasal dari tahun çaka 700 (778 M.), jadi abad ke 8 Masehi, maka temuan-temuan di Pejeng itupun diduga juga berasal dari abad ke 8 Masehi.[91]

Sangat menarik pula bahwa di antara tablet-tablet itu ada yang bergambarkan relief Budha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa agama Budha yang berkembang waktu itu adalah agama Budha Mahayana. Kita katakan demikian karena telah kita ketahui bahwa menggambarkan tokoh Budha adalah sangat pantang dalam agama Budha Hinayana.

Di samping prasasti-prasasti bahasa Sanskerta yang Buddhistis seperti disebutkan di atas, di daerah temuan Pejeng terdapat juga fragmen-fragmen prasasti bahasa Sanskerta yang bukan Buddhistis, melainkan bersifat Çiwaistis. Sebab di antaranya ada yang berbunyi : "**Çiwas** (–) **ddh**–" yang kiranya selengkapnya berbunyi **çiwa sidanta**. Jadi sudah menunjukkan adanya gejala-gejala Tantris-

me.[92] Namun demikian berdasar atas data yang telah kita ketahui, kita belum mendapat penunjang yang kuat untuk memungkinkan kita dapat berbicara dengan jelas mengenai sinkritisme antara agama Çiwa dan agama Budha pada periode itu. Baiklah untuk sementara waktu kita puaskan diri dengan mengatakan bahwa agama Budha dan agama Çiwa waktu itu telah hidup berdampingan. Besar kemungkinan kedua agama itu telah menunjukkan kesanggupannya untuk hidup berdampingan secara damai, saling hormat-menghormati satu sama lainnya. Kami katakan demikian sebab sementara sekarang ini kami tidak mendapatkan sesuatu data yang memberikan indikasi tentang adanya pertentangan agama pada zaman Bali Kuna.

Kemudian suatu hal yang perlu juga mendapat perhatian di sini ialah apa yang kita dapati pada prasasti nomer 001 Sukawana A (Çaka 804).[93] Prasasti ini berbahasa Bali Kuna, Tetapi tidak menyebutkan nama raja yang mengeluarkan prasasti itu. Disebutkan bahwa prasasti itu dikeluarkan di Panglapuan Singhamandawa. Isi pokok prasasti tersebut ialah berkenaan dengan ijin yang diberikan kepada para bhiksu untuk mendirikan pertapaan dan pesanggrahan (**sastra**) di daerah perburuan di bukit Cintamani. Para biksu itu dibebaskan dari beberapa macam pajak. Dimuat pula dalam prasasti itu penetapan tentang persoalan warisan yang ditinggalkan seseorang bhiksu yang telah meninggal. Hal yang perlu mendapat perhatian kami maksudkan di atas ialah berkenaan nama para bhiksu yaitu masing-masing bernama; **Çiwakangcita, Çiwanirmala dan Çiwaprajna.** Lazimnya, kata bhiksu dipergunakan untuk tokoh agamawan dari agama Budha. Dalam prasasti ini ternyata nama-nama beliau itu ketiganya mulai dengan kata "Çiwa". Sehingga oleh karenanya timbul pertanyaan, apakah kata bhiksu di sini juga dipakai menurut kelazimannya, dan sekiranya demikian, apakah kenyataan di atas itu berarti bahwa beliau pada galibnya merupakan tokoh penganut agama Çiwa Buddha ?

Baiklah kami biarkan hal itu sebagai suatu persoalan yang memerlukan penelitian lebih lanjut serta data yang lengkap sehingga nantinya dapat diangkat menjadi suatu teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Marilah kita lanjutkan pembicaraan mengenai kehidupan atau perkembangan agama pada Bali Kuna. Dari prasasti-prasasti raja-raja yang memerintah pada masa-masa selanjutnya dalam rukun zaman Bali Kuna, kita juga mendapat gambaran bahwa kedua agama di atas yaitu agama Çiwa dan agama Budha masih tetap hidup berdampingan. Hal itu kita ketahui, karena tokoh-tokoh ulama yang berasal dari masing-masing agama juga disebutkan dalam pra-

sasti-prasasti yang dikeluarkan oleh para raja selanjutnya. Beliau-beliau merupakan kelompok ulama dalam lembaga pemerintahan yang pada zaman Bali Kuna disebut dengan nama : **panglapuan, samohanda senapati di panglapuan, paksamasa, palapknan** dan sejak zaman pemerintahan Udayana dan Gunapriyadharmmapatni dinamakan : **"pakira-kiran i jro makabaihan"**. Lembaga pemerintahan ini berfungsi sebagai "badan penasehat pusat", yang berkesempatan memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai kebijaksanaan pemerintahan yang akan diambil sang raja.

Adapun jumlah beliau-beliau itu seperti yang terbaca dalam prasasti-prasasti, tidaklah tetap jumlahnya pada tiap-tiap raja. Dari zaman raja Jayaçakti umpamanya, kita mengetahui Mpungku-Mpungku yang berkedudukan di :[94]

1. Banugaruda.
2. Lokeçwara
3. Antakunjarapada
4. Kanyabhawana
5. Udayalaya
6. Dharmma Hanar
7. Makarun
8. Kusuma Hajika (?)
9. Binor
10. Kusumadenta.

Beliau yang tersebut di atas berasal atau mewakili agama Çiwa dan semuanya memakai **dang acaryya** di muka nama personalnya. Di samping itu, dari golongan **kaçewan** kita mengetahui lagi seorang yang bertitel **dang acaryya** tetapi dengan jabatan **samgat juru wadwa**. Sedangkan para **Mpungku** dari agama Buddha (Kasogatan yang kita ketahui dari zaman itu ialah yang berkedudukan di :[95]

1. Dharmmaryya
2. Kutihanar
3. Bajraçikara
4. Canggini
5. Kadhikaran

Beliau-beliau tersebut di atas memakai titel dang **upadyaya** di muka nama personalnya. Dari zaman pemerintahan Ragajaya, yaitu atas pembacaan prasasti Tejakula (Çaka 1077) kita mengetahui para **Mpungku** dari golongan **Kaçewan** yang hadir menyaksikan penganugrahan prasasti termaksud kepada **karaman i Sabaya** ialah beliau-beliau yang berkedudukan di :[96]

1. Dhammahanar

2. Puspadanta
3. Hyang Karampas
4. Makarun
5. dan seorang samgat juru wedwa, yaitu dang acaryya Agoreçwara.

Dari golongan kasogatan yaitu :[97]
1. Mpungkwing Kadikaran
2. Mpungkwing Canggini
3. Mpungkwing Bajraçikara
4. Samgat mangiren ngiren wandami.

Di samping kedua sekte yang telah kita sebutkan di atas, barangkali ada baiknya ditambahkan juga hal-hal sebagai berikut. Dari prasasti juga kita mengetahui adanya pemujaan terhadap bhatara Ganapati (sekte Ganapatya). Dalam prasasti Campaga dapat kita baca "..... **kapanjing mare i sira bhatara ganapati ring tumpuhyang** ....." (dihaturkan kepada bhatara Ganapati yang dipuja di Tumpuhyang).[98] Mengenai adanya sekte Bhairawa mungkin arca Durgamasisasuramardhini yang terdapat di pura Bukit Dharma (Kutri), dan arca Bhima di pura Kebo Edan (Pejeng)[99] dapat ditunjuk sebagai sekedar contoh di samping banyak yang lainnya lagi. Kemudian kita dapat baca pula dalam prasasti bahwasanya seseorang raja dianggap sebagai inkarnasi Wisnu. Dalam prasasti 554 Bwahan C yang berasal dari raja Jayaçakti Umpamanya dapat kita baca : "..... **swabhawani kadi sira prabhu saksat ira wisnumurtti** ....." (sebagai seorang raja semata-mata perwujudan Wisnulah baginda itu). Ungkapan seperti itu mungkin tidak semata-mata menyatakan agama yang dianut raja Jayaçakti bahkan mungkin lebih cenderung dilandasi oleh suatu pandangan tentang adanya keserupaan fungsi antara dewa Wisnu dan tokoh raja di dunia dalam arti dewa Wisnu sebagai penguasa **sthiti** yang berfungsi sebagai pemelihara serta pelindung dunia beserta segala isinya yang sangat sesuai dengan kewajiban bagi seseorang raja yakni sebagai pelindung negara dan rakyatnya. Bagaimanapun juga keadaan di atas memberikan gambaran bahwasanya tokoh dewa Wisnu menduduki tempat istimewa dalam hati raja maupun penduduk, khususnya pada zaman Bali Kuna.

Sebagai hal terakhir yang tidak kami singgung pada bagian ini ialah gambaran yang kita peroleh dari bagian "**çapatha**" yang kadang-kadang pula juga termuat pada suatu prasasti. Dari bagian tersebut kita dapat pahami bahwa penduduk juga menyatakan kepercayaannya serta rasa takutnya kepada makhluk-makhluk seperti **yaksa, raksasa, pisaca, preta, aura, garuda, gandarwa** serta dewa -

dewa yang tergolong dalam "**caturloka phala**" yaitu : Yama, Bruna, Kuwera, Basawa, dan lain-lainnya.[100]

3.4.2. Bangunan agama.

Prasasti-prasasti juga memberi cukup banyak nama-nama bangunan suci atau bangunan-bangunan keagamaan. Pada prasasti 001 Sukawana lembar Ib.3. umpamanya dapat kita baca nama : **pertapaan setra** yang terletak di daerah perburuan.[101] Mungkin yang dimaksud dengan **pertapaan setra** ialah suatu pertapaan yang dilengkapi dengan suatu bangunan pesanggrahan. Suatu bangunan suci yang bernama **prasada** telah disebut pula dalam prasasti untuk penduduk yang dikeluarkan atas nama raja : Sang Ratu Çri Janasadhu Warmmadewa pada tahun Çaka 897.[102]

Kemudian suatu urut-urutan penyebutan beberapa nama bangunan suci kita dapat baca pada salah satu prasasti raja Anak Wungçu. Dalam prasasti nomer 439 Klungkung A (Çaka 994) pada lembaran IIb. 2–3. terbaca "..... **çala hyang wihara, patapan, silunglung, kaklungan, kamulan, panglumbigyan, padmak, sambar-sambaran** ....."[103] Sebagian dari nama-nama itu belum kita dapat pahami dengan jelas. Wihara (**hyang wihara**) adalah bangunan Buddhistis yaitu semacam asrama para pendeta agama Buddha yang juga dilengkapi dengan tempat sembahyang (**Chaitya**). Dengan **patapan**, besar kemungkinan yang dimaksud ialah pertapaan. **Silunglung** mungkin suatu bangunan yang ada hubungannya dengan upacara kematian, tetapi dengan **kaklungan** sama sekali belum jelas yang dimaksud. Kata **kamulan** mengingatkan kita pada "**sanggah kamulan**" atau "**sanggah kawitan**" yang umum terdapat pada tiap-tiap rumah keluarga di Bali pada dewasa ini. **Pangulumbigyan** juga rupanya erat sangkut pautnya dengan upacara kematian. **Padmak** tidak begitu jelas maksudnya bagi kita. Dengan kata **sambar-sambaran** barangkali dapat dimengerti maksudnya bangunan tempat bersembahyang tetapi yang belum jelas jenis bangunan yang manakah yang dimaksud.

Dari prasasti-prasasti kita dapat juga mengetahui beberapa tempat suci di mana dipuja bhatara-bhatara tertentu, dihubungkan dengan nama lokal. Dapat disebutkan antara lain :

1. Bhatara ri Tulukbyu

Disebutkan dalam prasasti nomer 605 Batur, Pura Abang A.[104] Pada dewasa ini masih ada pula yang bernama pura Tulukbyu, terletak di desa Batur Kecamatan Kintamani daerah Tingkat II Bangli. Kemungkinan besar pura inilah yang dimaksud dengan tempat suci yang tersebut dalam prasasti tersebut di atas.

2. Bhatara ri Dharmmahanar

Menurut Stutterheim yang dimaksud dengan nama itu ialah suatu bangunan suci yang terletak dekat pura Pengukur–Ukuran di desa Sawah Gunung (Pejeng).[105]

3. Bhatara Bukit Humintang

Disebut dalam prasasti nomer 407 Dausa AII.[106] Mengelokasikannya belumlah jelas kita ketahui.

4. Bhatara ring Antakunjarapada

Tersebut dalam prasasti nomer 404a Dawan (Çaka 975). Menurut Dr. R. Goris yang dimaksud dengan nama tempat suci itu ialah Goa Gajah pada dewasa ini.[107]

5. Bhatara ing Air Kanakantaralaya

Disebut dalam prasasti 446 yang bertahun Çaka 999.[108] Lokasinya belum dapat diketahui.

6. Sanghyang kàtyagan ing pakrisan mangaran ring Amarawati.

Menurut Dr. R. Goris yang dimaksud dengan nama tempat suci itu ialah komplek Gunung Kawi yang terletak di Tampaksiring pada dewasa ini.[109]

Akhirnya pembicaraan singkat mengenai bangunan-bangunan suci ini kami tutup dengan menyebutkan beberapa tempat yang dihubungkan dengan tempat pemakaman atau tempat percandian seorang raja. Sebagian besar dari padanya tidak kita ketahui lokasinya dan juga tidak jelas raja mana yang dimaksud. Tempat suci tersebut antara lain :

1. **Sang lumah di Air Madatu** atau **sang lumah ri Banu Madatu** Menurut Dr. R. Goris adalah tempat percandian raja Ugrasena.[110]

2. Sang Ratu sang lumah di Bwah Rangga.

Tersebut dalam prasasti nomer 209. Sembiran A II (Çaka 897)[111] Entahlah raja mana yang dimaksud.

3. Sang lumah ring Nusa Dua

Disebutkan dalam prasasti nomer 303 Bwahan A (Çaka 916)[112] Juga belum diketahui raja mana yang dimaksud.

4. Bhatara lumah i Burwan

Sering terbaca pada prasasti raja Anak Wungçu. Bacalah prasasti-prasasti nomer 410, 431, 434, dan lain-lainnya.[113] Adapun yang dimaksud ialah nama penyucian dari ibunda Anak Wungçu yaitu Gunapriyadharmapatni.

5. Bhatara lumah i Banu Wka

Juga sering disebutkan dalam prasasti raja Anak Wungçu[114] mengikuti gelar penyucian Gunapriyadharmapatni. Di sini dimaksud ialah raja Udayana setelah mangkat dan disucikan.

6. Bhatara lumah ing Çamara

Kita dapat baca dalam prasasti nomer 441 Sukawana A II (Caka 995).[115] Menurut Dr. R. Goris, yang dimaksud ialah raja

Marakata setelah mangkat.

3.5. **Hubungan ke luar.**

3.5.1. Bentuk hubungan.

Sampai saat ini kita belum menemukan data-data kongkrit yang menunjukkan adanya hubungan Bali dengan dunia luar secara langsung di sekitar abad 1 sampai tahun 1500 masehi. Kekurangan bahan-bahan dalam penguraian hal tersebut menimbulkan beberapa interpretasi di kalangan para sarjana untuk menguraikan huhubungan di atas.

W.P. Groeneveldt pada tulisannya mengatakan bahwa sejak zaman dinasti Tang (618–906), Bali telah mengadakan hubungan langsung dengan Cina. Pendapat ini didasari atas catatan yang ditulis para pilgrim Cina yang antara lain menyebutkan bahwa:[116]

> ..... Dva-pa-tan terletak di sebelah selatan Kamboja. Jarak Dva-pa-tan dengan Kamboja dapat ditempuh dengan laut selama dua bulan perjalanan. Batas-batas yang membatasi Dva-pa-tan sebelah Timur Kaling (Jawa), sebelah Barat-nya Mi-li-ku dan sebelah utara dibatasi oleh lautan. Adat-istiadat hampir bersamaan dengan kebiasaan yang dilakukan di Kaling. Padi dapat dihasilkan dua kali setahun dan mereka menulis di atas daun lontar. Jika ada salah seorang penduduk meninggal pada mulut si korban diberi emas, tangan dan kaki dihiasi gelang, dikalungi serta dibarengi dengan bermacam-macam wangi-wangian yang pada akhirnya mayat si korban dibakar.

Kemungkinan berdasarkan alasan di atas yang dihubungkan dengan tradisi sampai sekarang di Bali, Groeneveldt cenderung menduga bahwa yang dimaksud Dva-pa-tan pada catatan itu tidak lain pulau Bali yang terletak di Timur pulau Jawa.

Di samping interpretasi hubungan di atas kita melihat pula adanya hubungan tidak langsung antara Bali dengan dunia luar seperti India, Khemer dan sebagainya. Hal ini dapat kita ketahui pada bidang agama, ikonografi, kesusastraan serta cabang-cabang kesenian lainnya yang perkembangannya meresap melalui Jawa dan Sumatra.

3.5.2. Akibat hubungan.

Seperti telah kami singgung di atas, pada pasal ini kami tidak mungkin dapat menjelaskan akibat-akibat hubungan langsung antara Bali dengan dunia luar pada zaman kunanya. Karenanya baiklah pada bagian ini kita tinjau sejenak beberapa akibat yang ditimbulkan adanya hubungan tidak langsung itu.

Bali pada saat ini terkenal dengan pulau yang penuh dengan berbagai upacara. Hampir setiap tindakan disertai dengan saji-saji-

an yang dilaksanakan penuh hikmat dan ketenangan. Pada tiap upacara keagamaannya selalu kita menemukan uang kepeng yang berasal dari Cina dipergunakan sebagai pelengkap jalannya upacara. Ada kalanya uang kepeng uang kepeng tersebut dibentuk dalam suatu perwujudan arca yang dikenal sekarang dengan patung "**palinggihan**" (dalam bentuk binatang), "**rambut sedana**" (berbentuk manusia yang melambangkan dewa kekayaan) Arca perwujudan ini disimpan dalam pura, dipuja dan dihormati penduduk. Bahkan penduduk menyebutkan uang kepeng Cina tersebut "**pis koci**" (uang suci). Hal ini membuktikan betapa besar pengaruh yang ditimbulkan akibat hubungan di atas.

Dalam perkembangan Bali selanjutnya pengaruh Cina dapat pula kita lihat adanya porselin-porselin yang tersebar di seluruh pelosok Bali berasal dari dinasti Tang, Ming di samping porselin yang berasal dari Swatow dan Sawangkalok. Dalam seni pahat kita menjumpai adanya beberapa pengaruh, menyusup ke dalam inspirasi seniman-seniman Bali seperti pada relief, bentuk "**sae**", "**patra Cina**", di samping "**patra Mesir** atau **Kuta Mesir**", "**patra Holanda (Belanda)** lainnya.

Pengaruh-pengaruh dunia luar lainnya yang sangat terkemuka di Bali adalah pengaruh yang diterima dari India. Agama penduduk Bali yang mayoritas Hindu tidak dapat dipisahkan dengan agama Hindu dan Budha yang ada di India, walaupun dalam beberapa segi sedikit mengalami perubahan sesuai dengan alam pikiran serta kondisi daerah Bali. Kitab Weda, kitab suci agama Hindu, di Bali dipuja dan dihormati sehikmat-hikmatnya. Para pendeta dari keturunan Brahmana dalam Catur Warna tetap menduduki urutan pertama pada pelaksanaan upacara-upacara keagamaan.

Di bidang kesusastraan pengaruh India telah luluh dengan penduduk. Bahkan dua buah epos yaitu Ramayana dan Mahabharata yang juga merupakan cerita amat terkenal di India, yang penuh dengan ajaran-ajaran falsafah keagamaan oleh penduduk Bali dianggap sebagai kitab suci Weda. Keduanya amat digemari di samping cerita-cerita lainnya.

Selanjutnya pada sebuah pura di desa Wanayu—Gianyar, tersimpan sebuah patung yang ditinjau dari expresi dan hiasan kepalanya mengingatkan kita kepada patung-patung yang ada di Khmer. Bagaimana hubungan ini terjadi, hal ini perlu kitanya diadakan penelitian dan penyelidikan yang lebih serius.

CATATAN

1. Baca pada rangka 3.4.1. di bawah nanti.
2. Vide Stutterheim, **OB.** I (Teks), p.59.
3. Lihat Goris, **PB.** I, pp.53–54.
4. Ibid, pp.54–56.
5. Baca Goris, **AHB**, pp. 9–11.
6. Periksa Goris, **PB.** II, p.243 dan p.313.
7. Baca Goris, **PB.**I, pp.63–72.
8. **Ibid**, p.64.
9. **Ibid**, pp. 74–77
10. **Ibid**, p.2.
11. **Ibid**, p. 75–76.
12. **Ibid.**
13. **Ibid**, p. 77–79.
14. Ibid, p. 79–80.
15. Vide Goris, AHB, pp. 21–22.
16. Lihat Goris, **PB**,I, pp. 80–94, pp. 105–107.
17. Vide Goris SBK, p.6.
18. Lihat Goris, **PB**, I. pp. 95–96.
19. **Ibid**, pp. 96–101.
20. **Ibid**, pp. 101–105 (untuk nomer-nomer 353 dan 355) dan juga baca I Putu Budiastra, **Djaman Pemerintahan Marakata**, Denpasar, 1969, (skripsi) passim.
21. Baca Goris, PB. I, pp. 23–24.
22. Baca Ida Bagus Santosa, **Prasasti-Prasasti Radja Anak Wungcu** di Bali, Denpasar, 1965, (skripsi), p. 116.
23. **Ibid**, pp. 21–54, pp. 114–209, ct. Goris, **AHB**, pp. 31–32.
24. Periksa Goris, **PB**, I, ? p.17, 20, 21, 22 dan 24.
25. Vide Goris, **AHB**, p. 33.
26. Ibid, p.cf. Goris, PB, I, pp. 27–28.
27. Goris, **AHB**, p. 35.
28. **Ibid.**
29. Ibid, pp. 36–37.
30. Ibid serta periksa pula Goris, **PB**, I, pp. 29–31.
31. Baca Ktut Ginarsa, **Prasasti Baru Radja Ragajaya**, Singaraja, 1968, p. 14.sgg.
32. Mengenai raja ini segera akan selesai sebuah skripsi tingkat doktoral oleh I Gde Semadi Astra, **Jaman Pemerintahan Maharaja Jayapangus di Bali**, Denpasar, 1976/1977.
33. Baca Goris, **SBK**, p.10.
34. Periksa Callenfels, **EB**, p. 36, 46.
35. **Goris, PB**, I, p. 32.

36. **Ibid**, pp. 31–40.
37. Goris, **AHB**, pp. 41–42.
38. Lihat kembali Callenfels, **EB**, pp. 56–59, cf. Goris, **AHB**, p. 43.
39. Vide Goris, **PB**, I, pp. 41–42.
40. Ibid, p. 42.
41. Lihat Callenfels, **EB**, p. 50.
42. Lihat Goris, **PB**, I, p. 43.
43. Ibid. cf. Callenfels, **EB**, p. 68–70.
44. Periksa Goris, **SBK**, pp. 11–12.
45. Lihat Goris, **PB**, I, p. 44. cf. Goris, **AHB**, p. 47.
46. Baca Goris **AHB**, p. 47 dan p. 63–64. cf. Stutterheim, **OB**, I (teks) p. 79.
47. Vide Muhamad Yamin, Gajah Mada, cet ke 6, Jakarta, 1960, 47–49.
48. Lihat kembali Goris, **SBK**, p. 10.
49. **Ibid**, pp. 12–13.
50. **Ibid**.
51. Baca I Gde Semadi Astra, **Struktur Birokrasi**, p. 8.
52. Vide Goris, ABK, p. 13.
53. Vide I Putu Budiastra, O.C. passim.
54. Vide Ida Bagus Santosa, O.C. passim.
55. Baca Ktut Ginarsa, O.C, pp. 2–3.
56. Baca I Gde Semadi Astra, **Struktur Birokrasi**, p.13–14.
57. Vide Goris. **SBK**, p. 13.
58. Vide I Gde Semadi Astra, **Struktur Birokrasi**, p.15.
59. Baca Goris, **SBK**, p.14.
60. **Ibid**.
61. Lihat I Gde Semadi Astra, Struktur Birokrasi, p.16.
62. **Ibid**.
63. **Ibid**. p. 5–6 cf. Callenfels, EB, pp. 68–70.
64. Lihat Goris, **PB**, I, p.65.
65. Vide Goris, PB, II, p.243, p.313.
66. Periksa Dr. Prijohutomo, **Sejarah Kebudayaan Indonesia, II**, Jakarta, 1953, p.107.
67. Vide Dr. R. Goris, Enkele Historische en Sosiologische Gegevens uit de Balische Oorkonden, TBG, 81,3,1941, p.281.
68. Muhamad Yamin, o.c. p.47.
69. I Putu Budiastra o.c. hal. 27, lihat Goris **PB,I** hal. 100.
70. Prasasti Goris 104.
71. Prasasti Goris 107.
72. Prasasti Goris 001.
73. Prasasti Goris 201.

74. M.M. Sukarto K Atmojo, Struktur Pemerintahan dan Masyarakat Djaman Anak Wunggu, hal. 31.
75. Ibid.
76. Pada beberapa daerah pegunungan di Bali seperti, Trunyan, Tianyar, masih juga dilaksanakan sistim barter.
77. Dr. P.V. van Stein Callenfels, E.B.I. hal. 31.

4. ZAMAN BARU 1500 – 1800

4.1. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan.

Dalam periode tahun 1500–1800 terdapat kerajaan-kerajaan Bali yang pada mulanya berpusat di Gelgel kemudian pindah ke pusat yang baru di Klungkung. Sejak berdirinya kerajaan Klungkung, berdiri pula kerajaan-kerajaan lainnya sehingga pulau Bali tidak lagi merupakan satu kerajaan tetapi telah terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan. Setiap kerajaan yang timbul berusaha untuk melepaskan diri dari kerajaan Klungkung. Antara kerajaan Klungkung dengan kerajaan lainnya di Bali mempunyai hubungan yang bersifat horisontal dalam bidang ketatanegaraan. Berbeda dengan periode kerajaan Klungkung, secara ketatanegaraan kerajaan Bali yang berpusat di Gelgel mempunyai hubungan vertikal. Daerah-daerah bagian tunduk kepada satu pemerintahan pusat.

4.1.1. Pertumbuhan.

Pada tahun 1343 kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan pulau Bali.[1] Para penguasa Bali yang memegang pemerintahan sebelumnya seperti Pasung Grigis bertugas menyerang raja Sumbawa yaitu Dedelanata dan keduanya gugur di dalam pertempuran.[2] Untuk memegang pemerintahan, Gajah Mada atas nama kerajaan Majapahit menugaskan Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan menjadi raja di Bali. Raja ini adalah putra ketiga Mpu Kepakisan dan mendirikan keraton di Samprangan, daerah Gianyar.[3]

Para arya yang berjasa menaklukkan pulau Bali, ditempatkan di desa-desa. Arya Kenceng di Tabanan, Arya Sentong di Pacung, Arya Belog di desa Kaba-Kaba.[4] Menurut **Babad Dalem Turun** ke Bali, Arya Kenceng di Gelgel, Arya Kepakisan di Bedaulu, Arya Bleteng di Tangkas, Arya Belog di desa Kaba-Kaba.[5]

Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan masih menghadapi pemberontakan rakyat "Baliaga". Mereka kebanyakan berasal dari desa-desa pegunungan Kabupaten Bangli dan Karangasem : Kedisan, Batur, Cempaga, Songan, Abang, Pinggan, Serai. Ada pula dari desa Manikliu. Bonyoh, Sukawana, Got, Margatiga, Ulakan dan ada pula yang berasal dari desa Datah, Pesedahan.[6] Raja Bali sebagai vasal mengirim utusan ke Majapahit. Gajah Mada memberikan na-

sehat-nasehat untuk membesar-besarkan hati raja Bali dan memberikan hadiah berupa keris. Di samping itu tersebut juga pakaian kebesaran.[7] Orang-orang Baliaga mulai mendapat serangan. Arya Gajah Pura menyerang dari sebelah Timur, Tan Kober, Tan Mundur, Tan Kaur menyerang dari sebelah Barat. Orang-orang "Baliaga" tunduk.[8]

Dalem Samprangan yang menggantikan Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan tidak cakap memegang pemerintahan.[9] I Gusti Kebontubuh menghadap kepada adik Dalem Samprangan yaitu Dalem Ketut Ngelesir yang kebetulan ada di desa Pandak (Tabanan) dan mohon agar beliau mau menjadi raja. I Gusti Kebontubuh mempersembahkan tanah miliknya di Gelgel untuk membangun istana. Dalem Ketut Ngelesir menjadi raja dengan keraton yang baru di Gelgel.[10]

Kerajaan Gelgel mulai tumbuh. Dalem Ketut Ngelesir menyempurnakan pemerintahan. Pembesar-pembesar rakyat "Baliaga" mendapat perhatian. I Pasek Gelgel menjadi pegawai di istana Gelgel. I Pasek Ngukuhin menjadi kepala rakyat di pegunungan-pegunungan.[11] Dalam masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir kerajaan Bali aman.[12]

4.1.2. **Perkembangan.**

Dalem Waturenggong mewarisi kerajaan Bali dalam keadaan aman. Beliau adalah satu-satunya putra mahkota.[13] Keamanan menjadi dasar perkembangan kerajaan di dalam segala bidang. Pertanian seperti padi dan kelapa tumbuh dengan subur.[14] Kerajaan Bali menaklukkan Blambangan di bawah pimpinan Kyai Ularan.[15] Daerah-daerah lain seperti Puger di pulau Jawa, Nusa Penida, Lombok dan Sumbawa menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Bali pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong.[16] C. Berg menarik kesimpulan bahwa Dalem Waturenggong adalah raja terbesar dalam sejarah pemerintahan dinasti Mpu Kepakisan di Bali.[17]

Dalem Bekung yang menggantikan kedudukan Dalem Waturenggong sangat lemah, tidak berwibawa. **Babad Dalem Samprangan** menyebutkan Dalem Bekung masih kecil.[18] **Babad Dalem** secara tegas memberikan keterangan bahwa Dalem Bekung tidak cakap memegang pemerintahan. Lebih cakap Dalem Segening.[19] Oleh karena itu untuk memegang pemerintahan, Dalem Bekung mendapat bantuan dari paman-paman beliau : I Dewa Gedong Arta, I Dewa Nusa, I Dewa Anggunan dan lain sebagainya.[20]

Situasi politik dalam negeri sangat kacau, demikian juga hubungan dengan luar, mengalami kesulitan. Pada masa ini timbul pemberontakan I Gusti Batanjruk. Danghyang Astapaka telah me

nasehati I Gusti Batanjruk agar jangan memberontak. Beliau tetap meneruskan pemberontakan. I Dewa Anggungan memegang peranan penting. Dalam rencana, I Dewa Anggungan dinobatkan menjadi raja. Laskar kerajaan Bali sebagian besar tetap setia kepada raja, melakukan perlawanan. I Gusti Batanjruk melarikan diri dan terbunuh di desa Jungutan. I Dewa Anggungan tidak diakui sebagai ksatrya Dalem.[21] Pada masa ini, desa Tuban mendapat serangan dari kerajaan luar Bali.[22]

Kekacauan politik dalam negeri terus berlarut-larut. Pada masa pemerintahan Dalem Bekung timbul lagi pemberontakan I Gusti Pande. Dalem Bekung memerintahkan I Gusti Pande untuk membunuh I Gusti Telabah yang telah berani mencintai istri Dalem Bekung. Dengan perantaraan Ki Capung, I Gusti Telabah terbunuh tetapi diketahui oleh I Gusti Kanca yaitu keluarga I Gusti Telabah. I Gusti Kanca melaporkan kejadian ini kepada Dalem Bekung dan menuntut untuk membunuh I Gusti Pande. Karena keluarga I Gusti Kanca sangat banyak, Dalem Bekung menuruti kehendak I Gusti Kanca. Laskar kerajaan Bali berhasil membunuh I Gusti Pande, putra-putra serta pengikutnya.[23]

Oleh karena Dalem Bekung tidak mempunyai putra, Dalem Sagening naik tahta kerajaan Bali.[24] Kerajaan Bali aman. I Gusti Ngurah Jelantik memimpin ekspedisi laskar kerajaan Bali terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu orang). I Gusti Ngurah Jelantik gugur dalam pertempuran.[25]

Pada masa pemerintahan Dalem Di Made yaitu putra ke dua Dalem Sagening, kerajaan Bali mengalami kekacauan politik yang paling hebat di dalam sejarah Bali. I Gusti Agung Widia melakukan pemberontakan dan berhasil menduduki istana Gelgel sehingga Dalem Di Made mengungsi ke desa Guliang dan meninggal di sana.[26] Dengan demikian timbullah dua buah pusat kerajaan. I Gusti Ngurah Singarsa mengirim surat, untuk minta bantuan kepada punggawa Badung dan Buleleng.[27] Kedua punggawa ini memberikan bantuan. Kyai Jambe Pule yang memimpin laskar Badung gugur dalam pertempuran. I Gusti Ngurah Panji Sakti dan patih Ki Tamblang memimpin laskar Buleleng, laskar I Gusti Ngurah Singarsa, laskar Dewa Agung Jambe berhasil mengakhiri kekuasaan I Gusti Agung Widia di Gelgel. Atas nasehat I Gusti Ngurah Singarsa, Dewa Agung Jambe membangun istana di Smarapura (Klungkung).[28] Kerajaan Klungkung berdiri pada tahun 1686.[29]

Dalam masa peralihan pusat kerajaan Bali di Gelgel, sampai timbulnya pusat kerajaan yang baru di Klungkung, muncullah kerajaan-kerajaan lainnya di Bali. I Gusti Ngurah Panji Sakti mendirikan kerajaan Buleleng.[30] Kerajaan-kerajaan yang lain misalnya

kerajaan Mengwi. I Gusti Agung Widia melarikan diri dari Gelgel. Keturunan beliau mendirikan kerajaan Mengwi dan berkembang menjadi salah satu kerajaan yang besar di Bali pada masa pemerintahan I Gusti Agung Sakti.[31] Di samping itu muncul pula kerajaan Karangasem, kerajaan Tabanan, kerajaan Badung, Gianyar, Bangli, Jembrana, dan Payangan. Pada abad ke XIX terdapat sepuluh buah kerajaan di Bali.[32]

4.1.3. **Kepemimpinan.**

Golongan ksatrya memegang pimpinan di dalam pemerintahan. Masyarakat tradisional membenarkan keadaan semacam ini. Hak golongan ksatrya untuk memegang pemerintahan dianggap sebagai karunia Tuhan. Mereka berhak memegang pemerintahan secara turun-temurun. **Brahmokta Widisastra** memberikan keterangan bahwa golongan ksatrya lahir dari tugas khusus. Pekerjaan mereka hanya memerintah, mengetahui cara-cara memanah.[33]

Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan yang mendirikan dinasti Mpu Kepakisan di Bali merupakan keturunan seorang Brahmana yaitu Mpu Kepakisan.[34] Mereka memegang pemerintahan secara turun-temurun dan memakai gelar "Dalem". Gelar ini dipakai sejak kerajaan Bali berpusat di Samprangan sampai Gelgel runtuh. Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan, Dalem Ile (Dalem Samprangan) Dalem Ketut Sri Smara Kepakisan (Dalem Ketut Ngelesir), Dalem Waturenggong (Dalem Baturenggong), Dalem Bekung (Dalem Pemayun) Dalem Sagening dan raja terakhir adalah Dalem Di Made.[35]

Orang-orang yang memegang jabatan di bawah raja merupakan keturunan para Arya yang menaklukkan Bali. Secara turun-temurun mereka memakai gelar "I Gusti". I Gusti Kebon Tubuh keturunan Arya Kuta Waringin, I Gusti Pinatih keturunan Arya Wangbang, I Gusti Lurah Tabanan keturunan Arya Kenceng, I Gusti Petangakan, I Gusti Batanjruk, I Gusti Nginte, I Gusti Agung Widia adalah keturunan Arya Kepakisan.[36]

Lain halnya setelah kerajaan Klungkung berdiri. Raja yang memegang pemerintahan di kerajaan Klungkung memakai gelar "Dewa Agung" misalnya Dewa Agung Jambe.[37] Setelah pemerintahan, Dewa Agung Jambe, raja Klungkung memakai gelar Dewa Agung Putra secara turun-temurun.[38]

Raja-raja yang memegang pemerintahan di kerajaan-kerajaan lainnya memakai gelar I Gusti Ngurah, I Gusti, I Dewa. I Gusti Ngurah Panji Sakti, I Gusti Ngurah Panji Gde di kerajaan Buleleng.[39] I Gusti Agung Sakti di kerajaan Mengwi.[40] Di kerajaan Gianyar, raja memakai gelar I Dewa. Misalnya I Dewa Manggis

Kuning, I Dewa Manggis Pahang.[41]

Di dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Bali dapat diketemukan tokoh pimpinan kekuasaan yang kharismatis. Tokoh-tokoh elite pemerintahan oleh sumber-sumber tradisional digambarkan secara berlebih-lebihan. Sri Kresna Kepakisan lahir dari Bidadari dan mempunyai kakek batu.[42]

Putra Dalem Segening yang lahir dari ni Luh Pasek, mengeluarkan cahaya dari kepala. Dalam perjalanan pulang ke desa Panji, banyak mengalami peristiwa yang ajaib. Pada waktu kekurangan air minum, ia menancapkan kerisnya ke tanah seketika keluar air yang jernih. Di pegunungan dia menjumpai makhluk yang sangat besar dan tinggi. Makhluk ini mengangkatnya sehingga dia bisa melihat ujung timur pulau Jawa, semua daratan pulau Bali dan laut-laut yang mengelilingi pulau Bali. Kemudian ternyata putra Dalem Segening menjadi raja sebagai pendiri dinasti Panji Sakti di kerajaan Buleleng.[43]

Pendiri kerajaan Gianyar juga memiliki kharisma pribadi. Sebelum I Dewa Manggis Kuning menjadi raja di Gianyar beliau mengeluarkan cahaya dari kepala.[44] Di samping tokoh-tokoh politik yang kharismatis terdapat juga tokoh-tokoh agama. Kesaktian merupakan ukuran setiap pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpin agama. Danghyang Nirarta, yang menjadi pendeta kerajaan, membakar diri dalam upacara homa tetapi beliau sendiri tidak terbakar. Oleh karena upacara homa itu berhasil, pertanian berkembang subur. Kerajaan Bali makmur.[45]

Dalam sumber-sumber tradisional di Bali, pendeta kerajaan yang bertugas menasehati raja dalam bidang pemerintahan disebut "Cudamanya".[46] Di samping itu terdapat istilah "Bagawanta" menjadi istilah yang sangat umum untuk menyebut pendeta kerajaan yang bertugas menasehati raja dalam bidang pemerintahan.[47]

Para pegawai kerajaan yaitu orang-orang yang membantu raja disebut "mantri" dan mereka memakai gelar "Rakryan".[48] Di kerajaan Bali khususnya pada waktu pusat pemerintahan di Gelgel, gelar "Rakryan" sering disingkat. Oleh karena itu terdapat istilah "Kryan". Misalnya untuk menghormati patih Batanjruk yaitu patih Dalem Waturenggong, sumber-sumber tradisional tidak perlu menyebutkan Rakryan Patih Batanjruk secara lengkap tetapi cukup menyebutkan Kryan Patih atau Kryan Patih Batanjruk.[49]

Para pembantu raja yang bertugas mengurus sebuah desa biasanya memakai gelar "Lurah". Oleh karena itu terdapatlah I Gusti Lurah Tabanan, I Gusti Lurah Kapal.[50]

4.1.4. **Pengaturan.**

Untuk melancarkan jalan pemerintahan di Bali, Dalem Ketut Ngelesir yaitu raja Bali yang pertama kali menaiki tahta kerajaan di Gelgel berusaha mengoper serta mentrapkan cara-cara pemerintahan yang ada di kerajaan Majapahit. Tindakan yang dilakukan ini memang sesuai dengan perintah raja Hayamwuruk. Dalem Ketut Ngelesir menerima perintah ini pada waktu beliau menghadap ke Majapahit bersama kerajaan-kerajaan yang lain seperti Madura, raja Wengker sebagai raja Vasal.[51] Sebagai akibatnya cara-cara pemerintahan yang ada di kerajaan Bali mempunyai persamaan-persamaan dengan cara-cara pemerintahan kerajaan Majapahit. Menurut **Babad Dalem**, raja Hayamwuruk mengharuskan kepada raja Bali untuk mempergunakan **Manawasasana** sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. **Manawasasana** menjadi pedoman di kerajaan Majapahit pentrapannya berhasil dengan baik.[52]

Di Bali dapat diketemukan sumber tradisional yang memakai judul **Nawasasana** dan bukan **Manawasasana. Nawasasana** adalah sebuah lontar yang pada pokoknya menguraikan tentang urutan-urutan upacara terutama pada waktu raja bersama-sama para pembesar kerajaan melakukan persidangan di istana. Di samping itu **Nawasasana** menguraikan juga tentang bagaimana dan tindakan serta kode etik yang seharusnya dipergunakan, terutama pada waktu para pembesar kerajaan menghadap raja dan sebagainya.[53]

Di samping pedoman-pedoman yang telah tersebut di atas, kerajaan yang ada di Bali mempergunakan pula pedoman-pedoman yang tercantum dalam **Nawanatya.**[54] Di dalam buku **Tatanegara Majapahit** karangan Muhammad Yamin, memuat salinan yaitu sebuah transkripsi yang memakai judul **Nawanatyagama.** Salinan ini menguraikan tentang jabatan-jabatan pemerintahan yang ada di bawah jabatan raja seperti Dyaksa, patih Amangku Bumi, Hino, Sirikan, Halu, Demung, Tumenggung, Rangga, Kanurahan dan lain sebagainya. Di samping itu menguraikan pula tentang bagian-bagian dari istana dan keraton misalnya pengastryan, Alun-alun, pasar. Uraian yang lebih penting adalah tugas dan tanggung jawab setiap pejabat dari pejabat patih sampai jabatan yang paling rendah.[55]

Dalam salinan **Nawanatyagama** itu tersebut pula sebuah buku yang berjudul **Negarakrama.**[56] Di Bali dapat diketemukan sebuah lontar yang memakai judul **Kramanegara.** Dalam lampiran terakhir (19a) disebutkan bahwa **Kramanegara** disebut juga **Mantrisasana.** Lontar ini menguraikan tentang kewajiban-kewajiban para pembesar kerajaan kepada raja sebagai penguasa tertinggi.[57]

Dalam Babad Mengwi tersebut bahwa **Rajaniti** juga merupakan pedoman yang harus diketahui oleh seorang raja yang meme-

gang pemerintahan.[58]

Di dalam melaksanakan pemerintahan, raja didampingi oleh seorang pendeta kerajaan (Bhagawanta). Danghyang Nirarta adalah pendeta kerajaan pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong di Gelgel.[59] Dalam perkembangan selanjutnya yaitu setelah berdirinya kerajaan Klungkung dan timbulnya kerajaan-kerajaan lain di Bali, keturunan pendeta ini tetap memegang peranan penting. Ida pedanda Sakti Ngurah adalah seorang pendeta kerajaan Buleleng pada masa pemerintahan raja I Gusti Ngurah Panji Sakti.[60]

Dalam lembaga pemerintahan di kerajaan Bali, terdapat jabatan patih. Lain halnya dengan kerajaan Majapahit karena di kerajaan Majapahit terdapat jabatan patih Amangku Bumi. Jabatan patih Amangku Bumi pernah dipegang oleh Gajah Mada sampai tahun 1364.[61] Di samping itu terdapat juga pegawai tinggi kerajaan yang terdiri dari lima buah jabatan yaitu : Patih, Demung, Tumenggung, Rangga dan Kanuruhan.[62] Sampai pemerintahan Dalem Di Made, kerajaan Bali tetap mempunyai tiga pegawai tinggi kerajaan yang terdiri dari jabatan Patih, Demung dan Tumenggung.[63] Akhirnya terdapat juga jabatan kepala desa yaitu para Lurah,[64] termasuk juga golongan Pasek dan Bendesa misalnya Pasek Gelgel, Pasek Kedisan, Bendesa Gadingwani, Bendesa Mas.[65]

Setelah timbulnya kerajaan Klungkung dan kerajaan-kerajaan lainnya di Bali, jabatan Demung dan Tumenggung belum tersebut dalam sumber-sumber. Jabatan-jabatan yang masih ada adalah Raja, kemudian Patih, Punggawa atau Manca dan jabatan kepala desa. Di kerajaan Buleleng jabatan Patih pernah dipegang oleh Ki Tamblang.[66] Jabatan Manca atau Punggawa dan kepala desa tersebut dalam sumber-sumber tradisional misalnya **Babad Mengwi**.[67]

Dalam sistem pengangkatan para pejabat, faktor keturunan memegang peranan penting. Raja dan pegawai yang membantu raja memegang pemerintahan secara turun-temurun. Putra mahkota merupakan satu-satunya keluarga raja yang berhak atas tahta kerajaan. Dalem Waturenggong adalah putra mahkota yang berhak menggantikan Dalem Ketut Ngelesir.[68] Setelah timbulnya kerajaan-kerajaan di Bali, sistem ini terus dipertahankan. I Gusti Ngurah Panji Gde adalah putra mahkota dan berhak menggantikan I Gusti Ngurah Panji Sakti.[69] Kedudukan keluarga laki-laki memegang peranan penting. Walaupun I Dewa Rangda Gowang merupakan putra tertua Dalem Segening. Namun Dalem Di Made lebih berhak menaiki tahta kerajaan menggantikan kedudukan Dalem Segening.[70] Dalam sistim pergantian pemegang kekuasaan, pengaruh raja tidak bisa diabaikan.

4.1.5. **Hubungan antar negara.**

Pada masa kerajaan Bali berpusat di Gelgel, daerah-daerah bagian mempunyai status kemancaan dan mengakui satu kekuasaan pusat. Para punggawa mengakui kekuasaan tertinggi Dalem di Gelgel yang menguasai seluruh pulau Bali sehingga Dalem disebut Sri Aji Bali.[71]

Pada saat-saat terakhir keraton Gelgel yaitu pada masa pembrontakan I Gusti Agung Widia, daerah-daerah bagian seperti Badung dan Buleleng masih tetap mempunyai status kemancaan. Sumber-sumber secara tegas memberikan keterangan bahwa daerah-daerah itu diperintah oleh seorang punggawa.[72] Sebagai seorang punggawa mereka merasa wajib memberikan bantuan kepada pemerintah pusat walaupun setelah perang berakhir keraton dipindah ke Klungkung.[73]

Dengan demikian hubungan antara Gelgel dengan daerah bagian merupakan hubungan vertikal. Secara ketatanegaraan, kerajaan Bali mempunyai sifat negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.[74]

Setelah timbulnya kerajaan-kerajaan di Bali, daerah-daerah yang mempunyai status kemancaan telah disebut "nagara" atau "panegara".[75] Di dalam abad ke XIX terdapat sepuluh buah kerajaan di Bali.[76] Pada zaman Klungkung hubungan antara kerajaan bersifat horisontal. Secara ketatanegaraan, kerajaan-kerajaan di Bali mempunyai bentuk federasi. Penghormatan terhadap raja Klungkung semata-mata hanya untuk menghormati bahwa beliau itu adalah keturunan Majapahit.[77]

Dewa Agung Jambe mendirikan kerajaan Klungkung dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan penguasa Badung oleh karena beliau mempunyai ibu dari Badung, yaitu saudara Kyai Jambe Pule yang gugur dalam pertempuran di Batuklotok, dekat Gelgel.[78] Keturunan Dewa Agung Jambe yaitu Dewa Agung Made mengambil istri di kerajaan Buleleng yaitu I Gusti Ayu Den Bukit, keturunan I Gusti Panji Sakti.[79]

Sebenarnya hubungan semacam ini terjadi pula antar kerajaan-kerajaan lain di Bali. Hubungan perkawinan menyelubungi maksud-maksud politik. Kerajaan Buleleng melakukan serangan ke-Jembrana dan Tabanan demikian juga kerajaan Mengwi. Setelah kerajaan Mengwi mengadakan perdamaian, I Gusti Ngurah Panji Sakti mengambil putri I Gusti Agung Sakti sebagai isteri.[80] Sebaliknya raja Mengwi yaitu I Gusti Agung Sakti berusaha mengambil putri raja Buleleng dan kemudian usaha ini berhasil. I Gusti Agung Sakti kawin dengan I Gusti Ayu Panji, putri I Gusti Ngurah Panji Sakti.[81]

Kontak peperangan terjadi pula antara kerajaan Buleleng dengan kerajaan Badung. I Gusti Ngurah Panji Sakti berasil memperisteri seorang dari kasta Wesya di kerajaan Badung.[82] I Gusti Ngurah Panji Sakti gagal melakukan serangan terhadap kerajaan Tabanan tetapi berhasil memperistri seorang putri kerajaan Tabanan. I Gusti Magada Sakti yaitu raja Tabanan menyerahkan putrinya yaitu I Gusti Abiantubuh sebagai istri I Gusti Ngurah Padang, putra I Gusti Ngurah Panji Sakti.[83]

Menurut De Graaf, I Gusti Ngurah Panji Sakti pernah juga melakukan serangan ke kerajaan Gianyar, ke Gelgel, ke Payangan.[84] Pada tahun 1711 kerajaan Buleleng mulai pudar, kerajaan Mengwi menjadi salah satu kerajaan yang besar di Bali, di bawah pemerintahan I Gusti Agung Sakti. Jajahan kerajaan Buleleng yaitu Blambangan diambil oleh kerajaan Mengwi.[85] Kejadian penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Bali adalah mengenai perjanjian bilateral yang terjadi antara kerajaan Buleleng, dengan kerajaan Tabanan. Perjanjian ini terjadi pada tahun 1734. Pada pokoknya perjanjian itu menetapkan bahwa masing-masing raja melarang perpindahan penduduk di antara kedua kerajaan dan mengadili seseorang yang melakukan kesalahan sesuai dengan hukum kerajaan dari mana ia berasal.[86] Pada abad ke XVII kerajaan Karangasem muncul dan berkembang menjadi salah satu kerajaan yang terbesar di Bali. Kerajaan Karangasem pernah melakukan serangan terhadap Gelgel, wilayah kerajaan Klungkung.[87] Pada tahun 1800 kerajaan yang besar ini melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng. Serangan ini dilakukan oleh karena permintaan keluarga raja Buleleng.[88]

Selama abad ke XVIII sampai permulaan abad ke XIX pulau Bali diliputi oleh sengketa perang. Kerajaan Klungkung melakukan serangan terhadap kerajaan Bangli pada tahun 1800 yaitu pada permulaan abad ke XIX.[89]

4.2. **Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat.**

Dalam Babad Smara Pura disebutkan bahwa situasi masyarakat yang ada pada waktu itu sesuai dengan uraian dalam Haji Brahmokta. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan berbeda-beda.[90] Di Bali dapat diketemukan sebuah lontar yang berjudul **Brahmokta Widisastra** yang menguraikan tentang pembagian golongan masyarakat : golongan brahmana, golongan ksatrya, golongan wesya, golongan sudra.[91]

4.2.1. **Pemenuhan kebutuhan hidup.**

Masyarakat Bali adalah masyarakat agraris sehingga kehidupannya sebagian besar tergantung kepada pertanian.[92] Pada abad ke XVI di Bali telah terdapat perdagangan. Bali mengeksport beras, kain.[93] Pada masa kerajaan Bali berpusat di Gelgel para pembesar kerajaan yang telah mengabdi kepada raja mendapat sebidang tanah. Tanah para pembesar kerajaan meliputi sebuah desa yang terbesar di seluruh pelosok pulau Bali. Nama-nama **apanage**,[94] mereka sesuai dengan nama-nama mereka sendiri.[95] I Gusti Abyantubuh mempunyai apanage di Abyantubuh (Gelgel), I Gusti Tabanan mempunyai apanage di daerah Tabanan dan lain sebagainya.[96] Dalam **Nawanatyagama** terdapat pembagian tanah untuk masing-masing jabatan. Orang yang memegang jabatan Demung mendapat pembagian tanah 1000, uang 2000; orang yang memegang jabatan Tumenggung mendapat tanah 4000; rakyat sebanyak 600 orang.[97]

Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Danghyang Nirarta membagi warisan kepada putra-putra beliau. Di antaranya terdapat warisan yang berbentuk uang dan tanah.[98] Para pengarang istana juga mendapat uang. Ida Manuaba menerima uang sebanyak 20.000 karena beliau berhasil menulis sebuah karangan dengan judul "Bali Sengara".[99]

Pada abad ke XVII dan abad ke XVIII, Bali menjadi Pusat perdagangan budak.[100] Pada tahun 1755 seorang duta Bali menerima 5000 **Rijksdaalder** untuk membayar budak-budak yang telah dijual kepada V.O.C.[101] Dalam sumber-sumber belum pernah kami menjumpai tentang bagaimanakah sebenarnya kehidupan ekonomi masyarakat pada waktu itu.

4.2.2. **Hubungan antar golongan.**

Dalam **Brahmokta Widisastra**, terdapat pembagian empat golongan masyarakat. Setiap golongan mempunyai tugas-tugas tersendiri. Tugas-tugas setiap golongan ditentukan oleh Tuhan dan sejak mereka lahir ke dunia. Golongan Brahmana mempunyai tugas untuk mendalami agama sesuai dengan petunjuk kitab suci Weda. Golongan Ksatrya lahir ke dunia dengan tugas utama memegang pemerintahan. Golongan Wesya maupun Sudra mempunyai juga tugas tersendiri sehingga antara golongan itu terpisah secara tegas baik dari segi kelahiran maupun dari segi kewajiban mereka di dalam masyarakat.[102]

Justru pemisahan secara tegas semacam ini menimbulkan saling ketergantungan. Para pemegang pemerintahan terdiri dari golongan Ksatrya. Mereka memerlukan sejumlah tenaga manusia un-

tuk mengerjakan tanah mereka sendiri. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Bendesa Mas memperoleh tanah sebanyak 200, untuk itu beliau mendapat rakyat 200 orang.[103]

Golongan Ksatrya terutama raja memperoleh nasehat-nasehat dari golongan Brahmana dalam berbagai ilmu. Hal ini sangat jelas antara raja dengan Bagawanta. Danghyang Nirarta memberikan nasehat dalam berbagai ilmu kepada Dalem Waturenggong.[104] Hubungan antara raja sebagai seorang Ksatrya dengan pendeta kerajaan sebagai seorang Brahmana demikian eratnya sehingga merupakan dwitunggal.[105] Setelah timbulnya kerajaan-kerajaan lain di Bali, hubungan semacam ini tetap ada. Misalnya hubungan antara pendeta kerajaan dengan raja Buleleng. Ida Pedanda Sakti Ngurah memilih dan menentukan hari baik bagi I Gusti Ngurah Panji Sakti sebagai raja Buleleng untuk melakukan serangan terhadap kerajaan Blambangan.[106]

Dalam **Manawa Dharmaçastra** disebutkan hubungan antara raja dengan rakyat. Raja sebagai penguasa tertinggi di dalam bidang pemerintahan mempunyai hak untuk memerintah dan mempekerjakan rakyat. Sebaliknya tugas untuk melindungi rakyat merupakan kewajiban utama seorang raja.[107]

Hubungan antar golongan tidak saja terbatas kepada tugas golongan masing-masing tetapi meliputi bermacam-macam bidang kehidupan. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong ada usaha untuk melarang perkawinan di luar golongan. Misalnya Dalem Waturenggong melarang semua golongan petani, khususnya petani yang cantik untuk memperlihatkan diri apabila raja sedang bepergian. Menurut Dalem Waturenggong Beliau sendiri sebagai seorang manusia sangat sukar untuk membendung panca indra. Dengan melarang semua petani wanita yang cantik memperlihatkan diri, beliau dapat menahan selera terhadap wanita.[108]

Golongan Brahmana juga berusaha untuk memurnikan golongannya sendiri dengan jalan menasehati keturunan. Danghyang Nirarta yang hidup pada waktu itu mengadakan pembatasan tegas terhadap keturunan beliau yang terdiri dari banyak golongan. Dalam **Babad Dwijendra Tatwa** disebutkan bahwa Danghyang Nirarta mempunyai keturunan yang ibunya berasal dari bermacam-macam golongan baik golongan Brahmana, Ksatrya, Sudra. Pada waktu makan secara bersama-sama, alat-alat makan bertabrakan dengan sendirinya antara yang satu dengan yang lain. Setelah terjadi berkali-kali, Ida Patapan dan Ida Bindu dipersilakan makan, memakai tempat dan alat-alat makan tersendiri. Alat-alat makan tenang. Oleh karena itu Danghyang Nirarta menasehatkan semua keturunan beliau bahwa Ida Bindu dan Ida Patapan yang lahir dari ibu go-

longan rendah tidak diperkenankan bergaul apalagi kawin dengan saudaranya yang lahir dari golongan tinggi.[109]

Walaupun terdapat pembatasan-pembatasan tegas namun dalam masa-masa berikutnya perkawinan antar golongan tetap terjadi. Sebagai seorang ksatrya, Dalem Segening kawin dengan Ni Luh Pasek Panji secara tersembunyi. Perkawinan ini melahirkan I Gusti Ngurah Panji Sakti. Menurut **Babad Buleleng** pada waktu sedang hamil, Ni Luh Pasek Panji diberikan kepada I Gusti Ngurah Jelantik dengan syarat, sebelum melahirkan I Gusti Ngurah Jelantik tidak boleh bercampur dengan Ni Luh Pasek Panji. Dengan demikian Dalem Segening dan penulis Babad merahasiakan perbuatan itu.[110]

Antara golongan ksatrya dengan golongan ksatrya dan antara golongan ksatrya dengan golongan wesya sering terjadi percampuran melalui perkawinan. Dalem Di Made sebagai seorang ksatrya Dalem kawin dengan saudara Kyai Jambe Pule dari Badung.[111] Perkawinan merupakan politik yang terselubung, yang sering dilakukan di Bali. I Gusti Ngurah Panji Sakti kawin dengan seorang wesya dari kerajaan Badung.[112]

4.2.3. **Kepemimpinan.**

Golongan Brahmana dan golongan ksatrya, merupakan kelompok elite dalam masyarakat tradisional di Bali. Mereka memegang pimpinan dalam posisi-posisi penting sehingga memperoleh, penghormatan sosial yang sangat tinggi. Apa yang diuraikan oleh **Brahmokta Widisastra** memang sesuai dengan keadaan masyarakat. Faktor-faktor seperti keturunan, kekuasaan yang mereka miliki memisahkan kehidupan mereka dengan rakyat kebanyakan. Golongan brahmana dan golongan ksatrya tidak lahir dari perut tetapi dari kepala dan bahu Sanghyang Brahma.[113]

Golongan elite masyarakat tradisional mengelompokkan diri dalam lokasi tertentu di sekitar istana. Walaupun keluarga raja tidak ikut memegang pemerintahan, mereka tetap mempunyai status dan memperoleh penghormatan sosial yang cukup tinggi, justru oleh karena mereka adalah keluarga raja. Pada masa pusat kerajaan masih ada di Gelgel, semua pembesar kerajaan mempunyai istana dan mengambil lokasi di pusat kerajaan.[114] Golongan ksatrya Dalem yang tidak ikut memegang pemerintahan bergelar I Dewa, misalnya I Dewa Nusa, I Dewa Pegedangan, I Dewa Bangli.[115] Golongan brahmana berhak mempelajari agama.[116] Golongan brahmana yang sudah dinobatkan (apodgala) disebut Pedande. Misalnya Ida Pedande Telaga, Ida Pedande Kemenuh,[117] Ida Pedande Sakti Ngurah di kerajaan Buleleng.[118] Golongan brahmana yang belum dinobatkan cukup memakai gelar Ida untuk laki-laki

dan Ida Ayu untuk keturunan wanita. Misalnya Ida Kulwan, Ida Ayu Swabawa.[119]

Terdapat empat golongan brahmana yang berasal dari keturunan Danghyang Nirarta. Golongan brahmana Kemenuh adalah keturunan Danghyang Nirarta yang beribu dari Daha. Brahmana Manuaba beribu dari Pasuruhan, golongan brahmana Keniten beribu dari Blambangan, sedangkan golongan brahmana yang beribu dari Mas disebut Brahmana Mas.[120] Ada pula murid, yaitu seorang ksatrya yang tekun belajar kepada Danghyang Nirarta yaitu I Gusti Dauh Baleagung menjadi begawa.[121]

Golongan ksatrya di luar ksatrya Dalem memakai gelar I Gusti. Misalnya I Gusti Kebontubuh, I Gusti Lurah Tabanan.[122] Fungsi sosial yang mereka lakukan menambah kewibawaan dan kehormatan dalam mata masyarakat. Bentuk-bentuk pakaian, alat-alat perlengkapan seperti kendaraan, jumlah pengiring juga menjadi ukuran status mereka. Rakyat banyak dianggap sebagai golongan yang tidak penting oleh karena tidak menentukan sehingga dalam sumber-sumber tidak disebut-sebut. Dalam sumber-sumber rakyat kebanyakan disebut "wong tani",[123] wong dusun tani atau "wong sudra nitya jadma".[124]

Nama ini memang sesuai oleh karena mereka tinggal sebagai petani di desa. Raja tinggal di istana di pusat ibu kota. Sampai timbulnya kerajaan Klungkung, istana kerajaan, disebut "Pura" sehingga terdapatlah Suweca Pura (Suweca Linggarsa Pura, Smara Pura).[125] Bahkan ada babad yang memakai judul Smara Pura.[126]

4.2.4. **Pengaturan masyarakat.**

Dalam masyarakat Majapahit, berlaku hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan hukum itu tertulis dalam sebuah buku yaitu **Agama** atau Manawa Dhamaçastra.[127] Di dalam **Babad Mengwi** disebutkan bahwa I Gusti Agung Sakti yang berhasil membawa kerajaan Mengwi kepada masa kebesaran, menguasai isi sebuah buku yang berjudul **Sanghyang Agama**.[128] Kitab hukum **Agama** berlaku di Bali.[129] **Babad Ksatrya Taman Bali** mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan harus dihukum sesuai dengan kitab **Çastra Agama**.[130]

Kitab hukum **Agama** merupakan hukum yang telah dibukukan dan kebanyakan memuat tentang sangsi-sangsi hukum yang harus dikenakan kepada setiap anggota masyarakat. Sangsi-sangsi hukum terutama ditujukan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Misalnya mencuri (nusta, ndusta).[131]

Hukum **Agama** berlaku untuk semua golongan yang ada di masyarakat.[132] Dalam kitab hukum **Agama** ada ketentuan tentang

pidana mati yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan yang tidak mungkin dibuang, didenda apalagi diampuni. Misalnya membunuh orang yang tidak bersalah sama sekali.[133]

Hukum merupakan alat utama yang dapat mengendalikan segala kelakuan anggota masyarakat. Dalam **Manawa Dharmaçastra** disebutkan bahwa hukum itulah yang memerintahkan, melindungi masyarakat.[134] Dalam bidang hukum, raja mempunyai kekuasaan tertinggi. Agama selalu menyebutkan bahwa orang yang memutuskan perkara adalah Anak Agung.[135] Di samping itu tersebut pula "kerta".[136]

Antara hukum dan penguasa mempunyai hubungan yang sedemikian erat sehingga **Manawa Dharmaçastra** mengatakan bahwa hukum itu adalah suami raja.[137]

Dalam masa pemerintahan Dalem Waturenggong, terlihat juga kekuasaan raja dalam bidang hukum. Dalem Waturenggong membuang Kyai Ularan yang bersalah melakukan pembunuhan terhadap Sri Juru yaitu raja Blambangan.[138] Orang yang melakukan pencurian diusut oleh Dalem Waturenggong tetapi kemudian dibebaskan.[139] Golongan Bendesa dan Pasek mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di dalam bidang hukum. Keistimewaan kedudukan ini merupakan akibat langsung dari pengaruh kekuasaan raja. Golongan Bendesa dan Pasek beserta keturunannya tidak boleh dikenakan hukuman mati. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka menjalani hukum buangan atau dibebaskan sama sekali.[140]

Perbedaan pelayanan hukum nampak jelas dalam ketentuan hukum Agama. Dengan melihat perbedaan jumlah denda yang dikenakan kepada setiap golongan dalam kejahatan yang sama kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang terdapat perbedaan pelayanan hukum di dalam masyarakat tradisional. Seorang brahmana yang mengumpat (nguman-uman) seorang sudra cukup membayar denda 500 sedangkan golongan sudra yang melakukan kejahatan yang sama terhadap seorang Brahmana harus dihukum mati.[141]

Banyak lagi perbedaan-perbedaan hukum yang berlaku dimasyarakat. Di dalam bidang hukum adat terjadi juga hal yang sama. Golongan Pasek yang ada di pegunungan misalnya keturunan Pasek Kayu Selem tidak boleh membakar mayat apabila ada anggota keluarga mereka meninggal. Misalnya cukup dikubur (abyatanam).[142]

Anggota keluarga golongan ksatrya misalnya mempunyai ketentuan lain. Mereka boleh membakar mayat. Istilah "ngaben" belum dapat diketemukan. Di dalam sumber-sumber, "ngaben" disebut dengan istilah "Atiwa-tiwa" atau "atitiwa".[143] Alat-alat

perlengkapan upacara pembakaran mayat juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri untuk setiap golongan. Misalnya keturunan I Gusti Lurah Tabanan boleh memakai "bade" tetapi "bade" itu harus mempunyai ukuran tinggi tertentu yaitu tidak boleh lebih dari sepuluh tingkat. [144]

4.3. Kehidupan seni budaya.

Sebenarnya kehidupan seni budaya di Bali telah ada sejak Bali mengenal sejarahnya. Sejak Majapahit menaklukkan Bali, kebudayaannya ikut mempengaruhi kebudayaan yang telah ada di Bali.

4.3.1. Pendidikan.

Dengan sendirinya pendidikan dalam abad ke XVI sampai permulaan abad XIX mempunyai corak yang sesuai dengan masyarakat tradisional. Pendidikan dilakukan oleh golongan elite atas inisiatif pribadi. Pendidikan yang menonjol pada waktu itu adalah pendidikan keagamaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kerajaan. Orang-orang yang memberikan pendidikan terdiri dari orang-orang brahmana. Orang yang memberikan pelajaran disebut "Sang Guru". Misalnya Danghyang Astapaka Sang Guru Buda. [145] Dengan sendirinya seorang guru dianggap telah memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Seorang guru dianggap telah mengalami kelahiran dua kali. Pertama lahir sebagai manusia dan kelahiran yang kedua yaitu setelah memiliki ilmu pengetahuan yang luas dengan suatu upacara. Oleh karena itu seorang guru disebut orang yang lahir dua kali (dwijati). Danghyang Nirarta juga disebut "Sang Dwija", [146] atau Sang Mahadnyana. [147]

Orang yang belajar disebut "Sisya". [146] Dalam sumber-sumber proses belajar disebut "aguru", sedangkan proses memberikan pelajaran disebut "asisia". [149] Sebagai seorang sisya harus mentaati peraturan-peraturan yang sangat ketat. Misalnya peraturan dalam lontar Ciwasasana yang antara lain menyarankan, pengekangan diri (tapa brata). [150]

Seorang guru melakukan seorang sisya dengan upacara dan dalam sumber-sumber disebut dengan istilah "abebersih" atau diksita (diksa)", "apodgala". [151]

Setelah "mediksa", barulah seorang brahmana bergelar Ida Pedande. Misalnya Ida Pedande Telaga. [152] Di samping seorang brahmana, seorang ksatrya juga berhak melakukan upacara ini dan pada zaman Gelgel, disebut "Bhagawan". Misalnya I Gusti Dauh Baleagung. [153]

Biasanya untuk menggantikan dirinya, seorang guru cukup menunjukkan salah seorang keturunannya. Sebelum meninggal, Danghyang Nirarta menunjuk Ida Pedande Kulon sebagai guru dan kepada putra-putra yang lain diharapkan kesetiaannya kepada guru yang baru.[154]

Khusus kepada penguasa-penguasa pemerintahan, seorang guru memberikan bermacam-macam ilmu seperti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pemerintahan (Kramanegara), ilmu yang berhubungan dengan agama misalnya Mahasrada. Pelajaran-pelajaran di bawah raja. Misalnya kepada I Gusti Dauh Baleagung.[155]

4.3.2. **Kesenian.**

Peristiwa penaklukan pulau Bali pada tahun 1343 mengawali masuknya pengaruh kebudayaan Majapahit ke Bali.[156] Kebudayaan yang mulai berkembang pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Majapahit.[157]

Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong kerajaan Bali mengalami perkembangan dalam segala bidang.[158] Seni musik, seni rupa, seni tari terutama seni sastra mengalami perkembangan yang sangat menonjol. Pada masa ini hidup dua orang pujangga besar, yaitu Danghyang Nirarta dan murid beliau sendiri : I Gusti Dauh Baleagung. Hasil karangan kedua orang pujangga ini cukup banyak baik dalam bentuk prosa maupun puisi. Danghyang Nirarta antara lain mengarang : Usana Bali, Kidung Sebunbangkung, Sara Kusuma, Ampik, Legarang, Mahisa Langit, Hewer, Mayadanawantaka, Dharma Pitutur, Wasista Sraya, Kawya Dharma Putus, Dharma Sunya Kling, Mahisa Megatkung, Kekawin Anyang Nirarta, Wilet Demung Sawit. Di samping itu beliau juga mengarang Gugutuk Menur, Brati Sasana, Tuan Semeru dan Aji Pangukiran.[159]

Karangan yang merupakan hasil karya I Gusti Dauh Baleagung : Rareng Canggu, Wilet, Wukir Padelegan, Sagara Gunung, Jagul Tua, Wilet Manyura, Anting-anting Timah dan Arjuna Pralabda.[160]

Dalam perkembangan selanjutnya keturunan kedua orang pujangga ini juga berhasil menulis beberapa karangan. Ida Pedande Telaga berhasil menulis sebuah karangan dengan judul Ender.[161] Ida Pedande Manuaba mengarang Bali Sangara.[162] Sedangkan karangan seperti : Tantri Carita, Wangbang Turida adalah hasil karya Ida Pedande Nyoman Pidada.[163]

Ida Pedande Bukcabe terkenal dengan hasil karangannya yang berjudul Kidung Ranggawuni. Amerta Masa, Amurwa Tembang, Patal, Wilet Sih Tan Pegat dan Rareng Taman merupakan hasil karya beliau yang tidak boleh dilupakan. Di samping itu beliau ju-

ga mengarang Rara Kadura, Kebu Dungkul dan Caruk Amerta Masa.[164] I Gusti Pande menulis sebuah karangan dengan judul Nata Merta. Karangan ini tidak dapat diselesaikan, kemudian dilanjutkan oleh putra beliau sendiri yaitu : I Gusti Wayan Byasama.[165] I Gusti Ngurah Jelantik juga menulis karangannya sebelum beliau gugur dalam peperangan di Pasuruhan. Judul karangannya adalah Gita Sang Sipta (Dalu Dening Kadulurang Ulah Durjaneng Budi).[166]

Setelah timbulnya kerajaan-kerajaan di Bali muncul pula kesusastraan. Pada zaman Klungkung muncullah bermacam-macam babad dari masing-masing kerajaan. **Kidung Pamancangah** ditulis oleh Ida Pedande Gde Rai dari Geria Cucukan, di kerajaan Klungkung pada tahun 1892.[167]

Seni musik seperti gamelan sejak lama sudah ada di Bali. Pada zaman pemerintahan Dalem Bekung di Gelgel, I Gusti Pande memberontak dan laskar kerajaan Bali melakukan perlawanan disertai tabuh gamelan "Ki Sekar Sandat".[168] Ki Gusti Jelantik Bogol membawa barang-barang rampasan seperti piring besar, gong satu barung.[169]
Gong mempunyai fungsi untuk mengantar acara-acara persidangan dalam istana.[170] Setelah timbulnya kerajaan-kerajaan di Bali gamelan ini tetap disebut-sebut, I Gusti Ngurah Panji Sakti di kerajaan Buleleng membuat alat-alat perlengkapan gamelan seperti : Trompong, gong dan lain sebagainya.[171]

Di samping seni musik, seni tari juga mengalami perkembangan pada zaman pemerintahan Dalem Waturenggong demikian juga pada zaman pemerintahan Dalem Segening.[172] Seni bangunan, seperti bangunan istana Gelgel meniru istana di kerajaan Majapahit.[173] Menurut sumber-sumber istana Klungkung dibangun oleh Dewa Agung Jambe dan meniru juga arsitektur istana kerajaan Majapahit.[174]

4.4. Alam pikiran dan Kepercayaan.

Suasana religius menguasai alam pikiran masyarakat. Kepercayaan, bersumber kepada agama Hindu. Kepercayaan kepada alam gaib, hubungan manusia dengan Tuhan, kepercayaan kepada sifat-sifat Tuhan dengan segala manifestasinya.

4.4.1. Perkembangan agama.

Terdapat bermacam-macam teori penyebaran agama dan kepercayaan Hindu ke Indonesia. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa golongan brahmana yang memegang peranan penting.[175] **Brahmokta** Widisastra mengatakan bahwa golongan brahmana ada-

lah satu-satunya golongan yang berhak mendalami agama.[176] Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong Danghyang Nirarta dan Danghyang Astapaka merupakan dua orang brahmana yang memegang peranan penting dalam perkembangan agama. Danghyang Nirarta sebagai pendeta agama Hindu dan Danghyang Astapaka pendeta agama Budha.[177] Kedua orang pendeta ini sebenarnya mempunyai hubungan keluarga. Danghyang Nirarta adalah putra Danghyang Asmaranata yaitu pendeta di kerajaan Majapahit.[178]

Babad Dwijendra Tatwa mengatakan bahwa runtuhnya kerajaan Majapahit dan berkembangnya agama Islam menyebabkan Danghyang Nirarta pindah dari Majapahit melalui Pasuruhan, Blambangan akhirnya sampai di Bali.[179]

Sampai di kerajaan Bali beliau mengajarkan agama di setiap desa yang dikunjungi. Misalnya pelajaran agama yang diberikan kepada Bendesa Mas.[180] Dalam proses penyebaran agama, di masyarakat Bali mempunyai peranan aktif. I Gusti Dauh Baleagung terlambat tiba di Gelgel oleh karena waktunya dipakai untuk mempelajari agama kepada Danghyang Nirarta sehingga I Gusti Dauh Baleagung dimarahi oleh Dalem Waturenggong. Kemarahan Dalem Waturenggong hilang setelah mendapat nasehat Danghyang Nirarta.[181]

Sebenarnya kedatangan para pendeta agama Hindu ke Bali pada masa itu, hanya mengadakan pembaharuan terhadap agama yang telah ada sebelumnya. Pembaharuan ini dapat dilihat dari segi arsitektur. Danghyang Nirarta melihat keadaan yang kabur sebagai akibat peralihan paham-paham keagamaan sebelum dan sesudah Empu Tuturan datang ke Bali. Kekaburan pengertian terdapat antara pemujaan Dewa-dewa dan pemujaan terhadap leluhur. Di satu pihak terdapatlah tempat pemujaan terhadap leluhur (Sanggah, Panti, Paibon dan sebagainya) sedangkan di pihak lain terdapat tempat-tempat pemujaan terhadap Dewa-dewa (misalnya Kahyangan Tiga). Untuk mengatasi keadaan seperti ini, Danghyang Nirarta menciptakan bangunan tempat pemujaan yang baru yaitu Padmasana. Padmasana mempunyai arti teratai, tempat duduk atau tempat duduk yang berbentuk teratai, sebagai lambang sthana Tuhan. Oleh karena itu dalam pura-pura sekarang, terdapat pelinggih padmasana.[182]

Dalam perjalanan Danghyang Nirarta di Bali, beliau pernah menemukan hal yang ajaib. Dalam Babad Dwijendra Tatwa dikatakan bahwa Danghyang Nirarta memetik teratai (padma) dalam perut seekor naga yang besar.[183]

Sebagai seorang pendeta kerajaan, Danghyang Nirarta mengajarkan agama kepada raja yaitu Dalem Waturenggong.[184] Pada

masa pemerintahan raja ini, persatuan antara agama Hindu dan Budha tampak lebih jelas dari masa-masa sebelumnya. Danghyang Nirarta sebagai pendeta agama Hindu dan Danghyang Astapaka sebagai seorang pendeta Budha bersama-sama melakukan upacara homa di istana Gelgel.[185]

Setelah timbulnya kerajaan-kerajaan di Bali, keturunan kedua orang pendeta ini tetap memegang peranan penting. Keturunan brahmana Keniten menjadi pendeta di kerajaan Tabanan,[186] keturunan golongan brahmana Kemenuh menjadi pendeta di kerajaan Buleleng.[187]

Agama Hindu, sebagaimana juga agama Budha merupakan agama negara, hidup berdampingan secara damai sampai kepada masa sekarang ini (tahun 1931).[188]

Agama Islam mulai disebarkan ke Bali pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Utusan raja Demak,[189] menghadap ke istana Gelgel untuk menyebarkan agama Islam di Bali tetapi usaha ini gagal.[190] Menurut Utrecht, Sunan Prapen yaitu putra Sunan Giri berusaha untuk menyebarkan agama Islam ke Bali tetapi mengalami kegagalan.[191]

4.4.2. **Pengaruhnya.**

Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, agama berkembang subur.[192] Oleh karena itu, pura[193] sebagai tempat pemujaan umat Hindu mengalami perkembangan juga. Sebelum Danghyang Nirarta datang ke Bali, pura-pura belum mempunyai pelinggih padmasana dan padmasana yang ada pada masa ini merupakan hasil ciptaan beliau.[194] Pura-pura yang ada hubungannya dengan Danghyang Nirarta beserta keturunan beliau adalah : Di Kabupaten Buleleng : Pura Pulaki atau Pura Melanting, Pura Panyiwitan, Pura Kayuputih, Pura Ponjok Batu. Pura-pura yang ada di Kabupaten Jembrana : Pura Purancak, Pura Rambutsiwi, Pura Amertasari, Pura Prapat Agung. Di Kabupaten Tabanan : Pura Kawitan Geria Suci, Pura Tanah Lot, Pura Bulakan, Pura Bukit Gong, Pura Gunung Payung, Pura Sakenan, Pura Pucak Tedung terletak di Kabupaten Badung. Pura-pura yang terletak di Kabupaten Gianyar : Pura Taman Pule, Pura Bukcabe, Pura Tugu, Pura Dalem Ksetra, Pura Pemuteran, Pura Puseh, Pura Pucak Bukit, Pura Manuaba, Pura Airjeruk. Di Kabupaten Klungkung terdapat pura : Pura Dalem Ganda Mayu, Pura Bajing, Pura Bukit Lingga, Pura Batulepang, Pura-pura yang terdapat di Kabupaten Karangasem : Pura Bukit Abah, Pura Silayukti, Pura Sekaton. Pura Bukit terletak di Kabupaten Bangli.[195]

Perlu ditekankan bahwa sebelum Majapahit menaklukkan Ba-

li, Pura Penataran Sasih merupakan pura ibu kota sedangkan Pura Dasar Gelgel merupakan pura yang pernah menjadi pura Ibu kota setelah Majapahit menaklukkan Bali. Pura Besakih merupakan salah satu Sad Kahyangan. Setelah timbulnya kerajaan-kerajaan di Bali, timbul pula kerajaan tersendiri misalnya Mengwi, Tabanan, Buleleng, Karangasem.[196]

Di kerajaan Mengwi, I Gusti Agung Sakti mendirikan Pura Taman Ayun.[197] Dalem Waturenggong memusatkan politik luar negeri kerajaan Bali kepada daerah-daerah sekeliling pulau Bali dan menaklukkan Blambangan, Nusa Penida, Lombok dan Sumbawa.[198] Dari abad ke XVI sampai abad ke XVIII daerah-daerah ini tetap menjadi persengketaan antara kerajaan-kerajaan di Bali dengan kerajaan-kerajaan Islam. Raja-raja Bali memandang bahwa masalah agama adalah masalah kerajaan, agama Hindu dan agama Budha yang menjadi agama negara harus dipelihara dengan baik. Raja-raja di Bali menaklukkan daerah-daerah sekitarnya dengan maksud membendung arus perkembangan agama Islam baik dari sebelah barat maupun dari sebelah timur.[199]

4.5. Hubungan ke luar.

Hubungan antara Bali dengan dunia luar telah berlangsung sejak lama di dalam segala bidang, baik di dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Hubungan dalam bidang politik mengakibatkan pula hubungan dalam bidang yang lain. Bali mengadakan kontak baik kepada daerah-daerah nusantara sendiri, maupun dengan dunia Eropa Barat. Hubungan yang disebut pertama pada umumnya terjadi dalam bidang politik dan kebudayaan dan telah berlangsung sejak lama. Hubungan dengan bangsa Eropa Barat pertama kali terjadi pada akhir abad ke XVI atau pada permulaan abad ke XVII. Pada umumnya hubungan ini terjadi dalam bidang ekonomi dan dalam perkembangan selanjutnya, akibat-akibat ekonomi mengharuskan bangsa Eropa Barat untuk menguasai Bali dalam bidang politik.

4.5.1. Bentuk hubungan.

Pada tahun 1343 terjadi kontak peperangan antara Bali dengan Majapahit.[200] Hubungan dengan Majapahit sangat jelas kelihatan pada waktu Dalem Ketut Ngelesir sebagai raja vasal, menghadap raja Hayam Wuruk.[201] Raja Bali mendapat perintah untuk mengoper dan mentrapkan cara-cara pemerintahan kerajaan Majapahit di Bali. Di samping itu raja memperoleh keris dan pakaian kebesaran.[202] Agama Islam berkembang di Jawa, kerajaan Majapahit mulai runtuh dan lenyap dalam sejarah pada tahun 1525.[203]

Dalem Waturenggong yang memegang pemerintahan di Bali, bebas melakukan politik dalam maupun luar negeri.[204] Pada masa ini Danghyang Nirarta dan Danghyang Astapaka datang ke Bali.[205] Dalem Waturenggong mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Kyai Ularan untuk menyerang raja Blambangan yaitu Sri Juru. Kyai Ularan menang di dalam pertempuran dan membawa barang-barang rampasan seperti perhiasan termasuk pula kepala Sri Juru.[206] Dalem Waturenggong pernah mengutus Danghyang Nirarta untuk menghadap raja Lombok dengan maksud meminang putri raja Lombok. Usaha ini gagal.[207] Sejak jatuhnya Blambangan, kerajaan Bali merupakan musuh kerajaan-kerajaan Islam terutama Mataram.[208]

Pada masa pemerintahan Sri Haji Krahengan, kerajaan Lombok menyerang kerajaan Bali. Dalem Waturenggong ikut memimpin laskar. Laskar kerajaan Lombok terusir dari desa Kelahan.[209]

Pada tahun 1587 kerajaan Bali menyerang Mataram tetapi gagal.[210] Pada masa pemerintahan Dalem Segening, I Gusti Ngurah Jelantik membantu Blambangan menyerang Pasuruhan. Tetapi I Gusti Ngurah Jelantik gugur di dalam pertempuran.[211] Ki Gusti Ngurah Jelantik Bogol menyerang Dalem Nusa di pulau Nusa Penida. Ki Gusti Jelantik Bogol menang di dalam pertempuran dan Dalem Nusa gugur. Gong satu barung, piring besar, merupakan barang-barang rampasan yang dibawa ke Gelgel.[212]

Dalam **Babad Arya Tabanan**, disebutkan penyerangan laskar kerajaan Bali ke Lombok. Ki Kebo Mundar yaitu raja Lombok melakukan perlawanan sehingga Kyai Telabah yang ikut memimpin laskar kerajaan Bali, lari dan berenang menyebrangi Selat Bali. I Gusti Ngurah Tabanan menang dan Ki Kebo Mundar gugur.[213]

Cornelis de Houtman merupakan orang Belanda yang pertama datang ke Bali. Lintgensz dan Manuel Rodenborch mendapat tugas menghadap raja Gelgel dan mempersembahkan hadiah. Mereka tinggal di Bali selama satu bulan yaitu dari tanggal 25 Januari sampai 26 Februari 1597.[214] Pada tahun 1601 vn Heemskerk singgah di Bali, mempersembahkan sepucuk surat dari Pangeran Mauritius. Raja Bali menghadiahkan seorang gadis Bali.[215]

Untuk menentukan batas-batas pengaruh di sebelah timur, kerajaan Bali mengadakan perjanjian dengan raja Makasar, yaitu Sultan Alaudin.[216] Kerajaan Mataram menyerang kerajaan Bali. Belanda tidak mau memberikan bantuan kepada kerajaan Bali.[217] Pada tahun 1633 Gubernur Jendral Hendrick Brouwer mengirim Jan Oosterwijck sebagai duta ke Bali. Bali diliputi oleh masa kekacauan sehingga utusan ini gagal.[218]

Kerajaan Mataram kembali menyerang kerajaan Bali pada ta-

hun 1639.[219] Pada tahun 1645 kerajaan Bali menyerang kerajaan Mataram karena Sultan Agung telah meninggal.[220] Belanda mengirim kembali seorang duta pada tahun 1651. Dalem Di Made telah meninggal sehingga duta ini juga mengalami kegagalan dalam usahanya untuk berhubungan dengan kerajaan Bali.[221]

Sejak timbulnya kerajaan-kerajaan di Bali, kerajaan Buleleng merupakan salah satu kerajaan yang terkuat. Keunggulannya terletak dalam bidang militer.[222] I Gusti Ngurah Panji Sakti adalah raja Buleleng yang menyerang Blambangan pada tahun 1697. Blambangan menjadi daerah kekuasaan kerajaan Buleleng. Pada waktu kembali, I Gusti Ngurah Panji Sakti membawa seekor gajah, tiga orang penggembala gajah.[223]

Kerajaan Buleleng makin lama makin merosot dan kemudian, pada tahun 1711, kerajaan Mengwi menguasai Blambangan.[224] Menurut Babad Mengwi, I Gusti Ngurah Panji Sakti menyerahkan Blambangan kepada I Gusti Agung Sakti yaitu raja Mengwi, setelah kerajaan Buleleng kalah dalam peperangan.[225] Kerajaan Karangasem timbul pada abad ke XVII dan pada tahun 1740 kerajaan Karangasem telah dapat menguasai pulau Lombok.[226] Setelah kemenangan melawan kerajaan Bejanggik, Seleparang, kerajaan Karangasem mendirikan kerajaan Pegesangam, Pagutan, Kediri dan lain sebagainya.[227]

4.5.2. Akibat hubungan.

Kebudayaan Majapahit mempengaruhi kebudayaan Bali.[228] Keturunan Majapahit memerintah di Bali secara turun-tumurun. Hancurnya Majapahit, timbulnya kerajaan-kerajaan Islam memberi corak tertentu terhadap politik kerajaan Bali. Kerajaan Bali yang merdeka di bawah pemerintahan Dalem Waturenggong, mulai mengirim ekspedisi-ekspedisi ke daerah-daerah sekeliling pulau Bali. Ekspedisi militer kerajaan Bali dapat menguasai daerah Blambangan, Nusa Penida, Lombok, Sumbawa.[229]

Politik perluasan daerah terutama bermaksud untuk memelihara agama Hindu dan Budha sebagai agama negara, antara lain dengan jalan membendung arus perkembangan agama Islam baik dari sebelah barat maupun dari sebelah timur.[230]

Kerajaan Bali mulai mencoba untuk melibatkan bangsa Belanda dalam usahanya untuk menjaga keutuhan wilayahnya tetapi Belanda menolak.[231] Politik untuk memperebutkan wilayah kekuasaan dengan raja-raja yang beragama Islam berlangsung sampai abad ke XVIII yaitu setelah Belanda merebut Blambangan dari kerajaan Mengwi pada tahun 1768.[232] Untuk pertama kalinya, pulau Bali langsung berhubungan dengan bangsa Barat yaitu ketika

Cornelis de Houtman dengan anak buahnya singgah di Bali.[233]

Sejak abad ke XVII sampai abad ke XVIII hubungan antara Bali dengan Belanda (VOC) terbatas dalam bidang perdagangan, dan tukar menukar duta. Perdagangan budak sangat menonjol sehingga Nielsen mengatakan bahwa pada abad ke XVII–XVIII Bali menjadi pusat perdagangan budak.[234] Manuel Rodenborch yang tinggal selama empat tahun di Bali menterjemahkan surat Pangeran Mauritius yang ditujukan kepada raja Bali di Gelgel.[235] Manuel Rodenborch memberi nama Jonck Holand untuk pulau Bali.[236]

Lebih jauh, perdagangan budak menimbulkan perkampungan orang-orang Bali di Batavia. Seorang duta Bali memperoleh sebanyak 5000 Rijksdaalder sebagai hasil penjualan budak.[237] Kapten Bali yaitu Mohamad Japhar Babadan dari Krokot bertugas untuk menerima duta yang datang ke Batavia.[238] Menurut Soekanto, Ida Gde Bebandan bersama 700 orang anak buahnya pindah ke Batavia dan antara tahun 1667–1673 banyak orang Bali di Batavia. Pada tahun 1673 didirikan Balische Compagnie. Pada tahun 1709 I Gusti Ketut Bedaulu membentuk "Kampung Gusti". Orang Bali sangat terkenal membantu Belanda di dalam peperangan di Ternate, Malabar bahkan sampai ke Parsi.[239]

Di pulau Lombok timbul kerajaan-kerajaan Hindu yaitu Pegesangan, Kediri, Pagutan.[240]

Setelah bubarnya VOC hubungan antara Bali dengan Belanda tidak berubah. Dalam perkembangan selanjutnya, persaingan bangsa Inggris dan kesukaran-kesukaran perdagangan Belanda dalam hubungannya dengan hak "tawan karang" di Bali, memaksa bangsa Belanda untuk mencampuri urusan politik. Bangsa Belanda mulai menaklukkan pulau Bali. Misalnya penaklukan terhadap kerajaan Buleleng.[241]

CATATAN

1. CC. Berg, De Middeljavaansche Historische Traditie; De Geschiedenis van het Rijk Gelgel. Thesis. (leiden : tanpa penerbit, 1927), P.103. I Kt. Ginarsa, Ekspedisi Gajahmada ke Bali, (Denpasar : Walmiki, 1968), Usana Jawa tidak menyebutkan angka tahun. Lihat Usana Jawa, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp. 1b–12b Cf. Raja Purana, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp. 12a–54b.
2. Babad Dalem, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja (manuskrip), lp. 2a–2b.

3. **Babad Dalem Samprangan**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp. 1b.
4. **Usana Jawa**, (manuskrip), Op.cit, lp. 13b–14a.
5. **Babad Dalem Turun ke Bali**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp. 6b.
6. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit** lp. 3b–4b. Cf. CC. Berg, **op.cit**, p. 104.
7. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 4a–4b.
8. **Ibid**, lp. 5b.
9. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 1b–2b.
10. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 9b–10b. Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 2a–3a.
11. **Babad Ki Gusti Pasek Gelgel**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja (manuskrip), lp. 12a–14a.
12. Di dalam sumber-sumber belum pernah disebutkan mengenai kekacauan apapun yang terjadi pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir.
13. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 20a. Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **op.cit**. lp. 13b.
14. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 28a. Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), op.cit, lp. 21b–22a.
15. **Babad Ularan**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip) lp. 10a–14b. Cf. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 25a–25b.
16. **Ibid**, lp. 29a. Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 23a.
17. E Utrecht, **Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok**, (Sumur Bandung, 1962), p. 89. Cf. CC. Berg, **op. cit**, lp. 142.
18. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **op.cit**. lp. 23b.
19. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 31b.
20. **Dalem Samprangan**. (manuskrip), **loc.cit**.
21. Babad Dalem, (manuskrip), **op.cit**, lp. 29b–31b. Cf. **Babad Pabalik I Gusti Batanjruk; I Gusti Pande, I Gusti Agung Maruti**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp. 30b–31a.
22. **Babad Dalem**, (manuskrip), op.cit, lp. 31b. Cf. **Babad Dalem Samprangan**, op.cit, lp. 25a.
23. **Babad Rusak I Gusti Pande**, koleksi perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, (manuskrip), Cf. Babad Pabalik I Gusti Batanjruk, **I Gusti Pande, I Gusti Agung Maruti**, (manuskrip), op.cit, lp. 37b–39b.

24. **Babad Dalem**, (manuskrip), op.cit, lp.43a. Cf. **Kidung Pamancangah**, diterjemahkan oleh Gora Sirikan, (Denpasar : Balimas, 1957), p.89.
25. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 41a–41b. Cf. **Babad Blahbatuh**, koleksi Puri Blahbatuh, Gianyar, (manuskrip), lp. 4a–6b.
26. **Kidung Pamancangah**, p.100. Cf. **Babad Pabalik I Gusti Batanjruk, I Gusti Pande, I Gusti Agung Maruti**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 62b–64a.
27. **Babad Buleleng**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip) lp. 21a–223a. Cf. Kidung Pamancangah, **op.cit**, p. 109–113.
28. **Babad Smara Pura**, koleksi I Gde Kanta, Klungkung, (manuskrip) lp. 121a-123a. Cf. Kidung Pamancangah, **op.cit**. p. 113.
29. E.Utrecht, **op. cit**, p. 96. Cf.H,J.de Graaf, "Gusti Panji Sakti vorst van Buleleng", **Tijdschrift Bataviaasch Genoot** schap, (Batavia: Alberch Co M.Nijhoff, 1949), p.66.
30. **Babad Buleleng**, (manuskrip), op.cit. lp. 1b-11b. Cf.H.j. de Graaf, op.cit. pp.59-70.
31. **Babad Mengwi**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp. 1b-35a.
32. E.Utrecht, **op. cit**, p.97.
33. Lihat Brahmokta Widisastra, koleksi Gedong Kirtya Singaraja (manuskrip), 1p.6a.
34. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, 1p.2b.
35. Gelar ini hampir dapat diketemukan dalam sumber-sumber yang dipergunakan di dalam penulisan ini. Lihat **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **loc.cit**, **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, **Kidung Pamancangah**, **loc.cit**.
36. **Babad Dalem** (manuskrip), **op.cit**, lp.9a-10b, lp. 28a-28b,lp. 30b-31a. Cf. Kidung Pamancangah, op.cit, p.13.p.94.p 98.p.105.
37. E.Utrech, **op.cit**, p.96. Cf. **Kidung Pamancangah, op.cit.** p.132
38. **Babad Smara Pura**, (manuskrip), op.cit, lp.79a-126a.
39. **Babad Buleleng**, (manuskrip), op.cit, lp.21b-23a.
40. **Babad Mengwi**, (manuskrip), op.cit, lp.34b.
41. Mahaudiana, Babad **Manggis Gianyar**, (Gianyar : A.A. Gde Thaman 1968). pp. 7-39.Cf. **Babad Dewa Manggis Kuning**, koleksi perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, (manuskrip) lp. 2b-7b.
42. **Kidung Pamancangah, op.cit**, p.8.
43. **Babad Buleleng**, (manuskrip), op.cit, lp.1b-17.b.

44. Mahaudiana, **op.cit**, p.8. Cf. **Babad Dewa Manggis Kuning**, (manuskrip), **op.cit**, lp.1b–4b.
45. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **op.cit**, lp.36a.
46. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.27a. Cf. **Babad Smara Pura**, (manuskrip), **op.cit**, lp.36a.
47. I Gusti Agung Oka, **Niti Çastra**, (Denpasar; tanpa penerbit, 1970), p.7.
48. Gelar Rakryan mengandung arti "tuan". Lihat Van der Tuuk, **Kawi Balineesch Nederlandsch Woordenboek**, I, (Batavia: Landsdrukkerij, 1897), p.724. Gelar Rakryan juga berarti "tua, yang dihormati. Sampai sekarang (1962), gelar Rakryan terdapat di dalam istilah "raka" untuk menunjukkan orang yang lebih tua atau lebih dihormati dalam masyarakat Bali. Lihat Muh. Yamin, **Tatanegara Majapahit**, patwa IV, (Djakarta : Jajasan Prapantja, 1962), pp.159–165.
49. Babad Dalem, (manuskrip), loc.cit. Cf. Babad **Dalem Samprangan** (manuskrip), op.cit, lp.24a.
50. **Ibid**, lp.22a. Cf. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.23a.
51. CC. Berg, op.cit, p.96. Cf. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.17b–18a.
52. **Ibid**, lp.18a. Cf. Babad Dalem Samprangan, (manuskrip), **op. cit**, lp.11a–12a.
53. **Lihat Nawasasana**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp.1b–21b.
54. **Babad Smara Pura**, (manuskrip), op.cit, lp.68a.
55. **Nawanatyagama**, Muh. Yamin, **Tatanegara Madjapahit**, parwa III, (Djakarta : Jajasan Prapantja, 1962), pp.257–262.
56. **Ibid**, p.257.
57. **Lihat Kramanagara**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja (manuskrip), lp.15a–19a.
58. **Babad Mengwi**, (manuskrip), lp.22a.
59. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.27a. Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, koleksi Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, (manuskrip), lp.15a–16b.
60. **Babad Buleleng**, (manuskrip), **op.cit**, lp.14a.
61. **Muhammad Yamin, Gajah Mada**, (Djakarta : Balai Pustaka, 1972), pp. 30–34. Lihat juga uraian dalam bukunya yang lain **Muh. Yamin, op.cit**, p.238.
62. Slamet Muljono, **The Structure of the National Governement of Majapahit**, (Djakarta : Balai Pustaka, 1966), p.18.

63. Babad Dalem, (manuskrip), op.cit, lp.20a; lp.26a.
64. Ibid, lp.23a.
65. Babad Bendesa Manik Mas, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp.5b. Cf. Babad Dalem, (manuskrip), op. cit, lp.21a–21b; Babad Dwijendra Tatwa, (manuskrip), op.cit, 17a–17b.
66. Babad Buleleng, (manuskrip), op.cit, lp.22a. Cf. Kidung Pamancangah, op.cit, p.112.
67. Babad Mengwi, (manuskrip), op.cit, lp.34b.
68. Babad Dalem, (manuskrip), loc.cit, Cf. Kidung Pamancangah, op.cit, p.44.
69. Babad Buleleng, (manuskrip), op.cit, lp.23b.
70. Babad Dalem, (manuskrip), op.cit, lp.44a. Cf. Kidung Pamancangah, loc.cit.
71. Gelar ini, hampir terdapat dalam semua sumber-sumber yang dipergunakan di dalam penulisan ini, Babad Dalem, (manuskrip), loc.cit. Cf. Babad Dalem Samprangan, (manuskrip), loc.cit. Cf. Kidung Pamancangah, op.cit, p.39.
72. Babad Buleleng, (manuskrip), op.cit, lp.21b. Cf. Kidung Pamancangah, op.cit, p.111.
73. Babad Smara Pura, (manuskrip), op.cit, lp.122a–123a. Cf. Kidung Pamancangah, loc.cit.
74. E. Utrecht, loc.cit.
75. V.E. Korn, Balische Overeenkomsten, (S–Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1922), p.14;p.66.
76. E. Utrecht, loc.cit. Kerajaan Buleleng dan Karangasem termasuk kerajaan Bali utara sehingga dalam abad ke XIX terdapat sembilan buah kerajaan di Bali. Lihat Suhartono, "Bali Pada Pertengahan Abad ke XIX," Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada no.1 (Jogjakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, 1969), p.135.
77. E. Utrecht, loc.cit, Cf. Suhartono, loc.cit.
78. Kidung Pamancangah, loc.cit, Cf. Babad Smara Pura, (manuskrip), loc.cit. Babad Buleleng, (manuskrip), op.cit, lp. 21b–22a.
79. Babad Smara Pura, (manuskrip), op.cit, lp.39b. Cf. Babad Buleleng, (manuskrip), op.cit, lp.23a. 24a.
80. Ibid, lp. 18a–18b.
81. Babad Mengwi, (manuskrip), op.cit, lp.37–41b.
82. Babad Buleleng, (manuskrip), op.cit, lp.19a–19b.
83. Babad Arya Tabanan, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp.39–48a.

84. H.J. de Graaf, **Op.cit**, p.71.
85. E. Utrecht, **op.cit**, p.99. Cf. **Babad Mengwi**, (manuskrip), **op. cit**, lp.34a–55b.
86. ve. Korn, **op.cit**, pp.64–66.
87. **Babad Smara Pura**, (manuskrip), **op.cit**, lp.78a–80a.
88. E. Utrecht, **op.cit**, p.100.
89. **Babad Ksatrya Taman Bali**, koleksi Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, (manuskrip) lp.34a–52a.
90. **Babad Smara Pura**, (manuskrip) **op.cit**, lp.77a.
91. **Brahmokta Widisastra**, (manuskrip), **op.cit**, lp.4b–6b.
92. R. Goris, **Bali, Atlas Kebudayaan**, (Pemerintah Republik Indonesia; tanpa tahun penerbit), p.33.
93. B. Schrieke, **Indonesian Sociological Studies Part One**, (Sumur Bandung, 1960). pp.29–32.
94. Ensiklopedia Indonesia, A–B, (Bandung: W.Van Hoeve, tanpa tahun penerbit), p.96.
95. CC. Berg, **op.cit**, p.126.
96. Babad Dalem, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), loc.cit.
97. **Nawanatyagama**, Muh. Yamin, **op.cit**, pp.258–259.
98. Babad Dwijendra Tatwa, (manuskrip), **op.cit**, lp.28a–28b.
99. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.48a.
100. Aage Kroup Nielsen, **Leven en Avonturen van Een Oostingevaar der op Bali** .(Amsterdam: Quiridos, 1928), p.49.
101. E. Utrecht, **op.cit**, p.147.
102. **Brahmokta Widisastra**, (manuskrip), **loc.cit**.
103. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. Babad Bendesa **Manik Mas**, (manuskrip), **op.cit**, lp.4b.
104. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Smara Pura**, (manuskrip), **op.cit**, lp.36a.
105. I Gusti Agung Oka, **loc.cit**.
106. **Babad Buleleng**, (manuskrip), **op.cit**, lp.16b.
107. **Manawa Dharmasastra**, diterjemahkan oleh: G. Pudja, (et.al). (Jakarta: Lembaga Penterjemah Kitab Suci Weda, 1973). pp. 392–393.
108. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**.
109. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. Babad Sang **Brahmana Catur**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp.20b–21a.
110. **Babad Buleleng**, (manuskrip), **op.cit**, lp.3a–4a.
111. **Kidung Pamancangah**, **loc.cit**.
112. **Babad Buleleng**, (manuskrip), **op.cit**, lp.19b.

112. Babad Buleleng,
113. **Brahmokta Widisastra**, (manuskrip), **loc.cit.**
114. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit.**
115. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **loc.cit.**
116. **Brahmokta Widisastra**, (manuskrip), **loc.cit.**
117. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **op.cit**, lp.19a–21a. Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), op.cit, lp.52a–53a.
118. **Babad Buleleng**, (manuskrip), **op.cit**, lp.14a.
119. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), lp.20a. Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **op.cit**, lp.52a.
120. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **loc.cit.**
121. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit.**
122. **Ibid**, lp.28b. Cf. **Babad Smara Pura**, (manuskrip), **op.cit**, lp. 30b.
123. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit.**
124. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), op.cit, lp.20b.
125. **Kidung Pamancangah**, op.cit, p.24; p.113.
126. Lihat **Babad Smara Pura**, (manuskrip).
127. Slamet Muljono, Perundang-Undangan Majapahit, (Djakarta: Bhratara, 1967), p.10.
128. **Babad Mengwi**, (manuskrip), **op.cit**, lp.34b.
129. Slamet Muljono, **op.cit**, pp.10–15.
130. Babad Ksatrya Taman Bali, (manuskrip), op.cit, lp.41a.
131. Lihat **Agama**, diterjemahkan oleh I Goesti Poetoe Djilantik, (at.al), (Batavia: Landsdrukkerij, 1909), p.3. Cf. **Adigama** diterjemahkan oleh I Goesti Poetoe Djilantik. **(at.al)**, (Batavia: Landsdrukkerij, 1909), **passim.**
132. Slamet Muljono, **op.cit**, p.20.
133. Agama, **loc.cit.**
134. **Manawa Dharmaçastra, op.cit**, p.359.
135. **Agama**, op.cit, p.4; p.5.
136. **Adigama**, op.cit, p.14; p.15.
137. **Manawa Dharmaçastra, loc.cit.**
138. **Babad Ularan**, (manuskrip), op.cit, lp.27b.
139. **Babad Dalem**, (manuskrip), op.cit, lp.27b.
140. **Babad Pasek**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip), lp.79a. Cf. **Babad Bendesa Manik Mas**, (manuskrip), **loc. cit.**
141. **Agama, op.cit**, p.62.
142. **Babad Pasek Kayu Selem**, koleksi Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, (manuskrip)

lp.41b.

143. **Babad Arya Tabanan**, (manuskrip), **op.cit**, lp.61a–61b. Cf. **Babad Ksatrya Taman Bali**, (manuskrip) **op.cit**, lp.32b. Cf. Babad Dalem, (manuskrip), **op.cit**, lp.33b.
144. **Usana Jawa**, (manuskrip), **op.cit**, lp.14a.
145. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.24a. Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **loc.cit**, **Babad Smara Pura**, (manuskrip), **op.cit**, lp.39b.
146. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.24a. Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **op.cit**, lp.18a.
147. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dalem Samprangan** (manuskrip), **loc.cit**.
148 **Ciwasasana**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip) lp.26a.
149. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), op.cit, lp.20b.
150. **Ciwasasana**, (manuskrip), **op.cit**, lp.25a. Cf. **Manawa Dharmacastra**, pp.110–131.
151. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **op.cit**, lp.15a; **Ciwasasana**, (manuskrip), **op.cit**, lp.26b–27a.
152. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **loc.cit**.
153. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**.
154. **Ibid**, lp.32b. Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **op.cit**. lp.34a–34b.
155. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **op.cit**, lp.20a. Cf. **Babad Dalem** (manuskrip), **op.cit**, lp.22a–22b.
156. E. Utrecht, **op.cit**, p.87. Cf. R. Goris, **op.cit**, p.90.
157. **Ibid**.
158. C.C. Berg. **loc.cit**.
159. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **op.cit**, lp.23b–24b. Cf. I Gusti Bagus Sugriwa, Pemargan Danghyang Nirarta di Bali, (Denpasar: Paresada Hindu Dharma Kabupaten Badung, 1975), p.49.
160. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. I Gusti Bagus Sugriwa, **loc.cit**.
161. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **op.cit**, lp.21b.
162. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.21b.
163. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **op.cit**, lp.26b.
164. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**.
165. **Ibid**, lp.37a.

166. **Babad Blahbatuh**, (manuskrip), **op.cit**, lp.3a. Cf. **Babad Dalem**, (manuskrip), op.cit, lp.41a.
167. **Kidung Pamancangah**, op.cit, p.1. ; p.114, Cf. I Wayan Simpen, **Pengawi-Pengawi Bali**, koleksi Bapak I Ketut Ginarsa, Singaraja, p.6.
168. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.37b.
169. **Babad Blahbatuh**, (manuskrip), **op.cit**, lp.16a.
170. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.56b–57a.
171. **Babad Buleleng**, (manuskrip), **op.cit**, lp.13b.
172. I Made Bandem, (at.al), **Perkembangan Topeng Bali; sebagai, Seni Pertunjukan**, , (Denpasar; Proyek Penggalian, Pembinaan, Pengembangan Seni Klasik/Tradisional dan Kesenian Baru Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, 1976), pp.6–8.
173. **Kidung Pamancangah**, **op.cit**, p.24.
174. **Ibid**, p.113.
175. FDK. Boch, **Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia**, diterjemahkan oleh Panitya Seri terjemahan karangan-karangan Belanda, (Jakarta: Bhratara, 1974), p.32.
176. **Brahmokta Widisastra**, (manuskrip), **op.cit**, lp.5a.
177. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**.
178. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **op.cit**, lp.6a–7b. Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **op.cit**, lp.2a.
179. **Ibid**, lp.1b. Cf. **Babad Sang Brahmana Catur**, (manuskrip), **op.cit**, lp.13a–14a.
180. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**.
181. **Ibid**, lp.27b.
182. **Laporan: Penelitian Inventarisasi Pola-pola Dasar Arsitektur Tradisionil Bali**, (Denpasar: Universitas Udayana 1975), pp.12.14.
183. **Babad Dalem**, (manuskrip), **op.cit**, lp.21a. Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **op.cit**, lp.4a.
184. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, **Kidung Pamancangah**, **loc. cit.**
185. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**.
186. **Babad Arya Tabanan**, (manuskrip), **op.cit**, lp.18a.
187. **Babad Buleleng**, (manuskrip), **loc.cit**.
188. R. Goris, **Sekte-sekte di Bali**, diterjemahkan oleh Panitya seri terjemahan karangan-karangan Belanda, (Jakarta: Bhratara, 1974), pp.12–13.
189. C.C. Berg, **op.cit**, p.144. Cf. **Babad Dalem**, (Manuskrip), **loc.**

cit.

190. **Ibid.**
191. E. Utrecht, **op.cit**, p.92.
192. CC. Berg, op.cit, p.142.
193. Istilah "pura" di sini harus dibedakan dengan istilah "pura" yang dipakai di dalam kata Smara Pura, Swecalinggarsa Pura (Swe,a Pura). Istilah Pura yang dipakai di dalam kata-kata Smara Pura dan lain sebagainya sebagai-mana tersebut di atas, mempunyai arti istana, kraton, kota. Lihat Soewojo Wojowasito, Kamus Kawi Indonesia, (Malang: Jurusan Sastra Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP, 1973), p.187.
194. **Laporan Penelitian Inventarisasi Pola-pola Dasar Arsitektur Tradisionil Bali, op.cit**, p.13.
195. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **op.cit**, lp.32b–35b. Cf. I Gusti Bagus Sugriwa, **op.cit**, pp.59–63.
196. R. Goris, **op.cit**, p.37.
197. **Babad Mengwi**, (manuskrip), **op.cit**, lp.35b–36a.
198. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**. cc. Berg, **loc.cit**.
199. E. Utrecht, **op.cit**, pp. 89–90.
200. CC. Berg, **loc.cit**. Cf. **Usana Jawa**, (manuskrip), **loc.cit**, **Raja Purana**, (manuskrip), loc.cit.
201. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), loc.cit.
202. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **loc.cit**.
203. Muh. Yamin, **Tatanegara Madjapahit, Parwa II**, (Djakarta Jajasan Prapantja, 1962), p.335.
204. CC. Berg, **op.cit**, p.130. Cf. E. Utrecht, **loc.cit**.
205. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**.
206. **Babad Ularan**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**.
207. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **loc.cit**.
208. CC. Berg, **loc.cit**, Cf. E. Utrecht, **loc.cit**.
209. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dwijendra Tatwa**, (manuskrip), **loc.cit**.
210. E. Utrecht, **loc.cit**.
211. **Babad Blahbatuh**, (manuskrip), **op.cit**, lp.3a–7a. **Babad Dalem**, (manuskrip), op.cit, 41b–42b.
212. **Babad Blabatuh**, (manuskrip), **loc.cit**, Cf. **Babad Dalem**, (manuskrip), loc.cit.
213. **Babad Arya Tabanan**, (manuskrip), **op.cit**, 32b–25b.
214. **de. Jong, De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Indie**,

(1595–1610), II, (Amsterdam: M. Nijhoff, 184), 360 Cf. C. Lekkerkerker, Bali en Lombok, (Rijswijk: Blankwaardt & Schoonkoven, 1920), p. XII.

215. W. Cool, **De Lombok Expeditie**, (Batavia: G. Kol & Co, 1896) p.295. Cf. Utrecht, **op.cit**, p.141.
216. E. Utracht, **loc.cit.**
217. CC. Berg, **op.cit**, p.158. Cf. **Encyclopedia van Nederlandsch Indie**, V, (Batavia; M Nijhoff, 1927), p.40.
218. E. Utrecht, **loc.cit.**
219. CC. Berg, **loc.cit.** Cf. E. Utracht, **loc.cit.**
220. Encyclopedia, van Nederlandsch Indie. V, **loc.cit**, Cf. CC. Berg, **loc.cit.**
221. E. Utrecht, **op.cit**, pp. 144.145.
222. De Graaf, op.cit, pp. 59–62.
223. **Babad Buleleng**, (manuskrip), **op.cit**, lp.18a.
224. E. Utrecht, **op.cit**, lp.95. Cf. **Babad Mengwi**, (manuskrip), op.cit, lp. 37b–41b.
225. **Ibid.**
226. E. Utrecht **loc.cit**, Cf. **Babad Lombok**, koleksi Gedong Kirtya Singaraja, (manuskrip), lp. 7a–10b.
227. **Ibid**, Cf. E. Utrecht, **loc.cit.**
228. R. Goris, loc.cit, Cf. CC. Berg, **loc.cit.**
229. **Babad Dalem**, (manuskrip), **loc.cit.** Cf. **Babad Dalem Samprangan**, (manuskrip), **loc.cit.**
230. E. Utrecht, **loc.cit.**
231. **Ibid**, p.91. Cf. CC Berg, loc.cit.
232. E. Utrecht, **op.cit**, p.100. Cf. **Encyclopedia van Nederlandsch Indie**, loc.cit.
233. De Jong, **loc.cit.** C. Lekkerkerker, **loc.cit.**
234. Aage Kraup Nielsen, **loc.cit**, Cf. E. Utrecht, **loc.cit.**
235. W. Cool, **loc.cit.**
236. De Jong, **loc.cit**, Cf. C. Lekkerkerker, loc.cit.
237. E. Utrecht, **loc.cit**, Van der Chijs, **Plakaat Boek**, 1602 – 1811, VIII, (Batavia: Landsdrukkerij, 1891), p.815.
238. Soekanto, **Dari Djakarta ke Djajakarta**, (Djakarta: Soeroengan, 1954), pp.31–32.
239. E. Utrecht, **loc.cit**, Cf. Babad Lombok, (manuskrip), **loc.cit.**
240. **Gaguritan Rusak Buleleng**, koleksi Gedong Kirtya, **Singaraja**, (manuskrip).

5. ABAD KE XIX (± 1800–1900).

5.1. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan.

5.1.1. Keadaannya pada tahun ± 1800.

Keadaan struktur pemerintahan di Bali pada abad ke XIX mendekati struktur konfederasi. Sembilan kerajaan di Bali yaitu: Karangasem, Buleleng, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Mengwi, Jembrana, dan Payangan masih tetap mengakui kerajaan Klungkung yang mempunyai status yang lebih tinggi, tetapi tidak lagi sebagai kerajaan yang berdiri di bawah satu kekuasaan. Kerajaan-kerajaan boleh dikatakan mempunyai hak untuk berdiri sendiri, karena itu di antara kerajaan-kerajaan itu sering terjadi perebutan kekuasaan.

Pada tahun 1800 Klungkung berhasil mengalahkan Bangli, tetapi pada tahun 1805 Bangli berhasil membebaskan diri dengan bantuan Karangasem.[1] Demikian pula kerajaan Karangasem sekitar tahun 1800 merupakan kerajaan yang mempunyai kekuasaan di Bali dan Lombok. Pada tahun 1800 raja Karangasem : Gusti Gde Karangasem, demikian pula Anak Agung Canang[2] yang kemudian dikenal dengan nama Dewata di Toh Pati dapat mengalahkan kerajaan Buleleng. Pada waktu itu kerajaan Buleleng mengalami kekacauan akibat timbulnya perang saudara antara I Gusti Ngurah Pandji yang menjadi raja di Sukasada dengan adiknya I Gusti Ngurah Jelantik yang menjadi raja di Singaraja. Raja I Gusti Ngurah Jelantik kemudian minta bantuan ke Karangasem. Pada tahun 1804 pecahlah perang antara raja Sukasada melawan raja Singaraja. Akibat perang ini akhirnya raja Sukasada dapat dikalahkan kemudian berangsur-angsur kekuasaan diambil alih oleh raja Karangasem dengan jalan menempatkan I Gusti Gde Karangasem sebagai raja di Singaraja.[3] Sejak itu kerajaan Buleleng ada di bawah penguasa dari Karangasem. Pemerintahan berangsur-angsur mulai ditertibkan dengan jalan menempatkan beberapa golongan ksatrya (**Gusti**) sebagai punggawa; di antaranya dinobatkan kemenakannya yang bernama I Gusti Nyoman Jelantik menjadi patih dan berdiam di Bungkulan. Tahun 1804 Gusti Putu Djembrana yaitu raja Jembrana minta bantuan kepada raja Buleleng untuk menindas pem-

brontakan di Loloan (Jembrana) yaitu pemberontakan orang-orang Bugis di bawah pimpinan Kapitan Patimi yang mempunyai pengikut ratusan jumlahnya. Pada waktu itu Jembrana ada di bawah kerajaan Badung.[4]

Punggawa Buleleng I Gusti Nyoman Jelantik segera mengirimkan laskar yang cukup banyak jumlahnya sehingga terjadilah pertempuran yang sengit. Walaupun dari pihak Buleleng banyak yang meninggal, akhirnya pemberontakan dapat ditindas. Banyak juga orang-orang Bugis dan rakyat Buleleng yang menjadi korban. Akhirnya I Gusti Putu Ngurah Jembrana diharuskan (diwajibkan) mengakui Buleleng sebagai pimpinan kerajaan, sedangkan I Gusti Putu Ngurah Jembrana berstatus sebagai Patih. Sejak itu (1818) Jembrana ada di bawah kekuasaan Buleleng.

Sekitar tahun 1800 di Bali selalu terjadi perang antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya. Kebesaran Klungkung sebagai kerajaan yang tertinggi berangsur-angsur kehilangan kekuatannya sebagai penguasa tunggal, sebaliknya kerajaan-kerajaan lain mulai bertambah besar. Demikianlah halnya kerajaan Gianyar sekitar tahun itu dapat membebaskan diri dari Klungkung. Beberapa tahun berikutnya yaitu sekitar tahun 1820 Gianyar bermusuhan dengan kerajaan tetangganya yaitu dengan kerajaan Klungkung, Bangli, Badung, Mengwi. Untuk mengetahui cara lebih lengkap hubungan antara kerajaan yang satu dengan yang lainnya pada abad ke XIX lihat Korn, **Balische Overeenkomsten**.[5]

5.1.2. . **Hubungan dengan kekuasaan Eropah.**

Pada masa pemerintahan Daendels di pulau Jawa, ia berhasil mengutus seorang petualang bernama Van der Wahl ke Bali untuk mendapatkan calon-calon prajurit. Ia boleh dikatakan sebagai orang yang pertama berhasil membuat suatu perjanjian (kontrak) dengan raja Badung I Gusti Murah (Ngurah) Made Pemecutan pada tanggal 28 Nopember 1808.[6] Kedatangan Van der Wahl ke Bali itu di samping sebagai utusan ia juga diberikan beberapa hak antara lain : bertugas sebagai konsul atau **subandar** yaitu mengawasi pembesar-pembesar orang asing, sebagai importir tunggal yang dapat menentukan barang-barang yang akan diimport, di samping itu diharapkan juga dapat memperbaiki sistem ekonomi kerajaan. Pada tahun 1811 masa pemerintahan Daendels berakhir, kemudian diganti oleh Raffles. Di bawah pemerintahan Raffles timbul perubahan-perubahan besar dalam politik pemerintahan. Kita kenal salah satu usaha Raffles adalah penghapusan perdagangan budak di Indonesia. Hal ini menyangkut juga sampai ke Bali, di mana larangan perdagangan budak oleh pemerintahan Raffles sangat ditentang

oleh raja Buleleng dan Karangasem, terbukti pada tahun 1814 tentara kedua kerajaan ini menyerang orang-orang Sepoy (Inggris) yang berdiam di Banyuwangi.[7] Pada tahun itu juga Raffles mengutus Jendral Nightingale ke Bali untuk membalas dendam atas tindakan-tindakan raja Buleleng dan Karangasem. Walaupun pada akhirnya raja Buleleng tunduk kepada Nightingale, rupanya masalah perdagangan budak di Bali masih ada yang melakukan, terutama oleh orang-orang Cina. Usaha-usaha pemerintah Belanda untuk memulihkan hubungan baik dengan raja-raja di Bali terus dijalankan, di samping itu berusaha agar raja-raja Bali tidak berhubungan dengan pihak luar terutama dengan Inggris. Pada tahun 1817 dikirimlah rombongan di bawah Van den Broek untuk mendirikan sebuah pangkalan dagang di Bali. Misi Van den Broek ini mengalami kegagalan karena raja-raja bersikap cemas terhadap orang-orang Eropah. Di samping itu sering terjadi kesalahan faham terutama dalam hal perhubungan laut. Perselisihan kontak-kontak hubungan antara kerajaan-kerajaan di Bali dengan kekuasaan Eropah sering menimbulkan permasalahan antara lain hal perhubungan laut, karena di Bali masih berlaku apa yang disebut "**Tawankarang**". Apabila ada kapal-kapal asing yang terdampar di pantai yang termasuk daerah suatu kerajaan, maka kapal bersama isi dan muatannya menjadi rampasan kerajaan itu.[8]

Hal semacam ini pernah dialami sendiri oleh Van den Broek. Di dalam laporannya tertanggal 16 Februari 1818 ia menulis bahwa barang yang dikirim oleh pemerintah ke Buleleng untuk anak buahnya tidak sampai karena pada waktu sampai di Badung perahunya terdampar dan akibatnya raja Badung merampas seluruh isi muatan perahu tersebut.[9]

Pada tahun 1824 pemerintah Belanda mengutus seorang keturunan Arab bernama pangeran Said Hasan al Habeschi untuk mengadakan perundingan dalam hal sewa-menyewa budak untuk masuk tentara. Tetapi raja-raja Bali tidak terpikat oleh bujukan-bujukan tersebut, hanya raja Badung yang mau menerima. Oleh karena kegagalan ini, pada tahun 1826 pemerintah mengirim Kapten J.S. Wetters. Dia tinggal untuk sementara waktu di Kuta, satu-satunya tempat perdagangan yang ramai di Bali selatan pada waktu itu. Pada Tahun 1827 dia berhasil mengadakan kontrak dengan raja Badung untuk mendapatkan calon-calon tentara.[10] Setelah itu selesailah tugas Wetters, kemudian pemerintah Belanda menempatkan Pierre Dubois di Kuta dengan pangkat "**Civiel Gezaghebber**". Selama lima tahun Dubois di Bali menempati "**Werfkantoor**" di Kuta, agaknya dia tidak diberikan kekuasaan apa-apa kecuali mencari

dan menerima calon-calon tentara untuk kepentingan pemerintah Belanda. Sementara Dubois berdiam di Kuta ada seorang padri, Sinoloog mengunjungi Bali yaitu Dr. W.H. Methurst pada tahun 1829 yang melakukan perjalanan ke Bali utara. Kegiatan "**Werfkantoor**" yang ada di Kuta itu mendapat kecaman dari Methurst karena apa yang dia lihat di Bali masih menunjukkan berlangsungnya perdagangan budak. Baru kemudian setelah berakhirnya Perang Diponegoro (1830), kemungkinan oleh pemerintah Belanda tidak merasa perlu lagi mencari calon tentara. Sesudah periode ini hubungan antara raja-raja di Bali dengan orang-orang Eropah berkisar pada perdagangan. Perusahaan dagang Inggeris King & Co yang berpusat di Surabaya membuka perwakilan di Bali dan di Lombok. Di pulau Lombok dia membuka toko di Ampenan, sedangkan di Bali perusahaan itu membuka dua cabang perusahaan yaitu di Kuta, Badung dan satu lagi di Labuaji termasuk kerajaan Karangasem.

Pada tanggal 1 Agustus 1839 cabang **NHM (Nederlandsch Handels Maatschappij)** Surabaya, membuka kantornya di Kuta, sebagai agen yang pertama ialah D. Boelen Schuurman. Raja Dewa Agung Klungkung maupun raja Badung menyambut baik dibukanya kantor dagang ini. Pada tahun itu juga Made Lange membuka juga kantor dagang di Kuta dan dia berhasil mendapat pengangkatan sebagai "**Subandar**" dari raja Badung. Ternyata kemudian pendirian kantor dagang di Kuta merupakan jembatan bagi utusan-utusan Belanda dalam usahanya untuk membuat perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di Bali, seperti terbukti dengan dikirimnya Huskus Koopman sebagai duta untuk datang ke Bali.

5.1.3. **Akibat hubungan.**

Sejak mulai kontaknya hubungan raja-raja Bali dengan bangsa Eropah pada permulaan abad XIX seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan hampir selama 30 (tiga puluh) tahun itu perhubungan raja-raja di Bali khususnya raja Badung terhadap pemerintahan Belanda hanya berkisar pada pencarian tenaga-tenaga untuk calon serdadu. Apakah yang ditimbulkan akibat hubungan itu? Apakah seorang Bali yang diambil sebagai calon-calon tentara itu terdorong oleh faktor-faktor ekonomi ? Untuk menjawab hal ini, perlu kita mengetahui sedikit tentang situasi ekonomi di Bali pada saat itu. Memang ada sumber yang mengatakan bahwa situasi ekonomi di Bali pada waktu itu sangat menyedihkan terutama di daerah Buleleng, menderita bencana alam sehingga banyak penduduknya menderita kelaparan. Menurut sumber tersebut dikatakan bahwa pada tanggal 11 dan 12 April 1815 gunung Tambora di Sumbawa meletus. Akibat letusan itu tanah pertanian di Lombok dan

Bali tidak produktif, sehingga Lombok yang sebelumnya banyak memberikan bantuan beras ke beberapa tempat di Bali pada saat itu mengalami kekurangan beras. Bencana kedua terjadi tanggal 22 Nopember 1815 yaitu gempa bumi yang dahsyat yang memusnahkan 17 (tujuh belas) desa di daerah Buleleng. Oleh sebab kejadian-kejadian itu raja Buleleng dalam tahun 1816 minta pertolongan pemerintah Belanda untuk menanggulangi bahaya kelaparan di daerahnya.[11]

Dari sumber lain mengatakan bahwa pengambilan orang-orang Bali yang dijadikan tentara sewaan pemerintah Belanda itu mudah dilaksanakan karena pada orang-orang Bali sendiri ada terkandung darah keberanian di samping untuk mencari pengalaman hidup di luar daerah.[12]

Memperhatikan kedua keterangan sumber tersebut, jelaslah bahwa hubungan antara raja-raja Bali dengan pemerintah Belanda tidak mempunyai akibat apa-apa, pemerintahan di Bali berjalan seperti biasa sedangkan di pihak orang-orang Eropah yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah di Kuta belum ada ikut campur dalam pemerintahan di Bali. Usaha-usahanya hanya terbatas pada tujuan tertentu, demikian pula seandainya ada perjanjian-perjanjian yang dibuat antara raja-raja Bali dengan wakil pemerintah masih bersifat kerja sama saja dan belum ada usaha untuk pengurangan hak.

Demikian pula hubungan-hubungan sesudah tahun 1830. Wakil-wakil pemerintah Belanda maupun pedagang-pedagang Inggris yang membuka agennya di Kuta boleh dikatakan suasananya sepi saja dan seolah-olah raja-raja di Bali bersikap dingin terhadap orang-orang Eropah yang tinggal di Bali. Baru kemudian sesudah tahun 1841 dengan berhasilnya utusan pemerintah Belanda yaitu Huskus Koopman mengadakan perundingan-perundingan dengan raja-raja di Bali, mulailah pemerintah Belanda sedikit demi sedikit mengurangi hak-hak kekuasaan raja-raja di Bali dengan jalan mengadakan perjanjian-perjanjian, seperti halnya penghapusan **"Tawankarang"** di kerajaan Badung pada tahun 1842.[13]

5.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat.

5.2.1. Pengaruh kekuasaan Eropah.

Sebab-sebab pecahnya perang. Dalam tahun 1841, di pelabuhan Kuta (termasuk kerajaan Badung) berlabuh sebuah kapal Belanda bernama "Overijsel" yang membawa utusan Belanda yang dipimpin oleh Hendrik Jacob Huskus Koopman yang pada waktu

itu menjabat sebagai komisaris di Besuki (pulau Jawa). Mereka datang ke Bali atas perintah Gubernur Jenderal P. Merkus,, untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja Bali dan Lombok. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah bertujuan untuk menjerat raja-raja Bali secara diplomatis agar dapat dijajah dengan mudah tanpa mempergunakan intervensi bersenjata karena yang terakhir ini berarti akan mengeluarkan biaya dan korban yang besar. Ternyata Huskus Koopman berhasil meyakinkan sebuah perjanjian dengan raja Buleleng, di mana raja I Gusti Ngurah Made Karangasem membubuhkan tanda tangannya pada 26 Nopember 1841, dengan disaksikan pula oleh patih I Gusti Ketut Jelantik dan baudanda Ida Bagus Tamu. Isi pokok perjanjian tersebut adalah bahwa Buleleng mengaku bahwa negerinya juga milik Hindia Nederlan; mengibarkan bendera Belanda setiap ada kapal Belanda masuk pelabuhan Buleleng dan mau melepaskan "hak tawan karang".[14] Untuk memperkuat kedudukan perjanjian ini, Koopman mencari dukungan raja Klungkung sebagai susuhunan raja-raja Bali–Lombok, dengan jalan mengajukan konsep perjanjian yang sama.

Isi pokok perjanjian tersebut ialah bahwa Dewa Agung Putra sebagai raja Klungkung dan susuhunan di atas pulau Bali dan Lombok, mengakui bahwa negeri mereka adalah juga kepunyaan Hindia Nederlan; tidak akan menyerahkan kepada bangsa kulit putih lainnya dan akan menaikkan bendera Belanda setiap ada kapal atau perahu Belanda masuk pelabuhan di Bali. Surat-surat perjanjian dibuat di hadapan raja Buleleng, Karangasem, dan Badung serta ditanda tangani pada tanggal : 6 Desember 1841 oleh Dewa Agung Putra dan Huskus Koopman yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal di Batavia.[15]

Walaupun Belanda menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut di atas hanya sebagai tanda persahabatan, tetapi raja-raja yang menghadiri perundingan tersebut terutama raja Buleleng tidak setuju dan mulai curiga atas sikap utusan Belanda, karena isi perjanjian tersebut adalah merendahkan dan menghina derajat raja-raja Bali.

Perjanjian yang pertama ini nampaknya masih mendapat banyak tantangan dari raja-raja Bali, tetapi Huskus Koopman tidak berputus asa untuk mengadakan pendekatan-pendekatan dalam usahanya menempatkan pulau Bali di bawah kekuasaan Belanda seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dalam tahun 1843 Huskus Koopman mengajukan konsep perjanjian berikutnya kepada raja Buleleng dan berhasil ditanda tangani pada tanggal 8 Mei 1843. Isi pokok perjanjian ini ialah bahwa raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem dengan sukarela harus menghapuskan **undang-**

undang tawan karang selama-lamanya. Sebagai gantinya diusulkan suatu syarat-syarat untuk menolong dan menyelesaikan apabila ada kapal terdampar di pantai Buleleng.[16] Untuk memperkuat nilai perjanjian ini, Koopman mengajukan konsep yang hampir sama kepada raja Klungkung, sebagai susuhunan raja-raja Bali dan Lombok. Isi perjanjian ini pada pokoknya minta kepada raja-raja Bali untuk menghapuskan undang-undang tawan karang di seluruh Bali karena menurut anggapan Belanda hal itu tidak sesuai dan sangat merugikan pelayaran laut Belanda. Apabila raja-raja Bali setuju, maka hak otonomi raja-raja Bali sepenuhnya tidak akan diganggu untuk selamanya. Raja Klungkung menanda tangani perjanjian ini hanya membawakan raja Gianyar dan Mengwi dengan suatu tekanan kepada Belanda, bahwa baik terhadap raja-raja Bali yang mau menanda tangani perjanjian ini maupun yang tidak mau maka setiap terjadi pelanggaran atas pasal-pasal perjanjian ini adalah tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda sepenuhnya, termasuk jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak Belanda sendiri. Sedangkan bagi raja-raja Bali yang tidak ikut menanda tangani perjanjian ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja-raja bersangkutan.[17]

Dalam perjanjian ini jelas bahwa kerajaan Buleleng tidak terikat dan tidak mau tahu lagi serta tetap menjalankan undang-undang tawan karang sebagaimana yang sudah berlaku.

Hak tawan karang (Undang-undang Tawan Karang) = **Klip recht** adalah merupakan suatu bagian dari adat (hukum adat) di bidang maritim yang diakui dan dilaksanakan oleh seluruh raja-raja Bali dan Lombok. Tawan Karang adalah merupakan hak rakyat pantai dan sekitarnya pada tempat perahu terdampar. Mereka dapat memiliki kapal serta muatannya dan memperbudak penumpang-penumpangnya (kadang-kadang juga dibunuh). Di antara raja-raja di Bali dan Lombok ditetapkan suatu peraturan-peraturan tertentu mengenai tawan karang yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian **(paswara-paswara)**. Pasal-pasal perjanjian tersebut antara lain memuat bahwa raja pemilik pantai harus memberitahukan raja dari tempat asal perahu beserta penumpang-penumpangnya dan muatan-muatannya. Raja ini diberi waktu 25 hari untuk menebus kaulnya dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu masing-masing bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Apabila tidak dilaksanakan pada waktunya, maka penumpang dan separuh muatan perahu menjadi milik raja pemilik pantai dan separuh muatan lagi menjadi milik rakyat pantai bersangkutan. Bagi raja-raja di luar peserta perjanjian, keringanan-keringanan seperti tersebut hampir tidak pernah ada.[18]

Untuk sementara waktu, Buleleng maupun raja-raja Bali lain-

nya nampaknya seperti mentaati pasal-pasal perjanjian yang diajukan oleh Belanda. Tetapi dalam prakteknya tawan karang masih dilaksanakan oleh rakyat. Kapal Overijsel sendiri yang sedang berlabuh di Kuta dirampas oleh rakyat pantai Kuta. Hal ini membuat Gubernur Jenderal P. Markus menjadi marah dan hampir-hampir menggagalkan misi diplomatik Koopman. Sebagai bukti yang ke dua ialah ketika Gubernur Jenderal P. Merkus dalam tahun 1844 mengirim utusan Belanda ke Buleleng di bawah Pimpinan J. Ravia de Ligny asisten residen Banyuwangi, untuk menuntut ratifikasi pelaksanaan perjanjian terdahulu ternyata I Gusti Ketut Jelantik atas nama raja Buleleng menolak ratifikasi tersebut. Kejadian-kejadian seperti inilah nantinya menjadi bibit persengketaan yang menyebabkan meletusnya perlawanan rakyat Bali menentang penjajahan.

5.2.2. **Pemenuhan kebutuhan hidup.**

Sebagian besar penduduk Bali hidup dari hasil pertanian. Mata pencaharian ini merupakan mata pencaharian pokok di samping itu ada juga mengerjakan tanah tegalan atau perladangan. Hasil pertanian ini boleh dikatakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, untuk kepentingan adat dan agama. Dalam berbagai kegiatan, berbagai sistem kehidupan antara satu faktor dengan faktor yang lain saling berkaitan. Demikian halnya dengan faktor kepercayaan dan agama seolah-olah tak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bahwa di dalam mengerjakan bidang pertanian dari mulai membakar hutan, menebang kayu sampai kepada waktu mengetam padi setiap tahap pekerjaan dibarengi oleh upacara. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil lainnya yang diperdagangkan bahkan ada yang diperdagangkan ke luar Bali. Barang-barang dagangan tersebut antara lain berupa : beras, minyak kelapa, sapi, gula aren, kain dan sebagainya.

Lebih-lebih sejak dibukanya beberapa agen perusahaan dagang asing di Kuta, sejak ramainya perdagangan itu setelah tahun 1830 posisi Bali sangat menarik bagi pedagang-pedagang dari Jawa. Kadang-kadang ada muatan langsung dibawa dari Singapura untuk ditimbun di Bali seperti gambir, alat-alat dari besi, senjata-senjata, obat bedil atau mesiu, timah hitam dan kemudian ditambah dengan beras, minyak kelapa, kain-kain Bali, kulit sapi, tembakau, dan babi.[19]

Route perdagangan berkisar antara Lombok, Bali, Jawa, sampai ke Singapura, di samping itu perdagangan tradisional masih ramai juga yaitu perdagangan dengan perahu-perahu, jukung-jukung,

tongkang yang mengadakan pelayaran antar pulau (**interinsulair**) di kepulauan Indonesia bagian timur. Kebanyakan perdagangan tradisional dilakukan oleh orang-orang Bugis, Madura, Bali, Sasak, Cina, dan ada juga dari orang-orang Arab.

Yang paling ramai pada waktu itu diperdagangkan adalah candu. Tidak mengherankan kalau Kuta menjadi sarang penyelundupan candu, dari Bali ke Jawa.[20]

5.2.3. Gerakan perlawanan.

1. Perlawanan Buleleng.

Sebab-sebab perlawanan. Sebuah perahu dagang dari Jawa terdampar di pantai Sangsit.[21] Rakyat pantai Sangsit melakukan tawan karang atas perahu tersebut dan mendapat restu dari patih I Gusti Ketut Jelantik yang sangat dicintai oleh rakyat Buleleng. Peristiwa ini langsung menampar muka Belanda. Belanda menjadi marah sekali dan Gubernur Jenderal J.J. Rochussen menyuruh menyiapkan sebuah expedisi penyerangan ke Buleleng. Pada tahun 1846 sebuah expedisi bertolak dari Besuki di bawah pimpinan Schout E B. Van den Bosch dengan dibantu oleh seorang pelaut J. Entlie, AJ. de Sint van den Broecke dan pimpinan angkatan pendarat di bawah Letnan Kolonel J. Bakker. Setelah armada ini tiba di muara pelabuhan Buleleng, mereka tidak segera melakukan serangan, tetapi masih bermaksud membujuk Buleleng agar mau menyerah melalui diplomasi. Sebelumnya sudah pernah diusahakan penyelesaian secara perundingan yaitu ketika Belanda mengirim Residen Besuki J F I. Maijor dengan tugas mengulangi sekali lagi permintaan tahun 1844. Utusan ini berhasil menghadap ke istana Buleleng pada 11 Mei 1845.[22] Tetapi raja Buleleng beserta patihnya I Gusti Ketut Jelantik tetap mempertahankan pendiriannya sebagai semula. Semua ancaman-ancaman yang disodorkan oleh utusan Belanda itu tidak digubris sama sekali, bahkan Jelantik malah memperlihatkan sikap ksatryanya di hadapan utusan Belanda ini. Tetapi raja Buleleng beserta patihnya I Gusti Ketut Jelantik tetap mempertahankan pendiriannya sebagai semula. Tetapi saat ini, walaupun armada Belanda sudah berada di muara pelabuhan Buleleng, masih juga Belanda mengusahakan penaklukan Buleleng melalui cara-cara perundingan.

Jalan perlawanan. Tanggal 23 Mei 1846 kapal Bromo merapat di pelabuhan Pebeyan (Buleleng). Dari kapal turun seorang utusan yang memerintahkan seorang Cina (subandar Buleleng) untuk menghadap raja Buleleng dengan tugas membawa perintah agar raja mau takluk kepada Belanda tanpa syarat. Raja Buleleng meno-

lak dan menyatakan tetap pada pendirian semula. Bahkan patih I Gusti Ketut Jelantik mulai mempersiapkan laskarnya untuk setiap saat dapat menghadapi serangan Belanda. Untuk mengulur-ulur waktu, pada tanggal : 26 Mei 1846, raja Buleleng mengutus putra subandar Buleleng untuk menghadap Belanda ke kapal Bromo. Utusan itu membawa surat raja Buleleng yang minta penangguhan waktu sepuluh hari, karena raja Buleleng akan mengadakan perundingan dengan raja Klungkung dan Karangasem.

Pada saat yang sama raja Buleleng mengutus patih I Gusti Ketut Jelantik menghadap raja Klungkung untuk menyampaikan pendirian yang telah diputuskan oleh Buleleng, dalam persoalan menghadapi serangan Belanda. Kedatangan Gusti Ketut Jelantik memang diharapkan oleh raja Klungkung, karena utusan Belanda sedang di istana Klungkung.[23]

Dalam perundingan yang dihadiri oleh utusan Belanda ini, Gusti Ketut Jelantik menyampaikan dengan tegas pendirian raja Buleleng, bahwa Buleleng menolak tuntutan-tuntutan dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Belanda. Dijelaskan pula bahwa peristiwa terdamparnya kapal dagang di pantai Sangsit dikenakan tawan karang adalah karena kapal tersebut tidak menuruti perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang pabean yang sudah berlaku sejak dahulu.[24] Walaupun raja Klungkung mengingatkan Jelantik bahwa Buleleng dan Karangasem sedang menghadapi musuh dari Sasak, namun patih Jelantik tetap pada pendiriannya. Utusan Belanda terpukul oleh keputusan Jelantik ini dan segera melaporkan hasil perundingan ini kepada pimpinannya.

Sementara perundingan-perundingan berjalan mundur-maju, raja Buleleng terus mempersiapkan, menyusun kekuatan dan membangun benteng-benteng perlindungan. Pasukan-pasukan bantuan dari Klungkung dan Karangasem diharapkan segera tiba untuk memperkuat laskar Buleleng. Pada tanggal 24 Juni 1846 Gubernemen mengirim sebuah manifes yang memuat ultimatum bahwa dalam waktu 3 X 24 jam Buleleng harus menyatakan diri menyerah.[25] Raja Buleleng tidak menghiraukan semua ultimatum ini.

Karena dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada jawaban dari Buleleng, maka Belanda mendaratkan pasukannya dan menyerbu Buleleng. Pertempuran terjadi dengan hebat, karena pendaratan serdadu Belanda dibantu dengan pemboman-pemboman dari atas kapal perang. Ternyata sukar juga bagi serdadu-serdadu Belanda untuk menerobos benteng-benteng dan rintangan-rintangan yang dibuat oleh laskar Buleleng. Benteng ini berbentuk sebuah perbukitan memanjang yang ditemani dengan pagar-pagar bambu

berduri, pohon-pohon kelapa dan bilah-bilah bambu yang diruncingkan yang membentang kira-kira 8000 meter. Laskar Buleleng di bawah pimpinan Gusti Ketut Jelantik bertempur dengan gagah berani. Dalam serangan permulaan ini, walaupun laskar Bali lebih banyak yang gugur bila dibandingkan dengan serdadu Belanda, nampaknya Belanda merasa kewalahan juga. Terbukti kemudian didatangkan lagi armada bantuan yang datang dengan kapal Kamelion di bawah pimpinan Letnan LF Hoogenhuis. Walaupun Buleleng bertempur dengan penuh semangat, tetapi karena teknik persenjataan Belanda lebih modern, akhirnya pada tanggal 28 Juni 1846 Belanda berhasil menduduki Buleleng. Istana Raja Buleleng di Singaraja dibakar hangus.[26] I Gusti Ketut Jelantik dan raja Buleleng I Gusti Made Karangasem, beserta seorang brahmana bernama Ida Bagus Tamu bersama-sama dengan sisa-sisa laskar Buleleng lalu mengundurkan diri ke desa Jagaraga yang terletak di sebelah timur daerah Buleleng, dengan tujuan menyusun sisa-sisa kekuatan yang ada untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Untuk mendapat waktu yang cukup dalam menyusun kekuatan kembali raja Buleleng bersedia menanda tangani perjanjian yang disodorkan Belanda sebagai tanda kekalahan di pihak Buleleng. Pada tanggal 9 Juli 1846 raja Buleleng membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian tanda kalah kepada Belanda.[27]

2. **Perlawanan Jagaraga.**

Penaklukan Buleleng oleh Belanda pada tanggal 28 Juni 1846, belum meruntuhkan sama sekali sikap dan semangat kepahlawanan raja dan rakyat Buleleng. Menjelang jatuhnya kota Singaraja, dalam saat terdesaknya laskar Buleleng, patih I Gusti Ketut Jelantik telah mengambil keputusan untuk mengundurkan pasukannya ke Buleleng Timur memasuki desa Jagaraga dan kemudian memutuskan untuk memakai Jagaraga sebagai benteng konsolidasi kekuatan serta sebagai ibu kota kerajaan yang baru sebagai ganti kota Singaraja. Waktu itu wilayah kerajaan Buleleng dapat dibagi menjadi tiga wilayah yaitu : Buleleng Barat dengan pusatnya Banjar, Buleleng Tengah dengan pusatnya Singaraja dan Buleleng Timur dengan pusat Jagaraga.

Ternyata keputusan Jelantik ini sangat tepat dan didukung oleh situasi geografi desa Jagaraga yang sangat strategis sebagai medan pertahanan serta memungkinkan pula untuk menerapkan sistim pertahanan yang baru dalam bentuk dan sistim **gelar supit urang.** Keuntungan ini ditambah lagi dengan semangat dan kesetiaan laskar serta rakyat desa Jagaraga dan sekitarnya seperti desa Sawan, Bungkulan. Wilayah desa agak berhutan sepanjang jalan de-

ngan satu-satunya jalan yang menembus jantung desa yang terletak kira-kira 7½ kilo meter dari pantai, merupakan jarak yang cukup jauh untuk ditempuh oleh suatu pasukan berjalan kaki. Di kiri-kanan jalan terdapat sawah-sawah sempit dengan diselingi oleh medan perbukitan serta palung-palung dengan sungai yang mengalir deras, merupakan medan strategis bagi sayap perbentengan sebagai kaki supit kiri dan kanan. Di depan desa sebagai kepala udang, dibuat perbentengan yang berlapis-lapis dengan tipuan-tipuan dan rintangan alam dan buatan, yang akan mempersulit penyerangan Belanda untuk bisa mencapai ibu kota atau istana raja di Jagaraga. Desa Sawan yang terletak di belakang desa Jagaraga, merupakan ekor serta pusat persediaan perbekalan dan medan untuk mengundurkan diri dalam situasi yang terdesak.

Untuk mendapat waktu yang cukup untuk konsolidasi kekuatan, raja telah memutuskan untuk menandatangani perjanjian pernyataan kekalahan Buleleng pada tanggal 9 Juli 1846. Dengan penandatanganan ini, Belanda menganggap Buleleng telah menyerah sehingga apa yang sedang dipersiapkan oleh patih Jelantik di Jagaraga kurang mendapat perhatian. Raja I Gusti Ngurah Made Karangasem, menyerahkan seluruh kegiatan di Jagaraga kepada patih I Gusti Ketut Jelantik serta pemimpin-pemimpin yang lain seperti Ida Bagus Tamu. Tindakan Jelantik yang pertama adalah mengembalikan semangat tempur laskarnya dan menyadarkan rakyat desa Jagaraga dan sekitarnya akan pentingnya melanjutkan perlawanan terhadap Belanda dan mengusir Belanda dari Bali. Tindakannya yang kedua ialah mempersiapkan persenjataan dan mengerjakan segala sesuatu berkenaan dengan sistem **gelar supit urang** yang telah dipilih sebagai gelar bertahan dan menyerang. Selanjutnya dikirim utusan-utusan menghadap Dewa Agung Putra di Klungkung dan sekutu Buleleng terdekat untuk meminta bantuan laskar serta perlengkapannya. Pasukan Karangasem yang berjumlah 1200 orang, yang datang terlambat ketika pertempuran di Buleleng, akhirnya bergabung dengan pasukan raja di Jagaraga. Kemudian Mengwi mengirimkan laskarnya 600 orang diikuti dengan pasukan gabungan Gianyar dan Klungkung sebanyak 1650 orang di bawah pimpinan I Dewa Ketut Agung dan Anak Agung Made Sangging.[28] Nyatalah di sini bahwa solidaritas dari kerajaan-kerajaan di Bali masih utuh terutama kalau menghadapi musuh dari luar dan kharisma kepemimpinan raja Klungkung masih tetap dihormati. Raja Klungkung sendiri ikut melakukan politik mengulur-ulur waktu dengan segala macam bentuk perundingan untuk memberi kesempatan bagi Jelantik untuk menyusun kekuatan Jagaraga. Jelantik ha-

nya dapat waktu dua tahun untuk mempersiapkan kekuatannya karena kemudian semua kegiatan ini tercium oleh pasukan Belanda yang ditempatkan di Buleleng. Belanda mengirimkan team penyelidikan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Van Swieten untuk mengamati semua kegiatan Jelantik. Akhirnya dari hasil penyelidikannya tersebut Belanda menyimpulkan bahwa Jelantik di Jagaraga sedang mempersiapkan kekuatan laskar, untuk mengadakan pembalasan terhadap kedudukan Belanda di Buleleng. Pimpinan pasukan Belanda memutuskan untuk menyerang dan menghancurkan Jagaraga sebelum sempat melakukan suatu apa.

Pada tanggal 7 Maret 1848, armada kapal perang Belanda mendarat di muka pesisir Buleleng di bawah pimpinan Letnan Laut ICG. van Hoogennouck Tulleken. Tentara Belanda kemudian didaratkan di pantai Sangsit dengan persenjataan dan susunan pasukan yang lengkap mulai dari infantri sampai dengan kavalerinya dan berhadapan langsung dengan ujung **supit urang** laskar Jagaraga. Penduduk di sekitar pertahanan Belanda dapat dibujuk untuk membantu Belanda. Ternyata Jagaraga dengan jumlah laskar sepuluh kali lipat dari pasukan Belanda, telah menempati posisinya masing-masing dengan persenjataan tradisional yang terdiri dari keris, tombak, bambu runcing dan beberapa pucuk bedil buatan sendiri.

Jalan perlawanan.

Tanggal 8 Juni 1848 serangan Belanda terhadap Jagaraga dimulai dengan tembakan-tembakan meriam dari pantai Sangsit. Bungkulan dan wilayah pantainya tetap dikuasai oleh laskar Jagaraga supit kanan. Pasukan pendarat Belanda mulai bergerak di bawah pimpinan van Swieten, Letnan Kolonel Sutherland, Mayor Sorg, Letnan Kolonel Le Born de Vexela dan Mayor de Vos.[29]

Pertempuran berkobar sepanjang hari antara pasukan Belanda melawan laskar Jagaraga. Pada pertempuran hari itu pasukan Belanda terpancing untuk memasuki medan antara kedua supit yang menuju mulut udang. Belanda mulai mendapat serangan-serangan yang bertubi-tubi dari dalam benteng-benteng sepanjang jalan yang dilaluinya. Seluruh serangan laskar Jagaraga datang dari satu komando yaitu I Gusti Ketut Jelantik yang berada dalam benteng pertahanan timur dan merupakan benteng yang ke dua. Dalam pertempuran ini pasukan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk mengundurkan pasukan. Bantuan Belanda dari Bungkulan terputus karena laskar Jagaraga berhasil merebut Bungkulan dan mendesak Belanda kembali ke pantai. Dalam saat gerak mundur pasukan Belanda yang hampir tidak bersenjata lagi, supit urang kiri kanan mulai merapat dan menjepit pasukan Belanda dengan tikaman-tikam-

an keris dan tombak. Serangan Belanda yang pertama ini gagal dengan meninggalkan korban yang sangat besar. Armada kapal Belanda dengan sisa-sisa pasukannya kembali ke Jawa pada tanggal 20 Juni 1848, dengan maksud mengambil bantuan. Hampir satu tahun lamanya Jagaraga dapat kesempatan memulihkan pasukan dan perbentengannya sambil tetap siap siaga menunggu serangan balasan yang dipastikan akan datang lagi.

Ekspedisi Belanda yang ke dua kemudian berangkat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Michiels dan Letnan Kolonel de Brauw. Pagi-pagi buta tanggal 15 April 1849 Armada Perang Belanda yang ke dua ini mendarat di depan pantai Sangsit dan langsung melakukan serangan. Pengalamannya setahun yang lalu telah memberi pelajaran bagi Belanda sehingga dalam serangan ini Belanda mengubah taktik penyerangannya dengan melalui garis medan di luar supit kiri. Belanda memukul Jagaraga dari luar medan dan dengan pertolongan beberapa rakyat Sangsit yang dapat dibujuknya, Belanda berhasil menggempur benteng Jagaraga satu persatu. Walaupun Jagaraga bertahan dengan gagah berani, tetapi kekalahan berada di ambang pintu. Patih Jelantik memutuskan untuk mundur tetapi isterinya Jero Jempiring tetap melanjutkan pertempuran mempertahankan benteng sampai beliau gugur dalam pertempuran ini. Patih Jelantik bergerak dengan sisa-sisa laskarnya menuju arah ke Karangasem dengan maksud meminta bantuan untuk mengadakan serangan balasan. Tetapi dalam perjalanannya ini patih Jelantik tiba-tiba terbunuh.

Dalam serangan yang ke dua ini, dengan pertempuran sehari saja, Belanda berhasil memukul hancur kepala udang dengan jatuhnya benteng terakhir Jagaraga, dan jatuhlah benteng Jagaraga ke tangan Belanda pada tanggal 19 April 1849 dengan korban laskar di pihak Jagaraga kurang-lebih 2200 orang, termasuk 38 pedanda dan pemangku, 80 orang gusti dan 83 pembekel.[30] Menurut sumber Belanda, di pihak Belanda korban sebanyak 264 orang.

3. Perang Kusumba.

Kemenangan Belanda atas Jagaraga dengan korban yang dianggapnya tidak berarti, telah membangkitkan kembali semangat tempur pasukan Belanda. Mayor Jenderal Michiels setelah mendapat persetujuan dari Batavia, memutuskan untuk menyerang Klungkung sebagai hukuman atas penyelewengan-penyelewengannya terhadap apa yang telah dimuat dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Belanda. Klungkung menyadari bahwa suatu saat Belanda akan melakukan serangan atas wilayahnya, apabila taktik ini diketahuinya. Untuk ini Klungkung sudah memperkuat laskar dan

wilayah-wilayah yang dianggap sebagai dinding pelindung bagi ibu kota. Sebelah timur adalah Kusumba dan Satrya, dinding selatan adalah Gelgel dan sekitarnya sedangkan di barat adalah Banjarangkan.

Keyakinan Klungkung ini makin menjadi kuat dengan datangnya beberapa kali utusan Belanda ke Smarapura, yang meminta kepada Dewa Agung Putra agar segera minta maaf dan mengubah sikap atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuatnya, seperti bantuan-bantuan yang pernah dikirimkannya ke Buleleng untuk membantu kerajaan Buleleng. Namun Dewa Agung Putra menganggap ultimatum ini sebagai cambuk untuk memperkuat laskar dan bentengnya.

Pada saat ini yang memerintah di Klungkung adalah I Dewa Agung Putra Kusumba yang menggantikan ayah beliau Dewa Agung Sakti (karena sudah tua) dan berkedudukan di keraton Kusamba. Beliau dibantu oleh putrinya Dewa Agung Istri Kanya berkedudukan di istana Smarapura, memerintah atas nama datuk beliau Dewa Agung Sakti.

Tanggal 8 Mei 1849 Armada Belanda di bawah pimpinan Michiels mendarat di Padang (teluk Padang) dan setelah merebut desa Padang lalu dijadikannya sebagai pusat induk pasukan yang akan menyerang Klungkung. Bantuan dari Batavia didatangkan begitu pula bantuan pasukan dari Lombok 4000 orang di bawah pimpinan I Gusti Made Rai.[31] Setelah Karangasem dapat dikuasai, kemudian Kusamba direncanakan sebagai sasaran pertama untuk membuka jalan penyerbuan ke Klungkung dan di samping itu adalah karena Kusamba merupakan istana raja Muda Klungkung.

Pagi-pagi tanggal 24 Mei 1849, Kusamba diserang oleh Belanda dari timur. Walaupun Kusamba telah lebih dahulu mempersiapkan laskar kurang lebih 2000 orang yang dipusatkan di pura Goa Lawah dengan garis pertahanan sepanjang bukit Wates, namun serangan Belanda yang mendadak itu cukup mengejutkan laskar Kusamba yang hanya bersenjatakan keris, tombak, bambu runcing, dan beberapa pucuk bedil buatan sendiri.

Ternyata laskar Kusamba tidak mampu menghadapi serangan pasukan Belanda yang sangat lengkap persenjataannya maupun perlengkapannya. Hanya dalam waktu 5 (lima) jam pertahanan Goa Lawah telah dapat direbut Belanda.[32] Dengan meninggalkan korban yang banyak, laskar Kusamba mengundurkan diri dan bergabung dengan laskar yang bertahan di desa Kusamba.

Serangan Belanda yang dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Michiels dan Van Swieten, melanjutkan serangannya ke Kusamba. Tepat pada saatnya laskar bantuan dari Gianyar tiba pula di

Kusamba. Pasukan Belanda yang berjumlah 790 orang dengan perlengkapan dan persenjataan yang modern berhadapan dengan laskar Kusamba yang berjumlah 3000 orang di bawah pimpinan Anak Agung Made Sangging langsung di bawah komando I Dewa Agung Putra Kusamba.

Belanda menyerang Kusamba dari tiga jurusan. Dari utara adalah angkatan darat di bawah pimpinan Van Swieten, dari timur di bawah pimpinan Michiels sendiri dan dari selatan (pantai) adalah pasukan marinir di bawah pimpinan Bauricius. Kepungan ini dihadapi oleh laskar Kusamba dengan semangat gagah berani. Tetapi karena ketidak seimbangan terutama dalam persenjataan, maka jam 3.00 sore (jam 15.00) tanggal 24 Mei 1849, Kusamba mengundurkan diri sambil melakukan politik bumi hangus dengan membakar kampung-kampung. Dewa Agung Putra dapat meloloskan diri dari kepungan itu dan mengundurkan diri menuju Klungkung. Selanjutnya Belanda berkemah di sekitar istana Kusamba. Keesokan harinya tanggal 25 Mei 1849, pagi-pagi buta (kira-kira jam 3.00), laskar Kusamba melakukan serangan balasan. Penyerbuan yang tak terduga ini sangat mengejutkan pasukan Belanda yang sedang enaknya beristirahat dalam kemah sekitar istana Kusamba. Dalam kegaduhan dan hiruk pikuk ini telah menyusup sebuah pasukan istimewa di bawah pimpinan Anak Agung Made Sangging dengan tugas utama berusaha membunuh Jendral yang berbintang tujuh (yang dimaksud adalah Jenderal Michiels).[33] Sebelum Belanda sadar akan sergapan yang mendadak ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan dan Jenderal Michiels roboh. Kakinya (pahanya) sebelah kiri remuk kena peluru. Jenderal Michiels meninggal setelah dioprasi (dipotong). Dengan meninggalnya Jenderal Michiels, telah mengubah situasi peperangan selanjutnya. Belanda memutuskan kembali ke Padang dan melanjutkan pelayaran ke Batavia. Serangan atas ibu kota Klungkung dibatalkan.

4. Perlawanan Banjar.

Peperangan yang dilakukan oleh rakyat Banjar melawan Belanda tidak terlepas dengan apa yang telah dilakukan oleh Belanda terhadap Buleleng dan Jagaraga. Walaupun jatuhnya Jagaraga dianggap oleh Belanda sebagai takluknya kerajaan Buleleng, tetapi pada kenyataannya semangat melawan dari pihak rakyat dan beberapa pemimpin tidak padam sama sekali. Pemberontakan setempat-setempat terjadi di Buleleng di bawah pimpinan I Nyoman Gempol dan I Ketut Anyaran, tetapi perlawanan ini dapat dipadamkan oleh Belanda. Perlawanan-perlawanan ini telah membakar semangat perlawanan yang ada dalam dada Ida Made Rai sebagai

seorang punggawa yang memerintah desa Banjar dan sekitarnya, yang sejak kekuasaan Belanda di Buleleng merasa tidak senang atas tindakan-tindakan kolonial Belanda, terutama dalam pelaksanaan Tanam Paksa yang dikenakan terhadap rakyat. Terhadap sikap Ida Made Rai dan rakyatnya ini, Pemerintah Belanda di Buleleng telah mengambil keputusan untuk memecat punggawa Banjar Ida Made Rai dan diganti oleh musuh pribadinya yaitu Ida Ketut Anom yang pro Belanda. Bahkan dalam tahun 1864 Ida Made Rai dan kawan-kawannya pernah ditangkap dan dipenjarakan, tetapi kemudian mereka dibebaskan lagi atas desakan rakyat Banjar yang mengancam akan membuat huru-hara apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak dikembalikan.[34]

Pembangkangan dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Banjar di bawah pimpinan Ida Made Rai dan kawan-kawannya seperti Ida Made Tamu, Ida Made Kaler, I Kamasan, I Guliang dan Ni Belegug, sangat menjengkelkan Belanda, sehingga Belanda memutuskan untuk memerangi Banjar sebagai hukuman.

Pada tanggal 15 September 1868, Belanda mendaratkan pasukannya di pantai desa Temukus. Pasukan Belanda ini dibantu oleh pasukan raja Buleleng yang sepakat untuk menghancurkan Jagaraga. Berita ini telah membuat hati rakyat menjadi panas dan mulai mempersiapkan laskar-laskar untuk menghadapi setiap penyerbuan Belanda. Tetapi pemimpin-pemimpin desa Banjar seperti Ida Made Rai berusaha mengatasi situasi ini karena sadar bahwa persiapan-persiapan belum matang untuk menghadapi pasukan yang serba lengkap. Ida Made Rai bermaksud untuk mengadakan perdamaian, lalu mengirim I Kamasan dan kawan-kawannya sebagai utusan menghadap Belanda di Temukus. Tetapi pihak Belanda tidak menanggapi maksud perdamaian dari delegasi ini, bahkan kemudian Belanda menangkap I Kamasan dan membawanya ke Kapal.[35] Dengan perbuatan Belanda yang pengecut ini, pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Ultimatum Belanda yang meminta agar Ida Made Rai menyerah saja telah dijawab dengan pernyataan siap tempur.

Pada tanggal 19 September 1868 pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Heemskerk mulai menyerbu Banjar.[36] Serbuan Belanda yang pertama ini telah berhasil dijebak untuk memasuki perangkap yang sudah diatur sebelumnya oleh laskar Banjar. Pertempuran sengit terjadi sepanjang desa Den Carik dan di depan desa Banjar. Pertempuran berakhir dengan kekalahan di pihak Belanda dengan korban yang banyak. Serdadu-serdadu Belanda kebanyakan tewas karena tusukan keris dan tombak laskar Banjar. Sisa-sisa pasukan Belanda mengundurkan diri dan kembali ke desa Temu-

kus, dan menanti pasukan bantuan dari Batavia untuk melakukan penyerangan yang ke dua kali.

Tanggal 25 September 1868 armada bantuan Belanda di bawah pimpinan Kolonel de Brabant mendarat di pantai Temukus. Pendaratan segera dilanjutkan dengan penyerangan besar-besaran dengan kekuatan serdadu yang dilipat gandakan. Satu persatu desa-desa sekitar desa Banjar berhasil diduduki oleh Belanda dengan membuat korban yang besar terutama di pihak laskar Banjar. Pimpinan laskar Banjar yaitu Ida Nyoman Ngurah gugur dalam pertempuran dahsyat itu. Sisa-sisa laskar Banjar yang berhasil luput dari peluru Belanda, mulai mengundurkan diri di bawah pimpinan-pimpinan mereka seperti : Ida Made Rai, Ida Made Tamu, Ida Nyoman Gunung, Ida Made Sapan, I Made Guliang. Mereka menyadari bahwa Banjar sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Mereka memutuskan untuk mundur dan mencoba melakukan perang gerilya. Pada hari itu juga jatuhlah Banjar ke tangan Belanda. Belanda mengedarkan surat selebaran ke seluruh kerajaan-kerajaan Bali yang isinya supaya menangkap pemimpin-pemimpin Banjar kalau ternyata mereka berada dalam wilayah kerajaan masing-masing. Akhirnya Ida Made Rai dan kawan-kawannya dapat ditangkap oleh Belanda atas bantuan raja Mengwi di desa Mengwi dan kemudian dipenjarakan seumur hidup di Badung. I Guliang sendiri sempat meloloskan diri dari tangkapan Belanda waktu itu, tetapi dalam persembunyiannya di desa Wongaya ia dapat dijebak oleh rakyat yang kemudian membunuhnya.

5. Perlawanan Badung.

Sebab-sebab perlawanan.

Pada bulan Mei 1904 ada sebuah perahu Cina yang bernama "Sri Komala" dari Banjarmasin, terdampar di pantai Sanur telah dirampas oleh rakyat di sana. Pemerintah Belanda menuntut kepada raja Badung atas pelaksanaan hak "Tawankarang" yang dilakukan oleh rakyat Sanur itu dan mengharuskan membayar denda sebanyak f 7500. Raja Badung merasa keberatan atas tuntutan Pemerintah Belanda itu sehingga apa-apa yang diharapkan oleh Pemerintah Belanda sama sekali tidak terpenuhi.

Peristiwa ini akhirnya menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Rakyat Sanur di bawah pimpinan Ida Bagus Ngurah melaporkan kepada raja Badung Anak Agung Made bahwa rakyat Sanur sama sekali tidak merampas barang-barang milik Belanda. Bahkan persoalan ini juga dilaporkan oleh raja Badung kepada Dewa Agung di Klungkung yang masih dianggap sebagai raja tertinggi di kerajaan Bali. Kemudian peristiwa perselisihan dengan Belanda

ini diberitahukan juga kepada raja Tabanan Gusti Ngurah Agung dan akhirnya raja Tabanan bersama beberapa rakyatnya datang ke Badung. Di sebuah pura kedua raja ini mengadakan ikrar bersama untuk bersama-sama menentang Belanda.

Jalannya perlawanan.

Pada hari Sabtu Kliwon Landep tahun Çaka 1828 (15 September 1906) tentara Belanda mendarat di pantai Sanur dengan kekuatan 92 orang opsir dan 2311 orang tentara bawahan di samping 766 orang pribumi di bawah Mayoor M.B. Rost van Toningen dan dipimpin oleh anggota Dewan Hindia Belanda F.A. Liefrinck. Pihak Belanda baru mengadakan serangan pada hari kedua yaitu tanggal 16 September 1906 dari atas kapal.

Pertempuran antara tentara Belanda dengan laskar Badung mula-mula berlangsung di Sanur, kemudian berpindah ke desa Intaran. Di dalam perlawanan ini banyak laskar Badung yang gugur dan karena kekuatan persenjataan tidak seimbang kemenangan terletak di pihak Belanda. Keesokan harinya, pada hari yang ketiga tanggal 17 September 1906 perlawanan terjadi di desa Tanjung Bungkak dan di desa Panjer. Dalam perlawanan ini Badung juga menderita kekalahan. Kedua desa ini kemudian ditinggalkan, kekuatan laskar Badung dipusatkan di desa Sanglah yang terletak di sebelah selatan kota Denpasar. Pada saat ini laskar Badung betul-betul dipersiapkan secara teknik perang Bali yaitu dengan siasat **"arda candra"** (bulan sabit). Dari sebelah selatan dipersiapkan laskar dari Abiantimbul dan Padangsambian, dari sebelah utara laskar Denpasar, dari sebelah barat laskar Pemecutan, sedangkan pasukan dari Dalung dan Gaji dipersiapkan sebagai pasukan yang berada di garis belakang.

Pada hari yang kelima tanggal 19 September 1906 Kesiman dapat diduduki. Keesokan harinya tanggal 20 September 1906 merupakan hari yang keramat bagi rakyat Badung karena hari tersebut merupakan hari : **"Puputan Badung"** di mana seluruh keluarga raja Badung bersama-sama bertekad untuk mati bersama berperang melawan Belanda. Pagi-pagi tanggal 20 September 1906 itu tentara Belanda sudah melancarkan serangan atas kota Denpasar. Akhirnya seluruh Puri Denpasar baik puri Satrya, Puri Pemecutan dan Puri Kuta beserta raja-raja kecil lainnya gugur dalam perlawanan itu. Dengan demikian kerajaan Badung jatuh ke tangan Belanda.

Dengan runtuhnya kerajaan Badung bukanlah berarti seluruh kerajaan Bali dapat dikuasai oleh Belanda karena dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1908 disusul dengan perlawanan raja Klungkung yang terkenal juga dengan **"Puputan Klungkung"**.

6: **Perlawanan Klungkung.**

Sebab-sebab dan jalannya perlawanan.

Pada tanggal 18 April 1908 tiba-tiba di Gelgel (bekas ibu kota lama kerajaan Bali), telah terjadi suatu peristiwa di mana seluruh kompleks rumah candu terbakar dan mantri candu terbunuh dengan tidak diketahui siapa pelakunya. Belanda menganggap bahwa peristiwa ini adalah perbuatan Cokorda Gelgel yaitu : Paman dari Dewa Agung Jambe, yang dikenal oleh Belanda sebagai yang paling berani menentang Belanda. Belanda menganggap kejadian ini sebagai suatu pernyataan perang terhadap Belanda. Pada tanggal 19 April 1908 pasukan gabungan Belanda yang didatangkan dari Gianyar dan Karangasem menyerbu Gelgel. Rakyat Gelgel di bawah pimpinan Cokorda Gelgel dan putra-putranya antara lain Cokorda Made Gelgel dan Cokorda Pegig dengan gigih mempertahankan daerahnya. Hal ini kemudian diketahui oleh raja Klungkung Dewa Agung Jambe di mana beliau segera mengirim laskar menuju Gelgel di bawah pimpinan Ida Bagus Jumpung. Perlawanan berlangsung selama setengah hari dan akhirnya kemenangan ada dipihak Belanda. Dari pihak Gelgel banyak menderita korban antara lain : Cokorda Made Gelgel, Cokorda Pegig dan Ida Bagus Jumpung semuanya gugur dalam pertempuran itu. Perlawanan dilanjutkan pada malam harinya di mana pihak laskar Gelgel mengadakan serangan terhadap Belanda dan akhirnya Belandapun membalas serbuan itu bahkan sampai ke kota Klungkung. Melalui Resimen Liefrinck pernah dicoba untuk mengadakan perjanjian tapi raja Klungkung menolak tetap menyatakan perang terhadap Belanda.

Tanggal 21 April 1908 Klungkung segera mendapat serangan dari pihak Belanda di mana Belanda mengerahkan pasukan angkatan lautnya melalui pantai Jumpai yang terletak di sebelah selatan kota Klungkung. Raja Klungkung Dewa Agung Jambe beserta pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya telah bertekad untuk menghadapi serangan Belanda. Di bawah pimpinan Overste Schuroth, armada perang Belanda mendarat di Kusamba, dan sebagian lagi mendarat di pantai lebih. Keesokan harinya Belanda menyerang Klungkung melalui tiga arah yaitu : dari sebelah timur dipimpin oleh Kolonel Carpentier Alting, dari sebelah selatan dipimpin oleh Mayoor H. Missofer, dari arah barat pasukan Belanda dapat dibendung oleh laskar Banjarangkan di bawah pimpinan Cokorda Gde Oka. Belanda dapat memasuki kota dan pada saat ini seluruh keluarga raja bertekad untuk melaksanakan "Puputan" yaitu berperang habis-habisan. Dalam perlawanan ini tampil ke depan Dewa Agung Semara Bawa yaitu saudara raja Klungkung dan putra

mahkota Dewa Agung Gde Agung bersama-sama ibunda beliau yaitu Dewa Agung Muter menyerbu pasukan Belanda akhirnya beliau semuanya gugur dalam perlawanan. Akhirnya Dewa Agung Jambe memimpin laskar Klungkung, dan akhirnya kekuatan persenjataan Belanda lebih lengkap beliaupun juga gugur dalam perlawanan itu. Dengan jatuhnya Klungkung ini berarti Belanda telah berhasil menaklukkan seluruh wilayah kerajaan yang ada di Bali.

5.2.4. Keadaan masyarakat pada akhir abad XIX.

Keadaan masyarakat Bali pada akhir abad XIX belum banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan masyarakat di Jawa. Pengaruh-pengaruh luar yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan sosial belum nampak. Berbagai sitem di dalam masyarakat Bali masih tetap memakai sistem tradisional yang berlaku sebelumnya. Lebih-lebih kita lihat bahwa abad ke XIX untuk Bali merupakan abad penuh peperangan antar kerajaan. Hal ini memperkuat lagi adat istiadat maupun aturan-aturan yang berlaku di daerah kerajaan masing-masing, sebab apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga kerajaan tersebut dapat dikenakan hukuman secara adat sesuai dengan undang-undang (awig-awig) yang berlaku di daerah asalnya.[37] Demikian pula pelanggaran-pelanggaran perbatasan sering menimbulkan sengketa antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya dan tidak jarang hal seperti ini menimbulkan peperangan.[38]

Salah satu institusi sosial sebagai suatu tradisi yang sejak dulu berlaku pada kerajaan-kerajaan di Bali, ialah "hukum tawan karang", oleh ahli-ahli hukum adat Belanda sering diistilahkan dengan klip recht. Pelaksanaan dari hukum tawan karang ini sering pula menimbulkan perselisihan antara kerajaan-kerajaan di Bali dan pada masa berikutnya yaitu pada masa kontak-kontak dengan bangsa Barat, tidak jarang pula hukum tawan karang ini menimbulkan perselisihan antara raja-raja Bali dengan pemerintah Belanda bahkan sampai menimbulkan peperangan.[39]

Berbagai sistem sosial yang terdapat di dalam masyarakat Bali, masih tetap berpedoman pada sistem nilai yang dimiliki, oleh masyarakat Bali, sehingga di dalam sistem sosial itu dapat kita lihat bahwa setiap sistem sosial yang ada, selalu berpijak pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu.

Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah sistem status. Hal ini banyak mempengaruhi sistem sosial yang ada. Akibat dari sistem status di Bali mengakibatkan timbulnya stratifikasi sosial yang lain disebut "kasta". Sistem kasta di Bali memiliki

empat tingkatan yaitu golongan Brahmana sebagai kasta tertinggi, mempunyai tugas dalam bidang keagamaan, yang kedua adalah golongan Ksatria mempunyai tugas dalam bidang pemerintahan, golongan ketiga adalah Wesya; golongan ini kebanyakan sebagai petani dan pedagang sedangkan golongan terakhir adalah golongan Sudra yang bertugas untuk membantu ketiga golongan di atas dan mereka kebanyakan hidup sebagai petani dan pedagang. Di dalam sistem status ini jelaslah kepada kita bahwa setiap penggolongan dalam masyarakat mempunyai sistem yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan status dalam masyarakat ini, menimbulkan norma-norma dan norma-norma ini dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang berupa **awig-awig, sima, kerta sima, paswara-paswara.**[40]

Bentuk-bentuk aturan ini baik yang tertulis maupun yang tak tertulis (yang sudah di "adat" kan) kemudian lahir sebagai adat kebiasaan sangat mempengaruhi sistim sosial yang ada dalam masyarakat Bali. Sebagai contoh sistem sosial antara lain : Sistem kekerabatan, sistem perkawinan dan lain sebagainya. Kedua sistem tersebut di atas, sampai akhir abad XIX tidak banyak mengalami perubahan.

5.3. Kehidupan seni budaya.

5.3.1. Pengaruh seni budaya asing.

Membicarakan pengaruh seni budaya asing dalam seni budaya Bali tidak dapat dipisahkan dengan proses berlangsungnya hubungan antara bangsa asing itu dengan penduduk pulau Bali.

Seperti apa yang dapat dipelajari dari sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing di Bali yang berlangsung dari abad XVI–XVIII sebagian besar hanya dalam hubungan perdagangan saja. Baru kemudian pada abad XIX kita dapatkan sumber-sumber dari penulis-penulis Barat tentang permukiman orang-orang Cina di Bali diperkirakan baru banyak menetap sejak ramainya perdagangan di Bali sekitar abad XVII–XVIII; berdiam di beberapa tempat penting terutama di tempat-tempat pelabuhan di Bali antara lain di Kuta (Badung), Pabean (Buleleng), Amed, Pasir putih (Karangasem). Di antara mereka ada yang mendapat kepercayaan raja-raja setempat sebagai kepala pelabuhan yang pada umumnya disebut **Subandar.**[41] Di samping sebagai pedagang ada juga yang sengaja datang ke Bali sebagai tukang kayu, sebagai ahli bangunan, sebagai pemahat dan pematung.

Dari suatu laporan perjalanan (**Rapport van eene reis**) seorang controleur Belanda yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah Karangasem tahun 1900 dapat diperoleh keterangan bahwa pada masa pemerintahannya Anak Agung Gde Djelantik (1850-

1903) di Karangasem terdapat 18 orang Cina. Salah seorang bernama Singe Kam, dan salah seorang Cina yang pada waktu itu menjabat subandar di Pasir Putih bernama Yap Sian Liat.[42]

Yap Sian Liat ini adalah seorang ahli bangunan dan ahli pahat, atas perintah Anak Agung Gde Jelantik ia dapat menyelesaikan dua buah gedung tempat tinggal yang bercorak Cina yaitu sebuah terletak di puri Agung Karangasem dan sebuah lagi terletak di puri Kolodan Karangasem. Dari berbagai corak ragam hiasan-hiasannya itu banyak mempengaruhi corak ragam seni pahat Bali di dalam perkembangannya kemudian.

Demikian pula dalam seni patung, corak Cina yang umum di Bali disebut **Onte**, di beberapa tempat masih kita dapatkan antara lain di Kerta Gosa Klungkung, di pura Dalem Sidemen, Karangasem dan ada juga berbagai **style** dari patung tersebut disimpan di Museum Bali Denpasar. Bentuk patung Onte ini sangat disenangi di kalangan para bangsawan di Bali karena bentuk Onte tersebut kebanyakan berfungsi sebagai tempat keris.

Mulai kapan tersebarnya pengaruh kebudayaan Cina di Bali dan melalui daerah-daerah mana saja penyebarannya, sampai sekarang belum diketemukan sumber-sumber yang lengkap. Sudah tentu hal ini memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam.

Pengaruh seni budaya asing lainnya yang kita dapatkan pada akhir abad XIX adalah pengaruh seni budaya Barat yaitu berupa seni bangunan. Sesudah tahun 1882 yaitu sejak mulainya kota Singaraja ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan Bali dan Lombok, sejak itu pemerintahan Belanda berangsur-angsur mendirikan kantor-kantor administrasi di kota Singaraja. Di samping kantor-kantor pemerintahan, pada tahun 1875 di Singaraja mulai didirikan gedung Sekolah Dasar yang pertama di Bali. Dari segi bentuk dan corak bangunan jelas menunjukkan corak arsitektur modern artinya tidak lagi berpijak pada ketentuan arsitektur tradisional.

5.3.2. **Pendidikan.**

Sebelum masuknya sistem pendidikan Barat, pada umumnya sistem pendidikan pada masyarakat Bali dilakukan melalui pendidikan keluarga yaitu anak-anak dididik langsung oleh orang tua si anak di dalam lingkungan keluarganya. Sistem pendidikan tradisional seperti ini menyebabkan pendidikan mengarah kepada pengetahuan pokok keluarga atau golongan. Misalnya keluarga Brahmana yang bertempat tinggal di suatu Geria, mereka dididik membaca dan menulis untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan keagamaan. Pengetahuan mereka dimulai dengan membaca kesusastraan yaitu kekawin-kekawin seperti Rama-

yana, Bratayuda, Sutasoma, dan sebagainya. Kemudian pada tingkatan yang lebih tinggi mulailah mereka membaca isi-isi weda, memperdalam filsafat dan pelaksanaan upacara agama.

Pendidikan pada keluarga Ksatria terutama pada keluarga penguasa pemerintahan yang berdiam dalam lingkungan puri, umumnya hampir sama dengan sistem pendidikan pada keluarga Brahmana. Hanya ada sedikit perbedaan dalam tujuan pendidikan yaitu apabila pendidikan keluarga Brahmana mengharapkan kelak seorang itu akan menjadi pendeta, sedangkan pada pendidikan keluarga Ksatria bertujuan untuk menjadi seorang pemimpin, karena itu pendidikannya lebih cenderung mendalami soal-soal yang ada sangkut pautnya dengan bidang pemerintahan, yaitu etika dan hukum.

Demikian juga sistem pendidikan pada keluarga atau kelompok golongan lainnya, sehingga sistem pendidikan keluarga ini sangat tergantung pada lingkungan keluarga dan asuhan orang tua si anak.

Baru kemudian setelah masuknya sistem pendidikan Barat, yaitu dengan berhasilnya dibuka sebuah sekolah rendah pada tahun 1875 di Singaraja, mulailah oleh pemerintahan kolonial Belanda diterapkan sistem pendidikan Barat melalui sekolah-sekolah. Namun pendidikan sekolah pada waktu itu belum berjalan dengan baik. Pemerintah sangat sukar untuk mendapatkan murid, karena pada waktu itu belum ada keinsyafan dan kesadaran dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Di samping itu keadaannya masih sangat terbatas. Sejalan pula dengan politik pemerintah Belanda pada waktu itu ialah mendidik anak-anak untuk dapat membaca dan menulis dengan tujuan untuk kepentingan tenaga administratif saja. Kemudian sesudah tahun 1900 mulailah berangsur-angsur pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah desa di beberapa tempat di Bali dan tahun 1913 di kota Singaraja dapat didirikan **Hollands Inlandsche School** (H.I.S.).[43]

5.3.3. **Kesenian.**

Sumber-sumber pemberitaan mengenai kegiatan kesenian dalam periode 1800–1900 sangat sedikit kita dapatkan. Dari sumber-sumber babad hanya babad **Buleleng** pernah menyinggung sedikit mengenai diselenggarakannya pertunjukan wayang yaitu pada masa pemerintahan I Gusti Agung Pahang. Rupanya pada waktu itu sudah menjadi kegemaran bagi keluarga bangsawan sampai rakyat biasa untuk menonton wayang. Menurut babad itu dikatakan bahwa pertunjukan wayang yang dilangsungkan di Bancingah yaitu di bagian muka halaman puri dilakukan pada waktu malam hari.[44]

CATATAN

1. Utrecht, **Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok.** (Sumur Bandung, 1962, p.101).
2. Bloemen Waanders, **"Bijdragen tot de kennis van het Eiland Bali".** TNI, 3 de Serie, II. (1868), p.384.
3. **Vide Babad Buleleng,** koleksi Gedung Kirtya, Singaraja, (manuskrip). Cf. Ketut Ginarsa "Sedjarah Buleleng", **Bahasa dan Budaya,** Tahun III,6. (Djakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1955, p.5.
4. **Vide** Utrecht, **loc.cit.** Antara Utrecht dan Bloemen Waanders, ada perbedaan angka tahun. Menurut Utrecht tahun 1804 sedangkan Bloemen Waanders tahun 1807–1808.
5. Dalam bukunya Korn, **Balische Overeenkomsten.** (s–Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1922), **passim;** memuat pula perjanjian-perjanjian antara kerajaan di Bali serta tentang perbatasan daerah.
6. Menurut Utrecht perjanjian ini masih sangat lemah karena Badung pada waktu itu ada di bawah kerajaan Dewa Agung Klungkung. Vide Utrecht, op.cit, pp. 147–148.
7. Ibid, pp. 149–150.
8. Untuk lebih jelasnya **Vide** Utrecht, **Ibid,** p.122.
9. Lekkerkerker, "Het Voorspel der Vestiging van de Nederlandsche macht op Bali en Lombok" **BKI,** 79. (1923), p. 201.
10. **Ibid,** p.203.
11. Ibid, p.200.
12. AK. Nielsen, **Leven en avunturen van den oostinjervaarder op Bali.** (Amsterdam, 1928), p.50.
13. Untuk jelasnya vide Arsip Nasional, **Surat-surat perjanjian antara Kerajaan-kerajaan Bali/Lombok dengan pemerintah Hindia Belanda 184/1938.** (Djakarta : arsip Nasional, 1964), passim.
14. Ketut Ginarsa, **op.cit,** pp.78–80.
15. Arsip Nasional, **op.cit,** pp.1–5.
16. **Ibid,** pp. 81–86.
17. **Ibid,** pp. 7–11.
18. Utrecht, **op.cit,** p.123.
19. Lekkerkerker, **op.cit,** pp.227–228.
20. **Ibid,** p.224.
21. **Gaguritan Rusak Buleleng,** koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, **(manuskrip).**

22. Utrecht, **op.cit**, p.191.
23. **Gaguritan Rusak Buleleng**, (manuskrip).
24. **Ibid**.
25. Utrecht, **op.cit**, p.194, vide Ketut Ginarsa, **op.cit**, p.7.
26. Jatuhnya Singaraja ke tangan Belanda, menurut Utrecht, pada tanggal 28 Juni 1846 sedangkan Ketut Ginarsa pada hari Senin tanggal 26 Mei 1846. Vide Utrecht, **Ibid**. Ketut Ginarsa, **Ibid**, p.19; cf. **Gaguritan Rusak Buleleng**, (manuskrip).
27. Arsip Nasional, **op.cit**, pp. 87–97
28. **Gaguritan Rusak Buleleng**, (manuskrip).
29. Lauts, **Het Eiland en de Balienezen**. (Amsterdam, 1848), p.225.
30. **Ibid**, p.240.
31. PG. Booms, Expeditions de L'armee Nearlandaise indest orientales centre presncis de Bali de 1846–1849, Breda: Van Gulik & Hermans, impranius Libranes, 1850), p.95. Cf. J. Paulus, Enciclopedia van Nederlandsch Indie. (Leiden: N V O/H G J. Brill, 1917), p.110.
32. G. Nypels, De Expedition naar Bali in 1846, 1848, 1849, en 1868. (Haarlem: G. T. van Dorp & Co, 1897), p.158.
33. PG. Booms, **op.cit**, pp.91–92.
34. **Gaguritan Rusak Banjar**, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja, (manuskrip).
35. **Ibid**.
36. Van Vlijmen, **Bali 1868**, pp.17–18.
37. **Vide** Korn, **Het Adatrecht van Bali**. (s–Gravenhage: C. Naeff.
38. Tentang peraturan-peraturan perbatasan wilayah kerajaan, **vide** Korn, **Balische Overeenkomsten, passim**.
39. Meletusnya perang Buleleng dan perang Badung melawan Belanda adalah akibat dari hukum Tawan karang.
40. Hal ini telah dikumpulkan oleh FA' Liefrinck dalam bukunya **Landsverordeningen van inlandsche vorsten op Bali**. (s–Gravenhage: Martinus Nijhoff, 197), **passim** dan **Nogeenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten**. (s–Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921), **passim**.
41. Bagaimana peranan Subandar, vide Utrecht, **op.cit**, pp.119–129. Cf. AA. Gde Putra Agung, "Peranan Syahbandar di Lombok pada abad XIX". **Basis**. (Juli, 1972), pp.309–315.
42. **Menurut Rapport van eene reis van den Controleur voor de poltieke aangelegenheden vergezeld door den Punggawa**

van Soekasada Goesti Njoman Raka, van 27 Djanuari–7 Februari 1900. (Batavia: Albrecht & Co, 191), pp.3-4.
43. Hasil wawancara dengan Bapak Wayan Ruma, bekas guru Hollands Inlandsche School, (1921).
44. **Babad Buleleng**, (manuskrip).

6. ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (1900–1942)

6.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan

6.1.1. Kerajaan-Kerajaan

Segera setelah Pemerintahan Dalem Dimade di Istana Gelgel maka berakhir pulalah suatu kekuasaan tunggal di Bali. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Gelgel runtuh akibat pemberontakan Patih Gelgel yakni I Gusti Ngurah Widya yang terkenal dengan gelar I Gusti Agung Meruti.[1]

Dengan demikian maka terjadilah suatu perubahan ketatanegaraan di Bali yakni dengan terpecah-pecahnya Bali menjadi Kerajaan-Kerajaan kecil yang masing-masing berdaulat.[2] Kerajaan-Kerajaan tersebut antara lain Buleleng, Bangli, Karangasem, Gianyar, Mengwi, Tabanan, Badung dan Klungkung.[3]

Pada prinsipnya semua kerajaan-kerajaan ini hanyalah merupakan suatu perwujudan baru dari para Arya di Daerah-Daerah tersebut yang datang ke Bali bersama-sama Gajah Mada ketika Majapahit menaklukkan Bali.[4] Para Arya tersebut semula adalah merupakan pengikut Samprangan dan Gelgel yang merupakan raja-raja yang diangkat dan direstui oleh Majapahit.[5] Namun perubahan ketatenegaraan Gelgel yang merupakan perwujudan kelemahan di Gelgel sendiri menyebabkan para Arya tersebut melepaskan diri dari kekuasaan tunggal di Gelgel.

Akan tetapi walaupun demikian kekuasaan secara yuridis, terutama yang menyangkut hubungan dengan dunia luar masih tergantung kepada raja Klungkung sebagai ahli waris Kerajaan Gelgel.[6] Hal ini dapat kita lihat nanti dalam perkembangan kerajaan-kerajaan kecil tersebut setelah mereka terlibat dalam suatu perselisihan dengan Belanda.[7]

Dalam perkembangan selanjutnya dari kerajaan-kerajaan tersebut terlihat bahwa kerajaan-kerajaan tersebut silih berganti memegang supremasi. Mula-mula Buleleng, Mengwi, Karangasem dan Badung.[8]

Selanjutnya dalam abad ke 20 terjadi kembali perubahan baru dalam kerajaan-kerajaan di Bali yang pada prinsipnya bukanlah merupakan munculnya kerajaan-kerajaan baru, tetapi hanyalah

merupakan pengelompokan seperti persekutuan-persekutuan.[9] Buleleng yang telah jatuh ke tangan Belanda tahun 1849 boleh dikatakan telah menjauhi ketertibannya dalam federasi kerajaan-kerajaan di Bali.[10] Sedangkan Mengwi juga telah jatuh ketika Badung melebarkan sayapnya. Sementara itu Badung dan Tabanan seolah-olah bersatu dalam menghadapi Belanda, sehingga dalam abad ini hanya terdapat dua pusat kekuasaan yakni Badung dan Klungkung.[11]

6.1.2. **Pemerintahan Hindia Belanda.**

Kedatangan Bangsa Belanda di Bali telah dimulai pada tahun 1597, yakni dalam masa ekspedisi Belanda yang pertama yang dipimpin sendiri oleh Cornelis de Houtman, serta mendarat di pantai Gelgel (Batu Klotok).[12] Segera setelah itu terjadilah hubungan persahabatan antara Kerajaan Gelgel dengan Bangsa Belanda.[13]

Selanjutnya setelah ekspedisi tersebut, hubungan antara kerajaan Gelgel dan Bangsa Belanda boleh dikatakan tidak berarti sama sekali. Baru setelah abad ke 19 ada perhatian Belanda untuk kembali ke Bali secara intensif. Hal ini dapat kita lihat ketika Belanda memaksakan suatu perjanjian dengan raja-raja di Bali pada tahun 1841 walaupun kedatangannya ini tidak melihat Bali seperti dalam tahun 1597, karena Bali telah terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil.[14]

Sesungguhnya Belanda telah mempunyai suatu itikad untuk memasukkan Bali ke dalam wilayah Hindia Belanda, tetapi hal ini belum bisa dilaksanakan karena antara Belanda dan Bali belum pernah terjadi suatu persengketaan politik. Perjanjian yang mereka buat dengan kerajaan-kerajaan di Bali adalah merupakan permulaan intervensi Belanda di Bali. Hal ini terbukti ketika raja-raja di Bali melanggar perjanjian tersebut Belanda segera mengirimkan ekspedisi militernya untuk menghancurkan kedaulatan Bali. Dan hal ini terbukti dalam tahun 1908 Belanda berhasil sama sekali menaklukkan Bali ketika pada tahun itu Klungkung sebagai kerajaan berdaulat terakhir mengadakan Puputan melawan Belanda.[15]

1.

1. **Masa Stedehouder** [16]

Secara keseluruhan masa ini dimulai pada tahun 1908. Bali dibagi menjadi delapan Daerah yang masing-masing diawasi oleh seorang **Controleur**, di samping raja yang diangkat atas persetujuan Belanda. Kedelapan Daerah tersebut adalah Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.

Raja-raja yang diangkat untuk memangku kekuasaan di Daerah tersebut pada dasarnya adalah keturunan raja terdahulu, kecuali Badung yang karena tidak ada keturunan langsung raja yang wafat yang masih hidup, akibat Puputan Badung (1906) diangkat sebagai penggantinya I Gusti Alit Ngurah dari Puri Satrya, yang merupakan ahli waris raja yang terdekat. Selanjutnya sebutan raja diganti dengan **regent**, sedangkan bawahannya tetap menggunakan istilah yang lama seperti Punggawa, Perbekel dan Kelian.

2. Masa Zelfbestuurder[17]

Masa ini dimulai sejak tahun 1938 (21 Juni 1938). Pada masa ini Bali dibagi menjadi dua **afdeling** yakni Bali Utara dan Bali Selatan. Di bawah **afdeling** ada **onderafdeling** yang pada umumnya terdiri dari dua daerah bekas kerajaan kecuali Gianyar dan Karangasem yang berdiri sendiri. Jadi di luar daerah tersebut maka terdapat **onderafdeling** Bangli; Klungkung; Tabanan; Jembrana-Buleleng.

Sebagai struktur yang paling bawah dalam masa **zelfbestuurder** ini adalah **Landschap** yang wilayahnya adalah Kerajaan-kerajaan tersebut.

Baik pada masa **Stedehouder** maupun pada masa **Zelfbestuurder** sebagai penguasa tertinggi untuk Bali dan Lombok adalah **Resident** yang berkedudukan di Singaraja dan khusus untuk Bali di bawah **Resident** ada **Assistent Resident** yang berkedudukan di Denpasar.

3. Sistem Peradilan[18]

Peradilan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibagi menjadi dua jenis. Peradilan Negara yang disebut **Landraad** yang mengurus pertikaian antar **regent/Landschap** dan mengurus perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan bawahannya yang disebut **Raad van Kerta**. Jadi pada dasarnya **Landraad** menyelesaikan peradilan-peradilan apel/permohonan banding. Sedangkan **Raad van Kerta** adalah merupakan peradilan dalam tingkat Pertama yang tugasnya di samping mengadili perkara-perkara kecil juga mengatur tata tertib kerajaan. **Raad van Kerta** mempunyai personalia sebagai berikut : Ketuanya adalah raja/**Regent/ Landschap** sedangkan anggotanya yang juga merangkap sebagai Badan Penasehat terdiri dari para Pendeta Kerajaan yang umumnya disebut Bagawanta.

Selanjutnya pada **Landraad** bertindak sebagai Ketua adalah **Resident** yang apabila berhalangan diwakili oleh Assistennya. Se-

dangkan anggotanya terdiri dari **Controleur** dan para **regent**.

4. **Sistem Keamanan**[19]

Sistem keamanan untuk Bali diatur menjadi dua jenis yakni Keamanan dalam Daerah masing-masing dan Keamanan dalam arti menghadapi ancaman peperangan. Yang pertama meliputi pengadaan keamanan di masing-masing Daerah. Tugas ini dipikulkan kepada suatu kesatuan Keamanan yang disebut **Volkspolitie**. **Volkspolitie** ini terdiri dari satu orang Mantri polisi dan dua orang agen polisi untuk masing-masing regent. Sedangkan satu Kesatuan polisi khusus yang bersenjata api dipusatkan di Bangli oleh karena Bangli merupakan Daerah yang dicurigai oleh Belanda. Sedangkan jenis yang kedua disebut dengan Prayoda yang dalam masa Revolosi Fisik 1945 dikenal dengan K.N.I.L. Prayoda inilah yang bertanggung-jawab atas keselamatan Negara.

6.2. **Kaum Pergerakan Di Daerah.**

6.2.1. **Timbulnya**

Seperti telah kita ketahui bahwa Pergerakan Kebangsaan di Indonesia pada umumnya lahir pada tahun 1908 dengan ditandai oleh lahirnya Budi Utomo.[20] Pergerakan Kebangsaan ini pada dasarnya hanya berkembang di Jawa. Demikian juga Organisasi politik yang lahir setelah itu berkembang dengan pesat di Jawa seperti Serekat Islam; PKI; PNI; PARTINDO dan lain-lainnya.

Komunikasi antara Jawa dengan luar Jawa turut menentukan perkembangan Pergerakan Kebangsaan tersebut. Hal ini dapat kita rasakan ketika Pergerakan Kebangsaan di Jawa telah berkembang dengan subur di Bali boleh dikatakan belum terjadi apa-apa. Baru setelah Putera-putera Bali diberikan kesempatan untuk belajar pada sekolah-sekolah di Jawa seperti A.M.S. yang pada saat itu di Bali belum ada terutama yang terdapat di Blitar barulah Pergerakan Kebangsaan yang lahir di Jawa bisa menyebar di Bali.[21]

Tahun 1930 adalah merupakan permulaan masuknya pengaruh Pergerakan Kebangsaan ke Bali yang dibawa oleh Putra-putra Bali sendiri seperti I Gusti Putu Kaler dan I Bagus Santra. Keduanya ini adalah merupakan anggota Budi Utomo ketika mereka masih berada di Jawa.[22] Segera setelahitu Budi Utomo menyebar di Bali terutama dari golongan intelektualnya. Cita-cita Budi Utomo yang menuju perbaikan yang harmonis dari Bangsa Indonesia melalui Pendidikan dan Pengajaran,[23] dijalankan di Bali melalui usul kepada Pemerintah untuk pendirian sekolah-sekolah yang lebih banyak. Boleh dikatakan akibat dari usaha Pergerakan kaum di

Bali yang diperakarsai oleh Budi Utomo itu maka pada tahun itu juga berdiri **Ganesia Study Club** di Denpasar yang dipimpin oleh Purwadi, Nyoman Pegeg dan I Ketut Cetog. Ide dari **study club** ini disesuaikan dengan ide-ide yang diambil dari ajaran Bung Karno. Itulah juga yang menyebabkan **study club** ini mendapat pengawasan yang ketat sehingga ketika Bung Karno ditangkap **study club** ini tidak berani menampakkan diri dan akhirnya pada tahun 1933 terpaksa dibubarkan.

Selanjutnya pada tanggal 9 September 1933 didirikanlah Komite Taman Siswa di Denpasar atas prakarsa I Gusti Ngurah Pemecutan untuk melanjutkan usaha Kaum Pergerakan di Bali khususnya dalam lapangan Pendidikan. [24]

Suatu golongan yang menghendaki perbaikan nasib orang Bali sendiri mendirikan suatu organisasi Pendidikan yang bernama Bali Dharma Laksana yang didirikan di Singaraja. [25]

Berlainan dengan Komite Taman Siswa yang hanya berkembang di beberapa Daerah seperti Denpasar, Karangasem, Tabanan dan Jembrana maka Bali Dharma Laksana hampir berkembang di seluruh pelosok Bali serta diterima secara terbuka oleh masyarakat Bali. [26]

6.2.2 Sikap dan Gerakannya.

Kalau dibandingkan dengan di Jawa pergerakan Kebangsaan yang meluas di Bali boleh dikatakan tidak semaju di Jawa. Kemajuan Pendidikan dan Pengajaran juga merupakan faktor-faktor yang menentukan maju mundurnya suatu ideologi.

Di Jawa pendirian sekolah-sekolah dari tingkatan paling bawah seperti **Eerste Inlandsche School sampai dengan** Perguruan Tinggi seperti Stovia dan T.H.S. merupakan faktor yang penting dalam kemajuan suatu organisasi politik. Sedangkan di Bali Pemerintah Penjajah hanya mendirikan sekolah-sekolah yang terbatas seperti **Eerste Inlandsche School** dan **Tweede Inlandsch School**, H.I.S. dan OVO. Serta tempatnyapun terbatas pula. HIS, OVO hanya ada di Denpasar, Singaraja dan Klungkung. Selanjutnya sekolah-sekolah yang tingkatannya lebih atas terpaksa harus dicari di Jawa seperti di Blitar. [27]

Walaupun demikian Pergerakan Kebangsaan di Bali tetap bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di Bali. Pemerintah Jajahan yang pada prinsipnya menjalankan pemerintahannya di Jawa bersikap hati-hati serta mengadakan pengawasan yang ketat terhadap organisasi politik yang berkembang di Bali. [28]

Budi Utomo yang lebih mengutamakan pendidikan dan pe-

ngajaran boleh dikatakan mendapat kelonggaran oleh Pemerintah dengan lebih banyak didirikan sekolah-sekolah rakyat. Namun sesuai dengan sifat Penjajahan maka Pemerintah berusaha untuk mengadu domba arah pendidikan dengan mengarahkan suatu sistem pendidikan yang bersifat **Bali Centris** seperti yang diketengahkan oleh Belanda dalam Politik pendidikannya yang terkenal dengan sebutan **BALISERING**. [29] **Balisering** ini pada prinsipnya menginginkan suatu cara/sitem pendidikan yang terpisah dan merupakan pendidikan tersendiri untuk di Bali, artinya terpisah dari artian Indonesia dan tersendiri dalam artian memupuk rasa kedaerahan yang terlepas dari Indonesia secara kesatuan.[30]

Sedangkan Taman Siswa yang mengambil jalan **non cooperatie** disisihkan sama sekali oleh Pemerintah Belanda. [31] Sedangkan organisasi-organisasi yang lahir kemudian seperti PARINDRA (1938) yang merupakan organisasi yang termaju yang berkembang di Bali oleh karena jumlah anggotanya yang terbesar mengambil sikap yang sama seperti di Jawa yakni berasaskan **Cooperatie** insidental.[32]

6.3. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat

6.3.1 Pengaruh Kekuatan Eropa

Secara umum keruntuhan Bali ke tangan Belanda boleh dikatakan tidak mempunyai pengaruh. Pemerintah raja-raja di Bali sebelum kedatangan Bangsa Belanda boleh dikatakan tidak pernah melibatkan rakyat. Rakyat hanya merupakan sumber tenaga dan sumber pajak bagi para penguasa. Pemerintahan hanya dipegang oleh kaum aristokrat pribumi. Demikian juga bawahannya diangkat dan diberhentikan oleh raja dari keluarganya sendiri.

Setelah datang Bangsa Belanda hal ini tidak berubah. Raja beserta stafnya masih diangkat berdasarkan keturunan, sesuai dengan sifat penjajahan Belanda untuk menterapkan sistim feodal yang tradisional.[33]

Dalam bidang ekonomi Belanda hanya memperkenalkan sistem pembayaran dengan uang baik dalam perdagangan maupun dalam sitem perpajakan. Pembayaran in natura hampir dihapuskan.[34] Namun demikian istilah NGAYAH yang berarti penyerahan tenaga dari rakyat tanpa dibayar masih hidup dengan subur terutama di kalangan aristokrat.[35]

Sistem MEGURU dalam pengajaran pada masa Belanda mulai berubah dengan penterapan pendidikan yang klasikal. Sistem meguru atau Mesiwa khusus kepada Para Pendeta Kerajaan yang diwarisi dari sejak Zaman Dahulu[36] diganti dengan pendidikan se -

kolah-sekolah secara Barat. Demikian juga dalam berpakaian, pengaruh Barat dapat kita lihat dalam kehidupan sendiri. Istilah MEPANTALON lahir pada zaman Belanda yakni cara berpakaian dengan celana panjang. Jadi tidak lagi memakai lancingan atau berkain dalam hal-hal menghadap Pemerintah dan sebagainya.[37]

6.3.2. Pemenuhan Kebutuhan

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pengaruh Eropa hanya terbatas kepada golongan atas saja. Demikian juga dalam hal tatacara kehidupannya. Sedangkan rakyat tetap sebagai sediakala. Masyarakat yang agraris yang hidup dari hasil pertanian dan bercorak tertutup adalah merupakan ciri bagi kehidupan rakyat secara umum. Rakyat sudah terlalu biasa untuk mengolah tanahnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah maka berlakulah sistem Nandu, artinya Pengerjaan tanah dari Pemilik yang lebih kaya oleh Petani dengan pembagian hasil seperti 1 : 2 atau 2 : 3, di mana dalam hal ini Petani biasanya mendapatkan bagian yang lebih kecil di samping ia harus menanggung pajak (upeti) kepada Pemerintah, Subak, dan juga mengeluarkan bibit sendiri.[38]

Kebutuhan lainnya akan mereka dapatkan melalui pasar yang pada umumnya hanya menjual barang-barang keperluan sehari-hari. Dalam dunia perdagangan sampai akhir Pemerintahan Belanda di Bali tidak dijumpai aktivitas rakyat Bali dalam dunia usaha perniagaan. Bali Hotel adalah merupakan Hotel Pertama di Bali yang merupakan pusat pengembangan Pariwisata diusahakan dan didirikan oleh Belanda. Demikian juga di Kuta terdapat sebuah **Bungalow** yang didirikan dan diusahakan oleh Ni Ketut Tantri seorang Warga Negara Amerika yang hidup serta berjasa dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.[39]

6.3.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pergerakan Kebangsaan

Dalam uraian di atas dikatakan bahwa Pergerakan Kebangsaan di Bali tumbuh pada permulaan tahun 1930 an. Dapat dilihat betapa kemunduran rakyat Bali pada saat itu. Sekolah-sekolah yang didirikan khususnya tingkat menengah seperti H.I.S. dan O.V.O. hanya untuk kaum feodal dan golongan orang kaya saja.

Kemunduran Pendidikan ini menyebabkan pada tahun-tahun permulaan Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Bali tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya anggota dari masing-masing perkumpulan atau

organisasi politik hanya terdiri dari lapisan masyarakat atas seperti para intelektual yang umumnya terdiri dari kaum bangsawan karena merekalah yang pertama-tama mendapatkan kesempatan untuk sekolah di luar Bali. Anggota organisasi yang lainnya terdiri dari guru-guru Sekolah Rakyat seperti guru-guru **Eerste Inlandsche School** dan guru-guru **Tweede Inlandsche Scool** yang pada umumnya hanya ada di kota-kota saja.[40]

Perkembangan ini terjadi hampir selama tujuh tahun sejak adanya perkumpulan atau organisasi politik atau organisasi Pendidikan di Bali, yakni sejak tahun 1931.

Tetapi pada tahun 1938 di mana di Bali dikenal dengan masa **Malaisc**[41] yakni suatu masa peralihan dalam Zaman Penjajahan Belanda di mana berdasarkan **staatsblad** tahun 1938, Pemerintahan Belanda di Bali diganti dengan masa **Zelfbestuurder**, agaknya pertumbuhan organisasi politik mendapat sedikit kelonggaran, yang mana sebagai buktinya bahwa pada tahun itu di Bali berdirilah Partai Indonesia Raya yang disingkat PARINDRA. Organisasi ini adalah merupakan bagian dari PARINDRA yang lahir di Jawa. Hanya penyebarannya baru lancar di Bali pada tahun 1938.[42]

PARINDRA muncul dan berkembang di masyarakat dengan cepat. Keanggotaannya menyebar hampir ke seluruh Bali. Di tiap-tiap Daerah Kerajaan terdapat pengurus yang lengkap.[43]

6.3.4. Keadaan Masyarakat selama Periode 1900–1942

Pada umumnya masyarakat pada periode ini bersifat pasif. Rakyat hanya akan berpartisipasi dengan Pemerintah yang berkuasa apabila diperlukan tenaganya seperti ketika Belanda terlibat dalam Perang Dunia II baik di Eropa maupun di Daerah-Daerah Jajahannya dengan dibentuk Kesatuan-Kesatuan Keamanan yang terkenal dengan Prayoda. Kesatuan ini merupakan permulaan dari K.N.I.L. yakni Kesatuan Keamanan alat Pemerintah Penjajahan untuk mengintensifkan jajahannya khususnya di Bali dan Indonesia pada umumnya. Kesatuan ini dibentuk pada tahun 1938.

Sebelum dibentuk Kesatuan tersebut rakyat Bali tenggelam pada situasi yang pasif dan apatis. Mungkin hal ini disebabkan oleh sebagian terbesar dari rakyat Bali yang buta huruf, sehingga sangat sukar menerima pengaruh dari luar.

Memang keadaan ini sudah ada sejak Bali belum dijajah oleh Belanda. Tetapi kekuasaan dari tangan Pribumi sedikitnya memberikan kebanggaan bagi rakyat pada umumnya. Sehingga tenaga rakyat sangat mudah digerakkan ataupun didaya gunakan untuk kepentingan Kerajaan.

Rasa tidak senang kepada Penjajah telah ditunjukkan oleh rakyat Bali dengan terbukti adanya Puputan atau perang habis-habisan seperti Puputan Badung (1906) dan Puputan Klungkung (1908).

Memang selama periode 1900–1942 di Bali terdapat suatu Perubahan sosial terutama di Bali Utara. Oleh karena Bali Utara adalah merupakan Daerah yang pertama kali di Bali yang mengenal pengaruh Barat. Bali Utara yang sebelumnya terkenal dengan Kerajaan Buleleng sejak tahun 1849 telah berkenalan dengan pengaruh Barat. Secara umum untuk Bali Buleleng merupakan Daerah yang paling maju khususnya dalam bidang pendidikan.[44] Itulah sebabnya Bali Utara merupakan satu-satunya Daerah yang paling dulu mengalami suatu problema sosial berupa Pertentangan masyarakat antara kaum Triwangsa dengan Kaum Jaba. Hal ini akan kita dapatkan pada tahun-tahun 1924–1928. Pertentangan ini berkisar pada pengakuan hak-hak yang sama dari Kaum Triwangsa atas Kaum Jaba terutama dalam pergaulan hidup.[45]

Pertentangan ini kemudian mereda pada tahun 1928, tanpa ada suatu keputusan. Hal ini dapat kita buktikan bahwa sampai dengan saat ini ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kaum Triwangsa masih tetap berlaku sebagaimana mestinya. Hal ini mungkin karena Pemerintah Belanda masih mengharapkan bantuan kaum Triwangsa dalam melakukan dan melancarkan pemerintahannya di Bali.[45]

6.4. Kehidupan Seni Budaya

6.4.1. Pengaruh Kebudayaan Asing

Sejak Belanda berkuasa di Bali secara menyeluruh, pengaruh kebudayaan Barat boleh dikatakan sangat sedikit, dan kalaupun ada maka pengaruh ini hanya terjadi di kota-kota seperti di Denpasar, Klungkung, Singaraja. Sedangkan rakyat di pedesaan masih tenggelam dengan tradisinya yang lama.

Kebudayaan Barat pada dasarnya lebih mengarah kepada sifat yang material. Hal ini bertentangan dengan kebudayaan Bali sendiri yang lebih condong kepada hal-hal yang spiritual. Sebagai contoh kepercayaan rakyat kepada hari-hari baik. Bagi rakyat Bali hari baik yang disebut **Dewasa** sangat menentukan kehidupannya. Segala pekerjaan yang akan diambil dihubungkan dengan hari-hari tersebut. Hal ini sama sekali tidak berlaku dalam kebudayaan Barat. Inilah yang menyebabkan rakyat apatis terhadap kebudayaan Barat.[46]

Hanya sebagian kecil kebudayaan Barat berpengaruh atas

masyarakat Bali. Dan hal ini pun disebabkan oleh segi praktisnya saja tanpa adanya pengaruh sampingan dalam jiwa dan karakter rakyat Bali yang pada umumnya berakar pada adat dan agama Hindu.[47]

Pengaruh tersebut misalnya pengenalan uang sebagai alat pembayaran yang resmi dalam segala transaksi perdagangan maupun sebagai pembayaran upeti. Walaupun uang telah dikenal oleh masyarakat Bali jauh sebelum kedatangan Belanda di Bali seperti uang kepeng perunggu dan uang kepeng mas tetapi uang tersebut pada umumnya hanya dipergunakan dalam upacara-upacara adat dan agama. Jadi sangat sedikit dipergunakan dalam transaksi perdagangan.[48]

Jadi secara umum pengaruh kebudayaan Barat dapat juga disebutkan membuka rumah tangga dusun di mana masyarakat hidup secara tertutup dengan sifatnya yang khas tukar menukar barang-barang in natura dengan Rumah tangga Internasional yang semata-mata berdasar uang, walaupun perubahan ini dilakukan dengan sangat perlahan-lahan.

Tetapi walaupun demikian fungsi bahan-bahan in natura ternyata masih ada seperti misalnya pengenaan dari apa yang disebut sawinih yakni pajak yang dipungut oleh subak sawah-sawah dalam lingkungannya atau daerah-daerah yang mendapatkan air dari subak tersebut.[49]

Di samping itu yang juga merupakan pengaruh kebudayaan Barat adalah cara berpakaian. Orang Bali yang pada umumnya memakai kain kalau ingin menghadap raja atau pemerintah tetapi dengan masuknya pengaruh Barat tidak lagi menggunakan kain tetapi telah diganti dengan celana panjang.[50]

6.4.2. Pendidikan

Telah disebutkan di atas bahwa pendidikan dan pengajaran di Bali sangat terbatas. Dan sebagaimana di daerah lainnya di Indonesia Belanda mendirikan sekolah tidak bertujuan untuk memajukan Indonesia tetapi untuk mencari tenaga pembantu dalam melancarkan penjajahannya di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya.

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda pada masa pemerintahannya di Bali antara lain Sekolah Klas I yakni sekolah rakyat dari Klas I sampai dengan Klas III. Sekolah Klas II yakni sekolah rakyat dari Klas IV sampai dengan Klas V yang kemudian setelah tahun 1931 baru ditambah dengan Klas VI. Sekolah Klas I yang terkenal dengan EERSTE INLANDSCHE SCHOOL

di seluruh Bali didirikan 94 buah yang tersebar di Buleleng 15 buah, Jembrana 3 buah; Badung 20 buah; Tabanan 20 buah; Gianyar 20 buah; Klungkung 6 buah dan Karangasem 10 buah. Sekolah Klas II atau **Tweede Inlandsche School** terdapat di Buleleng 8 buah; Jembrana 2 buah; Badung 3 buah; Tabanan 5 buah; Klungkung 3 buah; Gianyar 2 buah dan Karangasem 2 buah. Selanjutnya HIS hanya ada di Badung 2 buah; Singaraja 2 buah dan Klungkung 1 buah. Kemudian OVO atau sekolah Guru hanya ada di Klungkung 1 buah dan Singaraja 1 buah.[51]

Di samping sekolah yang didirikan oleh Belanda maka akibat dari perkembangan pergerakan kebangsaan di Bali oleh putra-putra Bali sendiri didirikanlah Sekolah Taman Siswa.[52] Sekolah ini didirikan oleh sebuah Badan yang disebut Komite Taman Siswa yang didirikan di Denpasar pada tahun 1933 atas prakarsa I Gusti Ngurah Pemecutan, I Nyoman Pegeg dan I Ketut Ceteg.

Taman Siswa berkembang sebagai saingan dari sekolah-sekolah Belanda di Denpasar (1 buah); di Tabanan (1 buah); Jembrana (1 buah) dan Singaraja 1 buah. Tujuannya adalah mengembangkan pendidikan yang menuju cita-cita kemerdekaan dan kesadaran Bangsa Indonesia.

Tetapi ketika benih-benih pergerakan kebangsaan Indonesia mulai tumbuh, Belanda berusaha untuk memencilkan pandangan Nasionalisme bagi rakyat Bali dengan mengajukan program pendidikan yang pada dasarnya membangunkan sikap separatisme dan sukuisme bagi rakyat Bali yang dikenal dengan istilah **BALISERING**.[53] Memang secara sempit **Balisering** menguntungkan Bali sendiri karena dalam program **Balisering** kebudayaan Bali dapat dikembangkan. Tetapi apabila dipandang lebih jauh **Balisering** merupakan alat Belanda untuk memecah belah Bali dari Indonesia.[54]

6.4.3. Kesenian

Seni Bali boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan bahkan hampir dilupakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena Penjajah tidak pernah membina Kesenian Bali. Penjajah hanya sibuk dalam politik. Dan inipun terbatas pada kelas atas yakni dalam hubungannya dengan tugas yang diberikannya kepada kaum aristokrat pribumi.

Sebelum kedatangan Belanda Seni Bali adalah seni rakyat, di mana pembinaannya terletak di lingkungan istana, sehingga boleh juga dikatakan seni Istana. Tetapi setelah Bali jatuh ke tangan Penjajah Seni Bali boleh dikatakan mengalami proses disintegrasi.

Seperti telah disebutkan di atas, Balisering boleh juga diarti-

kan sebagai faktor yang menguntungkan seni Bali sendiri karena sejak saat itu Seni Bali mulai dihidupkan kembali, dengan bentuk pelajaran senam irama di sekolah-sekolah dengan mengambil tari-tari baris, gambuh dan lain-lainnya.

Seni suara hanya terbatas di lapangan atau pada golongan brahmana karena sangat erat kaitannya dengan upacara keagamaan.[55]

6.5. Alam Fikiran dan Kepercayaan

6.5.1. Perkembangan Agama

Agama Hindu adalah merupakan agama sebagian terbesar rakyat Bali. Rakyat Bali sudah terlalu biasa melaksanakan adat dan agamanya, walaupun mungkin sebagian terbesar dari rakyat Bali tidak mengerti kepada makna dan arti dari ajaran agama Hindu.[56]

Semua ajaran dalam agama dan yang menyangkut tentang agama hanya boleh diketahui oleh Kaum Brahmana,[57] yang merupakan golongan tertinggi dalam kelas masyarakat dalam agama Hindu. Tetapi walaupun demikian sangat sedikit dari golongan ini yang mengerti makna agama Hindu itu sendiri, karena yang disebut golongan Brahmana di Bali bukanlah karena fungsinya tetapi semata-mata karena keturunan Pendeta.[58]

Itulah sebabnya kebutaan dari rakyat banyak terhadap agamanya bisa terjadi, dan pada umumnya rakyat Bali percaya kepada agama Hindu adalah secara tradisional dan berdasarkan keturunan semata-mata. Karena nenek moyangnya beragama Hindu maka mereka pun memeluk agama tersebut.[59]

Di samping hal sebagai tersebut di atas, maka sikap AYUA–WERE yang berarti tidak membenarkan orang banyak tahu tentang arti dan makna ajaran agama, sebenarnya menempatkan agama Hindu dalam tempat yang kritis artinya sewaktu-waktu dapat menciutkan pemeluk-pemeluknya.[60]

Sangat beruntung bagi agama Hindu di Bali bahwa Belanda menginginkan Bali sebagai musium hidup artinya rakyat dibiarkan hidup dalam kondisi dan situasi semula dan bahkan beberapa daerah dilarang para misi menyebarkan agama Kristen di daerah tersebut seperti di Klungkung.[61]

Di daerah lain seperti di Singaraja misi-misi agama Kristen berhasil menyebarkan agama Kristen. Demikian juga di Denpasar dan Jembrana. Tetapi perlu diingat bahwa agama Kristen dapat berkembang di Bali karena rakyat Bali tidak mengerti dengan agamanya sendiri, jadi bukanlah karena faktor ekonomis.[62]

6.5.2. Perjuangan Pergerakan Nasional dan Motivasi Agama

Pada masa ini boleh dikatakan bahwa motivasi agama tidak pernah ada dalam tubuh kaum Nasionalis. Hal ini dapat dimengerti karena sangat sedikit orang yang tahu dan mengerti agama Hindu. Agama Hindu bukanlah agama yang militan dalam masa-masa ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun yang mengerti agama dengan baik, sampai kepada para pendeta sendiri. Dengan demikian pada masa-masa ini hampir tidak ada kerjasama golongan agama dengan kaum nasionalis untuk berjuang demi kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Lebih-lebih lagi pendukung Pergerakan Kebangsaan di Bali lebih banyak terdiri dari orang-orang yang telah mendapat pengaruh Barat. Hal ini terbukti dari mereka yang mendirikan organisasi politik di Bali terdiri dari kaum intelektualisme yang lebih dikenal dengan istilah PRIYAYI, yang pada umumnya tidak terpengaruh oleh suatu ajaran agama.

Itulah sebabnya Pergerakan Kebangsaan di Bali boleh dikatakan tidak ada hubungan sama sekali dengan motivasi agama.[63]

6.5.3. Kehidupan Intelektual.

Sistem Pengajaran di Bali sebagaimana diketahui dari Zaman Dahulu adalah memakai sistem MEGURU atau MESIWA artinya seseorang belajar yang terbatas kepada segi-segi agama pada seorang Pendeta. Arti **Mesiwa** boleh dikatakan sama dengan **Meguru** tetapi sifatnya lebih luas misalnya bukan saja sebagai tempat belajar tetapi juga sebagai tempat minta air suci (Thirta).[64]

Dalam Zaman Penjajahan Belanda sitem Meguru boleh dikatakan telah hilang. Tetapi sistem **Mesiwa** masih dapat kita jumpai, bahkan juga sampai saat ini sistem ini masih ada. Seorang Siwa yang pada umumnya seorang Pendeta menganggap muridnya sebagai **sisia** atau siswa.

Sistem Meguru hanya ada pada saat seorang Brahmana Ulaka (Muda) akan dibaptiskan menjadi pendeta. Pada saat ini Pendeta yang membaptis disebut **Nabe** sedangkan yang akan dibaptis disebut **nanak** (siswa). Putra-Putri dari Nabe kemudian disebut dengan istilah Guru Putra dan Guru Putri. Selanjutnya Keturunan Nanak tidak dibenarkan untuk kawin dengan keturunan gurunya (nabenya).[65]

Selanjutnya dengan masuknya pengaruh Barat sistim pendidikan ini kemudian sedikit demi sedikit diubah kepada sistem klasikal, dan disesuaikan dengan sistem pendidikan Barat.

Dalam kepegawaian Belanda sesungguhnya ingin untuk menetapkan apa yang telah ada. Pengangkatan Raja-raja, Punggawa, Perbekel adalah sesuai dengan yang telah terdahulu yakni berdasarkan keturunan. Tetapi dalam hal ini Belanda memasukkan sistem gajinya dengan menggunakan uang. Raja, Punggawa, Perbekel dan stafnya adalah Pegawai Pemerintah yang diawasi oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah Jajahan sendiri.

CATATAN

1. Babad Dalem (manuskrip) koleksi Gedong Kirtya Singaraja.
2. Utrecht; Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok (Penerbitan Sumur) Bandung 1962 pp.144–150.
3. V.E. Korn: Balische Overeenkomsten (Gravenhage'S Nijhoff) 1942 pp.100–102.
4. Kt. Ginarsa: Expedisi Gajah Mada ke Bali (Pt. Penerbit Walmiki) Denpasar, 1968 pp.1–10.
5. Babad Dalem (manuskrip), koleksi Gedong Kirtya Singaraja.
6. **Ibid.**
7. Babad Buleleng (manuskrip), koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
8. Babad Dalem, cf. Babad Buleleng, Babad Mengwi, Babad Badung (manuskrip), koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
9. **Ibid.**
10. Utrecht, **loc.cit.**
11. **Ibid.**
12. **Ibid.** p.137.
13. **Ibid.** pp.140–150.
14. Korn, **loc.cit.**
15. Babad Dalem (manuskrip) **loc.cit.**
16. Staatsblad van Bali 1881.
17. Staatsblad van Bali 1938.
18. Informan : Ida Pedande Gde Sidawa (72 tahun) Gianyar.
19. Informan : A.A. Gd. Putra (Pens. Pegawai Negeri, 56 tahun) Bangli.
20. A.K. Pringgodigdo: Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Pustaka Rakyat) Jakarta 1949. p.11.
21. Informan. I G.P. Merta (Suasta 60 tahun) Denpasar.

22. Informan. I Nym. Pegeg (Suasta 55 tahun) Denpasar.
23. Informan. I GA. Repeg (Suasta 59 tahun) Denpasar.
24. Informan. Cokorda Bagus Sayoga (Suasta 50 tahun) Denpasar.
25. Informan. I. Nym. Pegeg (Suasta 55 tahun) Denpasar.
26. **Ibid.**
27. Informan, I G.P. Merta (Suasta 60 tahun) Denpasar.
28. **Ibid.**
29. H. Ter Flierhaar, De Aanpassing van het Inlandsch onderwijs op Bali aan de eigen sfeer (tanpa penerbit) Batavia, 1931, p.1.
30. **Ibid.** pp.3–13.
31. Informan, I Gst. Ngurah Pemecutan (Suasta 72 tahun) Denpasar.
32. Informan, I G.P. Merta (Suasta 60 tahun) Denpasar.
33. V.E. Korn. Adatrecht van Bali (Gravenhage'S Neeff) 1932. p.239.
34. G.M.T. Kahin. Nationalism and Revolution in Indonesia (Cornell University Press 1949) Itaca New York. pp.6–7.
35. V.E. Korn, Adatrecht van Bali (Gravenhage'S Neeff) 1932, p.239.
36. Babad Dalem (manuskrip) koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
37. H.T. Flierhaar, **op.cit**, pp.14–24.
38. V.E. Korn, **loc.cit.**
39. Kt. Tantri, Revolusi di Nusa Damai (Alih Bahasa oleh Bar Salim) Penerbit Gunung Agung Jakarta 1965, pp.95–130.
40. Informan, Cok. Bagus Sayoga (suasta 50 tahun) Denpasar.
41. Informan, I G.A. Repeg (suasta 59 tahun) Denpasar.
42. Informan, I G.P. Merta (suasta 60 tahun) Denpasar.
43. Informan. I. B.M. Kaler (suasta 63 tahun) Bangli.
44. Untuk melihat perkembangan pertentangan kasta ini lihat majalah Suryakanta dan Bawanegara dari tahun 1924–1928, yang diterbitkan di Singaraja.
45. Informan, Ida Pedande Gde Sidhawa (72 tahun) Gianyar.
46. **Ibid.**
47. Informan, I Gst. Ngr. Pemecutan (suasta 72 tahun) Denpasar.
48. Ibid.
49. V.E. Korn, **op.cit**, p.239.
50. Informan, I. B.M. Kaler (suasta 63 tahun) Bangli.
51. C.J.J. Memorie van Overgave van Resident van Bali en Lombok (agustus, 1929) pp.94–97.
52. Inf. Nym. Pegeg (swasta 55 tahun) Denpasar.

53. H. Ter Flierhaar, **op.cit, pp.**1–5.
54. Inf. I.G.P. Merta (suasta 60 tahun) Denpasar.
55. Inf. Ida Pedande Gde Putra Manuaba (68 tahun) Bangli.
56. Inf. Ida Pedande Gde Sidawa (72 tahun) Gianyar.
57. Inf. **Ibid.**
58. Babad Danghyang Nirarta (manuskrip), koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
59. Inf. Ida Pedande Gde Putra Manuaba (68 tahun) Bangli.
60. **Ibid.**
61. Inf. Ida Pedande Gde Sidawa (72 tahun) Gianyar.
62. **Ibid.**
63. Inf. I.B.M. Kaler (63 tahun) Bangli.
64. Inf. Ida Pedande Gde Manuaba 70 th. Bangli.
65. **Ibid.**

DAFTAR INFORMAN.

No.	N a m a	Umur	Pekerjaan	Alamat.
1.	Ida Pedande Gde Sidawa.	72 th.	Pens. Kepala Kantor Agama Kab. Gianyar. Ketua P. H.D. Kab. Gianyar.	Geria Sidawa Gianyar.
2.	Ida Pedande Gde Manuaba.	70 th.	------	Geria Bukit Bangli.
3.	Ida Pedande Gde Putra Manuaba	68 th.	Pens. Kepala Kantor Agama Kab. Bangli.	Geria Bukit Bangli.
4.	Anak Agung Gde Putra.	56 th.	Pens. Peg. Negeri	Bangli.
5.	Ida Bgs. Md. Kaler	63 th.	Angg. DPRD. Kab. Bangli.	Geria Bukit Bangli.
6.	I. Gst. P. Merta	60 th.	Pens. Gubernur Bali.	Denpasar.
7.	I Gst. Ay. Repeg.	59 th.	Pens. Pegawai Negeri.	Denpasar.
8.	Cokorde Bagus Sayoga.	50 th.	------	Denpasar.
9.	I Gst. Ngr. Pemecutan.	72 th.	------	Denpasar.
10.	I Nyoman Pegeg.	55 th.	------	Denpasar.

7. ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG (1942–1945).

7.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan.

Seperti diketahui, Jepang tidak lama bisa menduduki kepulauan Indonesia. Pemerintah balatentara Jepang dengan segala kekuatannya hanya berhasil menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun (1942–1945). Khusus untuk pulau Bali, tentara pendudukan Jepang sudah mendarat di pantai Sanur pada 19 Februari 1942.[1] Sedang sumber lain ada mengatakan : "Tanggal 18 Februari 1942, pulau Bali jatuh di tangan Jepang,"[2] dan yang lain mengatakan pula bahwa : tentara Jepang sudah mendarat di pantai Padanggalak–Sanur pada tanggal 17 Februari 1942, dan pada 18 Februari 1942 lk.jam 06.00 sudah masuk kota Denpasar.[3] Ditu - turkan bahwa beberapa hari sebelum pendaratan ini telah terjadi pertempuran laut antara pasukan militer Jepang melawan tentara Sekutu di daerah perairan Gilimanuk (Selat Bali) dan sehari sebelum pendaratan atau pada 16 Februari 1942 lk. jam 21.00 pertempuran laut di daerah selatan Badung, hal mana terang kelihatan dari pantai selatan Gianyar.[4] Melihat gejala ini, barisan Prayoda (tentara Hindia Belanda) diinstruksikan oleh pemerintah Belanda untuk merusak alat-alat perlengkapan yang vital seperti : pusat listrik, telepon, minyak tanah, agar tidak dapat dikuasai oleh Jepang.[5] Nyoman S. Pendit mengatakan, "Setelah pembongkaran gudang-gudang BPM, dan DPM. tersebut maka pada keesokan harinya lagi, yaitu pada tanggal 19 Februari 1942 yang didahului oleh pertempuran dan pertempuran udara ..... maka balatentara Dai Nippon (Jepang Raya) melakukan pendaratan di pantai Sanur ...."[6] Belanda melakukan siasat bumi hangus, dengan melakukan pembakaran terhadap gudang/pompa bensin di Suci (Denpasar), Benoa dan Tuban.[7] Kemudian ketika pagi-pagi lk.jam 06.00 tentara Jepang datang dari pantai Sanur dan masuk kota Denpasar, praktis dari pihak Belanda tidak ada perlawanan dan pasukan Prayoda lari tunggang-langgang menuju ke bahagian barat (daerah Tabanan), di mana mereka mendapat perintah bubar, buka pakaian seragam, dan pulang ke kampung masing-masing.[8] Hal ini juga terjadi karena Belanda dengan pasukannya sudah schok, akibat sebelum

Jepang mendarat tembakan-tembakan sudah berhamburan di atas kota Denpasar dan sebelumnya pula alat-alat propaganda Jepang telah mengumandangkan suaranya bahwa pihak Sekutu telah hancur.[9] Seketika tentara Jepang dapat menduduki kota Denpasar dan dari sini bergerak menguasai seluruh Bali. Pada pertama kali keadaan menjadi kacau, toko-toko isinya dirampas, penangkapan orang-orang Belanda, penduduk ada yang lari ke pegunungan, banyak rakyat menjadi bingung.[10] Di samping itu pemuda-pemuda yang lebih mengerti seperti pemuda di Denpasar yang tergabung di dalam "Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia Mulia" atau disingkat PPRIM yang didirikan pada akhir tahun 1940, menyambut dengan meriah kedatangan Jepang, antara lain dengan : menyanyikan lagu-lagu Jepang, dan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya diajarkan oleh seorang guru Taman Siswa dari Yogyakarta bernama Kotot Sukardi.[11]

7.1.1. Kerajaan-kerajaan.

Setelah kl. 3 (tiga) bulan keadaan kacau itu berlangsung, saat mana sebenarnya masyarakat pada umumnya tidak mengerti apa yang terjadi, mulailah Jepang berusaha memperbaiki keadaan dengan melakukan propaganda-propaganda bahwa kedatangannya bukanlah untuk menjajah bangsa Indonesia, melainkan untuk mengusir Belanda (orang kulit putih) dari Indonesia (Bali). Orang-orang yang lari dipanggil diminta agar bekerja kembali sebagai biasa dan para bekas pegawai Belanda juga diminta bekerja untuk membantu pemerintahan Jepang yang akan disusun.[12] Kerajaan-kerajaan dengan rajanya masing-masing yang di Bali terdapat delapan buah, dimanfaatkan kewibawaannya dengan tetap menggunakannya sebagai penguasa di daerah-daerah. Juga para punggawa dan perbekel tetap dipakai seperti dalam struktur pemerintah masa Belanda.[13] Delapan kerajaan yang dipakai dengan rajanya masing-masing ialah: Kerajaan Buleleng dengan raja A.A. Putu Jelantik, kerajaan Jembrana dengan raja A.A. Bagus Negara, kerajaan Tabanan dengan raja Cokorda Ngurah Gede, kerajaan Badung dengan raja Cokorda Ngurah Ketut, kerajaan Gianyar dengan raja A.A. Ngurah Agung, kerajaan Klungkung dengan raja I Dewa Agung Geg, kerajaan Karangasem dengan raja Anak Agung Anglurah Karangasem dan kerajaan Bangli dengan raja A.A. Ketut Ngurah.[14] Daerah wilayah kerajaan ini pada masa pendudukan Jepang disebut Syu dan rajanya disebut Syu Cho.[15]

7.1.2. Pemerintahan Jepang.

Apabila pada permulaannya yang datang di Bali adalah ten-

tara dari kesatuan Angkatan Darat Jepang (**Rikugun**) yang tampaknya lebih kejam, bengis sikap galak dengan pedang selalu di tangan, maka kemudian ketika pemerintahan sipil mulai disusun, yang mengambil peranan adalah tentara Angkatan Laut yang disebut **Kaigun**.[16] Pemerintahan sipil ini disebut: **Minseibu** dengan kepalanya **Minseibu Chookan** berpusat di Singaraja.[17] Sistem militer yang diterapkan di sini menyebabkan pemerintahan bersifat **militer fascis**.[18]

Pusat kekuatan militer untuk seluruh Sunda Kecil berada di kota Denpasar dengan kepala militer tertinggi disebut **Sirei**.[19] Dalam hal ini walaupun bentuknya adalah pemerintahan sipil, namun semua itu selalu berada di bawah pengawasan militer.[20]

Dengan merangkul kekuasaan raja-raja terjadilah bentuk pemerintahan seperti halnya pada masa Belanda dahulu yakni: pertama, adanya penguasa raja pribumi yang mengatur pemerintahan dekat kepada rakyat dan kedua, adanya penguasa dari pemerintah sipil/militer Jepang kepada siapa raja-raja dan rakyat harus menghormat dan tunduk.[21] Mengenai pemerintahan daerah pada masa Jepang ini susunannya diatur sebagai berikut:

1. **Syo Sunda Minseibu** dengan pusat di Singaraja, kepalanya disebut, **Minseibu Chookan**.
2. **Nambu Baliken** dengan pusat di Denpasar, kepalanya disebut **Ken Kanrinkan**.
3. **Syu** (kerajaan) dengan pusat masing-masing di pusat kabupaten sekarang, dengan kepala disebut **Syu Cho** (raja pribumi) dan didampingi seorang pejabat Jepang (sejenis **Controleur** masa Belanda) disebut, **Bunken Kanrinkan**.
4. **Gun**, setingkat kecamatan sekarang dengan kepala disebut **Gun Cho** (punggawa orang pribumi).
5. **Son**, setingkat perbekelan sekarang dengan kepala disebut **Son Cho** (perbekel orang pribumi).[22] Susunan ini ada sedikit berbeda dengan keadaan di Jawa, sebab di sana disebutkan bahwa wilayah setingkat Residentie masa Belanda, pada masa Jepang disebut **Syu** dengan kepala **Syu Tyookan**, sedang setingkat **Regentschap** disebut **Ken** dengan kepala **Ken Tyoo**.[23] Di dalam pelaksanaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sifat militer selalu diterapkan dan sebagai pengaman bertindaklah suatu kesatuan polisi militer yang disebut **Tokkei Tai** yang di Jawa disebut **Kempei Tai**.[24] Di mana-mana anggota dari **Tokkei Tai** ini bertindak sangat kejam baik kepada sesama bangsanya, maupun bangsa Indonesia dan di Bali terkenal seorang **Tokkei Tai** karena kekejamannya bernama **Kawashima**.[25]

7.1.3. **Sikap terhadap pemerintahan Jepang.**

Setelah pemerintahan sipil dapat diwujudkan, aksi-aksi propaganda oleh pemerintah Jepang semakin giat, yang dalam hal ini dilakukan oleh semacam barisan propaganda disebut : **Sendenbu – Sendenka.**[26] Dalam hubungan ini di Bali banyak berperan seorang Jepang yang sebelumnya (pada masa pemerintahan Belanda) sudah lama tinggal di Bali, bekerja sebagai tukang sepeda dan dikenal dengan nama : Tuan Miora.[27] Karena propaganda-propaganda itu di samping kenyataan bahwa raja-raja tetap dipakai kekuasaannya dan para bekas pegawai Belanda dapat dikerjakan kembali, maka bukan saja rakyat yang terpancing, tetapi pula para pemimpin serta orang-orang terpelajar banyak yang percaya.[28] Segala perkumpulan/organisasi-organisasi yang ada dilarang/dibubarkan dan sekolah-sekolah model Belanda diganti dengan pendidikan sistem Jepang.[29] Dikeluarkan undang-undang yang melarang adanya partai-partai politik dan perkumpulan-perkumpulan sosial.[30] Keinginan bersidang dan berkumpul disalurkan ke dalam satu gerakan yang disebut : A. Tiga,[31] yang kemudian diganti dengan nama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) untuk membantu peperangan Asia Timur Raya.[32] Penduduk digerakkan pula ke dalam kewajiban-kewajiban seperti : bergotong royong **(kinrohosi)** membuat lubang-lubang perlindungan, parit-parit pertahanan di tempat-tempat yang strategis, menanam kapas, pohon jarak, bekerja menenun, memintal, mengumpulkan padi, usaha pengalengan daging.[33] dan kepada mereka yang berbuat jahat (mencuri) dilakukan tindakan-tindakan siksa yang keras, sehingga keadaan menjadi aman, rakyat sangat takut kepada pemerintah Jepang.[34] Dikatakan pada tahun 1943 pembangunan masyarakat berjalan dengan pesatnya.[35] Pada permulaannya keadaan seakan-akan berjalan dengan aman, tertib, surat kabar harian **Bali Shinbun** mulai terbit menyampaikan berita-berita kepada masyarakat.[36] Di sini pandainya Jepang adalah menanamkan harapan yang meyakinkan rakyat, bahwa diri mereka akan dibebaskan dari penjajahan.[37] Kemudian apabila untuk seluruh Indonesia dibentuk semacam Dewan Perwakilan Rakyat **(Chuoo Sangi In)** pada 15 Agustus 1943,[38] maka di Bali diben - tuk pula badan sejenis khusus untuk daerah yang disebut **Syu Kaigi** dengan para anggota disebut **Syu Kaigi In** dan berkantor pusat di Singaraja.[39] Suatu pasukan sukarela yang bernama **Peta** (Pembela Tanah Air) dibentuk pada 3 Oktober 1943 oleh **Saikoo Sikikan**, sedang untuk Bali para anggota Peta mulai dipungut pada permulaan Februari 1944.[40] Setelah mendapat pendidikan selama 3 (tiga) bulan di Tangsi Banyumala (Singaraja) anggota Peta ini disebar ke dalam 3 (tiga) buah **Daidan** yang masing-masing berada di Nega-

ra, Kediri(Tabanan) dan Gunaksa (Klungkung).[41] Selain itu pemuda-pemuda juga dikerahkan untuk dididik menjadi tentara laut (Kaigun Heiho), polisi (Jumpo), barisan pemuda (Seinendan), Hansip (Keibodan) dan yang belum mendapat tugas, didaftar untuk dikirim ke luar Bali tergabung dalam Barisan Pekerja Sukarela Bali (BPSB) yang di Jawa disebut Romusha.[42] Rakyat juga dikerahkan untuk membuat tempat-tempat pertahanan di daerah pegunungan Candi Kuning, pantai Buleleng, pantai Kusamba, Kuta, Soka dan lain-lain.[43] Untuk memenuhi kebutuhan pangan pemerintah Jepang mewajibkan para petani menyerahkan sebagian padinya kepada pemerintah dan rakyat diharuskan memakan nasi campur.[44] Kaum wanita dikoordinasi dalam suatu badan yang disebut : Fujinkai, suatu alat kampanye untuk menggerakkan tenaga wanita.[45] Sedang di Jawa Fujinkai dapat berupa sandiwara gerakan wanita.[46] Tipuan-tipuan kepada rakyat dilakukan dalam bentuk latihan bahaya udara (alarm), saat mana kendaraan-kendaraan Jepang sempat mengambil/mengangkut kekayaan rakyat yang sudah terkumpul.[47] Selanjutnya tindakan-tindakan keras dan kejam tanpa prikemanusiaan dilakukan terhadap rakyat yang tidak mau tunduk kepada peraturan-peraturan Jepang itu. Di sini ternyata bahwa, Jepang adalah penjajah, walaupun penuh dengan slogan-slogan dan janji-janji kemerdekaan.[48] Sikap rakyat terhadap pemerintah Jepang mulai berubah. Sejak pertengahan tahun 1943, sudah mulai terasa betapa berat tekanan dari tindakan-tindakan tentara Jepang sehingga rakyat menjadi miskin dan melarat.[49] Perasaan-perasaan goncang, tidak puas, tertekan, ketakutan, kurang makan selalu meliputi pikiran rakyat, hal mana mengundang sikap antipati terhadap Jepang. Sikap dan perasaan memberontak ini kadang-kadang meledak seperti; terjadinya pengurungan oleh Chudan Cho Sugianyar terhadap pos polisi di Gianyar,[50] terjadinya perlawanan/perampokan oleh penduduk di desa Pesaban (Karangasem) dan ketika yang melawan berhasil ditangkap, ia dipenggal oleh polisi militer Jepang.[51] Rakyat kecil umumnya dengan segala ketaatannya karena takut, hanya mendambakan kapan derita ini hilang.[52]

7.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

Soal penyelenggaraan hidup sangat tergantung pada situasi sosial masyarakat saat itu. Kehidupan di sini ada dalam suasana perang. Semua bekerja giat untuk mencapai kemenangan dalam perang.[53]

7.2.1. Keadaan Sosial.

Keadaan kehidupan sosial pada zaman Jepang ini tidak ba-

nyak berubah dari sebelumnya. Apabila pada zaman Belanda, orang-orang Belanda menduduki tempat tertinggi dalam kehidupan, sedang rakyat pribumi terpecah ke dalam kelompok-kelompok di bawahnya, maka pada zaman Jepang ini, keadaan hampir sama sebab kedudukan orang Belanda diganti oleh orang Jepang.[54] Dibawahnya ditaruh kekuasaan golongan feodal pribumi, hanya Jepang tidak menggunakan peranan orang-orang Timur Asing.[55] Dari segala beban/kewajiban yang dikenakan pada masyarakat, maka dari padanya tampak kelompok-kelompok sosial seperti : Penguasa orang Jepang, raja/pejabat pribumi, karyawan perusahaan/pedagang menengah dan rakyat kecil yang terdiri dari (pedagang kecil, masyarakat desa dan kuli-kuli).[56] Seluruh anggota masyarakat dikerahkan untuk kewajiban-kewajiban dan tidak boleh ada yang menganggur. Anak-anak sekolah giat bergotong-royong seperti: menanam jarak, membuat keset dari serabut kelapa, mengumpulkan padi yang diambil dari penduduk. "Anak-anak yang berumur 6 – 7 tahun tidak luput dari semacam kerja paksa".[57]

Lembaga-lembaga tradisional seperti : banjar, rukun tetangga, sekeha dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang, di mana perbekel atau kepala kampung berkewajiban mengaturnya.[58] Rasa hormat yang berlebih-lebihan kepada tentara Jepang ditanamkan dengan keras. Berani tidak menghormat apabila ketemu dengan seorang Jepang, berarti pukulan-pukulan akan melayang ke kepalanya. Dari rasa yang keliwat takut pada Jepang, maka datangnya rasa hormat sampai pula kepada para pejabat/pegawai sipil/militer pribumi. Sedang sebaliknya rasa hormat kepada bangsawan pribumi tidak terlintas pada orang-orang Jepang tersebut.[59] Dari cara pengaturan hidup seperti tersebut di atas, hasilnya dapat dibanggakan. Tetapi itu semua untuk kepentingan perang. Maka rakyat menjadi miskin, kurang makan, telanjang dan barang-barang kebutuhan pokok tidak dapat dibeli.[60] Tingkat makanan rakyat sangat rendah sebab nasi sudah lebih banyak dicampur dengan : ketela, batang pisang, biji wani, bungkil pisang.[61] Gadis-gadis Bali diincar oleh tentara-tentara Jepang dengan alasan akan dipekerjakan di restoran-restoran Jepang. Akibatnya terjadi pelacuran bagi gadis-gadis yang telanjur. Takut diperlakukan demikian banyak gadis-gadis dikawinkan lebih muda oleh orang tuanya.[62] Dari keadaan demikian timbul pula golongan-golongan yang dapat dipisahkan menurut anggapan dan cara berpikirnya : "a. golongan pemuda nasional yang tidak percaya akan janji-janji balatentara Jepang, yang dipelopori oleh angkatan muda dan pelajar, b. golongan nasional yang percaya akan janji-janji tentara pendudukan Dai Nippon,

yang dipelopori oleh kaum yang lebih tua, c. golongan a nasional yang kebanyakan terdiri dari orang-orang atau kaki tangan Kempei Tai ..., d. golongan yang mengharapkan pulihnya kembali pemerintah Hindia Belanda Belanda karena dengan adanya pendudukan balatentara Jepang ini kehilangan kekuasaan ..."[63]

7.2.2. **Keadaan Ekonomi.**

Kegiatan bekerja rakyat semakin nyata. Timbul usaha-usaha produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Usaha ini tampak dengan dibangunya bermacam-macam pabrik atau perusahaan yang menyerap banyak tenaga manusia seperti : **Mitsui Busan Kaisha** (badan pengumpulan padi dengan penggilingannya), **Mitsui Norin** (pengumpul kapas dengan pemintalannya), Goshio (pembuatan karung goni), **Taiwan Chikusan** (pemotongan ternak, pengawetan daging, penyamakan kulit).[64]" Segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi kebutuhan hidup yang utama dikerahkan untuk keperluan perang."[65] Dalam hubungan ini dibuka pula pertokoan seperti : **Hei Kyu Kumiai** (semacam toko serba guna) yang mendistribusikan barang-barang produksi, namun itu terbatas pada kepentingan para pegawai Jepang dan itupun kalau ada sisa dari pengiriman untuk perang.[66] Sebaliknya barang-barang hasil produksi dari pabrik-pabrik Jepang tidak ada kelihatan, selain beberapa buah kendaraan bermotor untuk pejabat, sepeda-sepeda yang banyak memakai ban karet mentah. Hal ini terjadi karena selama perang, politik industri Jepang berubah dari sistem membuat pakaian menjadi membuat senjata, sedang kebutuhan sandang-pangan diharapkan dari daerah pendudukan.[67] Gaji pegawai terasa cukup ditinjau dari jumlah uang yang diterima (berkisar 20 – 60 sen sehari), sedangkan untuk makan sehari sudah cukup dengan 5 (lima) sen.[68] Tetapi pegawai juga merasa melarat, sebab uang ada, barang yang akan dibeli tidak ada.[69] Pemerintah menganjurkan orang-orang menabung di Bank, tetapi itu tidak berguna, sebab uang sudah tidak ada harganya.[70] Keadaan pasar sepi/kosong, yang ada hanya pedagang-pedagang kecil dengan barang dagangan berupa sayur-mayur, kacang-kacangan dan orang harus antre untuk dapat membeli bahan-bahan seperti : beras, gula.[71] Toko-toko di kota-kota banyak ditutup, karena tidak ada barang yang dijual, kecuali yang berfungsi sebagai distributor/penyalur bahan-bahan untuk pegawai. Banyak orang-orang Cina yang dulunya menjual barang-barang, kini menyingkirkan barangnya ke gunung. Mereka tidak ikut berpartisipasi.[72] Sistem ekonomi pemerintah Jepang di sini adalah ekonomi produksi kepentingan perang.[73] "Po-

litik yang dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang tertuju kepada kebutuhan perang".[74] Keadaan ekonomi rakyat sangat melarat, lebih-lebih yang di desa, mereka sudah bekerja berat, makanan kurang, pakaian kurang, bahkan banyak yang hanya mempunyai sepotong kain untuk satu keluarga, sehingga memakainya secara bergantian.[75] Untuk menanggulangi keadaan ini mereka menutupi tubuhnya dengan tapis (seludang buah kelapa), kain dari bagu (benang daun nenas) atau serat batang pisang.[76] Dari celah-celah kehidupan ekonomi serupa ini tumbuh pula suatu kegiatan tukang-tukang catut, terutama terhadap barang yang sukar didapat oleh penduduk, tetapi bisa lolos dari pembantu-pembantu Jepang yang dipercaya.[77] Tentang hal ini untuk di Jawa Prof. Soedjito mengatakan : "Sementara pegawai tak terima gaji, timbul lapangan kerja baru pencatutan"[78] dan "Siapa menjual beras secara gelap ? Mungkin para pekerja pabrik, kepala desa, pangreh praja atau petani kaya ...."[79]

7.3. Kehidupan Seni dan Budaya.

Kehidupan seni dan budaya tidak berkembang ke arah pembinaan rasa keindahan atau membina kebudayaan masyarakat, melainkan cenderung didorong untuk membina penduduk ke arah kesetiaan pada saudara tua Dai Nippon. Kegiatan-kegiatan kesenian menjadi alat propaganda dan kampanye.[80]

7.3.1. Pendidikan.

Sistem pendidikan mulai berubah dari cara-cara Belanda menjadi sistim yang diperlukan Jepang. Apabila pada zaman pemerintahan Belanda sekolah-sekolah dibedakan antara, sekolah golongan orang Eropa dan sekolah golongan orang Bumiputra, maka kini sekolah itu disamakan saja untuk semua golongan penduduk. Tingkat sekolah menengah mulai dibuka oleh pemerintah dan membubarkan sekolah-sekolah swasta (Taman Siswa). Sekolah-sekolah tingkat menengah itu adalah : **Hutsu Chu Gakko** (Sekolah Menengah Umum), **Katto Chu Gakko** (Sekolah Menengah Atas), **Kyo In Yo Seidyo** (Sekolah Guru Desa) **Sihan Gakko** (Sekolah Guru B.) **Katto Sihan Gakko** (Sekolah Guru A) dan sekolah Pertanian, Pertukangan.[81] Pada saat ini boleh dikatakan terjadi demokratisasi di dalam pendidikan.[82] Tentang isi pendidikan pemerintah Jepang berusaha keras menghilangkan/melarang sifat yang keblanda-blandaan seperti : pelajaran bahasa Belanda, buku-buku yang dipakai zaman Belanda, dan sebaliknya mewajibkan memakai bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Murid-murid dilatih baris-berbaris se-

cara militer, senam pagi (taiso), latihan masuk perlindungan, menyanyikan lagu-lagu pujaan Jepang dan setiap pagi harus menghormati **Tenno Heika** dengan kiblat Tokio.[83] Kepada masyarakat diminta agar mengganti pemakaian tahun Masehi dengan tahun **Sumera** (Jepang) yang lazim dipakai di Jepang.[84] Penduduk dilarang mendengarkan siaran-siaran radio gelap (siaran dari Sekutu), untuk mana radio-radio umum gelombangnya ada yang disegel dan hanya boleh menyiarkan berita-berita dari pemerintah Jepang.[85]

7.3.2. **Kesenian.**

Dalam hal kesenian (drama dan tari), sebenarnya dianjurkan oleh Jepang. Bali lebih dipandang sebagai tempat mencari hiburan/istirahat, sehingga kesenian-kesenian tradisional dapat hidup sebagai biasa.[86] Hidupnya kesenian tradisional seperti: arja, topeng, legong, juga digiring agar dalam pementasannya banyak mengambil tema dan propaganda yang memuji kepahlawanan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, misalnya: mengambil lakon peristiwa Puputan Badung untuk membenci Belanda.[87] Juga diselenggarakan sandiwara keliling dari satu kota ke kota lainnya, musik dari Korps militer, film penerangan dengan sifat yang penuh kampanye.[88] Seni bela diri diajarkan terutama pada anggota Peta atau militer lainnya dan seni kerajinan tradisional seperti : melukis, mematung, menganyam tidak dilarang.[89] Dari semua itu kesenian di Bali pada hakekatnya menurun, sebab masyarakat diliputi perasaan takut, tidak ada waktu dan situasi tenang.[90]

7.3.3. **Pengaruh Seni Budaya Jepang.**

Tampak usaha pemerintah Jepang untuk mempengaruhi seni dan budaya masyarakat di Bali dengan mengadakan pengarahan terhadap kesenian tradisional dan kegiatan-kegiatan seni modern lainnya seperti tersebut di atas. Keadaan sedemikian itu pada mulanya seolah-olah dapat dikendalikan dan segala sesuatu berjalan dengan penuh ketaatan. Pada saat ini lagu-lagu pujaan Jepang berkumandang di mana-mana, para pemuda giat belajar baris-berbaris, perang-perangan, dan dari segi pakaian terutama murid-murid ikut meniru Jepang seperti : celana pendek, kepala gundul tipe militer, topi lapangan model prajurit yang bahannya tidak menjadi soal.[91] Apabila diperhatikan, maka sebenarnya sikap taat itu muncul dari rasa takut karena kekejaman Jepang.[92] Keadaan semakin memburuk; situasi pertahanan/perlawanan Jepang semakin tercium oleh penduduk, terutama golongan intelektual. Pemberontakan Peta di Blitar bulan Februari 1945, mempengaruhi semangat pemuda-pe-

muda di Bali.[93] Apabila dilihat dari segi pengaruh seni dan budaya Jepang di Bali, tidak banyak yang bisa diperbuat, mungkin karena waktu yang terbatas.[94] Seorang bekas serdadu Jepang yang kini diam di Denpasar mengatakan bahwa; pengaruh seni dan budaya Jepang di Bali, tidak ada, Jepang bergerak dalam kerja keras.[95] Sedang penjelasan lain mengatakan : pengaruh Jepang ada dalam sistem militer, senam masal di sekolah lagu-lagu bersemangat patriotisme,[96] tumbuhnya harga diri sebagai bangsa,[97] mulainya ada panggung terbuka untuk tontonan.[98] Keterangan lain juga mengatakan : "Pendudukan militer Jepang di Indonesia di samping akibat-akibatnya yang merusak terhadap masyarakat Indonesia, juga mempunyai pengaruhnya yang menguntungkan secara positip terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia."[99]

7.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan.

Pada zaman pendudukan militer Jepang, mengenai alam pikiran dan kepercayaan di Bali, tidak terdapat suatu perkembangan yang berarti yang membawa perubahan bagi suasana pergaulan hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena pengaruh situasi dan pengawasan ketat dari pemerintah Jepang.[100]

7.4.1. Perkembangan Agama.

Masalah agama yang dianut oleh masyarakat di Bali, tidak diganggu oleh Jepang, hanya saja di dalam pelaksanaan terasa oleh penduduk banyak mengalami kesukaran, hal mana menimbulkan penghematan pembiayaan.[101] Suatu upacara agama akan dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin, karena bahan-bahan yang sulit.[102] Aktivitas keagamaan hampir tidak ada yang muncul, sebab penduduk jatuh miskin dan malam-malam harus mematikan lampu.[103] Suasana kepercayaan agama berjalan biasa, tidak berkembang.[104] Karena situasi, di mana wajib kerja keras dan perasaan takut meliputi pikiran masyarakat, maka soal perkembangan agama tidak terpikir, hanya tradisi berjalan sebagai biasa dengan cara yang hemat.[105] Sebaliknya dari pihak pemerintah Jepang tidak kelihatan ada usaha untuk mempengaruhi kehidupan agama. Orang-orang Jepang tidak beraktivitas dalam hal-hal yang bersifat agama, melainkan memusatkan perhatian pada segi material untuk memperkokoh pertahanan Jepang. Di sini Tuan Taira Teizo mengatakan bahwa : alam kepercayaan Jepang tidak ada pengaruhnya di Bali dan agama orang Jepang adalah tipis.[106]

7.4.2. Gerakan Perlawanan dengan Motivasi Agama.

Tentang perlawanan dengan motivasi agama, semua informan yang dapat kami hubungi mengatakan bahwa, gerakan semacam itu tidak ada di Bali. Sedang sumber-sumber lain belum dapat kami jumpai. Dengan tindakan-tindakan tentara Jepang yang kejam, lebih-lebih apabila itu dilakukan oleh Tokke Tai, perlawanan atau usaha perlawanan terhadap pemerintah Jepangpun muncul pula.[107] Hal ini terbukti dengan adanya usaha para anggota Peta untuk melawan Jepang di luar motivasi agama seperti : peristiwa perkelahian Chudan Cho Sugianyar melawan pelatih militer Jepang pada bulan Juni 1945.[108] Pertemuan para pemuda pada bulan Agustus 1945 di desa Baji (Badung), membicarakan masalah pemberontakan,[109] dan lain-lain peristiwa sudah tersebut di depan.

7.4.3. Kehidupan Intelektual.

Golongan intelektual pada masa pemerintahan Jepang belum banyak ada di Bali dan segala gerakannya diawasi dengan ketat oleh Jepang.[110] Perkumpulan-perkumpulan yang ada sebelumnya dilarang, dan di antara mereka banyak yang dipakai membantu pemerintah Jepang.[111] Ilmu pengetahuan yang semestinya menjadi lingkungan pergaulan dari golongan ini, tidak sempat berkembang, sebab semua tenaga diarahkan untuk kepentingan perang.[112] Alat-alat komunikasi yang ada seperti : radio dan surat kabar dikontrol dengan keras, Kegiatan anak-anak sekolah diawasi.[113] Ditinjau dari segi perasaan, sebenarnya kehidupan golongan intelektuil dengan penduduk umumnya, sama saja, tidak terasa ada perbedaan, mereka sama-sama melarat di bawah tindihan Jepang. Hanya di dalam pandangan atau kesadaran ada perbedaan, di mana golongan intelektual memandang pemerintah Jepang dengan penuh curiga.[114] Balatentara Jepang terlalu banyak melanggar nilai-nilai dan kepercayaan rakyat Bali yang berjiwa kolektif.[115] Dari situasi ini, pada golongan intelektual muncul bermacam-macam usaha yang sifatnya rahasia dan membina semangat nasional. Hal ini tampak misalnya sekolah-sekolah dengan organisasi gerakan pelajarnya seperti : Gerakan Pelajar **Chu Gakko**, Gerakan Pelajar **Sihan Gakko**, Gerakan Pelajar **Kyo In Yo Seidyo** dengan pimpinan masing-masing : I Made Pastika, I Ketut Nara, Made Ayu Swandewi, I Nyoman Widiada dan berpusat di Singaraja.[116] Gerakan-gerakan ini mempunyai usaha bekerja sama dengan kaum pergerakan dan orang-orang Peta. Sebagi kode (tanda pengenal) para anggota memakai simbol bendera kecil dengan warna : merah,

putih, hijau.[117] Di antara mereka pernah terjadi suatu pengangkatan sumpah yang ditanda tangani dengan darah.[118] Sedang di Denpasar pelajar-pelajar sekolah lanjutan membentuk organisasi yang sejenis, bernama : Ikatan Siswa Sekolah Menengah (I.S.S.M.).[119] Dari golongan terpelajar yang bekerja pada pemerintahan dan perusahaan-perusahaan Jepang, timbul pula usaha untuk suatu gerakan rahasia. Gerakan ini agak terputus-putus karena pengawasan pemerintah Jepang.[120] Sebagai contoh dapat disebutkan; gerakan di bawah tanah pimpinan I Made Widjakusuma, I Gst. Ngr. Rai, I Nyoman Mantik, yang pada permulaan tahun 1944 dapat berkembang ke seluruh daerah di Bali.[121] Kemudian terjadi peristiwa penyiksaan-penyiksaan secara kejam terhadap kaum pergerakan di kota Tabanan seperti : Wayan Bina, Mas Suhud, Ketut Buana,Wayan Miasa dan kawan-kawannya pada Februari 1944, dengan tuduhan mengadakan organisasi di bawah tanah.[122] Gerakan di bawah tanah di Singaraja muncul di bawah pimpinan I Gde Puger. yang mengadakan kontak dengan pemuda-pemuda pelajar.[123] Juga timbul gerakan rahasia yang disebut :G.A.F. (Gerakan Anti Fascis).[124] Termasuk di dalam G.A.F. ini adalah kelompok I Gst. Ngr. Rai, yang pada saat itu bekerja pada perusahaan **Mitsui Busan Kaisha** di Denpasar.[125] Sedang golongan intelektual yang tergabung di dalam Peta, mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan tersebut di atas, sebagai contoh ' I Gst. Ngr. Rai pernah menghubungi I Putu Serangan di Daidan Kediri, agar menyebarkan semangat anti Jepang itu pada anggotanya dengan cara berbisik, rahasia.[126] Chudan Cho Muka menyebarkan semangat anti Fascis ini di Daidan Negara.[127] Gerakan-gerakan rahasia ini semakin kentara kegiatannya, pada saat-saat pertahanan Jepang semakin kacau, dan gerakan ini banyak didukung oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya menjadi anggota Parindra.[128] Kegiatan gerakan pemuda intelektual ini semakin nyata dengan adanya rencana-rencana untuk mengadakan pembersihan di daerah masing-masing seperti : Syodan Cho Serodja di daerah Karangasem, Syodan Cho Sugianyar di daerah Klungkung, Syodan Cho Pugeg di daerah Tabanan pemuda-pemuda yang tergabung dalam perkumpulan pencak-silat E.S.S.T.I. membuat sabotase-sabotase di Denpasar, pemuda-pemuda di Singaraja merebut pusat radio/telegram di bawah pimpinan I Gde Puger, sedangkan pemuda-pemuda pelajar ditugaskan agar membentuk staf penerangan dan perlengkapan.[129] Pada akhirnya memang kecurigaan datang pula dari pemerintah . Jepang, namun balatentara Jepang tidak dapat berbuat lebih banyak lagi, selain Peta dinyatakan bubar pada 15 Agustus 1945, dengan istilah cuti dan senjata dilucuti.[130]

7.5. Hubungan ke Luar.

Tentang hubungan ke luar yang kami maksud di sini adalah hubungan antara penduduk/masyarakat di Bali dengan daerah luar Bali, pada saat mana pemerintah balatentara Jepang memegang peranan sepenuhnya.

7.5.1. Terbuka.

Di dalam suasana yang selalu genting, hubungan ke luar daerah betul-betul diawasi oleh tentara Jepang. Walaupun ada hubungan perdagangan dari Bali ke Jawa misalnya, namun itu sepenuhnya diatur oleh perusahaan-perusahaan Jepang.[131] Balatentara Jepang dapat ke luar-masuk Bali dengan leluasa dan karena itu mereka bersifat mobil di Bali.[132] Untuk penduduk pribumi usaha hubungan ke luar masuk daerah ini, adalah tertutup.[133] Hubungan dengan luar daerah sama sekali tidak terbuka.[134] Juga kunjungan dari orang-orang asing sebagai wisatawan tidak tampak selain yang sudah berada di Bali sejak zaman Belanda seperti misalnya, Le Mayeur (orang Belgia).[135] Hal ini juga terjadi karena blokade dari Sekutu, di samping pers dan radio betul-betul dikekang.[136]

7.5.2. Di bawah Tanah.

Seperti telah disinggung di depan, bahwa sikap pemerintah Jepang semakin menimbulkan ketidak puasan pada masyarakat di Bali. Dari hubungan yang tertutup maka terjadi hubungan-hubungan gelap (di bawah tanah) yang disiplin. Hal ini terjadi misalnya dengan : mendengarkan siaran-siaran radio dari luar negeri secara bersembunyi-sembunyi dipusat radio di Singaraja,[137] mendengarkan atau mengartikan pidato-pidato Bung Karno dalam memimpin perjuangan di Jawa, yang dapat disiarkan oleh radio resmi di mana isi pidatonya sering-sering bersifat pantun berkait, misalnya : "Hanya karena Jepang bertindak adil, kita bekerja sama dengan Jepang".[138] Pada pertengahan tahun 1944, seorang dari kaum pergerakan dapat menyelundup pergi ke Jawa dan berhasil mengadakan pertemuan dengan pemuda Wijono Surjokusumo di Yogyakarta.[139] Kemudian saat-saat Jepang akan menyerah hubungan ke luar dapat dilakukan semakin nyata seperti, ikutnya pemuda Mr. I Gusti Ketut Pudja duduk di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diawasi oleh Jepang.[140] Hubungan ke luar ini semakin menimbulkan kesadaran berbangsa dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, berkembang membawa gerakan-gerakan semakin nyata dengan tujuan sama Indonesia Merdeka.[141]

CATATAN

1. S. Pendit, **Bali Berjuang**, Yayasan Kebaktian Pejuang Daerah Bali, Denpasar, 1954, Hl.29.
2. Soebekti, **Sketsa Revolusi Indonesia 1940–1945**, Penerbit Grip. Surabaya, Hal. 31.
3. I Gst. Agung Mantra, Umur: 51 tahun, Pekerjaan Waktu Jepang: Staf Redaksi Harian Bali Shinbun, Pekerjaan Sekarang: Kepala Perpustakaan Umum Denpasar, Asal: Desa Kramas–Gianyar.
4. I d e m.
5. I Ketut Mandra, Umur: 63 tahun, Pekerjaan waktu Jepang; Pegawai Kantor P.U. Denpasar, Pekerjaan sekarang: Pensiunan Kantor P.U. Propinsi Bali, Asal: Br. Anyar (Penyaringan), Negara.
6. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal. 3.
7. I Nyoman Sardja Udaya, umur: 50 tahun, Pekerjaan waktu Jepang: Syodan Cho di Tabanan, Sekarang: Purnawirawan ABRI. Asal: Denpasar.
8. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal. 4.
9. I Made Wedastera Suyasa, Umur: 48 tahun, Pekerjaan waktu Jepang: Pelajar Chu Gakko di Singaraja, Sekarang: Usaha Swasta. Asal: Penyaringan Jembrana.
10. I Ketut Mandra, sama dengan atas (S.D.A.).
11. I Made Pugeg, Umur: 55 tahun, Pekerjaan waktu Jepang: Syodan Cho di Tabanan, Sekarang:Usaha Swasta. Asal: Br. Langon Denpasar.
12. I Ketut Mandra, S.d.a.
13. Ida Bagus Ketut Rurus, Umur: 63 tahun, Pekerjaan waktu Jepang: Gun Cho (Punggawa) di Manggis, Sekarang: Pensiunan Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Bali, Asal Denpasar.
14. I Putu Serangan, Umur: 60 tahun, Pekerjaan waktu Jepang: Chudan cho di Tabanan, Sekarang: Pensiunan Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Bali. Asal: Br. Delog Peken Singaraja.
15. Ida Bagus Ketut Rurus, S.d.a.
16. I Made Wedastera Suyasa, S.d.a.
17. Ida Bagus Ketut Rurus, S.d.a.
18. I Made Widjakusuma, Umur: 63 tahun, Pekerjaan waktu Jepang Karyawan Taiwan Chikusan, Sekarang: Usaha Swasta. Asal: Br. Titih–Denpasar.

19. I Putu Serangan, S.d.a.
20. Taira Teiza, Umur: 55 tahun **Pekerjaan waktu Jepang**: Sersan A.D. Jepang, Sekarang: Usaha Swasta. **Alamat**: Jln. Plawa–Denpasar (W.N.I.) Asal: Jepang.
21. Ida Bagus Ketut Rurus, S.d.a.
22. I Putu Serangan, S.d.a.
23. Drs. P.J. Suwarno, **Peranan Bupati Sebagai Pelaksana Demokrasi** dalam Majalah Basis, Penerbitan Yayasan Kanisius, Yogyakarta, Januari 1976, XXV–4. Hal. 116.
24. Taira Teiza, S.d.a.
25. I Gst. Ngr. Pindha BA, Umur 52 tahun, **Pekerjaan waktu Jepang**: Syodan Cho di Tabanan, **Sekarang**: Pensiunan T.N.I. A.D. Asal: Kesiman–Badung.
26. Nyoman S. Pendit, **op.cit.** Hal. 9.
27. I Made Pugeg, S.d.a.
28. Nyoman S. Pendit, **loc.cit.**
29. I Made Wedastera Suyasa, S.d.a.
30. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal.8.
31. **Ibid.**
32. **Ibid**, Hal.10.
33. I Made Wedastera Suyasa, S.d.a.
34. I Gst. Ngr. Pindha BA., S.d.a.
35. Nyoman S. Pendit, **loc.cit.**
36. I Gst. Agung Mantra, S.d.a.
37. I Nengah Wirta Tamu alias Pak Tjilik, Umur: 58 tahun, **Pekerjaan waktu Jepang**: Syodan Cho di Negara, **Sekarang**: Pensiunan Kantor Gubernur Propinsi Bali, Asal: Br. Liligundi, Singaraja.
38. Soebekti, **op.cit.**, Hal.46.
39. I Ketut Subrata, Umur: 62 tahun, Pekerjaan waktu Jepang: Kepala Sekolah Kyo In Yo Seidyo di Denpasar, Sekarang: Pensiunan Kepala Urusan Pemuda dan Pramuka Bali, Asal: Br. Lumintang–Denpasar.
40. Nyoman S. Pendit, op.cit., Hal.11.
41. A.A. Ngr. Gde Pugeg, Umur: 66 tahun, **Pekerjaan waktu Jepang**: Guru Sekolah Rakyat, **Sekarang**: Kepala Kantor Agama Propinsi Bali. Asal: Blahkiuh–Badung.
43. Nyoman S. Pendit, op.cit., Hal.16.
44. I Gst. Ketut Kaler, S.d.a.
45. I Ketut Subrata, S.d.a.
46. Abito Marto Hardjono, **Dokumentasi Perdjuangan Pemuda Indonesia**, 1915–1950. Penerbit Toko Buku Islamyah,

Medan, 1950, Hal.15.
47. Pak Tjilik, S.d.a.
48. Idem.
49. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal.18.
50. **Ibid.** Hal. 20.
51. I Gst. Agung Mantra, S.d.a.
52. Pak Tjilik, S.d.a.
53. Taira Tezia, S.d.a.
54. Ida Bagus Ketut Rurus, S.d.a.
55. Pak Tjilik, S.d.a.
56. Idem.
57. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal.18.
58. Ida Bagus Alit Sudarma, Umur: 51 tahun, Pekerjaan waktu Jepang: Karyawan Taiwan Chikusan, Sekarang: Kepala Bidang Pembinaan Kegiatan Penerangan Daerah Kanwil Deppen. Propinsi Bali. Asal: Br. Pekandelan Sanur.
59. Idem.
60. Ida Bagus Pidada, Umur: 65 tahun, Pekerjaan waktu Jepang: Pegawai Bank Pemerintah Jepang. Sekarang: Pensiunan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Denpasar. Asal: Selat Karangasem.
61. I Gst. Agung Mantra, S.d.a.
62. Ida Bagus Alit Sudarma, S.d.a.
63. Nyoman S. Pendit, loc.cit., Hal. 23.
64. I Putu Serangan, S.d.a.
65. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal.15.
66. Ida Bagus Alit Sudarma, S.d.a.
67. Taira Tezia, S.d.a.
68. Ida Bagus Alit Sudarma, S.d.a.
69. I Putu Serangan, S.d.a.
70. Ida Bagus Pidada, S.d.a.
71. I Made Widjakusuma, S.d.a.
72. A.A. Ngr. Gde Pugeg, S.d.a.
73. Ida Bagus Pidada, S.d.a.
74. Mr. Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, **Lahirnya Republik Indonesia** P.T. Kinta, Hal.44.
75. I Gst. Ketut Rurus, S.d.a.
76. Idem.
77. Ida Bagus Alit Sudarma, S.d.a.
78. **Prof.** Soedjito Sosrodihardjo SH. MA., **Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa, suatu analisa**, Pen. Karya, Yogyakarta 1972, Hal.45.
79. **Ibid.** Hal.51

80. I Nyoman Rumi, Umur: 50 tahun, Pekerjaan: Pegawai Ketataprajaan Kantor Camat Manggis–Karangasem, Asal: Tenganan–Karangasem.
81. I Ketut Subrata, S.d.a.
82. I Nyoman Rumi, S.d.a.
83. I Gst. Ketut Kaler, S.d.a.
84. I Made Wedastera Suyasa, S.d.a.
85. I Gst. Agung Mantra, S.d.a.
86. Idem.
87. Ida Bagus Alit Sudarma, S.d.a.
88. I Gst. Ketut Kaler, S.d.a.
89. I Gst. Agung Mantra, S.d.a.
90. Pak Tjilik, S.d.a.
91. I Gst. Ketut Kaler, S.d.a.
92. Pak Tjilik, S.d.a.
93. I Nyoman Sardja Udaya, S.d.a.
94. I Gst. Ketut Kaler, S.d.a.
95. Taira Teiza, S.d.a.
96. I Ketut Subrata, S.d.a.
97. I Putu Serangan, S.d.a.
98. I Nyoman Rumi, S.d.a.
99. Mr. Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, **op.cit.**, Hal.65.
100. Ida Bagus Ketut Rurus, S.d.a.
101. Ida Bagus Alit Sudarma, S.d.a.
102. I Gst. Agung Mantra, S.d.a.
103. Ida Bagus Pidada, S.d.a.
104. I Ketut Subrata, S.d.a.
105. I Gst. Ketut Kaler, S.d.a.
106. Taira Teiza, S.d.a.
107. I Gst. Ngr. Pindha BA., S.d.a.
108. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal.25.
109. **Ibid**, Hal.26.
110. I Putu Serangan, S.d.a.
111. Ida Bagus Pidada, S.d.a.
112. I Gst. Agung Mantra, S.d.a.
113. I Ketut Subrata, S.d.a.
114. Pak Tjilik, S.d.a.
115. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal. 22.
116. I Made Wedastera Suyasa, S.d.a.
117. Idem.
118. Nyoman S. Pendit, **loc.cit.**
119. **Ibid.** Hal.21.
120. I Gst. Ngr. Pindha BA., S.d.a.

121. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal. 19.
122. **Ibid**. Hal. 14.
123. **Ibid**. Hal. 22.
124. Pak Tjilik, S.d.a.
125. Tjokorda Bagus Sayoga, Umur: 51 tahun, Pekerjaan waktu Jepang : Karyawan Taiwan Chikusan, Sekarang : Usaha Swasta, Asal : Puri Satrya Denpasar.
126. I Putu Serangan, S.d.a.
127. Pak Tjilik, S.d.a.
128. I. Gst. Ngr. Pindha BA., S.d.a.
129. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, Hal. 24.
130. I Nyoman Sardja Udaya, S.d.a.
131. Ida Bagus Alit Sudarma, S.d.a.
132. I Gst. Ngr. Pindha BA, S.d.a.
133. I Putu Serangan, S.d.a.
134. Ida Bagus Pidada, S d.a.
135. Ida Bagus Alit Sudarma, S.d.a.
136. I Gst. Agung Mantra, S.d.a.
137. Pak Tjilik, S.d.a
138. I Made Wedastra Suyasa, S.d.a.
139. Nyoman S. Pendit, op.cit., Hal. 20.
140. **Ibid**. Hal. 35.
141. I Gst. Ngr. Pindha BA., S.d.a.

---

8. ZAMAN KEMERDEKAAN

(1945 – 1975).

8.1. Keadaan pemerintah dan kenegaraan.

8.1.1. Tumbuhnya Pemerintah R.I. di Daerah.

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Presiden ditunjuk Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai Gubernur Sunda Kecil dan Ida Bagus Putra Manuaba sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Sunda Kecil. Dengan penunjukan ini Mr. I Gusti Ketut Pudja kembali ke Bali dari Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1945 dan selanjutnya membentuk Pemerintahan Nasional Republik Indonesia Sunda Kecil di bawah pimpinan Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai Gubernur Sunda Kecil dan Ida Bagus Putra Manuaba sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Sunda Kecil.[1] Untuk membantu Gubernur di dalam menjalankan tugasnya dibentuk Badan Pekerja yang anggota-anggotanya di antaranya ialah Dokter Angsar, I Gusti Bagus Oka dan dan Ida Bagus Putra Manuaba. Ibu kota Propinsi Sunda Kecil ialah Singaraja.[2]

Di samping Pemerintah Nasional Republik Indonesia Sunda Kecil, di Sunda Kecil Pemerintah Balatentara Pendudukan Jepang masih tetap berkuasa, meskipun Jepang telah menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dalam situasi yang begini Gubernur Sunda Kecil bersama Stafnya serta dengan dukungan seluruh rakyat mengajukan ultimatum kepada Pemerintah Balatentara Pendudukan Jepang yang pada waktu itu dikepalai oleh Cho Kang, di mana ultimatum itu menuntut supaya kekuasaan pemerintahan untuk Propinsi Sunda Kecil diserahkan kepada Gubernur Sunda Kecil. Dengan adanya ultimatum ini akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1945 kekuasaan pemerintahan untuk Propinsi Sunda Kecil oleh Cho Kang diserahkan kepada Gubernur Sunda Kecil.[3]

Pemerintah Nasional Republik Indonesia Sunda Kecil tidak lama dapat menjalankan tugasnya, karena pada tanggal 11 Maret 1946 Gubernur Sunda Kecil dan Ketua Komite Nasional Indonesia Sunda Kecil ditangkap oleh pihak Nica dengan alasan Sunda Kecil tidak aman dan diangkut ke kota Denpasar.[4]

Ketika terbentuk Pemerintahan Nasional Republik Indonesia Sunda Kecil, pulau Bali sejak tahun 1938 telah diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan **Korte Verklaring** (Perjanjian Pendek), dimana pulau Bali terbagi atas delapan Kerajaan yang diberi nama **Landschappen** terdiri dari : Landschap Buleleng, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Badung dan Karangasem. Masing-masing **Landschap** dikepalai oleh seorang Raja (**Zelfbestuurder**). Meskipun secara formal Raja yang berkuasa, tetapi dalam prakteknya segala-segalanya diputuskan oleh Controleur Belanda yang bekerja di samping Raja selaku **Adviseur** (Penasihat)[5]

Tiap Kerajaan berdiri sendiri lepas dari pada yang lainnya. Supaya ada kerjasama di antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, maka pada tanggal 30 September 1938 dibentuk suatu badan yang bernama **Paruman Agung**. Paruman Agung ini berfungsi membuat peraturan untuk seluruh Bali. Semua Raja-raja di Bali menjadi anggota Paruman Agung dan sebagai ketuanya ialah Residen Bali dan Lombok yang berkedudukan di Singaraja. Tempat kedudukan Paruman Agung di kota Denpasar. Di samping Raja sebagai anggota, diangkat pula penasihat-penasihat yang diambilkan dari masing-masing kerajaan dua orang. Sekretaris Paruman Agung diangkat oleh Paruman Agung dengan persetujuan Residen.[6]

Lambat laun dirasakan sesuai dengan perkembangan zaman anggota Paruman Agung perlu ditambah. Untuk ini oleh Paruman Agung dikeluarkanlah Peraturan tertanggal 4 Pebruari 1946 No. 43/1946, di mana anggota Paruman Agung tidak lagi Residen Bali dan Lombok, tetapi seorang Raja.[7]

Dengan terbentuknya N.I.T. (Negara Indonesia Timur) sebagai hasil dari pada Konperensi Denpasar tanggal 24 Desember 1946, di mana pulau Bali termasuk dalam lingkungan N.I.T., maka diadakanlah perubahan di dalam struktur pemerintahan di Bali, dengan dikeluarkannya oleh Paruman Agung Undang-undang Pembentukan Gabungan Kerajaan Bali dan Badan-badannya tanggal 26 Pebruari 1947 yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1947. Berdasarkan Undang-undang ini pokok kekuasaan di Bali terletak pada Gabungan Kerajaan-kerajaan yang langsung mengendalikan Pemerintahan Kerajaan di Bali (sebagai Badan Eksekutif), sedangkan Paruman Agung berfungsi sebagai Badan Legislatif. Raja tidak lagi menjadi anggota Paruman Agung. Di masing-masing kerajaan dibentuk Paruman Negara yang berfungsi sebagai Badan Legislatif pula. Ketua Gabungan Kerajaan dipilih di antara Raja-raja, sedangkan Ketua Paruman Agung diangkat di antara para anggotanya, dan anggota Paruman Agung dari suatu Kerajaan otomatis menjadi anggota Paruman Negara. Struktur pemerintahan yang demikian

ini berlangsung sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (RI) tanggal 27 Desember 1949 oleh Pemerintah Belanda.[8]

8.1.2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Berita Proklamasi tidak segera sampai di Bali. Secara samar-samar pada tanggal 21 Agustus 1945 Cho Kang mengumumkan bahwa di Jakarta ada Proklamasi Indonesia Merdeka. Para pemuda dengan penuh semangat menyambut berita proklamasi itu. Oleh para pemuda didirikan organisasi Angkatan Muda Indonesia (AMI) di Singaraja, dan Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Denpasar dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua	:	Made Widjakusuma.
Wakil Ketua	:	Tjokorda Agung.
Seksi Keamanan	:	Ida Bagus Tantra; Njoman Mantik.
Urusan Perlengkapan	:	Made Sugita dan Gede Windia.
Seksi Penerangan	:	Ida Bagus Sadnja dan Sumetja.[9]

Di samping itu dengan kedatangan Mr. I Gusti Ketut Puja dari Jakarta segera dibentuk Pemerintah Nasional Republik Indonesia Sunda Kecil dengan Mr. I Gusti Ketut Puja sendiri sebagai Gubernur Sunda Kecil. Kemudian oleh Gubernur Sunda Kecil diperintahkan untuk membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat), dan dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dengan kekuatan 13½ kompi.[10] Untuk menentukan markas TKR Sunda Kecil, oleh Gubernur Sunda Kecil, Ketua KNI dan Raja-raja di Bali diadakan rapat di puri raja Badung yang memutuskan bahwa agar tiap-tiap kerajaan mengirim utusan ke Denpasar. Dalam rapat yang diadakan di Kantor KNI, daerah Badung para utusan yang hadir ialah :

1.	Daerah Buleleng	:	diwakili oleh I Gusti Made Agung, adik raja Buleleng.
2.	Daerah Jembrana	:	I Gusti Bagus Kayun, keluarga raja Jembrana.
3.	Daerah Tabanan	:	I Gusti Wayan Debes.
4.	Daerah Badung	:	diwakili oleh I Gusti Ngurah Rai dan I Gusti Putu Wisnu.
5.	Daerah Gianyar	:	I Dewa Gde Anom Asta.
6.	Daerah Karangasem	:	diwakili oleh Anak Agung Ketut Jelantik dan Anak Agung Made Karang.
7.	Daerah Klungkung	:	tidak mengirim utusan.
8.	Daerah Bangli	:	diwakili oleh Anak Agung Anom

Mudita, keluarga raja Bangli.

Selanjutnya pada tanggal 1 November 1945 diadakan rapat pemilihan pemimpin tentara. Yang dibolehkan memilih yaitu dari DPRI, PRI, Pamong Praja, Polisi dan KNI. Dalam rapat itu dengan aklamasi terpilih I Gusti Ngurah Rai bekas ketua II **Prayoda** dan bekas **Cuodanco** sebagai pimpinan dan I Wayan Ledang sebagai kepala Staf. Dalam pelantikan pimpinan TKR. oleh Gubernur dan Ketua KNI Sunda Kecil, I Gusti Ngurah Rai diberikan pangkat Mayor, kemudian oleh Pusat Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta ditetapkan dengan pangkat Letnan Kolonel.

Mula-mula kekuatan dislokasi TKR Sunda Kecil berjumlah tiga belas setengah kompi yaitu :

1. Negara dengan kekuatan 2 kompi di bawah pimpinan I Gusti Agung Bagus Kayun dan I Dewa Nyoman Teges.
2. Tabanan dengan kekuatan 2 kompi di bawah pimpinan I Gusti Wayan Debes dan Ketut Widjana.
3. Denpasar dengan kekuatan 2 kompi di bawah pimpinan Cokorda Ngurah dan Putu Serangan. Berhubung suatu hal empat kompi yaitu Denpasar dan Tabanan untuk sementara, dipimpin oleh I Gusti Putu Wisnu.
4. Gianyar dengan kekuatan 2 kompi di bawah pimpinan I Dewa Gde Anom Asta dan I Dewa Gde Oka.
5. Bangli dengan kekuatan 1½ kompi di bawah pimpinan Anak Agung Anom Mudita.
6. Karangasem dengan kekuatan 2 kompi di bawah pimpinan Anak Agung Made Karang dan Anak Agung Made Jelantik.
7. Singaraja dengan kekuatan 2 kompi di bawah pimpinan I Dewa Made Suwidja dan I Gde Muka Pandan.
8. Klungkung tidak membentuk.[11]

Karena persenjataan yang dimiliki oleh TKR sangat kurang dan di dalam rangka menghadapi perjuangan selanjutnya yaitu mempertahankan proklamasi kemerdekaan, maka oleh TKR direncanakan untuk mengadakan serangan umum terhadap semua **Daidan** Jepang yang ada di Bali pada tanggal 13 Desember 1945, guna mendapatkan senjata. Tetapi serangan umum ini gagal, karena sebelumnya pihak Jepang telah mengetahui rencana serangan umum ini. Dengan gagalnya serangan umum ini pihak pemuda mundur ke pegunungan untuk lanjut mengadakan perang gerilya. Dalam situasi yang begini, setelah diadakan permusyawaratan bersama oleh pihak pemuda diputuskan untuk mengirim ekspedisi ke Jawa di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, guna meminta bantuan senjata dan bantuan-bantuan lainnya kepada Pemerintah Pusat RI di Yogyakarta. Rombongan ekspedisi Rai berangkat dari

Bali pada tanggal 19 Desember 1945.[12]

Pada tanggal 2 Maret 1946, tentara Gajah Merah (Pasukan Belanda) di Bali, lanjut ditempatkan di seluruh Bali.[13] Dengan kedatangan tentara Gajah Merah ini situasi di Bali menjadi gawat. Gubernur dan Ketua KNI Sunda Kecil ditangkap. Dengan demikian praktis Pemerintah Propinsi Sunda Kecil tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Ekspedisi Rai kembali dari Jawa pada tanggal 16 April 1946 langsung menuju Munduk Malang/Tabanan. Semua pasukan yang ada di daerah-daerah dipanggil dan dipusatkan di Munduk Malang. Dalam menghadapi Nica yang makin hari makin mengganas, maka dibentuklah satu badan perjuangan yang bernama : Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil (D.P.R.I.S.K.) yang merupakan penggabungan/fusi antara P.R.I., Pesindo, dan T.R.I. Resimen Sunda Kecil.[14]

Supaya bala bantuan dari Jawa bisa masuk ke Bali, dan untuk membangkitkan perlawanan rakyat di seluruh daerah, maka diadakanlah gerakan **long march** ke Gunung Agung. Dalam **long march** ini banyak terjadi pertempuran besar dan kecil di antaranya ialah pertempuran Tanah Aron/Karangasem pada tanggal 9 Juli 1946, di mana di dalam pertempuran itu tentara Nica tewas 82 orang, sedangkan di pihak pasukan Induk tidak ada yang korban. Kembali dari **long march** pasukan dikembalikan ke daerahnya masing-masing untuk terus mengadakan perlawanan terhadap Nica.[15]

Pasukan Induk ini terdiri dari :

1. Satu kompi pasukan Badung di bawah pimpinan Kapten Sugianyar, memiliki persenjataan 5 buah bren (keki), 2 buah mitraliur (12,7), ratusan senapan, pistol dan sten, sehingga pasukan Badung merupakan pasukan yang paling banyak memiliki senjata.
2. Satu kompi pasukan Tabanan di bawah pimpinan Kapten Widjana, dengan alat persenjataan terdiri dari senjata otomatis ringan, bren dan sten.
3. Satu peleton pasukan Singaraja di bawah pimpinan Kapten Duwija.
4. Satu setengah peleton pasukan ALRI di bawah pimpinan Kapten Markadi dan ditambah dengan pemuda-pemuda dari Jembrana.
5. Pasukan Gianyar Barat yang jumlahnya juga cukup besar tetapi kebanyakan tidak bersenjata, karena itu mereka diberi tugas untuk mengangkut alat-alat perlengkapan.
6. Anggota-anggota Staf MBO, (penasehat politik staf PMC = Penyelidik Militer Khusus), staf operasi, propaganda dan

lain-lain.[16]

Pasukan induk dibagi menjadi 2 gabungan yaitu : gabungan I dipimpin oleh Tjokorda Ngurah merangkap Komandan PMC dan gabungan II dipimpin oleh Mayor I Gusti Putu Wisnu.[17]

Di samping itu ada juga pasukan teritorial yang bertugas menjaga daerahnya masing-masing yaitu :

1. Pasukan teritorial Badung Utara dipimpin oleh Ida Bagus Tantra.
2. Pasukan teritorial Singaraja Timur dipimpin oleh Pak Cilik.
3. Pasukan teritorial Singaraja Barat dipimpin oleh Ida Bagus Tamu.
4. Pasukan teritorial Gianyar Barat dipimpin oleh I Ketut Gde Dharma Yudha.
5. Pasukan teritorial Bangli dipimpin oleh Anak Agung Anom Mudita.
6. Pasukan teritorial Tabanan dipimpin oleh I Gusti Wayan Debes.[18]

Di dalam sejarah perjuangan revolusi fisik di Bali, mulai terbentuknya MBO DPRI Sunda Kecil telah terjadi kontak senjata antara para pemuda pejuang melawan serdadu NICA di antaranya :

1. Pada tanggal 4 Maret 1946 terjadi pertempuran laut antara pasukan ALRI. V Jawa Timur melawan serdadu Belanda (NICA) di selat Bali, di mana pada waktu itu ALRI berusaha melakukan pendaratan di pantai Gilimanuk. Dalam pertempuran itu di pihak ALRI gugur Letnan Muda Sumeh Darsono sedangkan di pihak NICA sebuah motor boat dapat ditenggelamkan. Dalam usaha pendaratan ini sebuah perahu yang ditumpangi oleh Letnan Muhadji dapat mendarat dengan selamat.
2. Pada tanggal 12 Maret 1946 di sebelah utara desa Blahkiuh, kabupaten Badung terjadi pertempuran antara pasukan Beruang Hitam melawan serdadu NICA. Dalam kontak senjata ini seorang ajudan Belanda tewas sedangkan di pihak pemuda tidak ada korban.
3. Pada tanggal 9 April 1946 terjadi pertempuran di desa Bebetin, Jagaraga, kabupaten Buleleng di pihak serdadu NICA ada beberapa yang tewas sedangkan di pihak pemuda menderita kerugian karena beberapa rumah di desa tersebut dibakar oleh pihak serdadu NICA.
4. Pada tanggal 10 April 1946 para pemuda pejuang kita menyerang tangsi-tangsi NICA yang ada di kota Denpasar (Kayumas, Kreneng, Satria) yang dipimpin oleh I Gusti Bagus Sugianyar. Penyerangan ini dilakukan pada tengah malam

berlangsung sampai pagi. Dalam peristiwa ini di pihak pemuda pejuang gugur Letnan Ida Bagus Japa sedangkan Letnan Suweca menderita luka-luka parah dan 5 orang pemuda berhasil ditangkap oleh NICA. Di pihak NICA tewas 30 orang.

5. Pada tanggal 26 April 1946 pada waktu tengah malam diadakan serangan oleh pemuda pejuang terhadap pos NICA yang bermukim di SD Kalanganyar sebelah selatan kota Tabanan. Akibat serangan ini 13 orang NICA tewas sedangkan di pihak pemuda seorang kena peluru pada pahanya. Setelah penyerangan ini, desa Kalanganyar dibakar habis oleh NICA.[19]
6. Pada tanggal 15 April 1946 diadakan serangan terhadap pos NICA di sebelah Barat Penebel, kabupaten Tabanan. Penyerbuan ini dipimpin oleh Mayor Wisnu, di pihak pemuda seorang menderita luka-luka sedangkan di pihak musuh 30 orang tewas.
7. Pada tanggal 11 Mei 1946 terjadi pertempuran di sekitar Munduk Malang. Di pihak pemuda tidak ada yang tewas sedangkan di pihak lawan tidak diketahui berapa orang yang jadi korban.
8. Pertempuran yang sangat menyedihkan adalah pertempuran di desa Sawah, kecamatan Selemadeg, kabupaten Tabanan, yang terjadi pada tanggal 22 Mei 1946. Dalam pertempuran ini pihak pemuda gugur 6 orang, luka-luka 12 orang, sedangkan di pihak NICA tidak diketahui.[20]

Perjalanan Juni-Juli atau "Long March" ke Gunung Agung. Supaya bala bantuan dari Jawa dapat masuk ke Bali dan untuk membangkitkan perlawanan rakyat seluruh daerah maka diadakan gerakan perjalanan Juni-Juli atau lebih terkenal dengan sebutan "Long March" ke Gunung Agung. Perjalanan ini mempunyai beberapa maksud antara lain :

1. Menarik perhatian serdadu NICA ke bagian timur, sehingga front barat kosong yang berarti melancarkan serta mengamankan pendaratan bantuan pasukan dari Jawa.
2. Memperhebat semangat perlawanan rakyat di seluruh daerah gerilya.[21]

Gerakan perjalanan Juni-Juli ini dimulai pada tanggal 28 Mei 1946 dari Bengkel Anyar, keesokan harinya pagi-pagi benar pasukan induk beserta MBO mendaki Gunung Batukau terus menuju Emped dan Gesing. Setibanya di desa ini, pasukan Singaraja yang dipimpin oleh Kapten Suwidja bertemu dengan pasukan induk. Setelah istirahat perjalanan dilanjutkan menuju desa Bebetin, melalui desa Jombong, Gobleg, Cengana. Di sini pasukan induk mendapat tambahan anggota pasukan yang bersenjata bambu runcing

dan senjata tajam saja.[22]

Di Buleleng Timur pasukan induk dari MBO diterima oleh I Nengah Cilik (Pimpinan Staf Timur MB Buleleng). Gabungan pasukan ini dapat membersihkan pos NICA di Sudaji dan desa Sekumpul pada tanggal 10 Juni 1946. Untuk menghindari kepungan serdadu NICA, pasukan mundur ke desa Lemukih yang jaraknya ±3 Kilometer dari desa Sekumpul. Dari sini pasukan bergerak ke desa Bon dan tiba di desa Bon pada tanggal 11 Juni 1946. Keesokan harinya pada tanggal 12 Juni 1946 sebagian pasukan diperintahkan menyerang pos NICA di Lampu. Serangan di Lampu ini mengalami kegagalan sehingga pada tanggal 13 Juni 1946 terjadi pertempuran di desa Bon. Di pihak kita 2 orang luka-luka sedangkan di pihak NICA tidak diketahui.[23]

Atas permintaan MB Bangli agar MBO dan pasukan datang ke Bangli demikian pula karena tentara NICA telah diketahui bergerak menuju Bon akhirnya MBO menuju ke Manikliu kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli. Di Manikliu diadakan perundingan di mana diputuskan bahwa pasukan yang tanpa senjata dipulangkan dengan tugas menjaga daerah masing-masing sedangkan sisanya, kurang lebih 400 orang terus menuju Tanah Aron yang terletak di lereng gunung Agung.

Pertempuran Tanah Aron. Pasukan induk yang berjumlah kurang lebih 400 orang itu sebagian besar bersenjata bergerak ke arah timur melalui desa-desa Landih, Pemuteran, Samoh dan terus menuju Pesagi. Pada tanggal 19 Juni 1946 pasukan tiba di Landih dan di desa ini dibentuk pasukan istimewa di bawah pimpinan I Made Pegeg dan Anang yang bertugas untuk mengadakan kekacauan terhadap pos-pos NICA di daerah Badung. Hal ini diharapkan agar dapat mengalihkan perhatian NICA terhadap pasukan induk kita yang bergerak ke arah timur. Pada tanggal 2 Juli 1946 pasukan sampai di desa Pesagi kabupaten Karangasem dan terjadi pertempuran melawan tentara NICA. Untunglah di pihak kita tidak ada korban sedangkan di pihak NICA diperkirakan tewas 16 orang. Baru pada tanggal 5 Juli 1946 pasukan induk dari MBO tiba di Tanah Aron di bawah pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan beberapa perwira antara lain : Pak Wisnu, Pak Broto (Aryo Mataram), Pak Tjok Brengos. Beberapa pimpinan pasukan ialah Kapten Markadi dengan kekuatan 1 peleton terdiri dari pasukan ALRI, satu kompi pasukan di bawah pimpinan Kapten Sugianyar, satu kompi pasukan di bawah pimpinan Kapten Wijana. Dari macam persenjataannya dapat dibagi menjadi beberapa pasukan yaitu pasukan Keiki dan regu pasukan senapan dipimpin oleh Letnan Kredek ; Peleton senapan dipimpin oleh Let-

nan Suprapto. Pemimpin lainnya antara lain Letnan Diasa, Letnan Tiaga, Letnan Sarja. Di samping itu pasukan kita juga terdiri dari orang-orang Jepang antara lain Bung Ali dan Nyoman Sayan yang kedua-duanya telah mengganti nama aslinya menjadi nama Indonesia.[24]

Pertempuran mulai pukul 9.00. Tembakan-tembakan mulai di sebelah selatan gunung Pawon dekat pertahanan pasukan ALRI, di bawah pimpinan Kapten Markadi. Pertempuran di sini berlangsung lebih kurang 20 menit dilanjutkan dengan tembakan-tembakan di sebelah atas di mana pasukan Kapten Wijana melakukan penghadangan. Pertempuran di sini berlangsung sangat seru selama lebih kurang 40 menit. Sementara itu pasukan ALRI di bawah pimpinan Kapten Markadi bergerak mundur dan pasukan kita di sebelah atas dalam beberapa jam telah dapat membuat lubang perlindungan untuk senjata 12,7. Hal ini adalah bantuan tentara Jepang yang ikut tergabung di dalam pasukan kita. Pasukan NICA yang datang dari utara kelihatan mendekat mengambil posisi di depan pasukan kita. Antara tentara NICA dengan pasukan kita dibatasi oleh jurang yang dalam dengan jarak lebih kurang 250 meter. Kedudukan pasukan kita lebih menguntungkan daripada pasukan NICA sehingga dalam pertempuran yang berlangsung kurang lebih 1½ jam banyak tentara NICA yang menjadi korban, sedangkan di pihak kita tidak ada korban. Kira-kira jam 17.00 serdadu Belanda tidak kelihatan lagi, kemungkinan mereka mundur sedangkan pasukan kita oleh Pak Rai diperintahkan naik ke puncak gunung Agung, untuk mengadakan konsolidasi kekuatan. Menurut perkiraan korban serdadu NICA dalam pertempuran itu ada sebanyak 82 orang.[25]

Situasi sesudah pertempuran Tanah Aron. Pasukan kita kepayahan karena lapar sedangkan NICA terus mengejarnya. Ketika tiba di desa Songan, NICA menggempur baik dari darat, maupun udara sehingga bercerai-berai. Pada tanggal 17 Juli 1946 barulah pasukan induk tiba di desa Pakisan untuk beristirahat. Pasukan induk melanjutkan perjalanan dengan taktik bertahan tetapi di desa Jembong, mendapat gempuran kembali dari serdadu Belanda. Persediaan peluru hampir habis dan pada tanggal 23 Juli 1946 staf MBO mengadakan rapat di desa Munduk Pengorengan. Rapat memutuskan untuk membagi-bagi pasukan induk. Pasukan Tabanan, Badung dan lain sebagainya dikembalikan ke daerahnya masing-masing tetapi harus tetap memelihara hubungan satu dengan yang lain dan mengembalikan daerah-daerah yang telah diduduki oleh NICA. Pasukan ALRI juga dikembalikan ke Jawa.[26]

Usaha-usaha untuk memperoleh bantuan senjata dari Jawa,

gagal. Hal ini disebabkan karena NICA melakukan penjagaan ketat di pantai barat pulau Bali. Akhirnya MBO menggabungkan diri dengan Staf Cabang II/M (Melati) di Marga yang pada waktu itu dipimpin oleh Dewa Made Kaler.

Marga sebagai Markas Besar DPRI. Sejak pasukan induk dipecah-pecah, Staf MBO berkedudukan di desa Marga tetapi sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang-kadang di desa Marga, di Petiga Blanban, Apit Jaring (desa Batannyuh) dan terakhir di Banjar Ole. Pada waktu berkedudukan di desa Petiga Blanban, pasukan kita pernah mendapat gempuran dari serdadu NICA. I Nengan Kuasa tertembak dan berhasil melarikan diri tetapi kemudian ditangkap dan ditembak mati oleh serdadu NICA. Pada waktu markas besar berkedudukan di Banjar Ole, pasukan kita mengadakan serangan terhadap tangsi Belanda di kota Tabanan. Ibu Lasti yaitu seorang pejuang wanita, berhasil membelokkan hati komandan polisi NICA yaitu Wagimin sehingga memihak kepada kita. Rapat di Dangin Carik (Tabanan) yang dilakukan pada tanggal 11 Nopember 1946 antara Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, Kapten I Gusti Wayan Debes dengan Wagimin, memutuskan bahwa penyerangan akan dilakukan pada tanggal 18 Nopember 1946, malam hari. Pada waktu penyerangan ini, pasukan kita dipimpin oleh Kapten I Gusti Wayan Debes tanpa meninggalkan korban. Senjata dan barang-barang yang dapat dirampas pada waktu itu adalah : 2 pucuk bren, 2 pucuk pistol, mitraliur, 36 pucuk kraben, 2 pucuk senapan angin, 16 blek peluru masing-masing berisi 500 butir, 2 buah mesin tik.

Sampai pada tanggal 19 Nopember 1946 Markas Besar kita masih berkedudukan di Banjar Ole. Sementara itu, JBT Konig sebagai komandan tentara NICA untuk Bali dan Lombok sangat marah dan mulai mengerahkan tentaranya. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai mengumpulkan pasukannya dan ternyata berjumlah 105 orang, lengkap dengan senjata. Pasukan ini diberi nama "Ciung Wanara" dengan seragam kebanyakan hitam, peci hitam strip merah disertai lencana merah putih. Dari Banjar Ole, pasukan kita menuju desa Kelaci akhirnya bertahan di sawah (Subak Uma Kaang).

Pertempuran Margarana. Pada tanggal 20 Nopember 1946, sebanyak 60 orang tentara NICA datang dari selatan mendekati desa Kelaci. Dari sebelah utara datang pula 8 orang tentara musuh dan semua ada lebih kurang 1 kilometer dari pusat pertahanan kita. Puluhan truk tentara NICA diturunkan di desa Marga kemudian menyebar dan memerintahkan penduduk untuk ke luar, digiring ke pasar Marga.

Karena NICA telah mengurung desa Marga, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukan untuk pindah dan membuat steling di Subak Uma Kaang, menghadap ke selatan. Pertahanan diatur dalam bentuk segi empat dan pimpinan ada di tengah-tengah. Persenjataan di pihak kita pada waktu itu terdiri dari : 1 pucuk Juki Kanju/Keki lup dua, tiga pucuk bren, empat pucuk sten, 62 pucuk kraben, dua buah pistol pikers, dua pucuk pistol mitraliur, dua pucuk senapan angin, 16 blek peluru. Persenjataan tentara NICA belum dapat diketahui dengan pasti. Tentara NICA yang datang dari jurusan utara (barat laut) mulai mendekat. Pada jam 8.00 Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai memberi komando untuk menembak. Pertempuran terjadi di dua sektor yaitu sektor barat dan timur. Pertempuran berlangsung dengan sengit sehingga tentara NICA banyak yang menjadi korban. Hampir seluruh tentara NICA mengundurkan diri. Pesawat terbang (Piper cup) NICA mulai muncul kemudian atas perintah Letnan Suweta, bren dan sten ditembakkan sehingga tidak berani muncul lagi.

Semua pasukan "Ciung Wanara" diperintahkan untuk maju ke selatan dan kembali membentuk pertahanan segi empat. Pada jam 12.00 muncul lagi pesawat terbang NICA (B 24) yang didatangkan dari Makasar dan langsung menghujani pasukan kita dengan tembakan bom-bom mortir. Pasukan NICA yang tadinya mundur, kembali maju melakukan serangan. Sementara itu NICA mendatangkan pula balabantuan dari seluruh Bali (Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli). Gabungan serangan dari pihak NICA ini dibalas oleh pasukan kita sehingga pertempuran bertambah sengit. Pertahanan kita tidak menguntungkan. Kapten Sugianyar gugur. Melihat kejadian ini Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai marah kemudian pasukan kita meninggalkan steling untuk mengadakan pembalasan. Dalam peristiwa ini semua pasukan "Ciung Wanara" gugur, termasuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran selesai pada jam 17.00 dengan meninggalkan korban di pihak kita sebanyak 96 orang sedangkan di pihak NICA diperkirakan sebanyak 300–400 orang.

Nama-nama para pahlawan yang gugur dalam Puputan Marga.[27] Para pahlawan yang gugur pada waktu itu antara lain :

a. **Dari Daerah Badung.**

1. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai.
2. Sersan Mayor Ida Bagus Gde.
3. Sersan Mayor I Gusti Ngurah Tugir.
4. Sersan I Wayan Rangkep.

5. I Wayan Sukra (Jepang).
6. I Made Sukri (Jepang).

b. **Dari Daerah Buleleng.**

7. Mayor I Gusti Putu Wisnu.
8. Canggu (Jepang).

c. **Dari daerah Jembrana.**

9. Mayor I Gusti Bagus Sugianyar.
10. Selamat (Jepang).

d. **Dari Daerah Tabanan.**

11. Kapten I Gusti Wayan Debes.
12. Letnan Dua I Gusti Made Pugur.
13. Sersan Mayor I Made Tegog
14. Sersan I Ketut Ruta.
15. Sersan I Gusti Made Sentor.
16. Sersan Dua Men Lumut.
17. Kopral I Gusti Made Pating.
18. Kopral I Gusti Ketut Rambet.
19. Kopral Wagimin.
20. Kopral Dua I Ketut Beseg.
21. Kopral Dua I Wayan Kasub.
22. Kopral Dua I Londong.
23. Prajurit Satu I Ketut Bentir.
24. Prajurit Satu I Ketut Beko.
25. Prajurit Satu I Ketut Bau.
26. Prajurit Satu I Wayan Jegir.
27. Prajurit Satu I Wayan Jiwa.
28. Prajurit Satu I Wayan Gerat.
29. Prajurit Satu I Wayan Geblag.
30. Prajurit Satu I Nyoman Gerindem.
31. Prajurit Satu I Ketut Geret.
32. Prajurit Satu I Wayan Gereda.
33. Prajurit Satu I Nyoman Gereg.
34. Prajurit Satu I Ketut Kuwug.
35. Prajurit Satu I Wayan Kodet.
36. Prajurit Satu I Wayan Kenyus.
37. Prajurit Satu I Made Kolag.
38. Prajurit Satu I Ketut Kliyeb.
39. Prajurit Satu I Wayan Kolag.
40. Prajurit Satu I Kodo.
41. Prajurit Satu I Wayan Lana.
42. Prajurit Satu I Made Mandri.

43. Prajurit Satu I Ketut Manteb.
44. Prajurit Satu I Ketut Merta.
45. Prajurit Satu I Made Manderi.
46. Prajurit Satu I Muntrik.
47. Prajurit Satu Nang Norja.
48. Prajurit Satu I Ketut Ngenik.
49. Prajurit Satu I Made Nganting.
50. Prajurit Satu I Ketut Nerut.
51. Prajurit Satu I WayanOngkos.
52. Prajurit Satu I Gusti Ketut Oka.
53. Prajurit Satu I Nyoman Prodong.
54. Prajurit Satu I Wayan Purug.
55. I Made Putra (Jepang).
56. Prajurit Satu I Gde Nyoman Riasta Beng.
57. Prajurit Satu I Nyoman Repit.
58. Prajurit Satu I Made Rena.
59. Prajurit Satu Nang Rajin.
60. Prajurit Satu I Wayan Rengkug.
61. Prajurit Satu Nang Ringan.
62. Prajurit Satu I Rontok.
63. Prajurit Satu I Made Rembyok.
64. Prajurit Satu Ida Bagus Rai.
65. Prajurit Satu Nang Rimbeg.
66. Prajurit Satu I Gusti Nyoman Sukra.
67. Prajurit Satu I Ketut Sungkrug.
68. Prajurit Satu I Gde Nengah Suder.
69. Prajurit Satu I Gde Suli.
70. Prajurit Satu I Wayan Sintrek.
71. Prajurit Satu I Ketut Sadra.
72. Prajurit Satu I Gusti Raka Terak.
73. Prajurit Satu I Gusti Nyoman Tata.
74. Prajurit Satu I Nyoman Caeh.
75. Prajurit Satu I Ketut Tonik.
76. Prajurit Satu I Ketut Wardi.

e. Dari Daerah Gianyar.

77. Kapten I Nyoman Suweta.
78. Letnan Satu Ida Bagus Manik.
79. Sersan I Brata.
80. Sersan I Pugig.
81. Kopral I Limbuk.
82. Kopral I Maji.
83. Kopral I Rudeg.

84. Kopral I Sara.
85. Prajurit Satu I Rambug.
86. Prajurit Satu I Rodja.

Pangkat yang dipakai adalah pangkat pada waktu mereka masih hidup.

Perjuangan di Bali setelah Puputan Marga. Peristiwa Marga yang meninggalkan banyak korban di pihak kita, mendorong para pejuang yang masih hidup untuk melanjutkan perjuangan di Bali. Berdasarkan hasil rapat di desa Buahan (Tabanan) dibentuklah susunan pucuk pimpinan MBODPRI. yang baru.[28]

Pimpinan Umum	:	Wija Kusuma.
Wakil pimpinan	:	Kapten Mataram.
	:	Kapten Wijana.
Inteligent service	:	Mantik
		Sanu Bary (Poleng).
		Nurai.
		Cok Agung.
		Puger.
		Pak Ukir.
		Pak Mangku.
Penerangan	:	I Gusti Ngurah Anom.
		Alit.
Sekretariat	:	Sujana.
		Gusti Lanang Rai.
Urusan makanan	:	Gusti Putra.
Kepala Gabungan I	:	Kapten Mataram.
Kepala Gabungan II	:	Kapten Gelobes.
Kepala Gabungan III	:	Letnan Satu Suwija.
Kepala Gabungan IV	:	Kapten Mudita.
Kepala Gabungan V	:	Wija.
Kepala Gabungan VI	:	Made Gde.
Kepala Gabungan VII	:	Gusti Ngurah Jendra.
Penghubung	:	Kapten Subroto AM.

Karena banyaknya pucuk pimpinan perjuangan dan pemuda-pemuda pejuang yang gugur di pulau Bali, maka perjuangan dilanjutkan dengan cara militer pasif dan politik aktif. Politik aktif dengan cara mempengaruhi para pejabat supaya membantu perjuangan, di samping itu tetap membina desa-desa sehingga jangan sampai membantu Nica/Belanda. Usaha lain yang dilaksanakan ialah dengan jalan mengadakan hubungan dengan pemerintah

Pusat R.I. di Yogyakarta, dengan cara mengirimkan utusan untuk meminta bantuan senjata dan perlengakapan-perlengkapan lainnya.[30]

Dengan adanya pengakuan kedaulatan R.I. oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka diadakan seruan terhadap pemuda pejuang pada tanggal 15 Januari 1950, yang lanjut pada tanggal 1 Agustus 1950 diterima sebagai tentara dan dilatih di Singaraja dengan nama Depo Arjuna.[31]

Ternyata selama revolusi phisik, seluruh pemuda pejuang yang gugur adalah sebanyak 1371 orang,[32] dan untuk menghormati jasa-jasa pahlawan ini di Marga didirikan sebuah tugu peringatan yang bernama Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa. Demikian pula di kota Tabanan dibuat sebuah makam pahlawan yang bernama Taman Makam Pahlawan Pancaka Tirta.

8.1.3. **Sesudah pengakuan kedaulatan.**

Dengan adanya pengakuan kedaulatan R.I. oleh Pemerintah Belanda, maka terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (R.I.S.). Para pemimpin di Bali yang berjiwa proklamasi menuntut supaya diadakan perubahan struktur pemerintahan di Bali agar lebih demokratis. Dengan adanya tuntutan tersebut Paruman Agung bersidang pada tanggal 8 Juni 1950 dan menetapkan Peraturan Darurat Daerah Bali (Peraturan No.1/Darurat), untuk mengadakan Badan Pelaksana yang bersifat sementara mendahului peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RIS. Tindak lanjut dari peraturan ini maka dibentuklah Badan Pelaksana Sementara Daerah Bali yang terdiri dari lima orang, yaitu Ketua Dewan Raja raja sebagai Ketua dan empat orang anggota lainnya. Belum berapa lama Badan Pelaksana ini dapat menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan pemerintahan di Bali, maka oleh Pemerintah NIT dikeluarkan Undang-undang No.44 tahun 1950, mengenai perubahan susunan/struktur ketatanegaraan di NIT.[33]

Untuk menyesuaikan struktur pemerintahan di Bali sesuai dengan Undang-undang No.44 tahun 1950, maka dengan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Bali tanggal 20 September 1950 No.7/Darurat, Paruman Agung pada tanggal 25 September 1950 dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali yang masih bersifat sementara. Setelah DPRDS Bali terbentuk, lanjut diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali dan

terpilih Anak Agung Bagus Suteja sebagai Kepala Daerah Bali. Di masing-masing Swapraja di Bali dibentuk pula DPRDS–DPRDS dan Dewan Pemerintah. Struktur Pemerintahan Daerah Bali yang demikian ini berjalan sampai terbentuknya Daerah Tingkat I Bali.[34]

8.1.4. Terbentuknya Pemerintahan Daerah Tingkat I Bali.

Setelah Pemilihan Umum pertama di Indonesia tahun 1955, terjadilah perubahan ketatanegaraan di Pusat. Di samping itu terjadi pula pertentangan di antara Partai-partai politik yang juga berpengaruh terhadap situasi di daerah-daerah. Banyak timbul ketidakpuasan di dalam masyarakat. Dalam situasi yang begini lahir Undang-undang No.1 tahun 1957, yaitu Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah R.I. Dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957, Undang-undang No.44 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Pemerintah NIT dicabut. Undang-undang ini mengatur antara lain tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I. Pada tanggal 11 Agustus 1958 oleh Presiden R.I. disyahkan Undang-undang No.64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa-Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Jadi secara formal/resmi Daerah Tingkat I Bali lahir pada tanggal 14 Agustus 1958 dengan ibu kota Singaraja, yang selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Juni 1960 No.52/2/36–136 yang atas dasar resolusi DPRD Tingkat II Bali kedudukan ibu kota Singaraja dipindahkan ke Denpasar.[35]

Setelah terbentuknya Daerah Tingkat I Bali, dan menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah yang definitif, maka segala tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dijalankan oleh seorang petugas yang diangkat/ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama ialah I Gusti Bagus Oka, yang dilantik pada tanggal 1 Desember 1958. Sebagai lazimnya berlaku maka DPRD Bali bentuk lama masih terus menjalankan tugasnya sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang sesuai dengan Undang-undang No.64 tahun 1958.[36]

8.2. **Penyelenggaraan hidup.**

8.2.1. **Kehidupan sosial ekonomi pada zaman Revolusi Fisik.**

Setelah Jepang mengalami keruntuhan pada tahun 1945, keadaan ekonomi secara umum di Indonesia maupun di Bali mengalami kekalutan. Akibat pemerasan yang dilakukan oleh Jepang (semua produksi untuk konsumsi balatentara Jepang) rakyat menderita sekali.[37]

Dengan kedatangan Nica kembali ke Bali pada tanggal 2 Maret 1946, suasana menjadi tidak aman, karena di mana-mana terjadi pertempuran antara pihak pemuda melawan pihak Nica, yang satu sama lain ingin saling menghancurkan dan merebut hati rakyat.[38]

Secara umum dapat digambarkan bahwa perekonomian rakyat Bali selama Revolusi Fisik, sepenuhnya berdasarkan hasil pertanian dan sebagian besar dari hasil ini untuk konsumsi. Usaha pertanian 100% di tangan rakyat, akan tetapi mengenai distribusi/perdagangan, sebagian besar di tangan pengusaha-pengusaha asing, yang mempunyai modal, skill, organisasi, pengalaman yang lebih banyak.[39]

Keadaan yang pincang ini, mendorong para pengusaha swasta Nasional untuk menggabungkan diri dalam bentuk usaha-usaha gabungan maupun N.V., sehingga bisa memupuk modal yang lebih besar, adanya kemampuan untuk bersaing, demikian pula adanya organisasi yang lebih mantap. Akhirnya berturut-turut lahirnya : Perserikatan Dagang Indonesia (PERDI tahun 1947), yang kemudian pada tahun 1955 dilebur menjadi Dewan Ekonomi Indonesia (D.E.I.), NV. Gabungan Export Hewan Indonesia (GEHI Trading Coy tahun 1948), NV. Gabungan Import Export Bali (GIEB tahun 1948), N.V. Perserikatan Tenun Indonesia (PERTI tahun 1949).[40]

Hasil pertanian rakyat terutama adalah : padi, tanaman perdagangan (kopi, kopra), dan peternakan rakyat sebagai pekerjaan sambilan adalah : sapi, kerbau dan babi.

Di bawah ini kami cantumkan mengenai angka-angka hasil pulau Bali yang diperdagangkan ke luar daerah Bali sebagai berikut :

Tahun	Jenis barang	Jumlahnya	Keterangan
1947	Kopi	6482 ton	Robusta/Arabica.
1948	Kopi	6837 ton	—„—
1949	Kopi	6315 ton	—„—
1947	Kopra	6811 ton	Banyuwangi, Surabaya
1948	Kopra	15578 ton	—„—
1949	Kopra	14110 ton	—„—
1947	Tembakau	169 ton	Semarang
1948	Tembakau	348 ton	—„—
1949	Tembakau	154,7ton	—„—
1947	Sapi	7866 ekor	Indonesia
1948	Sapi	13923 ekor	Indonesia
1949	Sapi	9377 ekor	Indonesia
1948	Sapi	549 ekor	Export ke Singapore
1949	Sapi	3754 ekor	—„—
1947	Babi	236889 ekor	Indonesia
1948	Babi	79605 ekor	—„—
1949	Babi	104628 ekor	—„—
1948	Babi	2704 ekor	Export ke Singapore
1949	Babi	1523 ekor	—„—

Sapi biasanya diangkut ke Palembang, Bangka, Belitung, dan babi untuk Surabaya dan Jakarta.[41]

8.2.2 **Kehidupan sosial ekonomi pada masa sesudah pengakuan kedaulatan.**

Setelah pengakuan kedaulatan R.I. oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, di Bali terjadi proses demokratisasi dalam struktur pemerintahan, dengan terbentuknya DPRDS Bali dan dipilihnya Kepala Daerah Bali yang definitif. Pemerintahan dapat berjalan dengan baik, keadaan aman, tetapi Pemerintah belum banyak dapat melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam bidang sosial ekonomi. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah ialah menumbuhkan usaha-usaha swasta nasional, di mana sebelumnya sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas bahwa sektor perdagangan sepenuhnya berada di tangan pengusaha-pengusaha asing. Dalam rangka menumbuhkan usaha swasta ini, Pemerintah memberikan bantuan/fasilitas sepenuhnya seperti : ijin, permodalan, bimbingan dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Pemerintah dan pengusaha swasta

sangat baik dan erat, yang mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.[42]

Perusahaan-perusahaan yang berdiri setelah pengakuan kedaulatan ialah : Pusat Penjualan Gula Indonesia (1950), N.V. Bank Perniagaan Umum (1952), N.V. Bali VEEM (1955) dan N.V. Ikatan Eksportir Babi Indonesia (1958). Tahun 1954 kedudukan pengusaha-pengusaha swasta dan asing sudah sejajar/seimbang.[43]

Oleh Pemerintah telah disadari sepenuhnya bahwa untuk mengembangkan industri berat tidak mungkin, karena tidak ada bahan-bahan mineral seperti minyak bumi dan bijih besi. Yang mungkin dikembangkan ialah industri pariwisata dan untuk inilah kemudian didirikan Balitour.[44] Sumber pendapatan Daerah Bali pada waktu ini adalah Ipeda. Jadi keadaan kas Pemerintah Daerah sangat minim sekali.[45]

Untuk membantu para pelajar yang bersekolah di Jawa oleh Pemerintah Daerah Bali didirikan asrama-asrama pelajar di Kota-kota : Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, sehingga memungkinkan bagi para pelajar untuk melanjutkan studinya, dan sekaligus pula meringankan beban orang tuanya.[46]

Barang-barang yang dikirim ke luar daerah Bali tidak mengalami perubahan sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas seperti : kopi, sapi, babi, kopra, tembakau. Barang-barang yang didatangkan dari luar Bali ialah hampir semua kebutuhan setiap hari kecuali bahan makanan sehari-hari seperti : pakaian, minyak tanah, oto, prabot rumah tangga, sepeda motor, sepeda, alat tulis menulis dan sebagainya.[47]

8.2.3. Kehidupan sosial ekonomi sesudah terbentuknya Daerah Tingkat I Bali.

Luas pulau Bali 5606 km^2, terdiri dari : persawahan 23%, tegalan 30,5%, perkebunan 12,5%, hutan 26%, tanah gundul 5% dan daerah bencana 3%.[48]

Berdasarkan sensus tahun 1971 jumlah penduduk Bali 2.120.091 orang. Dari jumlah tersebut 86% merupakan penduduk rural/desa, sedangkan 14% penduduk urban/kota. Kepadatan penduduk rata-rata per km^2 378 jiwa. Untuk mengatasi penduduk yang terlalu padat oleh Pemerintah Daerah Bali diadakan usaha-usaha transmigrasi, pembinaan dan pengembangan industri rumah tangga, kerajinan rakyat dan industri lainnya.[49]

Keadaan alam yang agraris mengakibatkan sebagian besar penduduk hidup dari pertanian, perkebunan, peternakan. Dalam

usaha untuk lebih meningkatkan hasil pertanian, mulai tahun 1969 dilaksanakan Bimas dan Inmas berupa bantuan/pinjaman oleh Pemerintah kepada para petani berupa kredit ringan, pupuk dan bibit unggul.[50]

Bidang perkebunan makin memegang peranan penting, dengan adanya kemajuan industri pariwisata seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jenis tanaman industri yang penting di Bali ialah : kelapa, kopi, kapuk, cengkeh, lada, coklat, panili, kapas, tembakau dan hasil buah-buahan yang penting ialah : salak, leci, anggur, jeruk, mangga dan pisang.[51]

Sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan di atas, bahwa industri yang mungkin dikembangkan di Bali ialah industri pariwisata, karena Bali mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang ini seperti : keindahan alam, keramah-tamahan penduduk, dan seni budayanya. Kepariwisataan yang akan dikembangkan adalah "Pariwisata Budaya" dalam arti bahwa aspek-aspek kepariwisataan yang disajikan untuk parawisatawan yang datang ke Bali adalah kebudayaan Bali, yang bersumber kepada Agama Hindu. Dengan majunya industri pariwisata mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan kerajinan rakyat seperti ukir-ukiran patung, peternakan ayam, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya.[52]

Ekspor dari Bali untuk masa ini juga tetap terbatas seperti apa yang telah kami kemukakan di atas. Pelabuhan ekspor yang penting di Bali adalah Buleleng dan Benoa, sedangkan pelabuhan yang lain yang penting dalam arti perdagangan antar pulau ialah : Gilimanuk dan Padangbai.[53]

Mengenai masalah perlistrikan, di semua kota di Bali sudah ada listrik, yang diusahakan oleh P.L.N. (Perusahaan Listrik Negara). Penggunaan listrik sebagian besar untuk penerangan (75%), 20% untuk perdagangan, 7% untuk industri.[54]

8.3. Kehidupan pendidikan dan seni budaya.

8.3.1. Perkembangan pendidikan.

Sebelum Jepang berkuasa di Bali, sekolah-sekolah dasar yang ada di Bali ialah Sekolah Dasar Kelas Satu yang kemudian namanya diubah menjadi H.I.S. (Hollandsche Inlandsche School) dengan lama belajar tujuh tahun, Sekolah Dasar Kelas Dua dengan lama belajar lima tahun, dan Sekolah Desa dengan lama belajar tiga tahun. Sekolah-sekolah Dasar Kelas Satu (H.I.S.) hanya ada di kota-kota besar di Bali seperti Denpasar dan Singaraja, sedangkan di Klungkung hanya ada H.I.S. swasta. Bedanya H.I.S. dan Sekolah

Dasar Kelas Dua ialah di H.I.S. diajarkan bahasa Belanda sedangkan di Sekolah Dasar tidak diajarkan bahasa Belanda.[55]

Dengan adanya perkembangan kebangsaan, maka lahirlah Sekolah-sekolah : Pertiwi Putra School di Tabanan, Taman Siswa di Denpasar dan Sisia Pura School di Singaraja.[56]

Untuk mendapatkan tenaga-tenaga pengajar, maka murid-murid tamatan Sekolah Dasar Kelas Dua (kelas 5) dilatih selama enam bulan (namanya guru magang), yang kemudian setelah tamat diangkat menjadi guru Sekolah Dasar. Dalam rangka meningkatkan mutu guru-guru oleh Pemerintah Hindia Belanda di Bali didirikan sekolah Guru OVO (1927) dan diambil dari anak-anak tamatan H.I.S. dan Kelas lima, lamanya belajar dua tahun. Pada tahun 1920 di Singaraja didirikan sekolah untuk guru-guru Sekolah Dasar Kelas Dua. Sekolah Guru ini kemudian dibubarkan dan dijadikan **Normaal School (N.S.)** dan tempatnya di Makasar dan Jawa. Di samping itu oleh Pemerintah Hindia Belanda, khusus bagi para pemuda yang ingin menjadi guru dikirim ke Jember (tahun 1929), sedangkan bagi para wanita dikirim ke Blitar (tahun 1931), di mana setelah mereka-mereka itu tamat ditempatkan kembali di Bali dan mengajar di sekolah Dasar Kelas Dua.[57]

Dengan kedatangan Jepang di Bali pada tahun 1942, semua sekolah-sekolah yang telah ada dijadikan Sekolah Rakyat dan lamanya belajar enam tahun. Di Denpasar dan Singaraja didirikan Sekolah **Chu Gakko** (S.M.P. yang sekarang), demikian pula **Sihang Gakko (Normaal School)** di Singaraja. Untuk mengawasi Sekolah-sekolah Rakyat ini di tiap kabupaten diangkat Penilik Sekolah yang namanya Pemimpin Pengajaran, sedangkan waktu Nica datang kembali ke Bali, Penilik Sekolah kembali diciutkan menjadi tiga yaitu untuk Denpasar, Klungkung dan Singaraja.[58]

Setelah pengakuan kedaulatan, keinginan para orang tua murid sangat besar sekali untuk menyekolahkan putra-putrinya. Kalau pada masa penjajahan Belanda sekolah cari murid, tetapi setelah kemerdekaan terjadi sebaliknya yaitu murid cari sekolah. Karena Pemerintah Daerah Bali tidak cukup memiliki dana/kemampuan keuangan yang sangat terbatas untuk mendirikan sekolah-sekolah, sesuai dengan animo masyarakat, maka masyarakat sendiri mengambil inisiatif untuk mendirikan gedung-gedung Sekolah Dasar, di mana hampir di tiap desa di Bali ada Sekolah Dasar, sedangkan Pemerintah sekedar memberikan bantuan sebagai perangsang saja.[59]

Tahun 1957 Pemerintah Daerah Bali bermaksud mengadakan kewajiban belajar, tetapi ide ini belum bisa dilaksanakan karena terbentur kepada masalah biaya/anggaran untuk membuat gedung-

gedung sekolah dan mengangkat tenaga-tenaga pengajar.[60]

Perkembangan pendidikan di Bali selanjutnya sangat pesat, baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena animo dari masyarakat yang sangat besar untuk menyekolahkan putra-putrinya, sejalan dengan **policy** Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan U.U.D. 45. Sesuai dengan statistik yang ada di Kantor Wilayah Departemen P.K. Propinsi Bali pada Bidang Pendidikan Dasar dan Guru, Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Bidang Pendidikan Kejuruan, sekolah-sekolah yang ada di Bali sampai dengan bulan Juli 1976 adalah sebagai berikut : S.D. Negeri 1566 buah, S.D. Swasta 51 buah, S.D. Center 42 buah, S.M.P. Negeri 35 buah, S.M.P. subsidi 5 buah, S.M.P. Berbantuan 6 buah, S.M.P. Swasta 110 buah, S.M.A. Negeri 12 buah, S.M.A. Subsidi 1 buah, S.M.A. Berbantuan 2 buah, S.M.A. Swasta 11 buah, S.M.E.P. Negeri 8 buah, S.M.E.P. Swasta 9 buah, S.M.E.A. Negeri 7 buah, S.M.E.A. berbantuan 3 buah, S.M.E.A. Swasta 11 buah, Sekolah Menengah Kejuruan lainnya yang ada ialah : SSRI., KOKAR., SPSA Swasta, SKKA Negeri 2 buah, SKKA Swasta 1 buah, SMTK 1 buah, SKKP Negeri 3 buah, SKKP Swasta 2 buah, ST Negeri 4 buah, ST Swasta 3 buah, STM Negeri 1 buah, STM Swasta 8 buah.

Perguruan Tinggi Negéri pertama yang ada di Bali ialah : Fakultas Sastra Cabang Universitas Airlangga, yang didirikan pada tahun 1958 dengan dua jurusannya yakni Jurusan Ilmu Purbakala dan Sejarah Kebudayaan dan Jurusan Sastra Indonesia. Pada tahun 1962 berdiri Universitas Udayana dengan empat Fakultas yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan dan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.). Semua Fakultas-fakultas tersebut berkedudukan di Denpasar kecuali F.K.I.P. di Singaraja. Di dalam perkembangan selanjutnya Unud membuka lima buah Fakultas lagi yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian. Sedangkan F.K.I.P. yang kembali berintegrasi dengan Unud tahun 1968, setelah tahun 1963 menjadi Cabang IKIP Malang, dijadikan dua Fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Seluruhnya Unud mempunyai sembilan Fakultas dengan perincian tujuh di Denpasar dan dua di Singaraja.[61] Di samping Perguruan Tinggi Negeri, di Denpasar ada pula Perguruan Tinggi Swasta di antaranya ialah : Universitas Marhaen, Akademi Perhotelan Dan Pariwisata Denpasar, Akademi Perhotelan Bali, Akademi Bahasa Asing Saraswati, Akademi Bank (AKABA) dan Universitas Bali Dwipa.

8.3.4. **Perkembangan seni budaya.**

Seni Budaya Bali meliputi: seni rupa/gerak, seni bangunan / arsitektur, seni sastra, dan seni kerajinan. Yang termasuk seni rupa/ gerak ialah seni lukis, seni pahat/ukir, seni patung, seni tari, seni tabuh. Seni kerajinan meliputi : anyam-anyaman, tenun-tenunan, keramik, emas dan perak.[62]

Seni budaya Bali adalah merupakan bagian yang sangat penting dari hidup keagamaan (Agama Hindu) di Bali. Segala upacara agama seperti Panca Yadnya di Bali menggunakan unsur-unsur seni seperti seni tabuh, seni tari, seni rupa, seni hias, seni sastra, sebagai seni sakral.[63]

Fungsi seni di Bali ada tiga bagian yaitu pertama berfungsi sebagai Seni Wali (Seni Sakral) yang merupakan bagian dari upacara keagamaan, kedua berfungsi sebagai Seni Bebali, seni penunjang dari upacara keagamaan dan ketiga sebagai Seni Balih–Balihan, seni provan atau sekuler yang tak ada sangkut pautnya dengan upacara keagamaan.[64]

Seni Tari Wali adalah seni tari yang dilakukan di Pura-pura dan di tempat-tempat yang ada hubungannya dengan upacara agama, dan yang dapat digolongkan Seni Tari Wali ialah Tari Rejang, Rejang Renteng, Rejang Bengkol, Rejang Oyod padi, Rejang Alus, Tari Sanghiang, Tari Pendet, Tari Baris Upacara. Perkembangan Tari Wali sudah berabad-abad dan selalu menjadi pelaksana upacara, di Pura-pura. Usaha pembinaannya sekarang dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma bersama Kantor Wilayah Depertemen Agama Propinsi Bali.[65]

Tari Bebali digolongkan tari yang sering digunakan sebagai penunjang upacara di Pura atau di lain tempat yang ada hubungannya dengan upacara-upacara agama. Yang termasuk Tari Bebali ialah Barong Calonarang, Gambuh, Parwa, Wayang Wong, Upak, Arja, Basur, Topeng Sidakarya, Topeng Pajegan, Wayang kulit, Wayang Parwa, Wayang Ramayana, Wayang Gambuh, Wayang Calonarang, Wayang Cupak, Wayang Sudamala.[66]

Yang termasuk Tari Balih-Balihan ialah Kecak, Janger, Tari Kebyar.[67]

Mengenai Seni Rupa pada mulanya masih bersifat komunal untuk Pura dan Puri, yang bentuknya masih tradisional berupa hiasan-hiasan patra dan bentuk wayang klasik dengan ceritra Mahabharata, Ramayana, dan ceritra malat. Dengan datangnya Walter Spies dan Rudolf Bonnet yang menetap di Ubud (Gianyar), Seni Rupa mengalami perubahan Styl. Seni Rupa pada mulanya mengikuti styl Kamasan (Klungkung), tetapi dengan adanya pengaruh Walter Spies dan Bonnet para pelukis muda mulai mengenal teknik

dan isi baru dalam lukisan dan cara membuat lukisan yang kemudian diberi bingkai.[68]

Mengenai Seni Patung juga mengalami perubahan mulai dengan I Tegelan dari Belaluan (Denpasar) yang kena pengaruh Covarubias, di mana patung yang dibuat sesuai dengan lukisan-lukisan Covarubias yang mencantumkan bentuk manusia panjang.[69]

Arsitektur tradisional Bali juga bersumber kepada Agama Hindu, yang meliputi pembuatan bangunan suci, bangunan perumahan dan bangunan umum (Balai Banjar dan Wantilan). Tokoh arsitektur tradisional Bali ialah Mpu Kuturan dan Dang Hyang Nirarta (abad ke 11) terutama dalam hal pembuatan bangunan suci. Dengan masuknya Belanda ke Bali, membawa serta arsitektur Nederland seperti bangunan gedung, BPM. KPM, dan Kantor-kantor. Majunya industri pariwisata di Bali membawa pengaruh pula dalam bidang arsitektur. Bangunan tipe kantor tampak makin sempurna. Supaya touris-tuouris merasa senang, di sana-sini pada bangunan diisi hiasan/relief-relief pada dinding.[70]

Dalam usaha membina perkembangan kesusastraan Bali telah pula diusahakan mendirikan tempat-tempat koleksi yang lebih banyak seperti Museum Bali, Lembaga Bahasa Nasional, Fakultas Sastra Unud. Juga didirikan perguruan yang bercorak keagamaan seperti SMP Dwijendra, PGA dan Institut Hindu Dharma. Di samping itu juga sering diadakan seminar-seminar dan sayembara sastra.

8.4. Alam pikiran dan kepercayaan.

8.4.1. Perkembangan agama.

Menurut sensus tahun 1971 penduduk pulau Bali berjumlah 2.117475 jiwa. Dari jumlah itu 93% beragama Hindu, 0,2% beragama Budha, 0,2% beragama Kong Fu Tsu, 5,5% beragama Islam, 0,6% beragama Kristen Protestan dan 0,5% beragama Katolik.[72]

Secara historis agama Hindu di Bali adalah merupakan sinkretisme dari pada kepercayaan Indonesia (Bali) asli sebagai dasarnya dengan kepercayaan Hindu yang masuk di daerah ini. Dari semua kepercayaan dan konsepsi keagamaan itu luluh menjadi satu dan berkembang secara flexible sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan.[73]

Sebelum perang dunia kedua, yaitu pada tahun 1938 oleh Pemerintah Hindia Belanda, pulau Bali dibagi atas delapan kerajaan (Landschap), berdasarkan atas Korte Verklaring (Perjanjian Pendek) atau yang lebih dikenal dengan nama Zelfbertuurregelen 1938 atau Aturan Pemerintah Kerajaan 1938.[74] Di dalam Aturan Peme-

rintah Kerajaan itu telah ditentukan tugas dan kewajiban masing-masing kerajaan secara lengkap. Di antaranya ialah bahwa Raja (Zelfbestuurder) di samping sebagai Kepala Pemerintahan juga sebagai Kepala Keagamaan.[75] Dengan demikian jikalau terjadi penodaan terhadap agama, Raja bertindak aktif, demikian pula Pemerintah Kerajaan menyediakan anggaran untuk upacara-upacara yang bersifat keagamaan seperti pecaruan, aci-aci di pura dan sebagainya. Di samping itu untuk tegak kokohnya adat agama, oleh Pemerintah Kerajaan dibuat pengadilan adat dalam dua tingkat yaitu : pertama **Raad Distrik** yang diketuai oleh Punggawa dan kedua **Raad Kerta** yang diketuai oleh Raja, sedangkan sebagai hakimnya adalah Ida Pedanda.[76]

Setelah pengakuan kedaulatan, terjadilah proses demokratisasi di dalam struktur pemerintahan di Bali sesuai dengan Undang-undang NIT No. 44 tahun 1950, di mana di masing-masing Swapraja dibentuk DPRDS–DPRDS. dan Dewan Pemerintah. Kepala Daerah tidak lagi berfungsi sebagai Kepala Keagamaan, tetapi urusan keagamaan diserahkan kepada umatnya masing-masing.[77]

Mengenai pelajaran agama pada mulanya bersumber di Geriageria (tempat kediaman kaum Brahmana) dan cara belajarnya bersifat indifidual. Dengan adanya pengaruh modern dan keinginan untuk memajukan kebudayaan Bali termasuk agamanya, maka diterbitkanlah majalah-majalah seperti Bawa Negara tahun 1928, Suryakanta tahun 1930, Jatayu. Dengan adanya penerbitan ini pengertian dan kesadaran hidup beragama timbul. Mulai jaman Jepang timbul organisasi-organisasi yang berbau Keagamaan seperti: Paruman Para Pendeta yang diketuai oleh Ida Pedanda Made Kemenuh, Panti Agama Hindu Bali yang diketuai oleh Ida Pedanda Nyoman Ngenjung, Satya Hindu Dharma yang diketuai oleh Ananda Kusuma dan Panti Agama Hindu yang diketuai oleh I Ketut Subrata.[78]

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, keluarlah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, dengan Peraturan mana terbentuknya Propinsi Sunda Kecil dengan ibu kota Singaraja.[79]

Pada tahun 1951 di Singaraja dibentuk Kantor Urusan Agama Propinsi Sunda Kecil, di mana Agama Hindu tidak menjadi lapangan tugasnya. Dan di Pusat pun (Departemen Agama) tidak ada bagian Hindu.[80]

Supaya ada yang mengurus/membina kehidupan agama Hindu di Bali, akhirnya pada tahun 1955 oleh Pemerintah Daerah Bali didirikan Dinas Agama Otonom Daerah Bali dan di tiap-tiap Daerah Bagian (kabupaten sekarang) dibentuk Kantor Agama Daerah Ba-

gian. Dinas Agama Otonom Daerah Bali tidak mendapat pengakuan dari Departemen Agama. Atas usul Pemerintah Daerah Bali pada tahun 1956 di Departemen Agama dibentuk bagian Hindu.[81]

Berdasarkan Undang-undang No. 64 tahun 1958, terbentuklah Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 14 Agustus 1958 dengan ibu kota Singaraja dan selanjutnya ibu kota dipindahkan ke Denpasar. Oleh Departemen Agama dengan surat keputusan No. 1 tahun 1962 Kantor Urusan Agama Propinsi Sunda Kecil dan Dinas Agama Otonom Daerah Bali dibubarkan diganti dengan nama Kantor Agama Daerah Tingkat I Bali meliputi semua agama baik agama Hindu, Budha, Islam, Kristen Protestan dan Katolik, dan selanjutnya kini bernama Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali.[82]

Untuk memberikan tuntunan, bimbingan kepada umat Hindu oleh Dinas Agama Otonom Daerah Bali pernah diterbitkan majalah Kalawerta tahun 1956. Tetapi selanjutnya karena tidak ada anggaran, maka pada tahun 1962 majalah Kalawerta tidak terbit lagi.[83]

Di samping Dinas Agama Otonom Daerah Bali, oleh umat Hindu pada tanggal 23 Pebruari 1959 didirikan Parisada Dharma Hindu Bali yang selanjutnya bernama Parisada Hindu Dharma yang bersifat majelis umat yang menganut agama Hindu dengan kedudukan pusatnya di Denpasar. Tugas dan kewajiban Parisada sesuai dengan Pedoman Dasarnya ialah mengatur, memupuk, memperkembangkan dan membina kehidupan umat yang menganut Agama Hindu dalam lapangan keagamaan sesuai dengan sastra-sastranya, meningkatkan pengabdian umat kepada masyarakat dalam bidang spiritual dan mengadakan, memelihara dan mempererat hubungan secara konsultatif dengan setiap orang dan badan-badan yang bergerak berdasarkan agama dalam lapangan kemasyarakatan.[84]

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Parisada ialah menerbitkan buku-buku keagamaan seperti Dharma Prewerti Sastra, Bhagawad Gita, Upadeça, Sarasamuscaya, Dharma Upadeca, Kalender-kalender, majalah bulanan Warta Hindu Dharma. Di samping itu Parisada juga bergerak dalam bidang pendidikan, dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi di antaranya P.G.A.A. Negeri di Denpasar, P.G.A.A. di Singaraja dan Institut Hindu Dharma. Juga dibentuk Yayasan-yayasan untuk mengurus tempat-tempat suci yaitu Yayasan Jagatnatha untuk membangun dan membina Pura Jaganatha dan Yayasan Prawartaka yang membina Pura Besakih.[85]

Di samping Parisada ada pula lembaga-lembaga keagamaan lainnya seperti Majelis Ulama Islam yang didirikan tahun 1974,[86]

dan untuk umat Kristen Protestan ada tiga belas lembaga yang berbentuk Gereja dan Yayasan Kristen.[87]

Sekolah-sekolah agama yang ada di Bali ialah Kursus Latihan Penginjil bertempat di Gianyar dan didirikan tahun 1974, Seminari Menengah (Tingkat S.M.P.) di Tuka/Badung, Madrasah tingkat S.D. 36 buah (swasta), Madrasah tingkat S.M.P. dua buah (swasta), P.G.A. Islam empat tahun satu buah (Negeri), P.G.A. Islam enam tahun 1 buah (swasta), Madrasah Diniyah dua buah (swasta), Pondok Pesantren sembilan buah.[88]

Guru-guru tetap/negeri, swasta, GTT dan honorer yang ada di Bali ialah : Guru Agama Hindu tetap/negeri 32 orang,[89] Guru Agama Islam tetap/negeri 44 orang,[90] Guru Agama Katolik (honorer 43 orang),[91] Guru Agama Kristen Protestan (GTT dan Honorer) 14 orang.[92]

8.4.2. **Kehidupan intelektual.**

Dengan memperhatikan perkembangan jumlah sekolah-sekolah yang ada di Bali, baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi, sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan di atas dalam perkembangan pendidikan di Bali, dan dengan memperhatikan mahasiswa yang mendaftar di Universitas Udayana dari tahun 1969–1976 sebagai tabel terlampir,[93] maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa kehidupan intelektual di Bali menunjukkan trend/kecenderungan yang meningkat dan bertambah subur. Hal ini menurut pendapat kami disebabkan karena adanya keinginan dan kesadaran yang makin meningkat di kalangan anggota masyarakat akan arti penting pendidikan, kemampuan ekonomi yang makin meningkat, dan juga karena Policy Pemerintah untuk secepatnya mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Tabel : 1.

UNIVERSITAS UDAYANA
DATA MENGENAI MAHASISWA YANG MENDAFTAR

No.	Nama Fakultas	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976 x)
1.	Fak. Sastra	276	185	140	142	178	182	259	279
2.	Kedokteran	260	302	136	364	485	484	483	516
3.	F.K.H.P.	137	144	166	164	174	190	186	185
4.	F.H. & P.M.	294	264	220	222	270	335	464	637
5.	Teknik	277	219	239	344	245	281	297	407
6.	Ekonomi	255	244	235	210	345	403	504	621
7.	Pertanian	77	73	83	98	118	145	168	185
8.	Keguruan	226	218	213	142	122	184	644	855
9.	Ilmu Pendidikan	94	106	126	148	153	130	156	218
	Total :	1999	1896	1936	2021	2225	2548	3161	3921

Catatan: x) Angka-angka pada tanggal 1 Agustus 1976

8.5. **Hubungan ke luar.**

8.5.1. **Bidang Agama.**

Hubungan ke luar dalam bidang agama dilaksanakan di dalam rangka pengiriman rombongan jemaah haji ke Mekah. Sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Departemen Agama kepada Departemen Dalam Negeri, akhirnya untuk Daerah Tingkat I Bali dibentuk Staf Urusan Haji Daerah Tingkat I Bali, demikian pula di seluruh Tingkat II di Bali. Sebagai Koordinator Staf Urusan Haji Daerah Tingkat I Bali adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan dibantu beberapa orang tenaga Staf.[94]

Mengenai biaya naik haji sampai dengan tahun 1968 (dengan adanya sitem quotum), sebagian ditanggung oleh Pemerintah, tetapi untuk selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggungan para jemaah haji. Perjalanan naik haji sampai dengan tahun 1971/1972 dilaksanakan melalui jalan laut selama empat puluh hari pulang pergi, dan di Mekah selama satu bulan. Mulai tahun 1972/1973

di samping jalan laut juga dengan jalan udara Rp. 890.000,– dan melalui laut Rp. 925.000,–. Dari catatan yang ada di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali (Staf Urusan Haji), jumlah jemaah haji dari tahun 1963/1964 sampai dengan 1976/1977 adalah 333 orang.[95]

8.5.2. **Bidang seni budaya.**

Dalam usaha membina dan mengembangkan kebudayaan Bali, Pemerintah Daerah Bali pada tahun 1966 membentuk Listibya (Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan) Propinsi Bali dengan cabang-cabangnya di seluruh Bali.[96]

Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Listibya Propinsi Bali ialah menyusun Pola-pola Dasar Pembinaan Kebudayaan Bali yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Bali, Sayembara Sastra Daerah tahun 1971/1972, **Workshop** Gambuh tahun 1973/1974, menyeponsori terbentuknya Yayasan Pewayangan Daerah Bali, memberikan Patram Budaya kepada sekehe-sekehe kesenian dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kesenian Bali. Pada tahun 1966 dalam rangka membina seni rupa dan seni tari maka didirikanlah Sekolah Seni Rupa Indonesia (SESRI) dan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI), yang kemudian berturut-turut pada tahun 1968 dan tahun 1969 dinegerikan.[97]

Di samping itu Listibya juga bertugas memberikan penilaian untuk rekomendasi bagi mereka/sekehe-sekehe kesenian yang akan ke luar negeri. Misi kesenian Bali yang telah pernah melawat ke luar negeri ialah : untuk tahun 1973 sampai dengan tahun 1975 sebanyak sepuluh kali dengan tujuan negara-negara Eropah Barat, Hongkong, Malaysia, Australia, Manila, Jepang dan negara-negara Asean.[98]

8.5.3. **Bidang ekonomi sosial.**

Macam-macam barang yang diekspor dari Bali ialah : kopi, hewan (sapi, kerbau) dan hasil kerajinan tangan. Dari ke tiga macam barang itu yang menduduki tempat pertama ialah kopi, kedua hewan dan ketiga kerajinan tangan. Arah ekspor dari barang-barang tersebut di atas adalah ke negara-negara : Amerika Serikat, Hongkong, Singapura, Eropah, Jepang, Australia dan lain-lainnya.[99]

Pelabuhan ekspor Bali adalah Buleleng dan Benoa.

Realisasi volume ekspor Bali untuk tahun 1969 adalah $ 1.766.100, tahun 1970 sebesar $ 3.946.600, tahun 1971 $ 2.876.900.[100]

8.5.4. **Bidang Pendidikan.**

Hubungan dengan dunia luar dalam bidang pendidikan di-

adakan oleh Universitas Udayana Denpasar di dalam rangka **upgrading** Dosen-dosen Unud di Luar Negeri. Demikian pula Unud mengadakan affiliasi dengan beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Luar Negeri di antaranya ialah : dengan **Australia Asia Universities Cooperation**, **University of Hawai, Katholieke Universiteit Nijmegen** Negeri Belanda.[101]

Di samping hubungan dengan Luar Negeri, Unud telah banyak pula mendapat kunjungan dari Luar Negeri di antaranya pada tahun 1972 kunjungan Duta Besar Australia, Dr. Mc. Coy dari **The China Medicine Board** dan President Cleveland dari **University of Hawaii.**[102]

Jumlah dosen yang pernah mendapat latihan di Luar Negeri sampai akhir Maret 1975 ialah sebanyak 31 orang. Negara-negara tempat mereka dilatih/studi di antaranya ialah : Australia, Jepang, Amerika Serikat/Hawaii, Jerman Barat, Austria, Belanda.[103]

8.5.5. **Bidang komunikasi.**

Hubungan dunia luar dilaksanakan dengan kapal laut, kapal udara,dan telekomunikasi. Umumnya kapal-kapal yang datang dari Luar Negeri berlabuh di Padangbai dan Benoa. Pelabuhan Padangbai adalah pelabuhan alam, terletak di bagian timur pulau Bali dan hanya mampu menerima kapal yang mempunyai tenaga maximum 170 ton, sedangkan pelabuhan Benoa adalah pelabuhan buatan, terletak di sebelah selatan kota Denpasar dengan status pelabuhan samudra dan hanya mampu menerima kapal dengan berat maximum 3.500 Dwt.[104]

Perhubungan melalui udara ialah liwat **International Airport** Ngurah Rai, satu-satunya pelabuhan udara yang ada di Bali yang bertaraf internasional. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Bali melalui **Airport** Ngurah Rai.[105]

Perusahaan/maskapai penerbangan yang mengadakan hubungan/penerbangan ke Bali ialah : **P.N. Garuda Indonesian Airways, Pan Amerika Airways, Thai International, Cathay Pasific Airways, Quantas, Malaysia Singapore Airlines.**[106]

Dengan makin majunya industri pariwisata di Bali, maka jaringan telekomunikasi makin disempurnakan dengan **microwave.**[107]

CATATAN

1. Nyoman S. Pendit: **Bali Berjuang, Cetakan Pertama (Denpasar**: Yayasan Kebaktian Pejuang Daerah Bali, 20 Nopember 1954) p.40.
2. Hasil wawancara kami pada tanggal 15 Oktober 1976 dengan: Dokter M. Muhamad Angsar Kartakusuma, Umur: 67 tahun, Jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan bekas Dokter Pemerintah.
3. Nyoman S. Pendit, **op.cit.** pp. 50–52.
4. **Ibid.** p.93.
5. Soekarmen: **Pidato Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Pada Hari Jadi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 14 Agustus 1975.** p.2.
6. **Ibid.** pp.2–3.
7. **Ibid.**
8. **Ibid.** pp. 5–6.
9. Nyoman S. Pendit, **op.cit.** p.41.
10. Seri Kronologis **Sejarah TNI Nusa Tenggara Semenjak Th. 1945–1960**, Naskah koleksi Serdam XVI Udayana Denpasar: pp.23–24.
11. Nyoman S. Pendit, **op.cit.** p.61.
12. **Ibid.** p.73.
13. **Ibid.** p.91.
14. **Ibid.** p.97.
15. Kapten I Gusti Ngurah Pindha B.A.: **Pertempuran Besar Tanah** Aron (Denpasar: Yayasan Universitas Marhaen, 1964) p.13.
16. Kapten I Gusti Ngurah Pindha: **Gempilan Perjuangan Fisik di Bali; Tidurlah–Tidur anakku,** Djilid III (naskah ketikan), p.15.
17. **Serie** kronologis, **op.cit.**, p.7.
18. Kapten I Gusti Ngurah Pindha BA; **Gempilan Perjuangan Fisik di Bali; Men Bolong Memanggil;** jilid II, (naskah ketikan), p.29.
19. Nyoman S. Pendit, **op.cit.**, pp. 99–107.
20. Ibid, p.111.
21. MDVLVRI. Nusa Tenggara, **Sedjarah Singkat Almarhum Maha Putra Kolonel I Gusti Ngurah Rai;** koleksi MDVLVRI, Nusa Tenggara, Denpasar, 20 Juni 1962, p.4.
22. **Kapten** I Gusti Ngurah Pindha BA; **Tidurlah-tidur; op.cit.,** p.28.

23. Ibid, pp. 45–49.
24. Kapten I Gusti Ngurah Pindha BA; **Pertempuran; op.cit.**, pp. 4–10.
25. Ibid, p.13.
26. Kapten I Gusti Ngurah Pindha BA; **Gempilan; op.cit.**, p.61.
27. Berdasarkan monumen di Taman Pahlawan Margarana.
28. Seri kronologis; **op.cit.**, p.37.
29. Bali en Lombok Bode: **De Actie Op 20 November 1946, I Gusti Ngoerah Rai Gesneuveld,** dalam surat kabar Bali Lombok Bode, 23–11–1946.
30. Hasil wawancara kami pada tanggal 20 Oktober 1976 dengan: Mantik, Umur: 55 tahun, jenis kelamin: laki, pekerjaan Anggota D.P.R. R.I., Alamat: Jakarta.
31. Cilik: Schema Perjuangan/Perkembangan di Bali, berupa naskah ketikan, koleksi Y.K.P. Prop. Bali, 17 April 1955, pp.1–2.
32. Cilik: **Periode Gugurnya Para Pahlawan Resimen Ngurah Rai,** Berupa naskah ketikan, koleksi Y.K.P. Prop. Bali, p.1.
33. Soekarmen, **op.cit.** p.7.
34. **Ibid.**
35. **Ibid.** p.8.
36. **Ibid.** p.9.
37. Hasil wawancara kami pada tanggal 5 Nopember 1976, dengan: Ida Bagus Puja, Umur: 52 tahun, jenis kelamin: laki, pekerjaan: Pegawai Kantor Pertanian Daerah Tingkat I Bali, Alamat: Jalan Rama, Tanjung Bungkak No. 29.
38. Hasil wawancara kami pada tanggal 20 Nopember 1976, dengan: I Ny. Sarja Udaya, Umur: 51 tahun, jenis kelamin: Laki, Pekerjaan: Pensiunan ABRI, Alamat: Jln. Sri Rama No. 7. Denpasar.
39. K. Bagiada: Nota Berkenan dengan kemungkinan-kemungkinan credit perdagangan bagi pengusaha-pengusaha di Bali, dalam **Capita Selecta Majelis Perniagaan dan Perusahaan B.P. Kensi Daerah Bali 1951–1963** (Denpasar: Perserikatan Dagang Indonesia, 1954), p.1.
40. **Ibid.** p.2.
41. **Ibid.** pp. 4–6.
42. Hasil wawancara kami pada tanggal 10 Nopember 1976, dengan: I Wayan Dangin, Umur: 60 tahun, jenis kelamin: laki, pekerjaan: Pensiunan Administratur Ekbang Kantor Gubernur Propinsi Bali, Alamat: Jalan Sutoyo I.
43. **K. Bagiada, op.cit.** p.2.

44. I Wayan Dangin, loc.cit.
45. Ibid.
46. Ibid.
47. K. Bagiada, op.cit. p.6.
48. Soekarmen: Bali (Denpasar: Departemen Dalam Negeri Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali) pp.1–2.
49. Ibid. pp. 6,8.
50. Ibid. p.9.
51. Ibid. p.22.
52. Ibid. p.31.
53. Team Research Pembangunan Daerah Bali Universitas Udayana: Laporan Penelitian tentang Strategi Pembangunan Daerah Untuk Propinsi Bali Jilid III (Surabaya: Pelaksana Proyek Perencanaan Regional Persiapan Repelita II Untuk Bali, 1972) p.11.
54. Ibid. pp. 17–18.
55. Hasil wawancara kami pada tanggal 23 Nopember 1976, dengan: I Made Anom, Umur: 62 tahun, jenis kelamin: laki, pekerjaan: Pensiunan Kantor Gubernur Propinsi Bali, alamat: Jalan Surapati 21.
56. Ibid.
57. Ibid.
58. Ibid.
59. Ibid.
60. Ibid.
61. Universitas Udayana: "Nawa Warça Universitas Udayana" dalam **Bulletin Universitas Udayana No. 4 tahun 1972** (Denpasar Universitas Udayana, 1972), p.1.
62. Drs. I Gusti Ngurah Rai Mirsha: "Kebudayaan Sebagai Pola Ilmiah Pokok Universitas Udayana," dalam **Bulletin Universitas Udayana No. 10 tahun 1976** (Denpasar: Universitas Udayana, 1976), pp. 52–53.
63. Team Research **Pengaruh "Mass Tourism" Terhadap Tata Kehidupan Masyarakat Bali** (Denpasar: Team Research, 1973), p.131.
64. Ibid.
65. Ibid. p.133.
66. Ibid. p.134.
67. Ibid. p.143.
68. Ibid. p.149.
69. Ibid.
70. Ibid. p.180.
71. Ibid. p.110.

72. Team Research Pembangunan Daerah Bali Universitas Udayana: **Laporan Penelitian Tentang Strategi Pembangunan Daerah Untuk Propinsi Bali**, Jilid III (Surabaya: Pelaksana Proyek Perencanaan Regional Persiapan Repelita II Untuk Bali, 1973) pp. 21–22.
73. Ibid.
74. IB. Astawa: **Pokok-Pokok Sejarah Perkembangan Parisada Hindu Dharma** (Denpasar: Sekretariat Parisada Hindu Dharma Pusat, 1970) p.11.
75. Soekarmen, **op.cit.** p.2.
76. Hasil wawancara kami pada tanggal 11 Nopember 1976, dengan: I Gusti Ketut Kaler, umur: 53 tahun, jenis kelamin : laki, pekerjaan : Kepala Bidang Bimas Hindu & Buddha Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali.
77. Ibid.
78. Ibid.
79. Soekarmen, **op.cit.** p.8.
80. I Gusti Ketut Kaler, **loc.cit.**
81. Ibid.
82. Ibid.
83. Ibid.
84. I.B. Astawa, **op.cit.** pp. 65–66.
85. Ibid. pp. 10–11.
86. Hasil wawancara kami pada tanggal 22 Nopember 1976, dengan: Hadori, umur: 37 tahun, jenis kelamin: laki, pekerjaan: Kepala Seksi Urusan Agama Islam, alamat: Kanwil Dep. Agama Prop. Bali.
87. Hasil wawancara kami pada tanggal 26 Nopember 1976, dengan: Pieter H. Pajow, umur: 39 tahun, jenis kelamin: laki, Pekerjaan: Kepala Bimas (Kristen) Protestan Kanwil. Dep. Agama Prop. Bali, alamat: Kanwil Dep. Agama. Bali.
88. Hadori, **loc.cit.**
89. Ida Bagus Agastia: "Meningkatkan Partisipasi Tamatan P.G.A. Hindu Dalam Pembangunan Bangsa" dalam **Warta Hindu Dharma No. 109** (Denpasar: Parisada, Agustus 1976), p.12.
90. Hadori, **lo.cit.**
91. Hasil wawancara kami pada tanggal 20 Nopember 1976, dengan: J. Ph. Bredjon, umur 47 tahun, jenis kelamin :Laki, pekerjaan: Kepala Bimas Katolik Kantor Dep. Agama Prop. Bali, alamat: Kanwil Dep. Agama Prop. Bali.

92. Pieter H. Pajouw, **loc.cit.**
93. Universitas Udayana: Data Mengenai Mahasiswa Yang Mendaftar dalam **Bulletin Universitas Udayana** No. 10 Th. 1976 (Denpasar: Universitas Udayana, 1976), p.16.
94. Hasil wawancara kami pada tanggal 1 Desember 1976 dengan: Sudarsono, umur: 49 tahun, jenis kelamin: laki, pekerjaan : Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Bali Bagian Bendaharawan Routine merangkap Staf/anggota Urusan Haji Propinsi Bali, alamat: Jalan Jendral Ahmad Yani G II/6.
95. **Ibid.**
96. I Gusti Ngurah Pindha B.A.: **Laporan Badan Pelaksana Harian Listibya Daerah Tingkat I Bali Untuk Masa Bhakti Tahun 1972/1973 s/d 1975/1976** (Denpasar: Listibya Daerah Tingkat I Bali, 1976) p.56.
97. **Ibid.** p.3.
98. Dangin Harnama: Jumlah Rombongan Kesenian Bali yang mengadakan Perlawatan Ke luar Negeri dari tahun 1973 s/d 1976, merupakan daftar (Denpasar: Listibya Daerah Tingkat I Bali, 20 Nopember 1976), pp. 1–2.
99. Team Research Pembangunan Daerah Bali Universitas Udayana: **op.cit.** pp. 10–11.
100. **Ibid.**
101. Prof. Dr. I Gst. Ngoerah Gde Ngoerah: "Sambutan Rektor Universitas Udayana Pada Dies Natalis Tgl. 29 September 1972," dalam **Bulletin Universitas Udayana No.** 7 th. 1973 (Denpasar: Universitas Udayana, 1973), p.23.
102. **Ibid.**
103. Universitas Udayana : **op.cit.** p.27.
104. Team Research Pembangunan Daerah Bali Universitas Udayana : **op.cit.** p.6.
105. **Ibid.** p.7.
106. **Ibid.**
107. **Ibid.** p.8.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Dokter M. Muhamad Angsar Kartakusuma.
   Umur : 67 tahun.
   Jenis kelamin : laki-laki.
   Pekerjaan : Bekas Dokter Pemerintah.
   Alamat : Jalan Surapati 11.

2. Nama : Mantik.
   Umur : 55 tahun.
   Jenis kelamin : laki-laki.
   Pekerjaan : Anggota D.P.R. R.I.
   Alamat : Jakarta.

3. Nama : Ida Bagus Puja.
   Umur : 52 tahun.
   Jenis kelamin : laki-laki.
   Pekerjaan : Pegawai Kantor Pertanian Daerah Tingkat I Bali.
   Alamat : Jalan Rama, Tanjung Bungkak No. 29.

4. Nama : I Nyoman Sarja Udaya.
   Umur : 51 tahun.
   Jenis kelamin : laki-laki.
   Pekerjaan : Pensiunan ABRI.
   Alamat : Jalan Sri Rama No. 7 Denpasar.

5. Nama : I Wayan Dangin.
   Umur : 60 tahun.
   Jenis kelamin : laki-laki.
   Pekerjaan : Pensiunan Administratur Gub. Kdh. Tk. I Bali.
   Alamat : Jalan Sutoyo I.

6. Nama : I Made Anom.
   Umur : 62 tahun.
   Jenis kelamin : laki-laki.
   Pekerjaan : Pensiunan Kantor Gub. Kdh. Tk. I Bali.
   Alamat : Jalan Surapati 21.

7. Nama : I Gusti Ketut Kaler.
   Umur : 53 tahun.
   Jenis kelamin : laki-laki.
   Pekerjaan : Kep. Bid. Bimas Hindu & Buddha Kanwil Dep. Agama Prop. Bali.
   Alamat : Kanwil. Dep. Agama Prop. Bali.

8. Nama : Hadori.
   Umur : 37 tahun.
   Jenis kelamin : laki-laki.
   Pekerjaan : Kepala seksi urusan Agama Islam.
   Alamat : Kanwil. Dep. Agama Prop. Bali.

9. Nama : Pieter H. Pajouw.
   Umur : 39 tahun.
   Jenis kelamin : Laki-laki.

	Pekerjaan	:	Kepala Bimas Kristen Protestan Kanwil. Dep. Agama Prop. Bali.
	Alamat	:	Kanwil. Dep. Agama Prop. Bali.
10.	Nama	:	J. Ph. Bredjon.
	Umur	:	47 tahun.
	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
	Pekerjaan	:	Kepala Bimas Katolik Kantor Dep. Agama Prop. Bali.
	Alamat	:	Kanwil. Dep. Agama Prop. Bali.
11.	Nama	:	Sudarsono.
	Umur	:	49 tahun.
	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
	Pekerjaan	:	Pegawai kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Bagian Bendaharawan Reutine merangkap Staf/anggota Urusan Haji Prop. Bali.
	Alamat	:	Jalan Jendral Ahmad Yani G. II/6.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

Adigama, diterjemahkan oleh I Goesti Putu Djilantik, (et.al.), 1909 Lansdrukkerij.

Agama, diterjemahkan oleh I Goesti Poetoe Djilantik, (et.al.), 1909 Lansdrukkerij.

Agastia, IB. : "Meningkatkan Partisipasi Tamatan P.G.A. Hindu 1976 Dalam Pembangunan Bangsa", *Warta Hindu Dharma*, No. 109, Parisada, Denpasar.

Agung, A.A. Gde Putra : "Peranan Syahbandar di Lombok pada 1972 Abad XIX", *BASIS*, p.p. 309–315.

Arsip Nasional, *Surat-surat perjanjian antara Kerajaan-kerajaan Ba-*1964 *li/Lombok dengan pemerintah Hindia Belanda 1841/ 1938*. Arsip Nasional, Djakarta.

Astawa, IB. : *Pokok-pokok Sejarah Perkembangan Parisada Hindu* 1970 *Dharma*, Sekretariat Parisada Hindu Dharma Pusat, Denpasar.

Bali Adnyana, Majalah Bulanan, Singaraja, 1924–1929.

Bagiada, K. : *Capita Selecta Majelis Perniagaan Dan Perusahaan*

1954, *B.P. Kensi Daerah Bali, 1951–1963,* Perserikatan Dagang Indonesia, Denpasar.

Bali ēn Lombok Bode : "De Actie Op 20 November 1946, I Goes- 23–11–1946. ti Ngurah Rai Gesneuveld, *Bali En Lombok Bode.*

Bandem, I Made (et.al.) : *Perkembangan Topeng Bali sebagai Seni* 1976 *Pertunjukkan,* Proyek Penggalian, Pembinaan, Pengembangan Seni Klasik/Tradisionil dan Kesenian Baru Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, Denpasar.

Bhawanegara, Majalah Bulanan, Singaraja, 1925–1932.

Berg, CC. : *De Middlejavaansche Historische Traditie,* De Geschiedenis van het rijk Gelgel, Thesis, Leiden.

Bosch, F.D.K. : *Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepu-* 1974 *lauan Indonesia,* Seri terjemahan karangan-karangan Belanda, Bharatara, Jakarta.

Budiastra, I Putu : *Djaman Pemerintahan Marakata,* Denpasar, 1969 (Sekripsi).

Booms, P.G. : *Expeditions de 'l' armee Nearlandaise indest orien-* 1850 *talest centre prencis de Bali de 1846–1849* Van Gulik & Hermans, Impraniusu Libranes.

Callenfels, Dr. P.V. van : *Epigraphia Balica I,* Verhandelingen van 1926 het Koninklijk Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, LXVI, 3,G. Kolff & Co.

Caron, G.J.J. : *Memorie van Overgave van Resident van Bali en* 1929 *Lombok.*

Cilik, : *Schema Perjuangan/Perkembangan di Bali,* naskah ketikan, 17–4–1955 Koleksi Y.K.P. Propinsi Bali.

———— *Periode Gugurnya Para Pahlawan Resimen Ngurah Rai,* naskah ketikan, koleksi Y.K.P. Propinsi Bali.

Chijs, van der : *Plakaat Boek,* 1602–1811, VIII, Lansdrukkerij, 1891 Batavia.

Coonbrander, *Koloniale Geschiedenis III,* Martinus Nyhoff, S–Gra- 1926 venhage.

Cool, W. : *De Lombok Expeditie,* G. Kolf & Co, Batavia. 1896

Djoyoadisuryo, Mr. Ahmad Subardjo : *Lahirnya Republik Indone-* 1972 *sia,* P.T. Kinta.

Enciclopedia van Nederlands Indie, V, Nijhoff, Batavia. 1927.

Ensiklopedia Indonesia, A–B, W. van Hoeve, Bandung.

Flierhaar, H. Ter : *De Aanspassing van het inlandsch onderwijs op* 1931 *Bali aan de eigen sfeer,* Batavia.

Gde Ngurah, Prof. Dr. I Gusti Ngurah : "Sambutan Rektor Uni-

1973 versitas Udayana Pada Dies Natalis Tanggal 29 September 1972, *Bulletin Universitas Udayana*, No. 7. Tahun 1973, Universitas Udayana, Denpasar.

Ginarsa, I Ketut : *Ekspedisi Gajah Mada ke Bali*, Walmiki Den-
1968 pasar.

1968 : *Prasasti Baru Raja Ragajaya*, Singaraja.

1955 : Sedjarah Buleleng, *Bahasa dan Budaya*, Th. III, No. 6. Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Djakarta.

Goris, Dr. R.: *Enkele Historische en Sociologische Gegevens uit den*
1941 *Bade Balische Oorkonden*, *T.B.G.*, 81,3.

1948 : *Sedjarah Bali Kuna*, Singaraja.

1954 : *Prasasti Bali, I*, Bandung, N.V. Masa Baru.

1954 : *Prasasti Bali, II*, Bandung, N.V. Masa Baru.

Goris, Dr. R. : *Bali, Atlas Kebudayaan*, Pemerintah Republik In-
1954 donesia.

1957 : Dinasti Warmadewa dan Dharmawangsa di Pulau Bali, *Bahasa dan Budaya*, No. 3, th. V, Lembaga Bahasa dan Budaya Universitas Indonesia, Djakarta.

1965 : *Ancient History of Bali*, Faculty of Letters, Udayana University, Denpasar.

1974 : *Sekte-sekte di Bali*, Seri terjemahan, Bharatara, Jakarta.

Graaf, H.J. de : Gusti Pandji Sakti vrost van Buleleng, *T.B.G.*,
1949 LXXXIII, Batavia, Martinus Nijhoff.

Groeneveldt, W.P. : *Historical Notes on Indonesia & Malaya*
1960 *Compiled from Chinese Sources*, Djakarta.

Harnama, Dangin : *Jumlah Rombongan Kesenian Bali Yang Meng-*
1976 *adakan Perlawatan Ke luar Negeri Dari Tahun 1973 s/d 1976*, Listibya Daerah Tk. I Bali.

Heekeren, H.R. : New Investigation on *the Lower Palaeolithic Pa-*
1955 *citan Culture in Jawa*, *BDB*, 1, hal. 1–12.

Jong, De : *De opkomst van het Nederlands Gezag in Indie, (1595-*
1864 *1610)*, II, Nijhoff, Amsterdam.

Kahin, G.M.T. : *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell
1949 University Press, Itaca, New York.

Kempers, Dr. A.J. Bernet : *Bali Purbakala*, P.T. Penerbit dan Balai
1960 Buku "Ichtiar", Djakarta.

Kidung Pamancangah, Diterjemahkan oleh Gora Sirikan, Balimas,
1957 Denpasar.

Korn, V.E. : *Balische Overeenkomsten*, s–Gravenhage, Martinus,
1922 Nijhoff.

1932 : *Adatrecht van Bali*, s–Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Laporan Penelitian Inventarisasi Pola-pola Dasar Arsitektur Tradi-
1975 sionil Bali, Universitas Udayana, Denpasar.
Lauts, : *Het Eiland Bali en de Balinezen*, Amsterdam.,
1948
Lekkerkerker, C : *Bali en Lombok*, Blankwaardt & Schoonhoven,
1920 Rijswijk.
Lekkerkerker, C. : *Het Voorspel der vestiging van de Nederland-*
1923 *sche macht op Bali en Lombok, B.K.I.*, 79, s–Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Liefrinck, F.A. : *Landsverordeningen van inlandsche Vorsten op*
1917 *Bali*, s–Gravenhage, Martinus Nijhoff.
1921 : *Nog Eenige verordeningen en evereenkomsten van Balische vorsten*, s–Gravenhage, Martinus Nijhoff.
MDVLVRI Nusa Tenggara : *Sedjarah Singkat Almarhum Maha Pu-*
1962 *tra Kolonel I Gusti Ngurah Rai;* Koleksi MDVLVRI, Nusa Tenggara, Denpasar.
Mahaudiana, : *Babad Manggis Gianyar*, A.A. Gde Taman, Gianyar.
1968
Manawa Dharmasastra, diterjemahkan oleh G. Pudja, Lembaga Pen-
1973 terdjemah Kitab Sutji Weda.
Marto, Abeto Hardjono : *Dokumentasi Perdjuangan Pemuda Indo-*
1950 *nesia*, 1915–1950, Penerbit Toko Buku Islamyah, Medan.
Muljana, Slamet : *Perundang-undangan Madjapahit*, Bhratara, Dja -
1967 karta.
1966 : *The Structure of the National Goverment of Madjapahit*, P.N. Balai Pustaka.
Nielsen, Aage Kroup Nielsen : *Leven en Avonturen van Een Oos-*
1928 *tingevaareen op Bali* Quiridos, Amsterdam.
Nijpels, G. : *De Expeditien Naar Bali in 1846, 1849, en 1868.*
1897 De Erven Loosjes, Haarlem.
Oka, I Gusti Agung : *Niti Çastra*, Denpasar.
1970
Paulus, J : *Enciklopedia van Nederlandch Indie*, Leiden, N.V.J.
1917 Brill.
Pendit, Nyoman S. : *Bali Berjuang*, Cetakan Pertama, Yayasan
20 November 1954 Kebaktian Pejuang Daerah Bali.
Pindha, Kapten I Gusti Ngurah B.A. : *Pertempuran Besar Tanah*
1964 *Aron*, Yayasan Universitas Marhaen, Denpasar.
1976 *Laporan Badan Pelaksana Harian Listibya Daerah Tk. I Bali Untuk Masa Bhakti Tahun 1972/1973 s/d 1975/1976.* Listibya Daerah Tk. I Bali Denpasar.

------ : *Gempilan Perdjuangan Physik di Bali; Tidurlah-tidur Anakku;* Jilid III (naskah ketikan).
------ : *Gempilan Perjuangan Physik di Bali; Men Bolong memanggil,* Jilid II (naskah ketikan).
Pringgodido, A.K. : *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia,* Pusta-
1949 ka Rakyat, Djakarta.
Priyohutomo, Dr. : *Sejarah Kebudayaan Indonesia,* II, Djakarta.
1953
Raka, I Gusti Nyoman: *Rapport van eene reis van den Controleur*
1901 *voor de politieke aang elegenheden vergezeld van 27 Januari – 7 Februari 1900,* Albercht & Co., Batavia.
Rai Mirsha, Drs. I Gusti Ngurah : Kebudayaan *Sebagai Pola Ilmiah*
1976 Pokok Universitas Udayana, *Bulletin Universitas Udayana,* Denpasar.
Santosa, Ida Bagus : *Prasasti-prasasti Radja Anak Wungcu di Bali,*
1965 Sekripsi.
Sartono Kartodirdjo : *Sejarah Nasional Indonesia,* Jilid I : *Jaman*
1975 *Prasejarah di Indonesia,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halm. 1–278.
Schrieke, B. : *Indonesian Sosiological Studies,* Part One, W. van
1960 Hoeve, Bandung.
Semadi Astra, I Gde : *Struktur Birokrasi Tingkat Pusat Jaman Pe-*
1976 *merintahan Raja Jayapangus di Bali,* Denpasar.
1977 : *Jaman Pemerintahan Maharaja Jayapangus di Bali,* Denpasar (Sekripsi).
Serie kronologis *Sedjarah TNI Nusa Tenggara semendjak Th. 1945-1960,* Naskah koleksi Sendam XVI Udayana Denpasar.
Simpen, I Wayan : *Pengawi-pengawi Bali,* Koleksi Ketut Ginarsa, Singaraja.
Soebekti : *Skets, Revolusi Indonesia 1940–1945,* Penerbit Grip, Surabaya.
Soejono R.P. : Penyelidikan Sarkofagus di Pulau Bali, *Kongres*
1962 *Ilmu Pengetahuan Nasional Indonesia,* II, Seksi D., Halm. 210–250.
Soekarmen : *Bali,* Departemen Dalam Negeri, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
1975 : *Pidato Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Bali Pada Hari Jadi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 14 Agustus 1975,* Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali, Denpasar.
Soekarto, K. Atmojo : *Struktur Pemerintahan dan Masyarakat Djaman Anak Wungçu,* Panitia Penyusun Buku Stan-

dar Sejarah Nasional Indonesia.
Sosrodihardjo, SH. MA., Prof. Soedjito : *Perubahan Struktur Ma-*
1972 *syarakat di Jawa,* Suatu analisa, Penerbit Karya, Yogyakarta.
Stutterheim, Dr. W.F. : *Oudheden van Bali,* I (Teks), Kirtya Lie-
1929 frink van der Tuuk, Singaraja.
Suryakanta, Majalah Bulanan, Singaraja.
1925–1927.
Soewarno, Drs. Pj. : Peranan Bupati Sebagai Pelaksana Demokrasi,
1976 BASIS, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
Tantri, Ni Ketut : *Revolusi di Nusa Damai,* Alih bahasa Bar Sa-
1965 kim, Gunung Agung, Djakarta.
Team Research Pembangunan Daerah Bali Universitas Udayana, :
1972 *Laporan Penelitian tentang Strategi Pembangunan Daerah Untuk Propinsi Bali,* Jilid III, Pelaksana Proyek Perencanaan Regional Persiapan Repelita II untuk Bali.
Team Research : *Pengaruh "Mass Tourism" Terhadap Tata Kehidupan masyarakat Bali,* Team Research, Denpasar.
Transkripsi Prasasti-prasasti : Koleksi Museum Bali, Denpasar.
Tuuk, Van der : *Kawi Balinesche Nederlands Woordenboek, I, Ba-*
1897 *tavia,* Lansdrukkerij.
Universitas Udayana : Nawa Warca Universitas Udayana, *Bulletin*
1972 *Universitas Udayana,* No. 4. Tahun 1972, Denpasar.
1976 Data Mengenai Mahasiswa yang mendaftar, *Bulletin Universitas Udayana* No. 10. Tahun 1976, Universitas Udayana, Denpasar.
Utrecht, E. : *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok,*
1962 Sumur Bandung.
Vlijmen, van : *Bali 1868,* Amsterdam, J.C. Lomon Jr.
1875
Waanders, Bloemen, : Bijdragen tot de kennis van het Eiland Bali,
1868 *TNI* 3 de Serie, II.
Wojowasito, Suwojo : *Kamus Kawi Indonesia,* Jurusan Bahasa dan
1973 Sastra Indonesia, I K I P, Malang.
Yamin, Moh. : *Gadjah Mada,* Balai Pustaka, Djakarta.
1972
1962 : *Tatanegara Madjapahit,* Parwa II–IV, Jajasan Prapanca.

MANUSKRIP.

Babad Arya Tabanan, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Bendesa Manik Mas, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Blahbatuh, koleksi Puri Blahbatuh, Gianyar.
Babad Buleleng, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Dalem, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Dalem Samprangan, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Dalem Turun Ke Bali, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Badung, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Dwijendra Tatwa, koleksi Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
Babad Ki Gusti Pasek Gelgel, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Ksatrya Taman Bali, koleksi Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
Babad Manggis Kuning, koleksi Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
Babad Mengwi, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Pabalik I Gusti Batanjeruk, I Gusti Pande, I Gusti Agung Maruti, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Pasek, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Rusak I Gusti Pande, koleksi Perpustakaan Fakultas Sastra, Universitas Udayana, Denpasar.
Babad Sang Brahmana Catur, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Babad Smara Pura, koleksi I Gde Kantha, Klungkung.
Babad Ularan, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Brahmokta Widisastra, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Çiwasasana, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Gaguritan Rusak Buleleng, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Nawasasana, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Raja Purana, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Usana Jawa, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.
Bhuana Winasa, koleksi Gedong Kirtya, Singaraja.

TEAM AHLI PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH BALI
d/a. MUSEUM BALI
Jl. LETKOL. WISNU
DENPASAR.

Telp. 2680

SUSUNAN TEAM AHLI PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH BALI

I. **Ketua** : Drs. Wayan Widia (Asisten Direktur Museum Bali Denpasar).

Sekretaris : I Gusti Bagus Arthanegara BA. (Ka. Sub. Bid. Bina Program Bid. P.S.K. Kanwil. Dep. P. dan K. Prop. Bali).

Bendahara : I Gusti Bagus Ardana Adnya B.Sc. (Pegawai Museum Bali).

Pembantu : I Wayan Wimartina (Pegawai Museum Bali).

II. **Konsultan** : 1. Bidang Sejarah Daerah Bali: Drs. A.A. Gde Putra Agung Pemimpin Proyek P2 K.D. Bali.

2. Bidang Adat Istiadat Daerah Bali:
Drs. I Gusti Ngurah Bagus
Ketua Jurusan Antropologi Fak. Sas. UNUD.

3. Bidang Ceritera Rakyat Daerah Bali :
I Ketut Suwidja B.A.
Kepala Gedong Kirtya, Singaraja.

4. Bidang Geografi Budaya Daerah Bali :
Drs. Ngakan Nyoman Gede.
Ketua Jurusan Geografi F.K.I.P. UNUD Singaraja.

5. Bidang Ensiklopedi Musik dan Tari Daerah Bali :
Drs. I Gusti Bagus Nyoman Pandji.
Kabid. Kesenian Kanwil. Dep. P. dan K. Prop. Bali.

III. **Ketua Bidang** : 1. Bidang Sejarah Daerah Bali :
Ketua : Drs. Putu Bidiastra (Direktur Museum Bali)
Anggota: 1. Drs. Made Sutaba (Kabid. P.S.K. Kanwil. Dep. P. dan K. Prop. Bali).

2. Drs. A.A. Gde Putra Agung (Dosen Fak. Sas. UNUD).
3. I Gde Somadiastra B.A. (Fak. Sas. UNUD).
4. Ida Bagus Gde Budharta B.A. (Fak. Sas. UNUD).
5. Ida Bagus Rama B.A. (Fak. Sas. UNUD).
6. I Gde Parimartha B.A. (Fak. Sas. UNUD).
7. I Made Sudjana B.A. (Fak. Sas. UNUD).

2. Bidang Adat Istiadat Daerah Bali :
   Ketua : Drs. Wayan Widia (Asisten Direktur Museum Bali).
   Anggota: 1. I Ketut Ginarsa (Balai Penelitian Bahasa, Singaraja).
   2. Drs. Wayan Djendra (Dosen Jurusan Bahasa Fak. Sas. UNUD. Denpasar).
   3. Drs. Wayan Geriya (Dosen Antropologi Fak. Sas. UNUD. Denpasar).
   4. Made Seraya B.A. (Asisten Direktur Museum Bali).
   5. Ni Nyoman Rapini B.A. (Kep. Perpust. Museum Bali).
3. Bidang Ceritera Rakyat Daerah Bali:
   Ketua : I Gst. Bgs. Arthanegara B.A. (Ka.Sub.Bid. Bina Program Bis. PSK. Kanwil. Dep. P. dan K. Prop. Bali).
   Anggota: 1. Drs. Ketut Lama (Dosen F. Kg. UNUD. Singaraja).
   2. Ida Bagus Udara Naryana B.A. (Asisten Dosen Fak. Sas. UNUD. Denpasar).
   3. Ida Bagus Mayun B.A. (Ka. Sub. Bid. Tenaga Tehnis Bid. PSK. Kanwil. Dep. P. dan K. Prop. Bali).
4. Bidang Geografi Budaya Daerah Bali :

Ketua : Drs. Ngakan Nyoman Gede (Ket. Jurusan Geografi F. Kg. UNUD. Singaraja).

Anggota: 1. Drs. Wayan Durma (Dosen Geografi F. Kg. UNUD. Singaraja).
2. Drs. Gede Kawi (idem).
3. Drs. I Made Giri (idem).
4. Drs. Kt. Ejasta (idem).
5. Drs. Nyoman Sudila(idem).

5. Bidang Ensiklopedi Musik dan Tari Daerah Bali :

Ketua/ Anggota : I Made Bandem M.A. (Sekretaris ASTI. Bali. Denpasar).

003301.5
G3.2

bp PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA